



Katalog BPS: 4104001

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA



STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2012

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

ISSN : 2086-1036
Nomor Publikasi : 04220.1304
Katalog BPS : 4104001
Ukuran Buku : 21 Cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xxv + 260 halaman

Naskah : Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Penanggung Jawab Umum : Teguh Pramono, MA
Penanggung Jawab Teknis : Ir. Meity Trisnowati, M.Si.
Editor : Amiek Chamami SST, M.Stat
Penulis Naskah : Armadi Setiawan, S.Pi
Paramitha Hanifia, SST
Pengolah Data : Armadi Setiawan, S.Pi
Gambar Kulit : Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Semakin maju suatu negara maka semakin banyak penduduknya yang mencapai usia lanjut, lebih dari 60 tahun atau yang dikenal dengan sebutan lansia. Bangsa yang semakin sehat berarti masyarakatnya semakin panjang umur. Persentase penduduk lanjut usia di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 7,5 persen, berarti sudah mulai memasuki struktur umur tua. Kelompok penduduk ini mempunyai ciri sosial ekonomi yang berbeda dengan kelompok umur yang lebih muda, sehingga kebijakan pembangunan untuk melayaninya tentu juga berbeda.

Publikasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk lansia di Indonesia. Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2012 ini menyajikan data antara lain ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2012 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012.

Kepada semua pihak dan Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Oktober 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Dr. Suryamin, M.Sc.

GLOSSARY (Singkatan)

1. ART: Anggota Rumah Tangga
2. APS: Angka Partisipasi Sekolah
3. ASKESKIN: Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
4. ASLUT: Asistensi Sosial Lanjut Usia
5. BPS: Badan Pusat Statistik
6. BKKKS: Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
7. DTK: Daerah Tertinggal dan Khusus
8. IUPHHK: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
9. Jamkesda: Jaminan Kesehatan Daerah
10. Jamkesmas: Jaminan Kesehatan Masyarakat
11. JPK-MM: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
12. JSLU: Program Jaminan Sosial Lanjut Usia
13. Kemdikbud: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Kemenag: Kementerian Agama
15. KF: Keaksaraan Fungsional
16. KRT: Kepala Rumah Tangga
17. KUP: Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif
18. KUR: Kredit Usaha Rakyat
19. Lansia: Lanjut usia
20. MA: Madrasah Aliyah
21. MI: Madrasah Ibtidaiyah
22. MSBP: Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
23. MTs: Madrasah Tsanawiyah
24. ODR: *Old Dependency Ratio* (Rasio ketergantungan lansia)
25. OPK: Operasi Pasar Khusus
26. PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini
27. PHLU: Pelayanan Harian Lanjut Usia
28. PEMP: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
29. PERKASA: Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera
30. PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa
31. PKP: Program Peningkatan Ketahanan Pangan
32. PKPTK: Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
33. PPLTK: Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
34. P2DTK: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

35. PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
36. P3KUM: Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro
37. PPFMBLPS: Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial
38. PPEL: Program Pengembangan Ekonomi Lokal
39. P2WKSS: Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
40. PPIP: Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
41. PPK: Program Pengembangan Kecamatan
42. PPMR: Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya
43. P3MP: Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
44. PT: Perguruan Tinggi
45. PUAP: Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
46. PUMSHP: Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi
47. Pustu: Puskesmas Pembantu
48. P2KP: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
49. Raskin : Beras untuk Masyarakat Miskin
50. RTS: Rumah Tangga Sasaran
51. Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional
52. SPADA: *Support for Poor and Disadvantaged Areas*
53. SKPD: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
54. SKTM: Surat Keterangan Tidak Mampu
55. SBA: Survei Buta Aksara
56. SD: Sekolah Dasar
57. SDM: Sumber Daya Manusia
58. SMA: Sekolah Menengah Atas
59. SMP: Sekolah Menengah Pertama
60. SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
61. SP 2010: Sensus Penduduk Tahun 2010
62. Susenas: Survei Sosial Ekonomi Nasional
63. TPAK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
64. TD: Titik Distribusi
65. TB: Titik Bagi
66. UEP: Usaha Ekonomi Produktif
67. UU: Undang-undang
68. VSEN2012.K: Kuesioner Kor
69. VSEN2012.MSBP: Kuesioner Modul Sosial Budaya dan Pendidikan

Ringkasan Eksekutif

Salah satu dampak dari perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat adalah meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk lansia sekitar 18,55 juta orang atau 7,78 persen dari total penduduk Indonesia.

Persentase penduduk lansia yang telah mencapai angka di atas tujuh persen, menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah mulai masuk ke kelompok negara berstruktur tua (*ageing population*). Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, khususnya sebagai cerminan dari semakin panjangnya rata-rata usia penduduk Indonesia.

Jika dilihat menurut provinsi, Provinsi yang memiliki persentase lansia di atas 7 persen adalah DI Yogyakarta (12,99 persen), Jawa Timur (10,37 persen), Jawa Tengah (10,35 persen), Bali (9,79 persen), Sulawesi Utara (8,47 persen), Sulawesi Selatan (8,34 persen), Sumatera Barat (8,09 persen), Nusa Tenggara Timur (7,47 persen), Nusa Tenggara Barat (7,23 persen), Lampung (7,22 persen), dan Jawa Barat (7,05 persen).

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan. Hasil Susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk lansia pada tahun 2012 sebesar 12,01. Angka rasio sebesar 12,01 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia.

Bila dilihat dari segi pendidikan lansia, hasil Susenas 2012 menunjukkan pendidikan penduduk lansia relatif masih rendah, dimana penduduk lansia yang berpendidikan rendah persentasenya relatif masih tinggi. Mereka yang berpendidikan tamat SD sebesar 24,00 persen. Bahkan mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi lagi

persentasenya yaitu 59,91 persen. Di sisi lain, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif rendah. Persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP hanya sebesar 6,23 persen, dan SM ke atas sebesar 9,86 persen.

Kondisi ini hampir berlaku di semua provinsi. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (51,73 persen), sebaliknya persentase penduduk lansia terendah yang tidak/ belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (1,81 persen).

Sejalan dengan tingginya lansia yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah, angka buta huruf penduduk lansiapun relatif cukup tinggi yaitu sebesar 30,44 persen dari total keseluruhan penduduk lansia. Angka buta huruf lansia tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (57,56 persen) dan terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara (4,28 persen).

Dari sisi kesehatan, secara umum derajat kesehatan penduduk lansia cenderung masih rendah. Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, semakin tinggi kelompok umur lansia maka persentase yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar, yaitu kelompok umur 45-59 tahun (35,54 persen), 60-69 tahun (47,53 persen), 70-79 tahun (57,15 persen) dan 80 ke atas (63,93 persen). Tingginya persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan (sekitar separuh dari populasi lansia) ditemukan hampir di semua provinsi. Persentase tertinggi berada di Provinsi Gorontalo (66,99 persen) dan terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau (42,17 persen).

Bila dilihat perkembangannya, derajat kesehatan penduduk lansia mengalami peningkatan. Angka kesakitan penduduk lansia pada tahun 2008 sebesar 29,30 persen turun pada tahun 2010 menjadi 28,86 persen, dan angkanya menurun lagi pada tahun 2012 menjadi 26,85 persen. Dari seluruh penduduk lansia yang sakit, sebagian besar mengalami sakit tidak lebih dari seminggu, yaitu 42,58 persen menderita sakit selama 1-3 hari dan 32,65 persen selama 4-7 hari. Dilihat dari jenis obat yang digunakan, untuk mengobati sendiri sakitnya, terlihat bahwa obat modern menjadi pilihan utama sebagian besar penduduk lansia (57,99 persen), sedangkan mereka yang memakai obat tradisional sekitar 10,48 persen.

Selain mengobati sendiri, cara pengobatan lain yang juga dilakukan oleh penduduk lansia yang sakit adalah dengan berobat jalan. Bila dilihat dari urutannya, fasilitas pelayanan kesehatan yang paling diminati oleh penduduk lansia untuk berobat jalan adalah praktek tenaga kesehatan menempati urutan pertama dengan proporsi sebesar 33,23 persen, kemudian diikuti oleh praktek puskesmas/puskesmas pembantu sebesar 30,07 persen dan praktek dokter sebesar 29,94 persen.

Berdasarkan data hasil Sakernas Agustus 2012, masih banyak penduduk lansia yang tergolong produktif. Dari keseluruhan penduduk lansia sekitar 45,72 persen diantaranya masih bekerja. Kondisi yang sama terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yaitu masing-masing 37,39 persen dan 53,66 persen. Mayoritas penduduk lansia yang bekerja adalah lansia laki-laki, sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga.

Penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada tahun 2012, TPAK penduduk lansia relatif cukup besar yaitu sebesar 45,99 persen. TPAK penduduk lansia tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (55,14 persen) dan terendah terdapat di DKI Jakarta (35,19 persen).

Dari tiga kelompok sektor yang ada, sebagian besar penduduk lansia bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 61,64 persen. Sementara itu, hanya sebagian kecil dari lansia yang bekerja di sektor jasa (28,01 persen) dan sektor industri (10,35 persen). Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Lebih dari 90 persen penduduk lansia yang berpendidikan tamat SD ke bawah bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, penduduk lansia yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SMA ke atas hanya sekitar 3,13 persen yang bekerja di sektor pertanian.

Bila dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh yaitu sebesar 43,08 persen, sedangkan lansia yang berusaha sendiri sebesar 24,07 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,05 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masih dibawah 10 persen yaitu berturut-turut sebagai pekerja bebas (9,64 persen) dan buruh/karyawan (9,16 persen).

Produktifitas tinggi yang dialami pekerja lansia tercermin pula dari jumlah jam kerja yang dilakukan yaitu persentase penduduk lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 41,75 persen dan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir sebesar 40,59 persen. Sementara itu, lansia yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu hanya sebesar 17,66 persen.

Kegiatan sosial penduduk lansia meliputi akses terhadap media massa, kegiatan sosial kemasyarakatan dan partisipasi dalam olahraga. Akses terhadap media massa antara lain untuk melihat seberapa banyak lansia yang melakukan

kegiatan membaca, menonton TV, mendengarkan radio dan menonton pertunjukan kesenian. Secara umum minat baca para lansia masih sangat rendah, karena dari seluruh populasi lansia hanya sebesar 8,87 persen lansia yang melakukan kegiatan membaca surat kabar/majalah/tabloid. Sedangkan akses media massa yang paling banyak dilakukan lansia adalah menonton televisi (79,83 persen). Selain itu media massa yang juga diminati adalah mendengarkan radio (16,72 persen).

Keragaman seni, budaya dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Penduduk lansia merupakan bagian masyarakat yang juga ikut dalam memberikan apresiasi terhadap seni budaya, dari keseluruhan penduduk lansia sekitar 9,16 persen diantaranya pernah menonton pertunjukan kesenian/pameran seni rupa/kerajinan selama tiga bulan terakhir.

Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tidak hanya dilakukan oleh penduduk muda dan dewasa tetapi juga dilakukan oleh para lansia. Hal ini terbukti dari banyaknya lansia yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar 79,37. Keadaan sebaliknya dialami lansia dalam mengikuti kegiatan olah raga agar stamina fisiknya tetap terjaga, hanya sebesar 8,00 persen.

Permasalahan lansia yang mungkin muncul dari dari aspek sosial adalah ketelantaran lansia. Pada tahun 2012 sebanyak 13,17 persen lansia diantaranya termasuk kategori lansia telantar, 25,59 persen termasuk kategori lansia hampir telantar, dan sisanya 61,24 persen termasuk kategori lansia tidak telantar. Melihat masih banyaknya penduduk lansia yang tergolong telantar dan hampir telantar, diperlukan perhatian dan penanganan yang serius baik dari pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya.

Permasalahan penyandang disabilitas tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab sosial segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu masalah yang berhubungan dengan disabilitas merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif, terutama bagi lansia yang mengalami disabilitas. Berdasarkan data Susenas 2012 menunjukkan bahwa perkiraan jumlah lansia dengan disabilitas ada sebanyak 2,75 juta jiwa atau 14,86 persen dari seluruh penduduk lansia.

Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua berhak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindak kekerasan maupun kejahatan masih sering terjadi. Proporsi lansia yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data Susenas menunjukkan pada tahun 2010, persentase lansia

yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,41 persen, tahun 2011 turun menjadi 1,38 persen, kemudian terus menurun pada tahun 2012 menjadi 1,16 persen.

Ditinjau dari sisi kelayakan tempat tinggal, rumah dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu rumah layak huni, rumah hampir tidak layak huni dan rumah tidak layak huni. Persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni pada tahun 2012 sebesar 7,32 persen atau turun dibandingkan tahun 2010 (9,12 persen) dan tahun 2011 (7,78 persen). Kondisi yang sama juga terjadi pada lansia yang tinggal di rumah hampir tidak layak huni, pada tahun 2010 terdapat sebesar 15,48 persen, turun menjadi sebesar 14,03 persen pada tahun 2011 dan sebesar 13,90 persen pada tahun 2012. Namun kondisi lansia yang tinggal di rumah layak huni mengalami peningkatan, mulai dari 75,39 persen pada tahun 2010, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi 78,20 persen, kemudian meningkat lagi tahun 2012 menjadi 78,78 persen. Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa kondisi kesejahteraan lansia bila dilihat dari kelayakan rumah tinggalnya semakin membaik.

Pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan sosial rakyat terutama bagi penduduk lanjut usia telah menyelenggarakan beberapa bentuk perlindungan sosial. Jenis perlindungan sosial yang dicakup adalah bantuan sosial (*social assistance*), asuransi sosial (*social insurance*) dan kebijakan pasar kerja (*labour market policies*). Salah satu bentuk bantuan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah adalah pelayanan kesehatan gratis dan pemberian subsidi beras bagi penduduk miskin. Rumah tangga lansia di Indonesia yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebanyak 3,04 juta rumah tangga atau 20,60 persen dari seluruh rumah tangga lansia. Sedangkan persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapatkan bantuan beras miskin adalah sebesar 62,24 persen.

Program jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Rumah tangga lansia di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 14,74 juta rumah tangga, sekitar 6,56 juta rumah tangga lansia atau 44,51 persen mempunyai jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan.

Idealnya lansia yang bekerja mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental serta bagi lansia yang tidak bekerja diharapkan kesejahteraan mereka juga masih tetap mendapat perhatian. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh penduduk lansia adalah dengan mengadakan program PNPM Mandiri dan Program lainnya. Rumah tangga lansia di Indonesia yang menerima bantuan dari kedua program tersebut ada sebanyak 319 ribu rumah tangga atau 2,17 persen dari seluruh rumah tangga lansia.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
GLOSSARY (Singkatan)	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Sumber Data	7
2.2. Ruang Lingkup	8
2.3. Konsep dan Definisi	9
2.4. Keterbatasan Data	22
2.5. Metode Analisis	22
BAB III STRUKTUR DEMOGRAFIS	25
3.1. Struktur Penduduk Indonesia	26
3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia	28
3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia	29
3.4. Status Perkawinan Penduduk Lansia	31
3.5. Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga	32
BAB IV PENDIDIKAN	39
4.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	40
4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis	44

	Halaman
BAB V KESEHATAN	51
5.1. Keluhan Kesehatan	54
5.2. Angka Kesakitan	57
5.3. Lama Sakit	59
5.4. Cara Berobat	60
BAB VI KEGIATAN EKONOMI	67
6.1. Partisipasi Angkatan Kerja	68
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72
6.3. Lapangan Usaha	73
6.4. Status Pekerjaan	76
6.5. Jumlah Jam Kerja	78
BAB VII KEGIATAN SOSIAL	83
7.1. Akses Terhadap Media Massa	84
7.1.1 Kegiatan Membaca Surat Kabar/Majalah/Buku	85
7.1.2 Menonton Televisi	86
7.1.3 Mendengarkan Radio	88
7.1.4 Menonton Pertunjukkan Kesenian	89
7.2. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	91
7.3. Partisipasi Lansia dalam Olahraga	94
BAB VIII KONDISI SOSIAL	101
8.1. Ketelantaran	102
8.1.1 Distribusi Lansia Telantar	102
8.1.2 Status Ekonomi Rumah Tangga dengan Ketelantaran Lansia	105
8.2. Lansia Disabilitas	106
8.2.1 Distribusi Lansia dengan Disabilitas	106
8.2.2 Jenis dan Penyebab Kedisabilitas	108
8.3. Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan	110
8.3.1 Lansia yang Mengalami Tindak Kejahatan	111
8.4. Kelayakan Tempat Tinggal	114

	Halaman
BAB IX PERLINDUNGAN SOSIAL	121
9.1. Bantuan Sosial	123
9.2. Jaminan Sosial	127
9.3. Kebijakan Pasar Kerja (Labour Market Policies)	129
BAB X PROGRAM PEMBERDAYAAN LANSIA	135
<i>TABEL LAMPIRAN</i>	143
<i>ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING (SAMPLING ERROR ESTIMATES)</i>	219
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	241

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Perkembangan Proporsi Penduduk Lansia, 2003–2012	30
3.2	Persentase Lansia menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2012	33
4.1	Persentase Lansia menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012	43
4.2	Persentase Lansia Yang Buta Aksara Menurut Jenis Kelamin, 2008, 2010, Dan 2012	46
5.1	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2012	55
5.2	Angka Kesakitan Lansia menurut Tipe Daerah, 2008, 2010, dan 2012	58
6.1	TPAK Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	72
6.2	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2012	78
7.1	Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012	87
7.2	Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012	88
7.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012	92
7.4	Persentase Penduduk Lansia yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012	94
8.1	Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2010-2012	112
8.2	Persentase Lansia menurut Tipe Daerah dan Kelayakan Rumah Tinggal, 2012	116

Gambar**Halaman**

9.1	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Selama 6 Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kartu/Surat yang Digunakan 2012	125
-----	--	-----

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Lansia (Tahun), 2012	27
3.2	Rasio Ketergantungan Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	28
3.3	Perkiraan Jumlah dan Proporsi Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012	30
3.4	Persentase Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2012	31
3.5	Persentase Penduduk 10 – 59 Tahun dan Penduduk 60 Tahun Ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2012	34
4.1	Persentase Lansia menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2008, 2010, dan 2012	41
4.2	Persentase Penduduk 15-59 Tahun, 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Buta Aksara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	45
5.1	Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2012	56
5.2	Persentase Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2012	59
5.3	Persentase Lansia yang Berobat Sendiri menurut Tipe Daerah, Lamanya Sakit, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2012	61
5.4	Persentase Penduduk Berumur 0-59 Tahun dan Lansia yang Sakit dan Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2012	62
5.5	Proporsi Penduduk berumur 0-59 Tahun dan Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2012	63
6.1	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Utama Seminggu Terakhir, 2012	70

Tabel		Halaman
6.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2012	74
6.3	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha, 2012	76
6.4	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2012	77
6.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2012	79
7.1	Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Bacaan, 2012	85
7.2	Proporsi Penduduk Lansia yang Menonton Pertunjukan Kesenian Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Pertunjukan, 2012	90
7.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, 2012	93
7.4	Proporsi Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Olahraga, 2012	96
7.5	Proporsi Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Frekuensi Olahraga dalam Seminggu, 2012	97
8.1	Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kategori Ketelantaran, 2012	103
8.2	Persentase Lansia menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kategori Ketelantaran, 2012	106
8.3	Perkiraan Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Lansia Dengan Disabilitas menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012	107
8.4	Proporsi Lansia dengan Disabilitas menurut Jenis Disabilitas dan Tipe Daerah, 2012	108

Tabel		Halaman
8.5	Persentase Lansia dengan Disabilitas menurut Jenis Gangguan Fungsi/ Keterbatasan/ Disabilitas dan Penyebab Utama Disabilitas, 2012	110
8.6	Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	113
8.7	Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, 2012	113
8.8	Persentase Lansia menurut Kelayakan Rumah Tinggal, 2010-2012	115
8.9	Persentase Lansia menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2012	117
9.1	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga (RT) Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Selama 6 Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2012	124
9.2	Karakteristik Bantuan Beras Miskin (Raskin) yang Diterima oleh Rumah Tangga (RT) Lansia menurut Tipe Daerah, 2012	126
9.3	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap menurut Tipe Daerah, 2012	128
9.4	Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan, 2012	129
9.5	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Usaha Dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah, 2012	130
9.6	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Usaha Dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kredit Usaha, 2012	131

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
3.1.1 - 3.1.3	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Tahun), 2012	145 - 147
3.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	148
3.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	149
3.4.1 - 3.4.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2012	150 - 152
3.5.1 - 3.5.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2012	153 - 155
4.1.1 - 4.1.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012	156 - 158
4.2.1 - 4.2.9	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012	159 - 167
5.1	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	168
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	169
5.3.1 - 5.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit (hari), 2012	170 - 172
5.4	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	173
5.5.1 - 5.5.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2012	174 - 176
5.6	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	177
5.7.1 - 5.7.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2012	178 - 180
6.1	TPAK Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	181

Tabel		Halaman
6.2.1 – 6.2.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2012	182 - 184
6.3.1 – 6.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2012	185 - 187
6.4.1 – 6.4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2012	188 - 190
7.1.1 – 7.1.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jenis Bacaan, 2012	191 - 193
7.2	Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2012	194
7.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012	195
7.4.1 – 7.4.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jenis Kegiatan, 2012	196 - 198
7.5.1 – 7.5.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, dan Frekuensi Olahraga dalam Seminggu,, 2012	199 - 201
8.1.1 – 8.1.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Ketelantaran, 2012	202 - 204
8.2	Estimasi Jumlah dan Persentase Penyandang Disabilitas menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	205
8.3.1 – 8.3.3	Persentase Penyandang Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Disabilitas, 2012	206 - 208
8.4	Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	209
8.5.1 – 8.5.3	Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2012	210 - 212
8.6.1 – 8.6.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan Rumah Tinggal, 2012	213 - 215
8.7.1 – 8.7.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2012	216 - 218

DAFTAR ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING

Tabel		Halaman
9.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/ Belum Pernah Bersekolah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	221
9.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/ Belum Pernah Bersekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	222
9.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/ Belum Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	223
9.4	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/ Belum Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	224
9.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	225
9.6	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	226
9.7	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah Pertama menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	227
9.8	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah Pertama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	228
9.9	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	229
9.10	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	230
9.11	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Perguruan Tinggi menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	231
9.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Perguruan Tinggi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	232
9.13	<i>Sampling Error</i> Angka Buta Huruf Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	233
9.14	<i>Sampling Error</i> Angka Buta Huruf Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	234

Tabel		Halaman
9.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	235
9.16	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	236
9.17	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	237
9.18	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	238
9.19	Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Membaca Surat Kabar/Majalah Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	239
9.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Membaca Surat Kabar/Majalah Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	240
9.21	Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	
9.22	Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	
9.23	Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012	
9.24	Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012	

PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia (lansia) merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yaitu semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Selain keberhasilan dibidang kesehatan, peningkatan usia harapan hidup juga disebabkan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan tingkat pendapatan yang semakin meningkat. Tingkat pendidikan ini mempunyai hubungan dengan tingkat pengetahuan, serta tingkat pendapatan seseorang. Orang yang

mempunyai pendidikan dan pengetahuan cenderung akan meningkat penghasilannya sehingga jika mereka sakit akan memilih sarana kesehatan yang lebih baik. Oleh karenanya semua ini saling terkait dan akan berdampak terhadap adanya usia harapan hidup yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, hal ini berdampak pada peningkatan jumlah atau pertumbuhan lansia setiap tahunnya.

Disisi lain, peningkatan jumlah lansia akan membawa dampak terhadap sosial ekonomi baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam negara. Implikasi ekonomis yang penting dari peningkatan jumlah lansia adalah peningkatan dalam ratio ketergantungan lanjut usia (*old age dependency ratio*). Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Ketergantungan lansia disebabkan kondisi mereka banyak mengalami kemunduran baik fisik maupun psikis. Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dapat menunjang derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia agar tetap sehat, mandiri dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Menjadi tua merupakan suatu fase kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Secara fisik orang lanjut usia mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan proses *degenerative* sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik. Pemerintah memberikan perhatian terhadap lansia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain dari pada itu perhatian terhadap lansia diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lansia Sedunia yang tertuang dalam resolusi PBB No. 045/206 Tahun 1991. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan Hari Lansia di Indonesia pada tanggal 29 Mei. Diharapkan dengan memperingati Hari Lansia tersebut, pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia.

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu

kehidupan lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Arah pemberdayaan dilakukan dengan cara lansia aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik, dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan tidak saja dilakukan terhadap para lansia dan keluarganya, namun juga dilakukan terhadap seluruh komponen bangsa. Untuk itu, arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.

Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran makro mengenai kondisi dan potensi lansia pada berbagai aspek penting seperti demografis, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pada tingkat nasional maupun provinsi, diharapkan dapat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan lansia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi lansia Indonesia dilihat dari berbagai aspek, antara lain struktur demografis, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Gambaran situasi dan kondisi lansia Indonesia dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini berguna terutama bagi peneliti, perencana, dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang menaruh perhatian pada lansia.

1.3 Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Tahun 2012 ini disajikan dalam tujuh bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; konsep dan definisi; keterbatasan data; serta metode analisis.

Lima bagian berikutnya menyajikan gambaran situasi dan kondisi lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan kemampuan berbahasa Indonesia lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan lansia yang bekerja; bagian ketujuh (Bab VII) kegiatan sosial penduduk, akses terhadap media massa, partisipasi dalam kegiatan sosial Kemasyarakatan dan partisipasi lansia dalam olahraga; dan bagian kedelapan (Bab VIII) mengenai kondisi sosial lansia, ketelantaran, disabilitas, lansia yang menjadi korban kejahatan dan kelayakan tempat tinggal.

METODOLOGI

<http://www.s-go.id>



Metodologi

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2012 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2012, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi lansia dari sisi demografi, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Data Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) Susenas 2012, yang digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan gambaran makro mengenai kegiatan sosial dan kondisi sosial lansia.
- c. Data Sakernas Tahun 2012, yang digunakan untuk melihat gambaran kegiatan ekonomi lansia.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS-RI melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Mulai tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara triwulanan (triwulan I-IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan secara bergiliran setiap 3 tahun sekali. Sesuai dengan gilirannya, pada tahun 2012 dilaksanakan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP).

Susenas MSBP 2012 memuat beberapa keterangan, diantaranya keterangan penduduk semua kelompok umur tentang penyandang disabilitas, keluhan kesehatan, kepemilikan pakaian yang layak, frekuensi makan makanan pokok, makan sayuran, makan buah-buahan, makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati dan hewani), dan ketersediaan tempat tetap untuk tidur; keterangan penduduk berumur 0-4 tahun tentang aktivitas ibu yang bertanggung jawab terhadap balita; keterangan penduduk 5-17 tahun dan belum kawin tentang kegiatan yang biasa dilakukan bersama orang tua/wali; keterangan penduduk 5 tahun ke atas yang mencakup kegiatan menonton TV, mendengarkan radio, aktivitas membaca, keikutsertaan dalam kursus, olah raga, kebiasaan merokok, kunjungan ke museum/situs peninggalan sejarah, menonton/melakukan pertunjukan kesenian/pameran, pengeluaran konsumsi produk seni budaya, keanggotaan sanggar seni/sarana kegiatan budaya, dan keterangan pendidikan bagi yang masih sekolah; keterangan penduduk 10 tahun ke atas tentang partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan; serta keterangan penduduk 17 tahun ke atas tentang keanggotaan partai politik. Selain itu, memuat juga keterangan modal sosial, keterangan kebahagiaan, dan keterangan sosial ekonomi lainnya.

2.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Kor 2012 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 497 Kab/Kota di Indonesia, dimana

setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 75.000 rumah tangga. Dari 300.000 rumah tangga sampel, yang berhasil dicacah sebanyak 286.113 rumah tangga. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan dari kumulatif pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan datanya dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Susenas MSBP dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2012 dengan sampel 75.000 rumah tangga. Banyaknya sampel rumah tangga yang berhasil dicacah pada Susenas MSBP 2012 sebanyak 71.730 rumah tangga.

2.3 Konsep dan Definisi

- a. **Penduduk lanjut usia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas.
- b. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- c. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/ bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

- d. **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-

hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- e. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.
- f. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

g. **Pendidikan:**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- h. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- i. **Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan instansi lainnya.
- j. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- k. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah

tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/ perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- l. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- m. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

- n. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

- o. **Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap:**

JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).

JPK Jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.

Asuransi Kesehatan Swasta adalah asuransi kesehatan komersial yang mengganti biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh peserta asuransi. Keanggotaannya ditandai dengan kepemilikan kartu peserta asuransi kesehatan.

Tunjangan/penggantian biaya kesehatan oleh perusahaan adalah jaminan kesehatan yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas sebagai pegawai perusahaan di mana perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja mengganti biaya/memberi tunjangan kesehatan karyawannya.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM)/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Kartu Jamkesmas adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, kartu sehat, kartu miskin, kartu JPK-Gakin, atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu Jamkesmas.

Dana Sehat adalah kepesertaan jaminan kesehatan kelompok/komunitas yang ditandai dengan memiliki kartu dana sehat dan dikelola oleh kelompok/komunitas tersebut.

JPKM/JPK lain adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan JPKM atau jaminan pemeliharaan kesehatan lain di luar dari bentuk-bentuk jaminan di atas.

- p. **Angkatan Kerja Penduduk Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam

tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

- q. **Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- r. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia** adalah persentase angkatan kerja penduduk lansia terhadap penduduk lansia. TPAK dihitung dengan rumus:

$$\text{TPAK}_{\text{Lansia}} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lansia}}{\text{Jumlah Penduduk Lansia}} \times 100\%$$

- s. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

- t. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.
- u. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- v. **Lansia dengan Disabilitas** adalah lansia yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Seseorang dikatakan **mengalami kesulitan/gangguan melihat** apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan yang cukup tidak dapat melihat dengan jelas baik bentuk, ukuran dan warna. Andaikan orang itu menggunakan alat bantu (kacamata) sekalipun, ia tetap kesulitan melihat, maka orang tersebut dikategorikan mengalami kesulitan. Akan tetapi, kalau dengan bantuan kacamata ia dapat melihat normal, maka orang itu dikategorikan tidak mengalami gangguan.

Seseorang dikatakan **mengalami kesulitan/gangguan mendengar** jika tidak dapat mendengar suara dengan jelas, membedakan sumber, volume dan kualitas suara sehingga tidak dapat merespon suara tersebut secara wajar. Seseorang yang menggunakan alat bantu sehingga dapat mendengar dengan normal, maka orang tersebut dikategorikan tidak mengalami kesulitan. Termasuk kategori ini adalah para **penyandang disabilitas rungu/wicara**.

Seseorang dikatakan mengalami **kesulitan/gangguan berkomunikasi** bila dalam berbicara berhadapan tanpa dihalangi sesuatu, seperti tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat berbicara sama sekali karena gangguan fisik dan mental. Termasuk kategori ini adalah **penyandang cacat rungu/wicara dan autis**. Autis atau autisme adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak yang ditandai dengan gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial dan perilaku.

Seseorang dikatakan mengalami **kesulitan/gangguan mengingat/konsentrasi** jika mengalami kesulitan dalam mengingat atau tidak dapat berkonsentrasi.

Seseorang dikatakan **mengalami kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga** bila tidak dapat berjalan dengan normal misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan mengalami kesulitan.

Seseorang dikatakan **mengalami hambatan mengurus diri sendiri**, jika ia mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain.

- w. **Korban kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perampokan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan direncanakan atau pun tanpa rencana.

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang

kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.

- x. **Lansia telantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria lansia telantar:

1. Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati ≤ 4 kali, hewani ≤ 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
6. Bila sakit tidak diobati
7. Bekerja > 35 jam seminggu

Jika memenuhi: 1 (satu) kriteria : Tidak telantar
2 (dua) kriteria : Hampir telantar
Lebih dari dua kriteria : Telantar

- y. **Rumah Tidak Layak Huni** didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008).

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni:

1. Luas lantai per kapita Perkotaan dan Perdesaan yaitu $7,2 \text{ m}^2$
2. Jenis atap rumah terbuat dari daun/lainnya
3. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/lainnya
4. Jenis lantai tanah
5. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar (WC sendiri)
6. Sumber penerangan bukan listrik
7. Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10m.

Jika memenuhi: 1 (satu) kriteria : Layak huni
2 (dua) kriteria : Hampir tidak layak huni
Lebih dari dua kriteria : Tidak layak huni

- z. **Pelayanan kesehatan gratis** adalah pemeriksaan kesehatan/berobat, pemeriksaan KB, pemasangan alat KB, melahirkan, termasuk rawat inap yang tidak dikenakan pungutan biaya atau hanya dikenakan biaya administrasi saja.

Kartu/surat yang digunakan :

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran dari program Jamkesmas adalah masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin/tidak mampu. **Pengelola Jamkesmas** adalah Departemen Kesehatan RI dan PT Askes (Persero), sedangkan yang memberikan pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan jaringannya, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk. Jamkesmas merupakan pengganti ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin). Pemegang kartu Jamkesmas dibebaskan dari biaya pengobatan dan rawat inap di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Kartu Sehat adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dengan maksud membantu masyarakat miskin (tidak mampu). Kartu Sehat ini digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah (rumah sakit, dan puskesmas) tanpa di pungut biaya. Satu keluarga mempunyai satu Kartu Sehat yang di dalamnya memuat daftar anggota keluarganya, dan setiap anggota keluarga bisa mempergunakannya.

Surat Miskin/SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) adalah surat yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan dengan maksud untuk memperoleh keringanan biaya bagi penduduk.

Lainnya seperti: Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) adalah program bantuan sosial bidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat miskin di wilayahnya. Pengelola Jamkesda adalah Dinas Kesehatan di daerah setempat dan asuransi di daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Hal-hal lain menyangkut prasyarat dan bantuan kesehatan yang diberikan oleh asuransi kepada masyarakat serupa dengan Jamkesmas/Askeskin.

- aa. **Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)** adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh BULOG dengan menjual beras dengan harga murah bersubsidi.

Titik distribusi beras raskin adalah titik distribusi yang resmi seperti kantor kelurahan/desa, pos RW atau tempat yang lebih dekat dengan masyarakat.

- bb. **Kredit Usaha** adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha.

Jenis kredit usaha:

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam rangka menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksudkan kredit usaha yang diterima oleh masyarakat dari PNPM Mandiri adalah kredit usaha yang diterima dari program-program yang termasuk di dalam PNPM Mandiri, setelah tahun 2007 maupun sebelum tahun 2007.

Ciri kredit usaha dari PNPM Mandiri adalah penyalurannya tidak mengikuti prosedur perbankan. Dana kredit usaha atau lebih dikenal dengan dana modal bergulir (*revolving fund*) dikelola dan diusulkan pemanfaatannya langsung oleh masyarakat.

Program-program yang termasuk di dalam PNPM Mandiri pada tahun 2008, yaitu:

1. PNPM Mandiri Perdesaan atau yang dahulunya dinamakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
2. PNPM Mandiri Perkotaan atau yang dahulu dinamakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP),
3. PNPM Infrastruktur Perdesaan atau yang dahulunya bernama Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP),
4. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (DTK) atau yang dahulunya bernama Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)/ *Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA)*,
5. PNPM Agribisnis Perdesaan atau Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Program pemerintah lainnya, misal:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP);
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFMBLPS);
3. Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya (PPMR);
4. Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
5. Program Pembangunan Hutan Rakyat;
6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT);
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan;
8. Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan;
9. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP);
10. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
11. Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri);
12. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;
13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP);
14. Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi;
15. Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP);
16. Program Hutan Kemasyarakatan (HKM);
17. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK);
18. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK);
19. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM;
20. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM;
21. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;
22. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
23. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASA);
24. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM);

25. Program Pelatihan Pengarusutamaan Gender;
 26. Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
 27. Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/LKKnB;
 28. Program Pinjaman Lunak Lingkungan;
 29. Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL);
 30. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan;
 31. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 32. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
 33. Rencana Bisnis Perbankan untuk UMKM;
 34. Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintahan;
 35. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disalurkan oleh BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Bukopin.
- cc. Jenis-jenis jaminan pembiayaan/asuransi Kesehatan untuk keperluan berobat jalan/rawat inap sebagai berikut :

JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).

JPK Jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.

Asuransi Kesehatan Swasta adalah asuransi kesehatan komersial yang mengganti biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh peserta asuransi. Keanggotaannya ditandai dengan kepemilikan kartu peserta asuransi kesehatan.

Tunjangan/penggantian biaya kesehatan oleh perusahaan adalah jaminan kesehatan yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas sebagai pegawai perusahaan di mana perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja mengganti biaya/memberi tunjangan kesehatan karyawannya.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM)/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Kartu Jamkesmas adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin yang ditandai dengan memiliki

kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, Kartu Sehat, Kartu Miskin, Kartu JPK-Gakin, atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu Jamkesmas.

Dana Sehat adalah kepesertaan jaminan kesehatan kelompok/komunitas yang ditandai dengan memiliki kartu dana sehat dan dikelola oleh kelompok/komunitas tersebut.

JPKM/JPK lain adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan JPKM atau jaminan pemeliharaan kesehatan lain di luar dari bentuk-bentuk jaminan di atas.

2.4 Keterbatasan Data

- Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS RI, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus seperti panti jompo tidak dicakup dalam survei.
- Rumah tangga sampel MSBP 2012 tidak sebanyak rumah tangga sampel MSBP 2009 (291.888 rumah tangga), sehingga dalam penyajian tabel disesuaikan dengan kecukupan sampelnya.

2.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan Lampiran Tabel untuk melihat data pada tingkat provinsi.

STRUKTUR DEMOGRAFIS

<http://www.bps.go.id>



Struktur Demografis

Dalam rangka perencanaan pembangunan (sebagai input dan output) serta penetapan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan memerlukan data dasar kependudukan. Data dasar tersebut antara lain berhubungan dengan jumlah dan struktur penduduk. Pada kegiatan perencanaan sebagai input pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan sebagai output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Penduduk usia 60 tahun ke atas atau yang disebut dengan lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad milenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya jumlah lansia, dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penuaan

penduduk terutama dalam struktur demografis. Terjadinya perubahan struktur lansia membawa implikasi pada perumusan dan arah kebijakan pembangunan, salah satunya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lansia.

Sesuai dengan perumusan dan arah kebijakan, maka data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografis lansia merupakan data yang sangat dibutuhkan. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan. Uraian berikut ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi lansia serta perkembangannya menurut karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan struktur dalam rumah tangga.

3.1. Struktur Penduduk Indonesia

Menurut Inten Soeweno (Ketua Komnas Lansia) bahwa suatu negara mempunyai populasi lanjut usia di atas tujuh persen maka negara itu disebut negara berstruktur tua. Bila merujuk dari pernyataan di atas maka Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Berdasarkan data Susenas 2012 dapat dilihat persentase lansia yang telah mencapai 7,57 persen dari keseluruhan penduduk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional. Hal itu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. Keadaan ini telah memberikan peningkatan pada usia harapan hidup. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, secara umum persentase lansia perempuan (8,23 persen) lebih besar dari persentase lansia laki-laki (6,91 persen). Sedangkan menurut tipe daerah, sebarannya lebih banyak di daerah perdesaan (8,18 persen) dibandingkan dengan di daerah perkotaan (6,95 persen). Jika dilihat menurut kelompok umur, lansia terbagi menjadi lansia muda (60-69 tahun) sebesar 4,52 persen, lansia menengah/madya (70-79 tahun) sebesar 2,23 persen, dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebesar 0,81

persen. Sementara itu, penduduk pra lansia yaitu kelompok umur 45-54 tahun dan 55-59 tahun masing-masing sebesar 10,95 persen dan 3,52 persen.

Keberadaan lansia tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kepedulian akan kesejahteraan lansia tertuang dalam UU No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia. UU tersebut mengamanatkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Lansia (Tahun), 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur Lansia (Tahun)					60+ ^{*)}
	45-54 ^{*)}	55-59 ^{*)}	60-69 ^{*)}	70-79 ^{*)}	80+ ^{*)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	10,87	3,54	4,05	1,80	0,51	6,35
Perempuan (P)	10,97	3,34	4,41	2,25	0,89	7,56
L+P	10,92	3,44	4,23	2,02	0,70	6,95
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	11,08	3,62	4,56	2,15	0,76	7,47
Perempuan (P)	10,89	3,57	5,06	2,75	1,10	8,91
L+P	10,99	3,60	4,81	2,45	0,93	8,18
K+D						
Laki-laki (L)	10,98	3,58	4,30	1,97	0,63	6,91
Perempuan (P)	10,93	3,45	4,74	2,50	1,00	8,23
L+P	10,95	3,52	4,52	2,23	0,81	7,57

Sumber: BPS - Susenas 2012

Keterangan: *) 45-54 tahun dan 55-59 tahun : Pra Lansia
60-69 tahun : Lansia Muda
70-79 tahun : Lansia Menengah/Madya
80 tahun ke atas : Lansia Tua
60 tahun ke atas : Lansia

Lampiran Tabel 3.1.3 menyajikan persentase lansia menurut provinsi tahun 2012. Provinsi yang memiliki persentase lansia di atas 7 persen adalah DI Yogyakarta (12,99 persen), Jawa Timur (10,37 persen), Jawa Tengah (10,35 persen), Bali (9,79 persen), Sulawesi Utara (8,47 persen), Sulawesi Selatan (8,34 persen), Sumatera Barat (8,09 persen), Nusa Tenggara Timur (7,47 persen), Nusa Tenggara Barat (7,23 persen), Lampung (7,22 persen), dan Jawa Barat (7,05 persen).

3.2. Rasio Ketergantungan Lansia

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan, salah satunya adalah beban ketergantungan lansia. Akibat penurunan angka kelahiran dan makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, jumlah lansia pun menjadi relatif besar, yang berarti angka ketergantungan lansia juga bisa meningkat. Rasio ketergantungan lansia (*old dependency ratio/ODR*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan lansia pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai lansia.

Tabel 3.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Tipe Daerah	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	9,78	11,67	10,71
Perdesaan (D)	12,21	14,59	13,39
K+D	10,96	13,08	12,01

Sumber: BPS – Susenas 2012

Angka rasio ketergantungan lansia pada tahun 2012 berdasarkan data Susenas adalah sebesar 12,01 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.2. Angka rasio sebesar 12,01 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang lansia. Namun bila dibandingkan dengan jenis kelamin, maka angka rasio ketergantungan lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki, yaitu 13,08 berbanding 10,96.

Di samping itu ditampilkan pula, rasio ketergantungan lansia menurut tipe daerah juga ditunjukkan pada Tabel 3.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio ketergantungan lansia di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada tahun 2012, rasio ketergantungan lansia terhadap usia produktif di daerah perdesaan tercatat sebesar 13,39 sedangkan daerah perkotaan sebesar 10,71.

Jika dilihat menurut provinsi di Indonesia, besarnya rasio ketergantungan lansia berkisar antara 3,15–20,07 (Lampiran Tabel 3.2). Provinsi yang memiliki rasio ketergantungan lansia tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 20,07, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 16,52 dan Jawa Timur sebesar 16,04. Sedangkan provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan lansia terendah adalah Papua sebesar 3,15, Papua Barat sebesar 5,01 dan Kepulauan Riau sebesar 5,19.

3.3 Distribusi dan Komposisi Lansia

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2012, secara umum jumlah lansia di Indonesia sebanyak telah mencapai 18,55 juta orang atau sekitar 7,57 persen dari seluruh penduduk Indonesia (Tabel 3.3). Bila dibandingkan dengan jenis kelamin jumlah lansia perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 10,02 juta orang (8,23 persen dari seluruh penduduk perempuan), lebih banyak daripada laki-laki yang hanya 8,53 juta orang (6,91 persen dari seluruh penduduk laki-laki). Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi lansia yang lebih tinggi dari penduduk laki-laki disebabkan karena usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki. Berdasarkan hasil SP2010, angka harapan hidup perempuan empat tahun lebih lama dibanding laki-laki, yaitu 72,6 tahun untuk perempuan dan 68,7 tahun untuk laki-laki.

Tabel 3.3 Perkiraan Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012

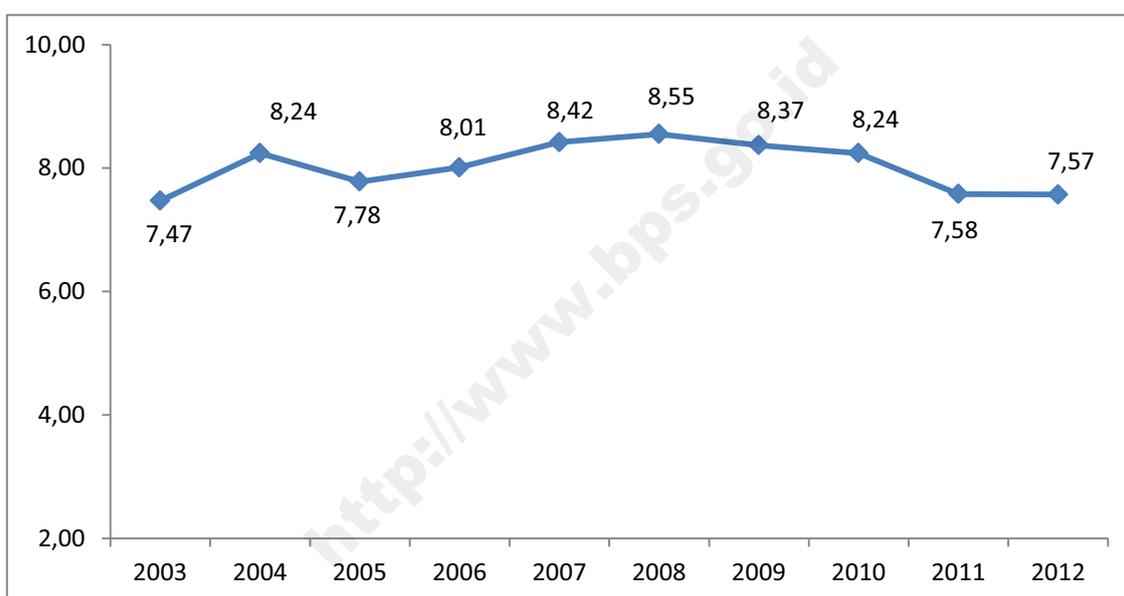
Jenis Kelamin	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki (L)	3 920 838	6,35	4 607 211	7,47	8 528 048	6,91
Perempuan (P)	4 603 954	7,56	5 417 172	8,91	10 021 126	8,23
L+P	8 524 791	6,95	10 024 383	8,18	18 549 174	7,57

Sumber: BPS – Susenas 2012

Namun bila dilihat menurut tipe daerah, jumlah lansia yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 10,02 juta orang (8,18 persen) dari keseluruhan penduduk perdesaan,

sedangkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan jumlahnya sebesar 8,52 juta orang (6,95 persen) dari keseluruhan penduduk perkotaan.

Perkembangan lansia selama 10 tahun terakhir disajikan pada Gambar 3.1, mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa persentase lansia mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 secara umum berkisar antara 7,47 persen sampai dengan 8,55 persen. Dimana pada tahun 2003 proporsi lansia tercatat sebesar 7,47 persen dan pada tahun 2012 telah mencapai 7,57 persen. Persentase lansia pernah mencapai titik tertinggi yaitu pada tahun 2008 sebesar 8,55 persen, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2011 sebesar 7,58 persen dan tahun 2012 mengalami penurunan kembali menjadi 7,57 persen.



Sumber : BPS – Susenas, 2003-2012

Gambar 3.1 Perkembangan Persentase Penduduk Lansia, 2003 - 2012

Persentase penduduk lansia tahun 2012 sangat bervariasi antar provinsi di Indonesia (Lampiran Tabel 3.3). Pada tabel tersebut tampak bahwa proporsi lansia berkisar antara 1,94 persen sampai dengan 12,99 persen. Provinsi yang mempunyai lansia dengan proporsi paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (12,99 persen), kemudian Jawa Timur (10,37 persen) dan Jawa Tengah (10,35 persen). Sementara provinsi yang proporsi lansia paling rendah adalah Provinsi Papua (1,94 persen), kemudian Papua Barat (3,10 persen) dan Kepulauan Riau (3,45 persen). Pola yang sama terjadi pada lansia laki-laki maupun perempuan.

3.4 Status Perkawinan Lansia

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa mayoritas lansia berstatus kawin sebesar 58,03 persen, diikuti dengan lansia berstatus cerai mati sebesar 38,85 persen. Sementara itu, lansia yang berstatus cerai hidup dan belum kawin masing-masing hanya sebesar 2,21 persen dan 0,91 persen.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	0,68	82,50	1,03	15,79	100,00
Perempuan (P)	1,33	36,59	3,13	58,95	100,00
L+P	1,03	57,70	2,16	39,10	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	0,58	83,70	1,25	14,47	100,00
Perempuan (P)	1,00	36,71	3,09	59,20	100,00
L+P	0,81	58,31	2,25	38,64	100,00
K+D					
Laki-laki (L)	0,62	83,15	1,15	15,08	100,00
Perempuan (P)	1,15	36,65	3,11	59,08	100,00
L+P	0,91	58,03	2,21	38,85	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2012

Bila dilihat lebih rinci menurut jenis kelamin, pola status perkawinan lansia laki-laki berbeda dengan lansia perempuan. Sesuai dengan kenyataan bahwa usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, hal ini menimbulkan dugaan penyebab persentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Persentase lansia laki-laki yang berstatus kawin (83,15 persen) lebih banyak dibandingkan dengan lansia yang berstatus cerai mati (15,08 persen). Sebaliknya, lansia perempuan yang berstatus cerai mati (59,08 persen) lebih banyak daripada yang berstatus kawin (36,65 persen). Pola yang sama juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Terdapat fenomena yang menarik pada status perkawinan untuk lansia. Pada status perkawinan cerai terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi antara lansia perempuan dengan lansia laki-laki. Tingginya persentase

lansia perempuan yang berstatus cerai dapat disebabkan karena sebagian besar kaum perempuan yang telah bercerai tidak segera kawin lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya, lansia laki-laki yang terpaksa bercerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, umumnya segera kawin lagi.

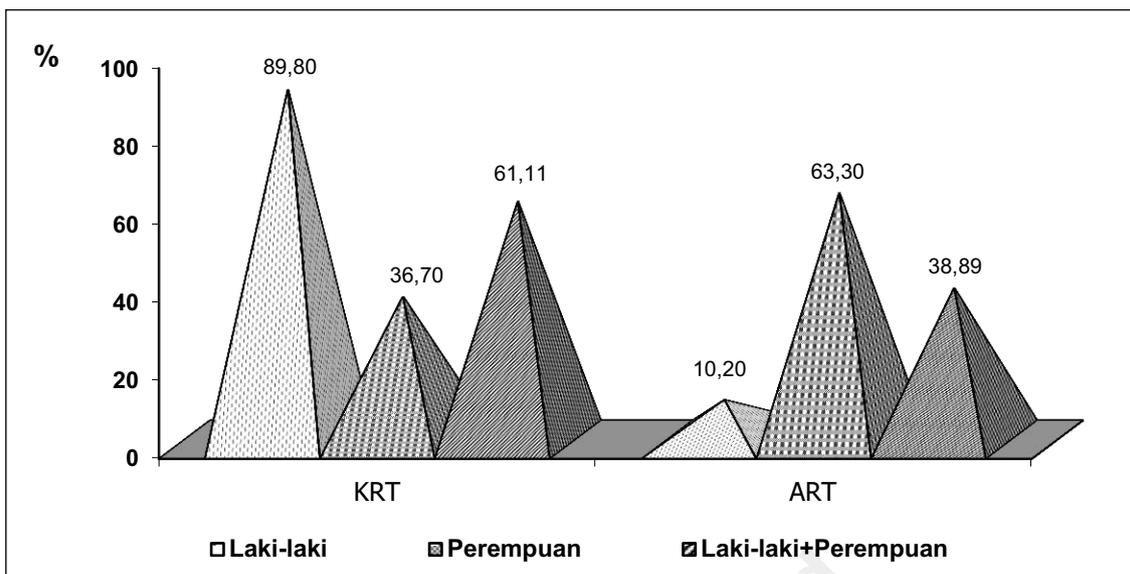
Struktur perkawinan lansia di setiap provinsi menunjukkan pola yang sama dengan struktur perkawinan lansia secara nasional. Keadaan ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.4.3, kecuali untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Papua Barat. Provinsi-provinsi tersebut mempunyai pola persentase lansia yang berstatus belum kawin cenderung lebih tinggi dari mereka yang berstatus cerai hidup.

3.5 Peranan Lansia di Dalam Rumah Tangga

Seseorang yang telah memasuki masa tua seyogianya dapat menikmati hari tuanya tanpa beban yang berat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa lansia di Indonesia masih banyak yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap satu rumah tangga. Kedudukan kepala rumah tangga sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Hasil studi lansia tahun 2012 menyatakan bahwa tingginya lansia sebagai kepala rumah tangga karena: 1) lansia masih dituakan sehingga dianggap sebagai kepala rumah tangga, 2) lansia masih menjadi tulang punggung keluarga dan 3) rumah yang ditempati milik lansia. Pada Gambar 3.1 disajikan persentase lansia dan hubungannya dengan kepala rumah tangga. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa lebih dari separuh lansia berperan sebagai kepala rumah tangga, yaitu sebesar 61,11 persen, sedangkan yang berstatus sebagai anggota rumah tangga sebesar 38,89 persen. Tingginya persentase lansia sebagai kepala rumah tangga sejalan dengan tingginya lansia bekerja dengan jam kerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu). Besarnya persentase lansia yang menjadi kepala rumah tangga perlu mendapat

perhatian serius karena mereka dituntut beban dan tanggung jawab tinggi secara ekonomi terhadap anggota rumah tangganya.



Sumber: BPS – Susenas 2012

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2012

Di sisi lain, seharusnya lansia sudah menikmati masa tuanya dengan sejahtera tanpa beban. Karenanya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia perlu disosialisasikan terutama kepada penduduk usia produktif.

Peran keanggotaan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara lansia laki-laki dan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012, persentase lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga sebesar 89,80 persen, sedangkan lansia perempuan hanya sebesar 36,70 persen.

Tabel 3.5 menyajikan peran keanggotaan penduduk berumur 10-59 tahun dan lansia dalam rumah tangga. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar lansia berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Pola tersebut berbeda dengan pola umum penduduk berumur 10-59 tahun. Sebagian besar (70,98 persen) penduduk berumur 10-59 tahun berkedudukan sebagai anggota rumah tangga. Keadaan ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk perkotaan

berumur 10-59 tahun yang berkedudukan sebagai anggota rumah tangga sebesar 71,30 persen dan di perdesaan sebesar 70,64 persen.

Tabel 3.5 Persentase Penduduk 10 - 59 Tahun dan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Penduduk 10 - 59 Tahun		Penduduk Lansia	
	KRT	ART	KRT	ART
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)				
Laki-laki (L)	50,46	49,54	90,24	9,76
Perempuan (P)	6,52	93,48	37,44	62,56
L+P	28,70	71,30	61,73	38,27
Perdesaan (D)				
Laki-laki (L)	52,44	47,56	89,42	10,58
Perempuan (P)	5,77	94,23	36,08	63,92
L+P	29,36	70,64	60,59	39,41
K + D				
Laki-laki (L)	51,43	48,57	89,80	10,20
Perempuan (P)	6,15	93,85	36,70	63,30
L+P	29,02	70,98	61,11	38,89

Sumber: BPS – Susenas 2012

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang menjadi kepala rumah tangga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pola yang sama terjadi pada penduduk berumur 10-59 tahun dan lansia (60 tahun ke atas) baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan budaya masyarakat bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

PENDIDIKAN



Pendidikan

UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) mengamanatkan kepada pemerintah agar dapat memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Penduduk yang berusia tua pun perlu mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU Lansia No. 13

Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2) tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut diatas, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan keterampilan bagi lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus. Hal ini sesuai dengan karakteristik lansia yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya, seperti balita, remaja dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses menua yang terjadi pada mereka secara alamiah.

4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang tinggi dan ditunjang dengan kondisi kesehatan yang baik pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Tentu pendidikan dan kesejahteraan tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung akan tetapi melalui proses panjang pendidikan yang baik akan memberi peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pembangunan ekonomi. Kondisi

pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan prasyarat terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang pada akhirnya akan memunculkan masyarakat akan memiliki produktivitas tinggi. Produktivitas yang tinggi pada gilirannya akan berkontribusi sangat signifikan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya peningkatan bidang pendidikan adalah dengan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang semakin baik. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud. Kemudahan fasilitas pendidikan dapat dirasakan oleh generasi muda saat ini, namun tidak dirasakan oleh generasi tua di jamannya seperti pada masa kemerdekaan.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008, 2010, dan 2012

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2008			2010			2012		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/belum pernah sekolah	19,68	46,57	33,98	17,81	43,42	31,51	14,86	37,86	27,29
Tdk tamat SD	37,40	30,91	33,95	28,26	26,30	27,21	32,82	32,44	32,62
SD	22,84	13,76	18,01	32,52	20,33	26,00	29,77	19,09	24,00
SMP	6,80	3,54	5,07	7,92	4,69	6,19	8,16	4,60	6,23
SM+	13,29	5,22	9,00	13,49	5,26	9,09	14,39	6,01	9,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2008, 2010, dan 2012

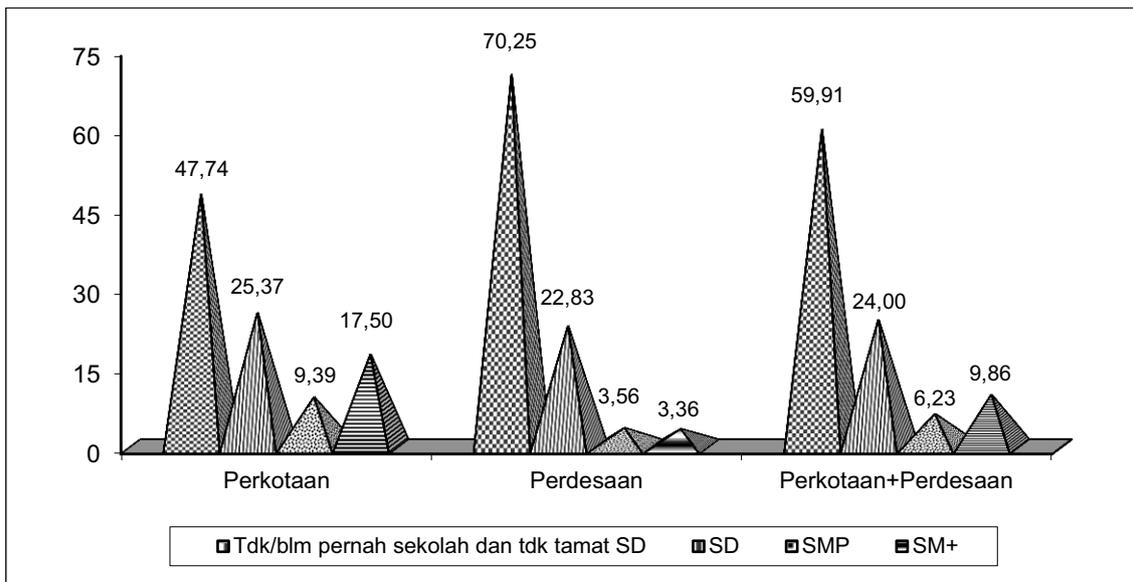
Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa pendidikan lansia relatif masih rendah, sebagian besar lansia memiliki pendidikan tertinggi hanya tamat SD, yaitu sebesar 24,00 persen, persentase lansia yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah jauh lebih besar, yaitu sekitar 59,91 persen. Sedangkan persentase lansia yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif rendah. Tabel 4.1 juga menunjukkan persentase lansia yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP hanya sebesar 6,23 persen dan yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SM ke atas sebesar 9,86 persen. Rendahnya pendidikan lansia tersebut memperlihatkan kualitas SDM lansia

secara umum masih rendah. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan menjadi salah satu faktor penyebab tingkat pendidikan lansia masih relatif rendah.

Budaya patriarkhi masih kental dalam keluarga di era tahun 45-an, orang tua lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Tabel diatas menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi pada semua jenjang pendidikan dengan selisih persentase yang cukup signifikan. Data tahun 2012 menggambarkan persentase lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah hanya sebesar 14,86 persen, sedangkan untuk lansia perempuan melebihi dua kali lipatnya yaitu sebesar 37,86 persen. Hal yang berkebalikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan lansia laki-laki lebih baik dari lansia perempuan. Sebuah fenomena yang menarik dari indikasi terjadinya kesenjangan gender dalam akses memperoleh pelayanan pendidikan pada masa Indonesia baru merdeka.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 dan 2010, persentase lansia yang tidak/belum pernah sekolah sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 33,98 persen pada tahun 2008 menjadi 31,51 persen pada tahun 2010 dan turun menjadi 27,29 persen pada tahun 2012. Lansia yang tidak tamat SD terjadi peningkatan dari 27,21 persen pada tahun 2010 menjadi 32,62 persen pada tahun 2012. Secara umum, persentase lansia dengan pendidikan rendah tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana persentasenya relatif masih tinggi.

Tingkat pendidikan lansia secara umum masih relatif rendah dan terdapat hampir di semua provinsi. Tabel Lampiran 4.1.3. memperlihatkan sekitar 27,29 persen lansia tidak/belum pernah sekolah dan 32,62 persen tidak tamat SD. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (51,73 persen), Bali (40,21 persen) dan Kalimantan Barat (39,36 persen), sedangkan persentase lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (1,81 persen), DKI Jakarta (7,06 persen) dan Maluku (7,18 persen).



Sumber: BPS - Susenas 2012

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa pendidikan lansia di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Persentase lansia di daerah perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan minimal SD cenderung lebih tinggi (52,26 persen) dibanding lansia di daerah perdesaan (29,75 persen). Sebaliknya, lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan (70,25 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (47,74 persen). Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di masa kemerdekaan, di daerah perkotaan pada umumnya ketersediaan fasilitas pendidikan masih cukup memadai dibanding daerah perdesaan. Akses masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan masih lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini diduga menjadi dasar adanya kesenjangan pendidikan yang ditamatkan antara lansia di daerah perkotaan dan perdesaan.

4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis

Tujuan kedua dari MDGs adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua. Penilaian terhadap pencapaian tujuan kedua dari MDGs didasarkan atas empat indikator yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rasio murid laki-laki dan perempuan. Pendidikan

dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Pada kelas awal jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD) yang diajarkan pertama kali pada siswa adalah kemampuan dasar membaca dan menulis huruf latin serta berhitung sederhana. Dengan menguasai baca tulis huruf latin dan berhitung sederhana, diharapkan setiap orang dapat mempelajari keterampilan dan keahlian lainnya.

Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis atau biasa disebut buta aksara merupakan indikator dasar yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Angka buta aksara menunjukkan proporsi penduduk buta aksara terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Program Keaksaraan Fungsional (KF) bertujuan untuk penuntasan buta aksara. Prioritas program KF adalah penduduk buta aksara usia 15-44 tahun. Namun dalam kenyataan hampir 10 persen peserta KF berusia 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dan kemajuan untuk membaca dan menulis lansia masih cukup besar (Laporan Ringkas SBA 2007).

Tabel 4.2 Persentase Penduduk 15-59 Tahun, 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Buta Aksara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-59 Tahun	Lansia (60+)	15 Tahun Ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Laki-laki	1,10	11,21	2,00
Perempuan	2,60	31,08	5,57
Laki-laki+Perempuan	1,84	21,94	3,79
Perdesaan			
Laki-laki	4,29	23,15	6,35
Perempuan	7,91	50,02	13,28
Laki-laki+Perempuan	6,09	37,67	9,82
Perkotaan+Perdesaan			
Laki-laki	2,65	17,66	4,13
Perempuan	5,18	41,32	9,36
Laki-laki+Perempuan	3,90	30,44	6,75

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

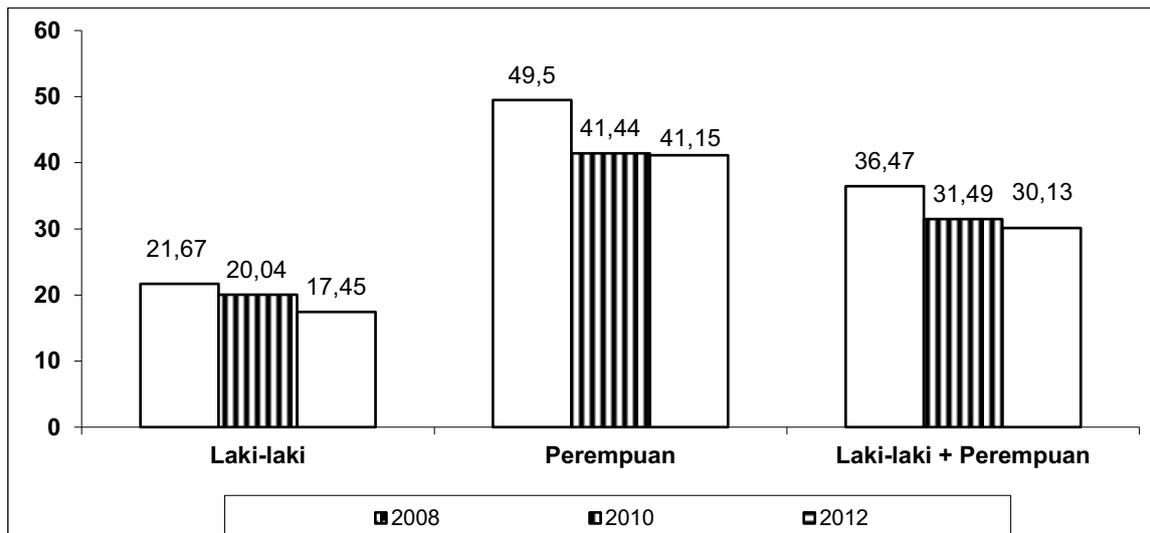
Pada Tabel 4.2. disajikan persentase buta aksara penduduk 15 tahun ke atas dan lansia pada tahun 2012. Tingkat buta aksara penduduk 15 tahun ke atas sebesar 6,75 persen, sebagian besar merupakan penduduk usia 45 tahun

ke atas termasuk di dalamnya lansia. Bila dibandingkan antara kelompok umur 15-59 tahun dengan lansia, angka buta aksara lansia relatif cukup tinggi yang mencapai dua digit yaitu sebesar 30,44 persen dari total keseluruhan lansia, sedangkan kelompok umur 15-59 tahun sebesar 3,90 persen.

Angka buta aksara lansia yang cukup tinggi ini sejalan dengan tingkat pendidikan lansia yang pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia pada 60 tahun yang lalu. Pada saat itu bangsa Indonesia baru melepaskan diri dari belenggu penjajahan sehingga pembangunan infrastruktur serta berbagai fasilitas termasuk fasilitas pendidikan pada masa itu dilakukan masih dalam skala yang sangat terbatas. Kondisi ini berbeda dengan pembangunan masa kini yang mempunyai fasilitas pendidikan lebih baik sehingga angka buta aksara penduduk 15 tahun ke atas jauh lebih kecil.

Keterbatasan berbagai fasilitas dalam bidang pendidikan di masa lalu cenderung lebih banyak dirasakan oleh lansia yang berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi ini tercermin dari angka buta aksara lansia di daerah perdesaan yang lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Angka buta aksara lansia di daerah perdesaan mencapai sebesar 37,67 persen, sedangkan di daerah perkotaan 21,94 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pula pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang buta aksara mencapai 9,82 persen, sebaliknya di daerah perkotaan hanya 3,79 persen.

Gambar 4.2. menyajikan angka buta aksara lansia menurut gender pada tahun 2008, 2010 dan 2012. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi penurunan angka buta aksara lansia dari 36,47 persen pada tahun 2008 menjadi 31,49 persen pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 turun menjadi 30,44 persen. Pola yang sama juga terjadi bila dibedakan menurut jenis kelamin, dimana persentase lansia laki-laki dan perempuan mengalami penurunan pada kurun waktu tersebut. Penurunan angka buta aksara lansia tersebut menunjukkan adanya kemajuan/peningkatan kualitas lansia dalam hal kemampuan membaca dan menulis, meskipun angkanya relatif masih cukup tinggi.



Sumber: BPS - Susenas 2008, 2010 dan 2012

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Lansia yang Buta Aksara menurut Jenis Kelamin, 2008, 2010, dan 2012

Bila dilihat menurut jenis kelamin, kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kemampuan baca tulis terjadi antara lansia laki-laki dan perempuan. Keadaan tersebut sudah terjadi sejak lama. Salah satu alasan yang mempengaruhinya adalah karena adanya sistem budaya patriarki masyarakat Indonesia yang cenderung lebih mengutamakan kaum laki-laki (lihat antara lain Iriantono et al, 2002). Pada Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa persentase lansia perempuan yang buta aksara lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan lansia laki-laki (41,32 persen berbanding 17,66 persen) pada tahun 2012. Hal yang sama terjadi pada tahun 2008 untuk lansia yang buta aksara (lansia perempuan 49,50 persen dan lansia laki-laki 21,67 persen) dan tahun 2010 untuk lansia yang buta aksara (lansia perempuan 41,44 persen dan lansia laki-laki 20,04 persen).

Tabel Lampiran 4.2.9 menunjukkan bahwa persentase lansia yang buta aksara antar provinsi sangat bervariasi antara 4,28-57,56 persen. Angka buta aksara lansia tertinggi secara berturut-turut ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (57,56 persen), Bali (41,38 persen), dan Sulawesi Tenggara (40,76 persen). Sebaliknya, persentase lansia yang buta aksara terendah secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara (4,28 persen), DKI Jakarta (6,22 persen) dan Maluku (8,65 persen).

<http://www.bps.go.id>

KESEHATAN



Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kualitas hidup yang baik akan didapat bila seseorang memiliki kesehatan yang prima, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Seseorang yang mempunyai badan yang sehat akan dapat melakukan kegiatan lebih baik dan

optimal bila dibandingkan dengan kesehatan orang yang sedang terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan setiap manusia.

Tingkat/derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu cermin dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat sehingga upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam upaya membangun kualitas SDM yang handal, program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam bidang kesehatan mencakup semua usia, termasuk lansia. Adapun program pelayanan kesehatan untuk lansia antara lain adalah Home Care, Usaha Ekonomi Produktif dan Posyandu Lansia, seperti yang ada di Provinsi Lampung, DI Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Selatan. Home Care merupakan program pendampingan yang ditujukan khusus untuk lansia yang perlu perhatian serius, seperti masalah fisik, kesehatan, gizi buruk, penyakit tua dan masalah mental spiritual (menurunnya daya pikir/pikun). Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan posyandu lansia adalah pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan dan pelaksanaan senam lansia.

Aspek kesehatan bagi lansia sangat penting karena pada umumnya daya tahan tubuh mereka berkurang sejalan dengan bertambahnya umur. Penurunan daya tahan tubuh lansia hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan tubuh menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dari semua pihak agar para lansia memiliki kesehatan yang prima dalam rangka melanjutkan aktivitas kehidupannya.

Berkaitan dengan itu tersebut diatas, upaya yang dapat dilakukan agar lansia selalu memiliki kesehatan yang prima adalah dengan: (i) meningkatkan kesadaran para lansia untuk membina sendiri kesehatannya; (ii) meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam menghayati dan mengatasi kesehatan lansia; (iii) meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan

kesehatan lansia; (iv) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia (Siti Partini Suardiman; 2007).

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia dituangkan dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab VI Pasal 14 Ayat (1) tentang pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia; b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penelitian mengenai pelayanan kesehatan lansia di rumah sakit menyimpulkan bahwa rumah sakit memiliki kecenderungan memberikan perlindungan kepada lansia dalam pemenuhan hak atas kesehatannya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, seperti anggaran untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk lansia masih menyatu dengan anggaran rumah sakit secara keseluruhan, kurangnya dukungan Pemerintah Daerah maupun DPRD (belum ada kebijakan yang dikeluarkan bagi perlindungan lansia di rumah sakit), belum adanya landasan yuridis (peraturan pemerintah), dan terbatasnya SDM (staf) pelayanan kesehatan lansia. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan lansia dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan, dan perlunya anggaran khusus program lansia.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan khusus untuk lansia diantaranya posyandu lansia. Pelayanan kesehatan ini disediakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan agar lansia selalu terpantau kesehatannya. Posyandu lansia juga merupakan ajang komunikasi sesama lansia.

Berdasarkan ilmu kesehatan, semakin lansia aktif maka akan semakin baik daya tahan fisik, pikiran, dan kebahagiaannya. Kondisi kesehatan lansia

tidak hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak manusia dalam kandungan sampai sekarang. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat.

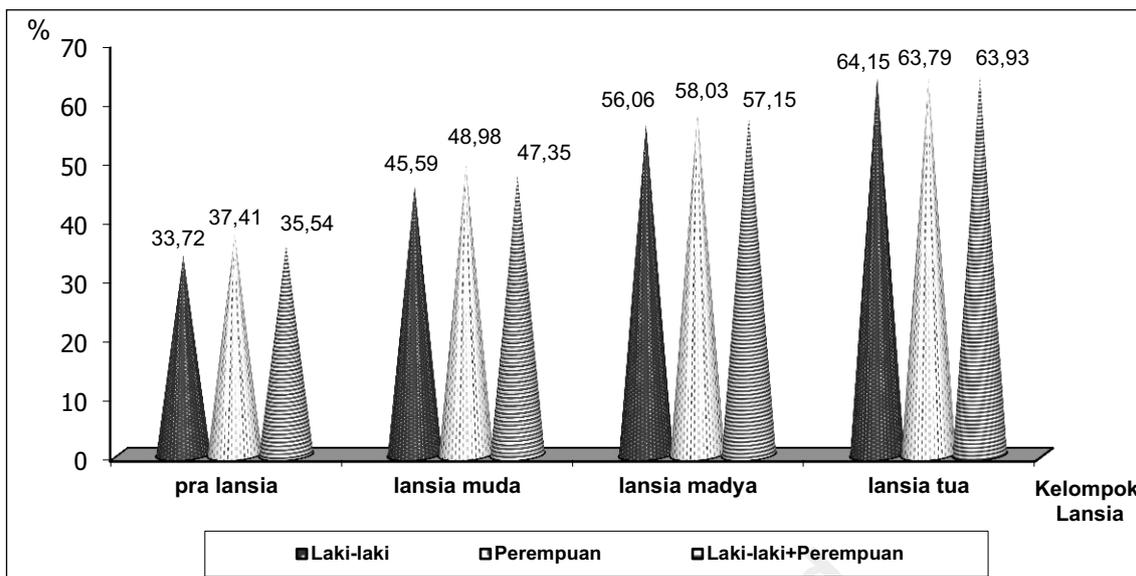
Gambaran makro mengenai kondisi kesehatan lansia yang dibahas pada bagian ini meliputi angka keluhan kesehatan, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, dan cara berobat lansia.

5.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Secara umum persentase penduduk pra lansia dan lansia yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.1. Semakin tinggi kelompok umur pra lansia dan lansia maka persentase yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar, yaitu kelompok pra lansia (45-59) tahun sebesar 35,54 persen, lansia muda (60-69 tahun) sebesar 47,35 persen, lansia madya (70-79 tahun) sebesar 57,15 persen dan lansia tua (80 ke atas) sebesar 63,93 persen. Berdasarkan data tersebut keluhan kesehatan lansia rata-rata di atas lima puluh persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, lansia perempuan lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan laki-laki pada semua kelompok umur, kecuali kelompok lansia tua. Pada kelompok pra lansia perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 33,72 persen dan 37,41 persen, pada kelompok lansia muda perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 45,59 persen dan 48,98 persen, pada kelompok lansia madya perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 56,06 persen dan 58,03 persen, dan kelompok umur 80 tahun

ke atas perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 64,15 persen dan 63,79 persen.



Sumber: BPS RI – Susenas 2012

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2012

Tiga provinsi dengan persentase tertinggi lansia yang mengalami keluhan kesehatan berturut-turut adalah Provinsi Gorontalo (66,99 persen), Aceh (65,53 persen), dan Nusa Tenggara Barat (62,66 persen). Sebaliknya, persentase terendah lansia yang mengalami keluhan kesehatan secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau (42,17 persen), Papua Barat (42,83 persen), dan Papua (43,06 persen) seperti yang disajikan pada Lampiran Tabel 5.1.

Masalah umum yang dialami lansia yang berhubungan dengan kesehatan fisik, yaitu kerentanan lansia terhadap berbagai penyakit karena berkurangnya daya tahan tubuh. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dan daya tahan tubuh lansia adalah pola hidup yang dijalannya sejak usia balita hingga sekarang. Pola hidup yang kurang sehat membawa akibat pada penurunan daya tahan tubuh sehingga akan timbul berbagai keluhan kesehatan terutama pada masa tua.

Berbagai penelitian mengenai penyakit lansia menemukan bahwa umumnya lansia menderita penyakit yang berhubungan dengan ketuaan dan merupakan penyakit kronis antara lain diabetes melitus, hipertensi, jantung

koroner, rematik, asma, lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, kanker dan kekurangan gizi.

Tabel 5.1 Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2012

Kelompok Lansia/ Jenis Kelamin	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45-59 Tahun (Pra Lansia)								
Laki-laki (L)	7,72	13,22	11,30	1,86	1,26	5,79	1,83	15,39
Perempuan (P)	6,98	12,07	10,50	1,80	1,16	8,42	1,70	19,77
L+P	7,36	12,65	10,90	1,83	1,21	7,09	1,77	17,55
60-69 Tahun (Lansia Muda)								
Laki-laki (L)	8,50	17,01	11,75	4,53	1,28	6,74	1,56	25,61
Perempuan (P)	8,23	15,02	11,17	3,77	1,38	10,06	1,30	30,41
L+P	8,36	15,97	11,45	4,13	1,33	8,47	1,42	28,11
70-79 Tahun (Lansia Madya)								
Laki-laki (L)	8,50	20,14	11,94	7,94	1,54	8,74	1,19	35,33
Perempuan (P)	9,22	17,66	11,53	4,85	1,68	11,08	1,00	39,72
L+P	8,90	18,76	11,71	6,22	1,62	10,04	1,09	37,77
80 Tahun Ke atas (Lansia Tua)								
Laki-laki (L)	10,24	23,18	12,18	11,26	2,39	9,56	0,86	42,83
Perempuan (P)	9,85	17,80	10,60	6,35	2,34	11,37	0,81	46,14
L+P	10,00	19,91	11,22	8,27	2,36	10,66	0,83	44,84

Sumber: BPS – Susenas 2012

Gambaran penyakit/keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk pra lansia dan lansia tersebut tersaji pada Tabel 5.1. Semakin tinggi kelompok umur lansia maka keluhan kesehatan yang dialaminya dengan berbagai jenis keluhan semakin meningkat kecuali keluhan sakit gigi yang menurun persentasenya. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami pra lansia dan lansia dari berbagai kelompok umur adalah keluhan lainnya, yaitu jenis keluhan kesehatan yang umumnya diderita lansia antara lain penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, darah rendah, dan diabetes. Jenis keluhan lainnya untuk kelompok umur 45-59 tahun (17,55 persen), kelompok umur 60-69 tahun (28,11 persen), kelompok umur 70-79

tahun (37,77 persen) dan kelompok umur 80 tahun ke atas (44,84 persen). Jenis keluhan yang juga banyak dialami pra lansia dan lansia adalah jenis keluhan yang biasanya banyak dialami oleh masyarakat umum yaitu batuk dan pilek.

Bila dilihat menurut gender, persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh lansia laki-laki dibandingkan lansia perempuan pada semua jenis keluhan. Jenis keluhan yang sering dialami lansia laki-laki adalah panas, batuk, pilek, dan asma. Sementara untuk lansia perempuan jenis keluhannya adalah sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya.

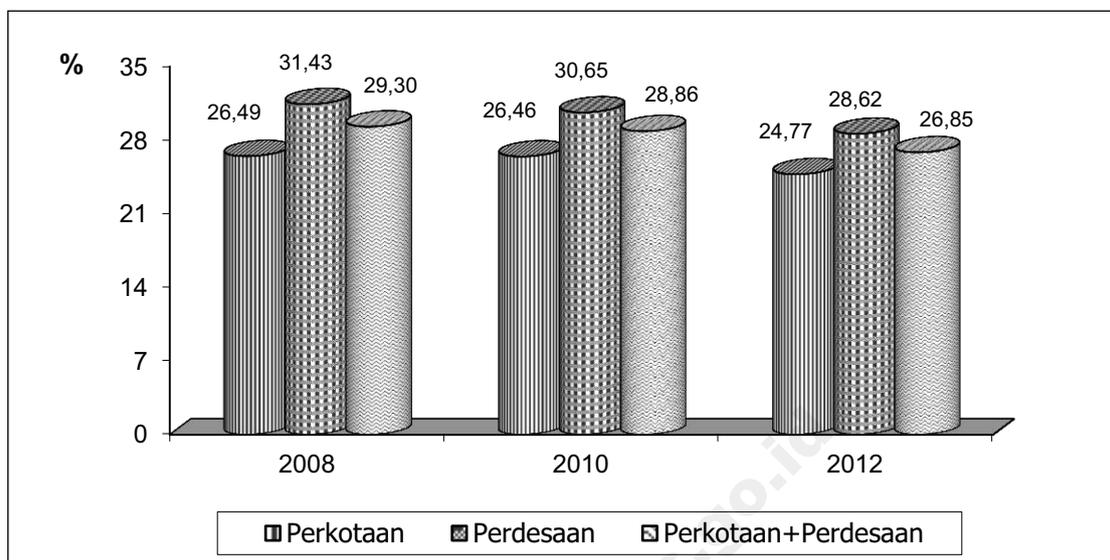
5.2 Angka Kesakitan

Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya yaitu tidak dapat melakukan kegiatan bekerja, sekolah dan kegiatan sehari-hari secara normal sebagaimana biasanya. Kondisi ini terjadi pula pada lansia. Daya tahan tubuh yang menurun sehingga rentan terhadap penyakit merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya lansia yang mengalami sakit.

Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Angka kesakitan lansia tahun 2012 sebesar 26,85 persen, artinya bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 27 orang diantaranya mengalami sakit. Angka kesakitan lansia perkotaan (24,77 persen) lebih rendah dibandingkan lansia perdesaan (28,62 persen). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan lansia di perkotaan cenderung lebih baik dibandingkan derajat kesehatan lansia di perdesaan. Bila dilihat perkembangannya, derajat kesehatan lansia mengalami peningkatan (Gambar 5.2). Angka kesakitan lansia pada tahun 2008 sebesar 29,30 persen, pada tahun 2010 turun sebesar 0,44

persen menjadi 28,86 persen, dan pada tahun 2012 turun lagi sebesar 2,01 persen menjadi 26,85 persen. Penurunan ini menunjukkan indikasi derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Pola yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS – Susenas 2008, 2010, dan 2012

Gambar 5.2 Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, 2008, 2010, dan 2012

Lampiran Tabel 5.2 memperlihatkan angka kesakitan per provinsi lansia berkisar antara 21,08 - 40,75 persen. Angka kesakitan lansia tertinggi terdapat di Provinsi Aceh (40,75 persen), Sulawesi Barat (40,13 persen) dan Sulawesi Tenggara (38,26 persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (21,09 persen), Kepulauan Riau (21,81 persen) dan Sumatera Selatan (22,08 persen).

5.3 Lama Sakit

Daya tahan tubuh dalam menangkal suatu jenis penyakit berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Waktu yang diperlukan seseorang dalam rangka proses penyembuhan sakitnya juga bervariasi. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya sangat lemah, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan tubuh dapat mencerminkan berapa lama seseorang menderita sakit.

Lamanya seseorang menderita sakit juga dapat menunjukkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2012

Lama Sakit (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 3	44,73	40,99	42,58
4 - 7	32,07	33,07	32,65
8 - 14	6,04	6,88	6,52
15 - 21	3,53	3,74	3,65
22 - 30	13,64	15,32	14,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS – Susenas 2012

Tabel 5.2 menyajikan persentase lansia yang menderita sakit menurut lamanya sakit. Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar lansia mengalami sakit tidak lebih dari seminggu. Persentase lansia yang menderita sakit selama 1-3 hari sebesar 42,58 persen dan yang menderita sakit selama 4-7 hari sebesar 32,65 persen. Sisanya adalah mereka yang menderita sakit lebih dari seminggu (8 sampai dengan 30 hari).

Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Persentase lansia perkotaan yang mengalami sakit selama 1-3 hari sebesar 44,73 persen dan yang sakit selama 4-7 hari sebesar 32,07 persen, sedangkan lansia perdesaan yang mengalami sakit selama 1-3 hari dan 4-7 hari masing-masing tercatat sebesar 40,99 persen dan 33,07 persen.

Pada Lampiran Tabel 5.3.3 dapat dilihat persentase lansia yang sakit menurut lama hari sakit dan provinsi. Pada kelompok lama sakit 1-3 hari, persentasenya berkisar antara 31,42-60,09 persen dan pada kelompok lama sakit 4-7 hari persentasenya berkisar antara 26,31-45,59 persen. Pada kelompok lama sakit lansia antara 1-3 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (60,09 persen), Kalimantan Tengah (53,55 persen) dan Banten (50,88 persen). Sebaliknya, persentase terendah

terdapat di Provinsi Maluku Utara (31,42 persen), Papua Barat (31,89 persen) dan Papua (32,02 persen). Pada kelompok lama sakit lansia antara 4-7 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Barat (45,59 persen), Papua (45,40 persen) dan Kepulauan Riau (41,33 persen). Sebaliknya, persentase terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi Bali (26,31 persen), DI Yogyakarta (26,99 persen) dan DKI Jakarta (27,72 persen).

5.4 Cara Berobat

Tindakan seseorang untuk mencari berbagai cara pengobatan dalam upaya penyembuhan mencerminkan orang tersebut peduli akan kesehatannya. Cara pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan berobat sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Tipe Daerah, Lamanya Sakit, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2012

Tipe Daerah/ Lama Sakit	Tradisional	Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
< 15 hari	8,47	63,07	1,37	27,09	100,00
15 - 21 hari	10,38	50,92	1,58	37,12	100,00
22-30 hari	15,46	43,73	1,53	39,29	100,00
Total	9,29	60,57	1,39	28,74	100,00
Perdesaan (D)					
< 15 hari	10,22	58,34	0,83	30,62	100,00
15 - 21 hari	12,59	53,92	0,78	32,71	100,00
22-30 hari	18,77	41,42	1,01	38,81	100,00
Total	11,36	56,10	0,85	31,70	100,00
K+D					
< 15 hari	9,47	60,36	1,06	29,11	100,00
15 - 21 hari	11,72	52,74	1,10	34,45	100,00
22-30 hari	17,47	42,32	1,21	39,00	100,00
Total	10,48	57,99	1,08	30,45	100,00

Sumber: BPS – Susenas 2012

Cara pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan berbagai jenis obat baik obat tradisional, modern, lainnya (selain obat modern dan tradisional) maupun obat campuran (lebih

dari satu jenis obat). Tabel 5.3 memberikan gambaran tentang lansia yang mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dideritanya menurut lamanya sakit dengan jenis obat yang digunakan. Secara umum tampak bahwa berapa pun lamanya sakit (baik yang kurang dua minggu atau lebih dari dua minggu), lansia lebih banyak memilih menggunakan obat modern, kemudian diikuti dengan jenis pengobatan campuran. Pola yang sama juga terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Pada tahun 2012, obat modern menjadi pilihan utama sebagian besar lansia (57,99 persen) dalam rangka mengobati sendiri sakitnya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.3. Selain obat modern, lansia juga menggunakan jenis obat campuran, tradisional dan lainnya dalam mengobati sendiri sakitnya, namun persentasenya relatif rendah. Mereka yang menggunakan obat campuran sebesar 30,45 persen, obat tradisional 10,48 persen, dan obat lainnya hanya 1,08 persen.

Bila dilihat menurut tipe daerah, penggunaan obat modern tidak saja diminati oleh lansia yang tinggal di daerah perkotaan (60,57 persen) melainkan juga banyak diminati oleh lansia yang tinggal di daerah perdesaan (56,10 persen).

Tabel 5.4 juga menyajikan persentase penduduk berumur 0-59 tahun yang berobat sendiri menurut jenis obat yang digunakan. Cara berobat sendiri dengan menggunakan obat modern tidak saja dilakukan oleh mayoritas lansia, namun juga dilakukan oleh lebih dari dua per tiga (71,26 persen) penduduk berumur 0-59 tahun yang sakit.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Berumur 0-59 Tahun dan Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2012

Jenis Obat yang Digunakan	Penduduk 0-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradisional	5,64	7,89	6,78	9,29	11,36	10,48
Modern	74,53	68,06	71,26	60,57	56,10	57,99
Lainnya	1,22	0,78	1,00	1,39	0,85	1,08
Campuran	18,61	23,27	20,97	28,74	31,70	30,45
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS – Susenas 2012

Bila dilihat menurut provinsi, persentase lansia yang melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern berkisar antara 30,70-70,49 persen (Lampiran Tabel 5.5.3). Tiga provinsi yang mempunyai persentase lansia yang menggunakan obat modern tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara (70,49 persen), Kalimantan Selatan (66,78 persen) dan Jawa Tengah (66,64 persen). Dan persentase terendah terdapat di Provinsi Bali (30,70 persen), Kepulauan Riau (39,52 persen) dan Maluku Utara (41,94 persen).

Selain dengan berobat sendiri, seseorang juga dapat mengobati sakitnya dengan cara berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan. Tabel 5.5 menampilkan proporsi penduduk semua umur dan lansia yang berobat jalan menurut jenis tempat berobat. Tiga tempat yang paling banyak didatangi oleh lansia untuk berobat jalan yaitu praktek tenaga kesehatan sebesar 33,23 persen, puskesmas/ puskesmas pembantu (30,07 persen), dan praktek dokter (29,94 persen).

Tabel 5.5 Proporsi Penduduk berumur 0-59 Tahun dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2012

Tempat Berobat	Penduduk 0-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah sakit pemerintah	6,95	4,26	5,59	12,42	6,28	8,96
Rumah sakit swasta	7,24	2,27	4,73	8,00	3,05	5,22
Praktek Dokter	40,39	18,96	29,57	38,21	23,52	29,94
Puskesmas/Pustu	31,36	36,83	34,12	28,99	30,91	30,07
Praktek tenaga kesehatan	19,60	41,59	30,70	21,57	42,27	33,23
Pengobatan tradisional	2,12	2,43	2,27	2,36	3,14	2,80
Lainnya	2,93	2,75	2,84	3,55	2,83	3,14

Sumber: BPS – Susenas 2012

Pola tersebut sedikit berbeda jika dilihat berdasarkan tipe daerah. Untuk daerah perdesaan, praktek tenaga kesehatan (42,27 persen) lebih banyak dikunjungi oleh lansia untuk berobat jalan dibandingkan ke puskesmas/pustu (30,91 persen) dan praktek dokter (23,52 persen). Di daerah perkotaan, proporsi lansia yang berobat jalan ke tempat praktek dokter (38,21 persen) lebih besar dibandingkan berobat ke puskesmas/pustu (28,99

persen) dan praktek tenaga kesehatan (21,57 persen). Tempat berobat di praktek dokter lebih banyak dikunjungi oleh lansia di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Hal tersebut karena fasilitas praktek dokter banyak terdapat di daerah perkotaan.

Bila kita bandingkan antara penduduk berumur 0-59 tahun dengan lansia, maka tempat berobat sebagai salah satu alternatif pilihan yang terjangkau baik dari sisi akses maupun biaya berobat bagi penduduk 0-59 tahun adalah puskesmas/pustu, sedangkan pilihan bagi lansia secara umum adalah berobat di praktek tenaga kesehatan. Proporsi penduduk berumur 0-59 tahun yang berobat jalan ke puskesmas/pustu sebesar 34,12 persen (di daerah perkotaan sebesar 31,36 persen dan perdesaan 36,83 persen). Sedangkan proporsi lansia yang berobat jalan ke puskesmas/pustu sebesar 30,07 persen (di daerah perkotaan sebesar 28,99 persen dan perdesaan 30,91 persen).

Proporsi tertinggi lansia yang sakit dan berobat ke puskesmas/pustu terdapat di Provinsi Papua Barat (68,29 persen), Nusa Tenggara Timur (67,46 persen) dan Papua Barat (64,28 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai proporsi terendah terdapat di Provinsi Bali (19,13 persen), Jawa Timur (21,68 persen) dan Jawa Tengah (23,87 persen).

KEGLATAN EKONOMI

<http://www.bps.go.id>



Kegiatan Ekonomi

Salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah ketenagakerjaan, karena membangun perekonomian yang baik harus dilandasi oleh produktivitas yang tinggi dalam bidang ketenagakerjaan. Sehingga perlu diupayakan pembangunan ketenagakerjaan yang luas dan menyeluruh agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah selalu diarahkan pada peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta. Dalam hal ini, pembangunan pada bidang ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi penduduk muda yang produktif namun diarahkan juga bagi mereka yang sudah memasuki masa lansia namun masih potensial yaitu mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

Lansia potensial disebut juga sebagai lansia yang produktif, yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak

tergantung pada pihak lain. Oleh karena itu pemberdayaan lansia potensial dalam berbagai aktivitas produktif merupakan salah satu upaya menunjang kemandirian lansia, tidak saja dari aspek ekonomi tetapi sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU Lansia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia.

Hak mendapatkan kesempatan kerja bagi lansia produktif juga tercantum pada UU tersebut Bab III Pasal 5 Ayat (2) c, juga dalam Bab VI Pasal 15 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memberikan peluang bagi pendayagunaan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya yang dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Gambaran umum mengenai kegiatan ekonomi lansia akan disajikan dalam bab ini. Beberapa indikator ketenagakerjaan yang dicakup antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja dan jumlah jam kerja.

6.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok ketenagakerjaan, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia sampai dengan 15 tahun. Penduduk usia kerja ini juga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur). Sedangkan yang bukan angkatan kerja yaitu penduduk sedang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

Angkatan kerja lansia merupakan lansia yang bekerja dan mencari pekerjaan (penganggur). Lansia ini sering disebut lansia potensial. Mereka tergolong sebagai lansia yang produktif dan mandiri. Lansia potensial banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan data hasil Sakernas Agustus 2012, lansia Indonesia masih banyak yang tergolong sebagai lansia produktif (Tabel 6.1). Dari keseluruhan lansia sekitar 45,72 persen diantaranya masih bekerja, sedangkan sisanya melakukan kegiatan mengurus rumah tangga (30,06 persen), lainnya (23,96 persen) dan menganggur (0,27 persen). Tingginya partisipasi lansia yang bekerja, antara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mengisi waktu luang, dan menjaga kesehatan badan.

Bila ditinjau menurut tipe daerah, proporsi lansia yang bekerja di daerah perdesaan (53,66 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (37,39 persen). Hal ini terjadi karena umumnya lansia yang berada di daerah perdesaan mempunyai tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan lansia di perkotaan, sehingga mereka harus tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu, umumnya pekerjaan di perdesaan bersifat informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus dibandingkan di perkotaan yang lebih banyak pekerjaan bersifat formal sehingga diperlukan beberapa persyaratan yang umumnya tidak dapat dipenuhi oleh lansia, seperti faktor umur dan pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Berumur 15-59 Tahun dan Penduduk Lansia Jenis Kegiatan Utama dan Tipe Daerah, 2012

Jenis Kegiatan Utama	Penduduk 15-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja	62,95	68,86	65,88	37,39	53,66	45,72
Menganggur	5,53	3,72	4,64	0,40	0,15	0,27
Mengurus Rumah Tangga	18,50	17,58	18,04	34,84	25,49	30,06
Lainnya	13,02	9,84	11,44	27,37	20,70	23,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2012

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Berumur 15-59 Tahun dan Penduduk Lansia Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2012

Jenis Kegiatan Utama	Penduduk 15-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja	81,49	50,08	65,88	62,39	31,10	45,72
Menganggur	5,35	3,91	4,64	0,41	0,15	0,27
Mengurus Rumah Tangga	0,82	35,47	18,04	8,86	48,64	30,06
Lainnya	12,33	10,54	11,44	28,34	20,11	23,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2012

Ditinjau menurut jenis kelamin, mayoritas lansia yang bekerja adalah laki-laki (62,39 persen), sedangkan perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga (48,64 persen) dibandingkan dengan yang bekerja (31,10 persen).

Pada Tabel 6.1 juga disajikan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas melakukan kegiatan bekerja (63,71 persen). Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja lebih besar proporsinya bila dibandingkan dengan lansia. Hal ini wajar mengingat penduduk 15 tahun ke atas termasuk penduduk yang tergolong usia produktif. Pada usia tersebut sebagian besar mereka bekerja karena lebih bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga.

Bila dilihat berdasarkan kegiatan utama mencari pekerjaan (menganggur), persentase lansia yang menganggur sangat rendah yaitu hanya

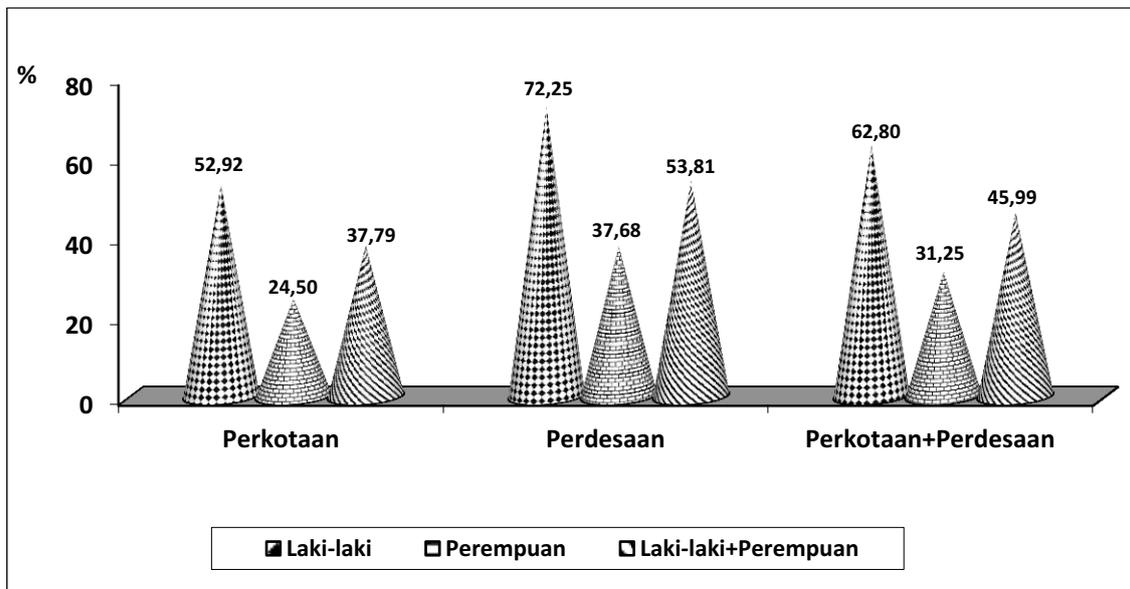
sekitar 0,27 persen. Rendahnya persentase lansia yang menganggur disebabkan karena banyak lansia yang masih bekerja sedangkan bagi lansia yang sudah lemah fisiknya hanya melakukan kegiatan lainnya yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Sementara itu bagi penduduk 15 tahun ke atas proporsinya lebih besar (4,17 persen) dibandingkan dengan lansia. Pada penduduk 15 tahun ke atas sulitnya menemukan lapangan pekerjaan yang mencari tenaga kerja baru. Kebanyakan dari lapangan kerja yang ada tidak membutuhkan tenaga kerja baru.

Di sisi lain, Tabel 6.1 juga memberikan gambaran mengenai kegiatan lansia yang bukan angkatan kerja yaitu mereka yang mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Dari kedua kegiatan tersebut, lansia yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sedikit lebih tinggi persentasenya (30,06 persen) dibandingkan lansia yang melakukan kegiatan lainnya (23,96 persen). Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini mencakup berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya mencakup antara lain kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang antara lain berupa kegiatan pengajian atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

Sementara itu, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan lainnya sebesar 12,79 persen, meliputi kegiatan olahraga, kursus, hiburan dan sejenisnya termasuk kegiatan bersekolah. Proporsi lansia yang melakukan kegiatan lainnya lebih besar daripada penduduk 15 tahun ke atas karena sebagian besar lansia termasuk kelompok penduduk non produktif. Secara fisik kondisi lansia juga sudah melemah sehingga banyak dari mereka yang melakukan kegiatan lainnya dibandingkan penduduk pada umumnya.

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok lansia, TPAK merupakan lansia yang terlibat kegiatan ekonomi, yaitu proporsi dari jumlah lansia yang bekerja dan lansia yang mencari kerja terhadap jumlah lansia itu sendiri.



Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Gambar 6.1 TPAK Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Pada tahun 2012 tampak bahwa lansia yang terlibat kegiatan ekonomi relatif cukup besar. Hal ini tercermin dari TPAK lansia sebesar 45,99 persen, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. Tingginya TPAK lansia terutama terlihat di daerah perdesaan yaitu sebesar 53,81 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 37,79 persen. Bila ditinjau menurut jenis kelamin, TPAK lansia laki-laki dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan (62,80 persen berbanding 31,25 persen). Hal ini terjadi karena umumnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang harus bekerja sedang perempuan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya mengurus rumah tangga.

TPAK lansia pada masing-masing provinsi bervariasi dengan persentase berkisar antara 35,19 - 55,14 persen, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran Tabel 6.1. Tiga provinsi yang memiliki TPAK lansia tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (55,14 persen), Bali (54,70 persen) dan Papua (54,40 persen). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki TPAK lansia terendah adalah DKI Jakarta (35,19 persen), Banten (36,46 persen) dan Kepulauan Riau (37,28 persen). Di daerah perkotaan, TPAK lansia pada masing-masing provinsi berkisar antara 26,05 - 49,04 persen, sedangkan di daerah perdesaan angka tersebut lebih tinggi dengan persentase berkisar antara 42,34 - 68,29 persen.

6.3 Lapangan Usaha

Lapangan usaha menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha dimana seseorang bekerja. Lapangan usaha mencakup banyak sektor, namun ulasan pada bab ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacturing*) dan jasa (*Service*). Kelompok lapangan usaha pertanian mencakup sektor pertanian, kelompok industri mencakup sektor pertambangan/penggalan, industri, listrik/gas/air dan konstruksi, sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi/komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. Ketiga kelompok sektor ini dikenal sebagai sektor A (*Agriculture*), M (*Manufacturing*) dan S (*Services*).

Tabel 6.2 menyajikan persentase pekerja penduduk 15 tahun ke atas dan pekerja lansia berdasarkan kelompok lapangan usaha. Dari tiga kelompok sektor yang ada, sebagian besar lansia bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 61,64 persen. Sementara itu, hanya sebagian kecil dari lansia yang bekerja di sektor jasa (28,01 persen) dan sektor industri (10,35 persen). Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar pekerja lansia untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan lansia yang pada umumnya masih rendah. Lapangan pekerjaan sektor pertanian terbuka untuk semua kalangan dan tanpa prasyarat pendidikan. Berbeda dengan penduduk 15 tahun ke atas yang umumnya bekerja pada sektor jasa (43,24 persen), kemudian sektor pertanian (35,09 persen) dan sisanya bekerja pada sektor industri sebesar 21,67 persen (Tabel 6.2).

Pada Tabel 6.2 juga ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha lansia di daerah perkotaan dengan perdesaan. Di daerah perkotaan, mayoritas lansia bekerja di kelompok sektor jasa (50,67 persen), sedangkan lansia yang bekerja di sektor pertanian dan industri masing-masing hanya sebesar 35,07 persen dan 14,26 persen. Sementara itu, di daerah perdesaan hampir 80 persen lansia bekerja pada sektor pertanian dan sisanya sebesar 12,94 persen bekerja pada sektor jasa dan 7,75 persen pada sektor industri. Terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha lansia

dan penduduk 15 tahun ke atas di daerah perkotaan. Lansia yang bekerja di sektor jasa sebesar 50,67 persen, kemudian sektor pertanian sebesar 35,07 persen dan sektor industri sebesar 14,26 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor jasa sebesar 61,82 persen, kemudian sektor industri (27,20 persen) dan sektor pertanian sebesar 10,98 persen.

Tabel 6.2 Persentase Penduduk 15-59 Tahun dan Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2012

Kelompok Lapangan Usaha	Penduduk 15-59 Tahun			Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	10,98	56,91	35,09	35,07	79,31	61,64
Industri (M)	27,20	16,66	21,67	14,26	7,75	10,35
Jasa (S)	61,82	26,43	43,24	50,67	12,94	28,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 6.2.3 menyajikan struktur pekerjaan lansia pada setiap provinsi. Pola struktur pekerjaan lansia pada setiap provinsi menunjukkan kondisi yang serupa dengan pola secara nasional dimana sektor pertanian mendominasi pekerja lansia (berkisar antara 51,95-81,85 persen), kecuali di Provinsi DKI Jakarta (2,04 persen), Banten (38,13 persen) dan Kepulauan Riau (38,56 persen), yang lansianya lebih banyak yang bekerja di sektor jasa dibandingkan dengan sektor pertanian

Pola struktur pekerjaan lansia di daerah perkotaan secara nasional sejalan dengan sektor yang diandalkan oleh lansia di daerah perkotaan pada masing-masing provinsi, yaitu terbesar pada sektor jasa, setelah itu disusul oleh sektor pertanian dan industri, kecuali di Provinsi Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lansia perkotaan di empat provinsi tersebut masih bergantung pada sektor pertanian sebagai andalan utama, seperti yang disajikan pada Lampiran Tabel 6.2.1. Sementara itu kondisi di daerah perdesaan seperti yang terlihat pada Lampiran Tabel 6.2.2 bahwa sektor

pertanian masih merupakan andalan utama lansia di daerah perdesaan pada semua provinsi, disusul oleh kelompok sektor jasa dan industri.

Tabel 6.3 Persentase Penduduk 15-59 Tahun dan Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha, 2012

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Penduduk 15-59 Tahun			Lansia		
	Pertanian	Industri	Jasa	Pertanian	Industri	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk/Blm Pernah Sekolah	10,26	2,12	1,80	25,62	18,08	13,29
Tdk/Blm Tamat SD	23,92	11,11	8,64	37,73	33,08	28,62
SD	39,70	29,60	20,59	29,15	30,89	28,78
SMP	15,66	23,41	17,76	4,36	8,06	11,36
SM	9,60	29,27	33,37	2,26	7,64	12,58
PT	0,85	4,49	17,83	0,87	2,25	5,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2012

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Namun ketika memasuki pasar kerja lansia kalah bersaing dengan penduduk yang lebih muda dan berpendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena persentase lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi (Bab 4). Oleh sebab itu, mayoritas lansia hanya dapat bekerja pada pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi seperti pada sektor pertanian. Keadaan ini tercermin pada Tabel 6.3. Lebih dari 90 persen lansia yang berpendidikan tamat SD ke bawah bekerja di sektor pertanian, dan hanya sebesar 3,13 persen lansia yang berpendidikan SMA ke atas yang bekerja di sektor ini. Gambaran ini secara umum mendukung dugaan sebelumnya yaitu bahwa bertumpuknya pekerja lansia di sektor pertanian berkaitan dengan akses untuk memperoleh pekerjaan di sektor ini yang jauh lebih mudah (bahkan tanpa syarat pendidikan) dibandingkan dengan sektor lainnya yang pada umumnya mensyaratkan kualifikasi/tingkat ketrampilan dan pendidikan tertentu.

Pada Tabel 6.3 juga menyajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelompok lapangan usaha. Secara umum, sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor jasa dan berpendidikan SMP ke atas 68,96 persen, sedangkan lansia yang bekerja di sektor jasa dan berpendidikan SMP ke bawah adalah 31,03 persen.

6.4 Status Pekerjaan

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan disebut sebagai status pekerjaan. Pada Tabel 6.4 disajikan persentase lansia yang bekerja menurut status pekerjaan. Secara umum dari keseluruhan jumlah lansia yang bekerja, sebagian besar lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh yaitu sebesar 43,08 persen, selanjutnya disusul oleh lansia yang berusaha sendiri sebesar 24,07 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,05 persen. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masing-masing masih dibawah 10 persen yaitu sebagai pekerja bebas (9,64 persen), dan sebagai buruh/karyawan (9,16 persen).

Banyaknya lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh terlihat jelas di daerah perdesaan. Dari total lansia di perdesaan yang bekerja, hampir separuhnya (48,82 persen) berusaha dibantu buruh. Pola ini juga berlaku pada lansia di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh sebesar 34,45 persen, diikuti yang berusaha sendiri sebesar 29,35 persen. Di daerah perkotaan lansia yang bekerja sebagai buruh/karyawan (17,06 persen) lebih besar dibandingkan di perdesaan (3,90 persen), sedangkan lansia yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar di daerah perdesaan (16,55 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (10,29 persen). Umumnya mereka adalah para lansia yang membantu pekerjaan suami/keluarganya di sektor pertanian atau pada usaha keluarga lainnya.

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Di bayar	Jumlah
-------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	26,03	41,21	18,83	9,55	4,38	100,00
Perempuan (P)	35,61	21,66	13,72	7,53	21,48	100,00
L+P	29,35	34,45	17,06	8,85	10,29	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	18,62	63,83	4,55	9,85	3,15	100,00
Perempuan (P)	23,80	23,66	2,81	10,70	39,03	100,00
L+P	20,55	48,82	3,90	10,17	16,55	100,00
K+D						
Laki-laki (L)	21,66	54,56	10,40	9,73	3,65	100,00
Perempuan (P)	28,30	22,90	6,97	9,49	32,34	100,00
L+P	24,07	43,08	9,16	9,64	14,05	100,00

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2012

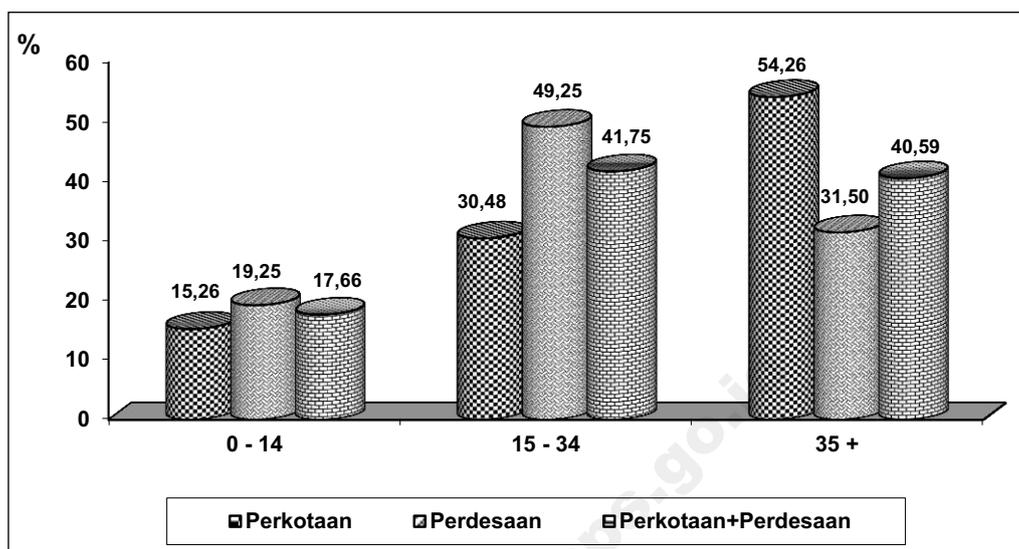
Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh lebih didominasi oleh lansia laki-laki yaitu sebesar 54,56 persen. Pola yang sama terjadi baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan. Di daerah perdesaan, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan status sebagai pekerja tidak dibayar sebesar 39,03 persen (Tabel 6.4).

Bila dilihat menurut provinsi, sebagian besar provinsi mempunyai struktur status pekerjaan yang sama dengan nasional, yaitu mayoritas lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh seperti yang ditunjukkan pada Lampiran Tabel 6.3.3. Namun terdapat empat provinsi yang mayoritas lansianya mempunyai status pekerjaan berusaha sendiri, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (37,92 persen), Kepulauan Bangka Belitung (34,95 persen), Sulawesi Utara (40,09 persen) dan Gorontalo (37,53 persen). Dan terdapat satu provinsi yang mayoritas lansianya status bekerja sebagai buruh/karyawan, yaitu DKI Jakarta (44,42 persen).

6.5 Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Seyogianya, jam kerja lansia hanya paruh waktu mengingat kondisi fisik yang mulai melemah. Namun pada kenyataannya masih banyak lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir.

Gambar 6.2 menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan lansia yang bekerja, hampir separuhnya (41,75 persen) bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir sebesar 40,59 persen dan mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu hanya sebesar 17,66 persen.



Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2012

Persentase lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh di daerah perkotaan (54,26 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (31,50 persen). Sebaliknya, persentase lansia yang bekerja dengan jam kerja selama 0-14 jam dan 15-34 jam per minggu di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini bersesuaian dengan sektor pertanian yang dikerjakan lansia di perdesaan.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, tingkat produktivitas pekerja lansia laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, hal ini tercermin dari lebih rendahnya proporsi lansia perempuan yang bekerja di atas jam kerja normal (lebih dari 35 jam). Tabel 6.5 menunjukkan bahwa, pekerja lansia laki-laki yang bekerja dengan jam kerja penuh mencapai 44,09 persen, sedangkan pekerja lansia perempuan persentasenya hanya sebesar 34,43 persen.

Tabel 6.5 Persentase Penduduk 15-59 Tahun dan Lansia yang Bekerja

menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2012

Jumlah Jam Kerja	Penduduk 15-59 Tahun			Lansia		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 14	6,77	13,19	9,19	14,36	23,45	17,66
15 - 34	24,84	32,45	27,71	41,55	42,11	41,75
35 +	68,39	54,36	63,10	44,09	34,43	40,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Sebaliknya, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam dan 15-34 jam lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam sebesar 23,45 persen dan jumlah jam kerja 15-34 jam sebesar 42,11 persen. Sementara itu, lansia laki-laki yang bekerja 0-14 jam sebesar 14,36 persen dan yang bekerja 15-34 jam sebesar 41,55 persen. Lansia yang bekerja dengan jam kerja antara 15-34 jam seminggu terdapat pada lebih dari separuh provinsi (21 provinsi) di Indonesia (Lampiran Tabel 6.4.3). Untuk penduduk 15 tahun ke atas, sebagian besar (63,10 persen) dari mereka bekerja dengan jam kerja penuh, laki-laki 68,39 persen dan perempuan 54,36 persen.

KEGIATAN SOSIAL

<http://www.sosial.id>



Kegiatan Sosial

Sebagai makhluk sosial, lansia dalam mengisi hari tuanya selalu berhubungan dengan orang lain. Seorang lansia yang masih aktif melakukan kegiatan sosial akan selalu berhubungan dengan orang lain sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap fisik/kesehatan dan mental/kebahagiaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aron Buchman, neurologis dari Rush University Medical Center, Chicago AS, diperoleh fakta bahwa makin sedikit kegiatan sosial yang dilakukan seorang lansia, makin cepat pula fungsi motorik mereka menurun.

Bagi seseorang yang telah mencapai usia lanjut akan mengalami penurunan kondisi fisik dan non fisik sehingga berpengaruh baik pada segi ekonomi, kesehatan maupun sosial. Untuk itu, dukungan sosial dari orang lain akan sangat diharapkan, antara lain untuk menambah ketenteraman

hidupnya. Pada usia lanjut seseorang dianjurkan tetap beraktivitas sesuai dengan kemampuannya agar ketahanan fisik dan mentalnya tetap terjaga. Untuk melihat gambaran kegiatan sosial budaya penduduk lansia, berikut ini akan diuraikan gambaran mengenai kegiatan sosial lansia hasil Susenas September 2012.

7.1 Akses Terhadap Media Massa

Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata-cara, mode, gaya hidup dan norma-norma (Dennis McQuil, 1987:1 dalam manfaat media massa). Media massa merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi. Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini berbagai informasi yang terjadi di seluruh dunia dapat diperoleh melalui berbagai media massa. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, media massa juga berfungsi sebagai sarana hiburan. Media massa sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat. Oleh karena itu, fungsi media massa dalam masyarakat sangatlah penting.

Media massa terdiri atas media cetak dan media elektronik. Surat kabar dan majalah termasuk ke dalam media cetak, sedangkan radio, televisi, komputer, telepon, faks, internet, satelit komunikasi dan sebagainya termasuk ke dalam media elektronika.

Media massa dapat diakses oleh semua penduduk termasuk kelompok lansia. Peluang lansia mengakses media massa seyogianya jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia produktif jika dilihat dari keluangan waktu yang dimiliki lansia. Untuk melihat seberapa jauh partisipasi lansia dalam mengakses media massa dan kegiatan seni, pada subbab ini akan diulas mengenai kegiatan membaca (surat kabar, majalah, buku), menonton televisi, mendengarkan radio dan kegiatan menonton pertunjukan kesenian yang dilakukan lansia.

7.1.1 Kegiatan Membaca Surat Kabar/Majalah/Buku

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan lansia dalam mengisi waktu luangnya adalah dengan membaca. Membaca bagi sebagian orang merupakan pekerjaan yang membosankan. Namun dibalik itu, banyak manfaat dari kegiatan membaca, diantaranya memperoleh informasi, memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan kecerdasan. Pemahaman terhadap kehidupan pun akan semakin tajam karena membaca dapat membuka cakrawala untuk berpikir kritis dan sistematis.

Jenis bacaan dapat berupa surat kabar, majalah/tabloid, maupun buku pengetahuan. Surat kabar/majalah umumnya berisi informasi terkini dengan berbagai topik bahasan. Buku sebagai media transformasi dan penyebaran ilmu. Semakin banyak membaca buku, semakin bertambah wawasan kita terhadap permasalahan di dunia. Karena itu buku disebut juga sebagai jendela dunia.

Tabel 7.1 Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Bacaan, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenis Bacaan		
	Surat Kabar/ Majalah/Tabloid	Buku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)			
Laki-laki (L)	22,11	4,42	17,30
Perempuan (P)	8,83	2,21	11,58
L+P	14,94	3,23	14,21
Perdesaan (D)			
Laki-laki (L)	5,34	2,23	13,65
Perempuan (P)	0,95	0,78	8,12
L+P	2,97	1,45	10,66
K+D			
Laki-laki (L)	13,61	3,31	15,45
Perempuan (P)	4,84	1,49	9,82
L+P	8,87	2,32	12,41

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa secara umum minat baca para lansia masih sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh kemampuan baca tulis (melek aksara) lansia Indonesia masih rendah. Dari sisi fisik, kemampuan mata lansia dalam membaca juga menurun. Dari seluruh populasi lansia,

hanya sebesar 8,87 persen lansia yang melakukan kegiatan membaca surat kabar/majalah/tabloid. Sementara itu, lansia yang membaca buku (buku cerita/buku pelajaran/buku pengetahuan) hanya 2,32 persen, dan yang membaca bacaan lainnya sebesar 12,41 persen. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa persentase penduduk lansia yang membaca di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan, terutama mereka yang membaca surat kabar/majalah/tabloid di daerah perkotaan lima kali lipat lebih tinggi dibanding persentase lansia di daerah perdesaan (14,94 persen berbanding 2,97 persen).

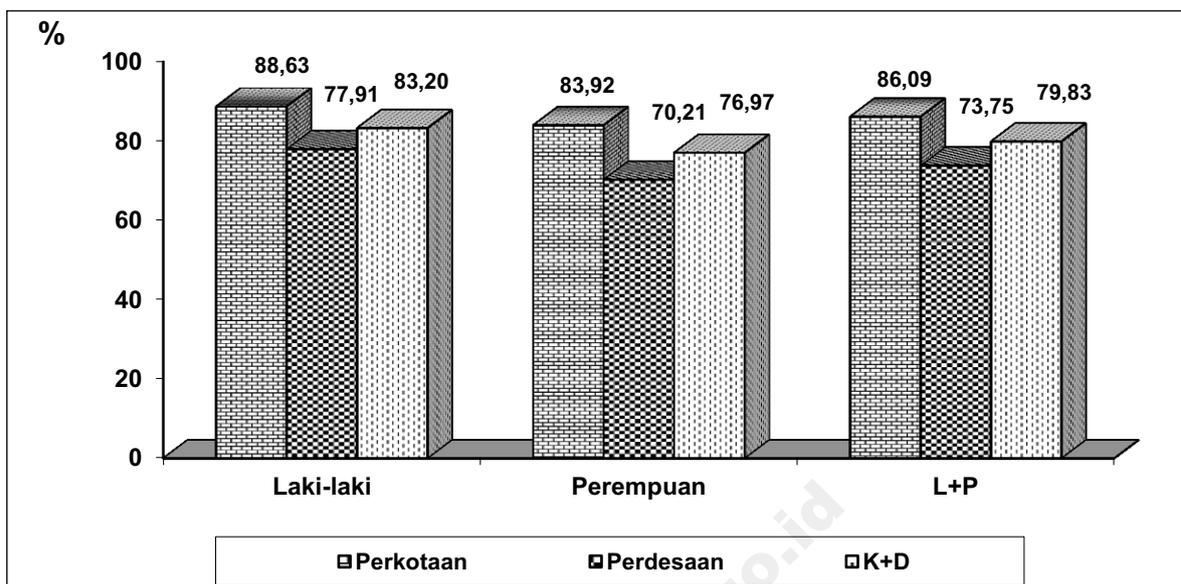
Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang membaca baik surat kabar/majalah/tabloid, buku, maupun bacaan lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan. Pola yang sama terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Lampiran Tabel 7.1.3 menunjukkan distribusi persentase lansia yang membaca surat kabar/majalah/buku menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Pada umumnya lansia lebih menyukai membaca surat kabar/majalah/tabloid daripada membaca buku, hal ini terjadi di seluruh provinsi. Persentase lansia yang membaca surat kabar/majalah/tabloid menurut provinsi, secara berturut-turut persentase tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta (33,55 persen), Sulawesi Utara (18,88 persen) dan Kepulauan Riau (17,90 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (3,74 persen), Kalimantan Barat (4,01 persen) dan Sulawesi Barat (4,41 persen).

7.1.2 Menonton Televisi

Media massa yang paling banyak diakses masyarakat termasuk lansia adalah televisi. Hal ini karena televisi mempunyai keunggulan dibandingkan media elektronik lainnya diantaranya menyajikan dalam bentuk *audio-visual*, yaitu gabungan dari media dengar dan gambar hidup. Penyampaian media ini bisa bersifat politis, informatif, hiburan, pendidikan atau bahkan gabungan dari keempat unsur tersebut. Pada Gambar 7.1. terlihat bahwa dari keseluruhan penduduk lansia, 79,83 persen diantaranya melakukan kegiatan menonton televisi. Persentase penduduk lansia laki-laki yang menonton

televise (83,20 persen) lebih besar dibandingkan dengan lansia perempuan (76,97 persen). Pola yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS - Susenas Modul 2012

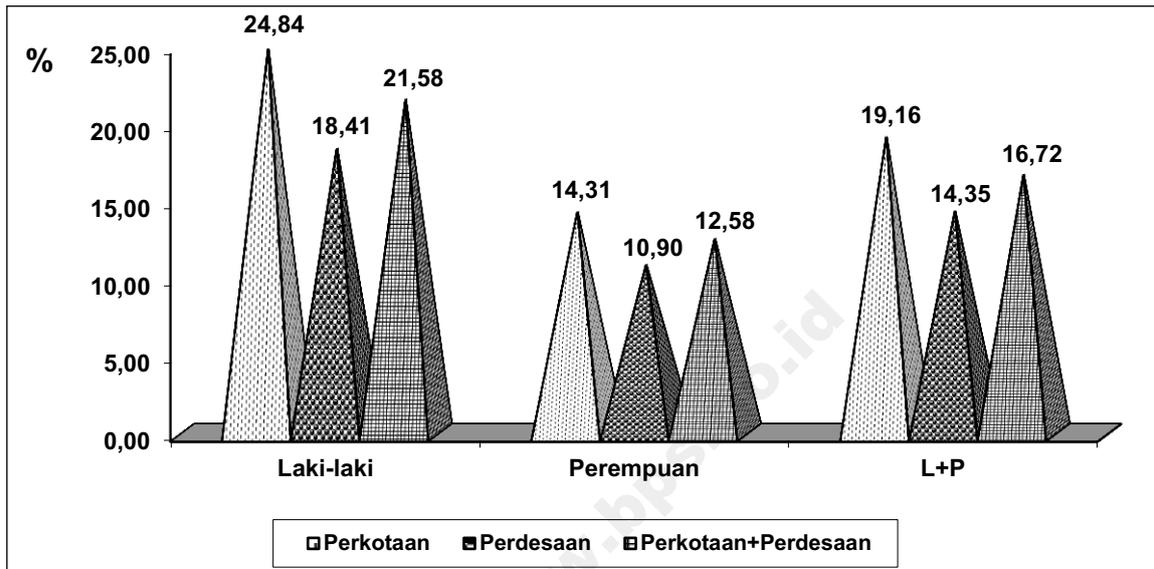
Gambar 7.1 Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012

Bila dilihat menurut tipe daerah, persentase lansia yang menonton televisi di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan lansia yang berada di perdesaan (86,09 persen berbanding 73,75 persen).

Lampiran Tabel 7.2 menunjukkan gambaran mengenai lansia yang menonton televisi menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa minat lansia untuk menonton televisi antar provinsi persentasenya sangat bervariasi, yaitu berkisar antara 35,88 - 94,40 persen. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi Kepulauan Riau (94,40 persen), DKI Jakarta (91,72 persen) dan Kalimantan Timur (90,23 persen). Sebaliknya, persentase terendah berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (35,88 persen), Papua (53,50 persen) dan Nusa Tenggara Barat (57,99 persen).

7.1.3 Mendengarkan Radio

Meskipun persentase pendengar radio jauh lebih rendah dibandingkan dengan penonton televisi, media radio hingga saat ini masih merupakan bagian penyebaran informasi dan hiburan. Kegiatan mendengarkan radio tidak saja dilakukan oleh kaum muda tetapi juga dilakukan oleh penduduk lansia. Gambar 7.2 memperlihatkan bahwa **hampir-seperlima (16,72 persen)** dari penduduk lansia mendengarkan radio selama seminggu terakhir.



Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Gambar 7.2 Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012

Perangkat atau alat untuk mendengarkan radio tidak saja berupa radio atau mini compo, tetapi dapat pula diakses melalui *handphone*, televisi dan internet. Hal yang menarik dari Gambar 7.2 ternyata pendengar radio mulai bergeser, kalau dulu radio lebih banyak diminati oleh masyarakat perdesaan, tetapi saat ini dengan perkembangan jaringan yang dapat diakses dengan berbagai perangkat elektronik, partisipasi masyarakat yang mendengarkan radio di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan perdesaan, kondisi ini terjadi pula pada kelompok penduduk lansia.

Bila dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk lansia yang mendengarkan radio di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan di daerah perdesaan, yaitu sebesar 19,16 persen dan 14,35 persen. Demikian

juga dengan lansia laki-laki atau perempuan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan lansia laki-laki atau perempuan di perdesaan.

Dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk lansia laki-laki yang mendengarkan radio (21,58 persen) lebih tinggi dibandingkan penduduk lansia perempuan (12,58 persen). Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (Gambar 7.2).

Lampiran Tabel 7.3 memberikan gambaran mengenai lansia yang mendengarkan radio menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Persentase lansia yang mendengarkan radio menurut provinsi cukup bervariasi yaitu angkanya berkisar antara 4,58 - 39,00 persen. Persentase tertinggi secara berturut-turut berada pada Provinsi DI Yogyakarta (39,00 persen), Gorontalo (35,49 persen) dan Kepulauan Riau (24,34 persen). Sebaliknya, persentase terendah secara berturut-turut berada pada Provinsi Maluku Utara (4,58 persen), Nusa Tenggara Barat (5,28 persen) dan Sulawesi Tengah (5,97 persen).

7.1.4 Menonton Pertunjukkan Kesenian

Keragaman adat, seni budaya dan tradisi telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional. Keragaman seni, budaya dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya untuk kemajuan bangsa. Sebagai salah satu wujud kontribusi dan apresiasi terhadap seni budaya adalah dengan menonton pertunjukkan kesenian/pameran seni rupa/kerajinan.

Penduduk lansia merupakan bagian masyarakat yang juga ikut dalam memberikan apresiasi terhadap seni budaya, hal ini tergambar dari keseluruhan penduduk lansia pada tahun 2012, sekitar 9,16 persen diantaranya pernah menonton pertunjukan kesenian/pameran seni rupa/kerajinan selama tiga bulan terakhir. Jika dilihat menurut jenis pertunjukan kesenian/pameran seni rupa/ kerajinan, lansia yang menonton pertunjukan seni musik/suara sebesar 6,39 persen, seni tari/joget 3,25 persen, seni drama/pedalangan 1,17 persen,

seni lukis 0,02 persen, seni kerajinan 0,04 persen, dan seni lainnya 0,49 persen (Tabel 7.2).

Tabel 7.2 Proporsi Penduduk Lansia yang Menonton Pertunjukan Kesenian Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Pertunjukan, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Seni tari/joget	Seni musik/ suara	Seni drama/ pedalangan	Seni lukis	Seni patung	Seni kerajinan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan (K)							
Laki-laki (L)	3,46	6,09	1,46	0,08	0,02	0,09	0,49
Perempuan (P)	2,01	4,20	0,41	0,00	0,00	0,08	0,43
L+P	2,68	5,07	0,89	0,04	0,01	0,09	0,45
Perdesaan (D)							
Laki-laki (L)	4,83	9,61	2,38	0,00	0,00	0,00	0,49
Perempuan (P)	2,95	6,03	0,64	0,01	0,00	0,00	0,56
L+P	3,81	7,68	1,44	0,00	0,00	0,00	0,53
K + D							
Laki-laki (L)	4,15	7,87	1,92	0,04	0,01	0,04	0,49
Perempuan (P)	2,49	5,13	0,53	0,00	0,00	0,04	0,49
L+P	3,25	6,39	1,17	0,02	0,00	0,04	0,49

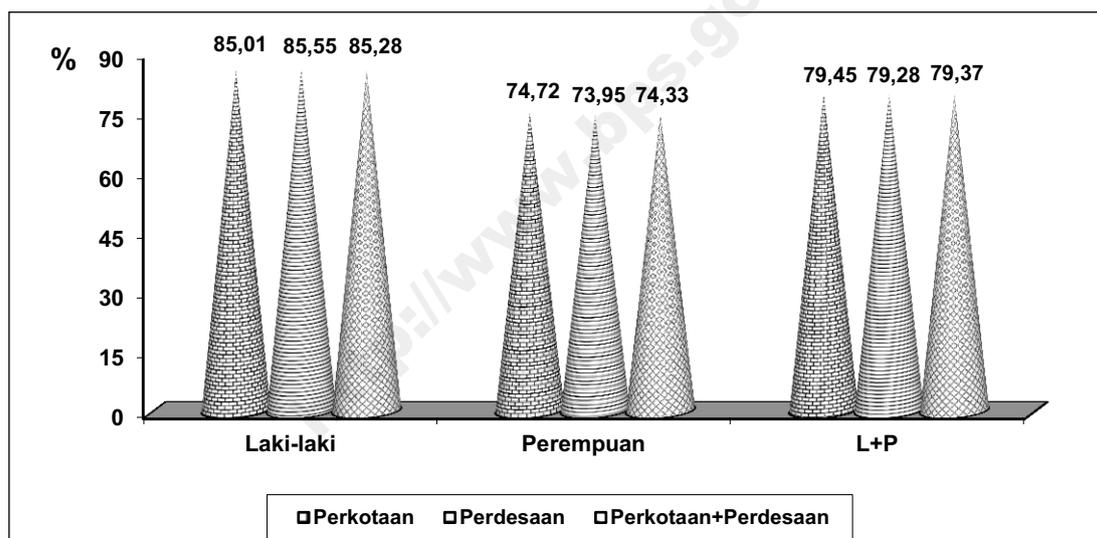
Sumber: BPS - Susenas Modul 2012

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang menonton pertunjukan kesenian lebih banyak daripada lansia perempuan untuk sebagian besar jenis pertunjukan kesenian, yaitu seni tari/joget, seni musik/suara, seni drama/pedalangan, seni lukis dan seni patung. Sedangkan jika dilihat menurut tipe daerah, persentase lansia perdesaan yang menonton pertunjukan kesenian pameran seni rupa/kerajinan lebih tinggi dibanding lansia perkotaan untuk pertunjukan seni tari/joget, seni musik/suara, seni drama/pedalangan dan seni lainnya. Sedangkan untuk pertunjukan seni lukis, seni patung dan seni kerajinan lebih banyak ditonton oleh lansia yang tinggal di daerah perkotaan daripada lansia yang tinggal di perdesaan.

7.2 Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Masyarakat

Salah satu cara menjaga keberlangsungan hubungan di dalam lingkungan tempat tinggal maupun dengan masyarakat yang tinggal di luar lingkungan tempat tinggal adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan. Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tidak hanya dilakukan oleh penduduk muda dan dewasa tetapi juga dilakukan oleh para lansia. Hal ini terbukti dari banyaknya lansia yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti yang disajikan pada Gambar 7.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa hampir delapan puluh persen (79,37 persen) penduduk lansia mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan selama tiga bulan terakhir. Persentase penduduk lansia yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di perkotaan (79,45 persen) sedikit lebih tinggi daripada penduduk lansia di perdesaan (79,28 persen). Bila dilihat menurut jenis kelamin, partisipasi penduduk lansia laki-laki yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan (85,28 persen berbanding 74,33 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

(Ganti Tabel) Gambar 7.3 Persentase Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012

Tabel 7.3 menampilkan persentase lansia yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenis kegiatan sosial kemasyarakatan. Jenis kegiatan sosial kemasyarakatan yang paling banyak diminati penduduk lansia adalah kegiatan keagamaan. Lebih dari separuh (65,03 persen) penduduk lansia mengikuti kegiatan keagamaan. Kemudian kegiatan kematian (58,75 persen), kegiatan sosial lainnya (31,75

persen) dan arisan (20,19 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan lebih tinggi dibanding lansia perempuan, kecuali untuk kegiatan arisan dan keterampilan. Untuk kegiatan arisan, lansia perempuan yang mengikuti sebesar 22,37 persen, sedangkan lansia laki-laki 17,64 persen. Sedangkan kegiatan keterampilan, persentase lansia perempuan yang mengikuti sebesar 0,55 persen, lansia laki-laki sebesar 0,29 persen.

Tabel 7.3 Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenis Kegiatan Sosial Kemasyarakatan						
	Keagamaan	Keterampilan	Olahraga	Kesenian	Arisan	Kematian	Sosial Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
Perkotaan (K)							
Laki-laki (L)	71,56	0,23	6,89	1,47	18,72	63,98	38,68
Perempuan (P)	62,82	0,73	3,67	0,74	26,43	50,77	24,19
L+P	66,84	0,50	5,15	1,08	22,88	56,85	30,86
Perdesaan (D)							
Laki-laki (L)	70,54	0,35	1,36	1,42	16,59	67,25	39,71
Perempuan (P)	57,07	0,37	0,68	0,57	18,42	54,96	26,59
L+P	63,26	0,36	0,99	0,96	17,58	60,61	32,62
K+D							
Laki-laki (L)	71,04	0,29	4,08	1,44	17,64	65,64	39,20
Perempuan (P)	59,90	0,55	2,15	0,66	22,37	52,89	25,41
L+P	65,03	0,43	3,04	1,02	20,19	58,75	31,75

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

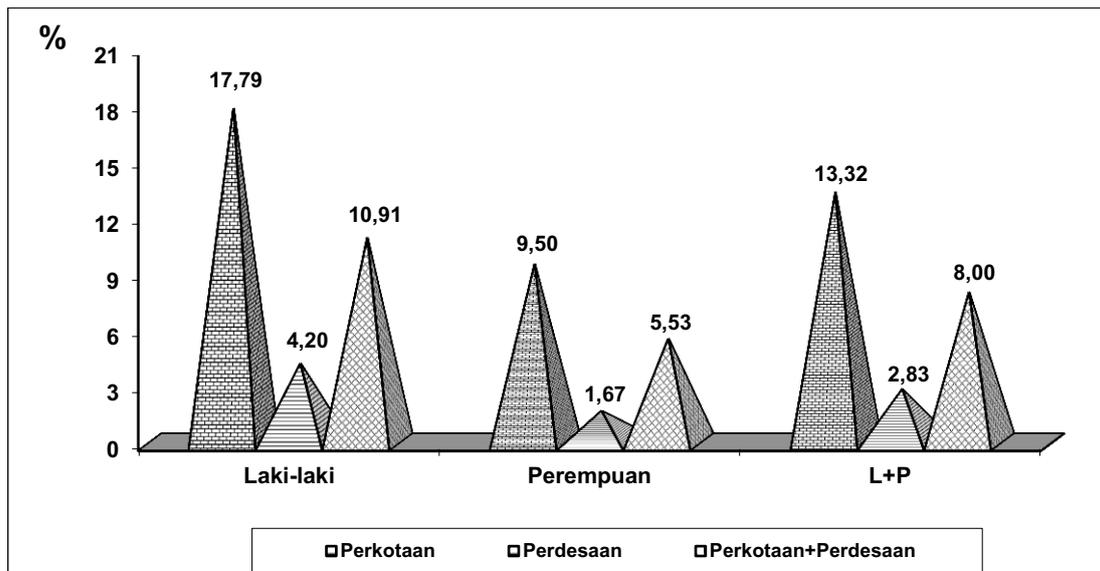
Lampiran Tabel 7.4.3 menunjukkan proporsi lansia yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan menurut provinsi dan jenis kegiatan sosial kemasyarakatan. Hampir semua provinsi mempunyai pola urutan yang sama dengan nasional dalam memilih jenis kegiatan sosial kemasyarakatan, dimana jenis kegiatan keagamaan paling banyak diminati. Proporsi lansia yang mengikuti kegiatan keagamaan pada masing-masing provinsi bervariasi yaitu

antara 40,45 - 85,86 persen. Proporsi tertinggi lansia yang mengikuti kegiatan keagamaan secara berturut-turut berada pada Provinsi Sulawesi Utara (85,86 persen), Jawa Tengah (84,78 persen) dan Riau (78,58 persen). Sebaliknya, proporsi terendah terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat (40,45 persen), Sulawesi Tenggara (42,56 persen) dan Gorontalo (45,05 persen).

7.3 Partisipasi Lansia dalam Olahraga

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak (yang berarti mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan gerak (yang berarti meningkatkan kualitas hidup). Seperti halnya makan, olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus, artinya olahraga sebagai alat untuk mempertahankan hidup, memelihara dan membina kesehatan, tidak dapat ditinggalkan. Olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan fungsional jasmani, rohani dan sosial. Struktur anatomis-anthropometris dan fungsi fisiologisnya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektualnya maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya nyata lebih unggul khususnya pada generasi muda yang aktif mengikuti kegiatan olahraga dari pada yang tidak aktif mengikutinya (Renstrom & Roux 1988, dalam A.S.Watson: *Children in Sport* dalam Bloomfield, J., Fricker, P.A. and Fitch, K.D., 1992). Hal ini juga berlaku bagi para lansia yang aktif dalam olahraga. Untuk tetap menjaga stamina fisiknya, lansia juga perlu olahraga.

Pada Gambar 7.4 terlihat bahwa sebesar 8,00 persen penduduk lansia melakukan kegiatan olahraga selama seminggu terakhir. Persentase penduduk lansia yang melakukan kegiatan olahraga di perkotaan (13,32 persen) jauh lebih tinggi daripada penduduk lansia di perdesaan (2,83 persen). Bila dilihat menurut jenis kelamin, partisipasi penduduk lansia laki-laki yang melakukan kegiatan olahraga lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan (10,91 persen berbanding 5,53 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Gambar 7.4 Persentase Penduduk Lansia yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012

Tabel 7.4 menampilkan persentase lansia yang melakukan kegiatan olahraga menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenis olahraga. Jenis olahraga yang paling banyak diminati penduduk lansia adalah jogging/gerak jalan. Lebih dari dua per tiga (67,63 persen) penduduk lansia melakukan olahraga jogging/gerak jalan. Kemudian jenis olahraga lainnya (16,78 persen), senam (14,29 persen) dan badminton (1,30 persen). Pola yang sama juga terjadi untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang melakukan kegiatan olahraga lebih tinggi dibanding lansia perempuan, kecuali untuk jenis olahraga senam. Untuk olahraga jogging/gerak jalan, lansia laki-laki yang melakukan sebesar 69,90 persen, sedangkan lansia perempuan 63,81 persen. Olahraga badminton, lansia laki-laki (2,08 persen), lansia perempuan (0,00 persen), dan olahraga lainnya lansia laki-laki (17,26 persen), lansia perempuan (15,97 persen). Sedangkan untuk olahraga senam lansia perempuan yang melakukan sebesar 20,22 persen, lansia laki-laki 10,76 persen.

Tabel 7.4 Proporsi Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Olahraga, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenis Olahraga				Jumlah
	Senam	Jogging/ gerak jalan	Badminton	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	10,58	70,34	2,37	16,72	100,00
Perempuan (P)	21,61	62,14	0,00	16,25	100,00
L+P	14,83	67,18	1,45	16,54	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	11,50	68,11	0,88	19,51	100,00
Perempuan (P)	12,51	73,05	0,00	14,44	100,00
L+P	11,82	69,68	0,60	17,90	100,00
K+D					
Laki-laki (L)	10,76	69,90	2,08	17,26	100,00
Perempuan (P)	20,22	63,81	0,00	15,97	100,00
L+P	14,29	67,63	1,30	16,78	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Selain jenis olahraga, frekuensi melakukan olahraga juga penting untuk memperoleh kebugaran tubuh. Frekuensi yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan adalah minimal 3 kali dalam seminggu dan dalam sepekan harus ada 1 hari untuk istirahat. Pada Tabel 7.5 disajikan proporsi penduduk lansia yang melakukan olahraga menurut frekuensi jumlah hari melakukan olahraga dalam seminggu. Frekuensi olahraga yang paling banyak dilakukan oleh penduduk lansia adalah lebih dari tiga hari dalam seminggu. Hampir separuh (43,08 persen) penduduk lansia melakukan olahraga lebih dari tiga hari dalam seminggu. Kemudian frekuensi satu hari dalam seminggu (24,11 persen), dua hari dalam seminggu (17,42 persen) dan tiga hari dalam seminggu (15,40 persen). Pola yang sama terjadi baik untuk lansia laki-laki maupun perempuan, demikian juga dengan daerah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 7.5 Persentase Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Frekuensi Olahraga dalam Seminggu, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Frekuensi Olahraga dalam Seminggu			
	1 hari	2 hari	3 hari	> 3 hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)				
Laki-laki (L)	23,35	16,87	16,63	43,15
Perempuan (P)	28,91	19,57	14,27	37,25
L+P	25,50	17,91	15,72	40,88
Perdesaan (D)				
Laki-laki (L)	18,24	17,21	12,99	51,55
Perempuan (P)	16,72	10,83	15,88	56,57
L+P	17,76	15,18	13,91	53,15
K+D				
Laki-laki (L)	22,36	16,93	15,92	44,79
Perempuan (P)	27,05	18,23	14,52	40,21
L+P	24,11	17,42	15,40	43,08

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Lampiran Tabel 7.5.3 menunjukkan proporsi lansia yang melakukan kegiatan olahraga menurut provinsi dan frekuensi olahraga. Sebagian besar provinsi penduduk lansia melakukan kegiatan olahraga dengan frekuensi lebih dari tiga hari. Proporsi lansia yang melakukan olahraga dengan frekuensi lebih dari tiga hari pada masing-masing provinsi bervariasi yaitu antara 0,00 - 75,79 persen. Proporsi tertinggi lansia yang melakukan olahraga dengan frekuensi lebih dari tiga hari secara berturut-turut berada pada Nusa Tenggara Barat (75,79 persen), Papua Barat (67,22 persen) dan Maluku (66,88 persen). Sebaliknya, proporsi terendah terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat (0,00 persen), Kepulauan Riau (8,87 persen) dan Papua (10,34 persen).

KONDISI SOSIAL

<http://www.123indonesia.com>



Kondisi Sosial

Secara biologis, penduduk lanjut usia adalah penduduk yang kondisi fisiknya mengalami proses penuaan secara terus menerus, sehingga daya tahan tubuhnya semakin rentan terhadap serangan penyakit. Hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada bagian wajah, tangan dan kulit, perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf, perubahan panca indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan dan kecepatan. Perubahan tersebut umumnya mengarah pada kemunduran kemampuan fisik dan psikis yang pada akhirnya berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka.

Dari aspek ekonomi, permasalahan yang mungkin muncul adalah menurunnya tingkat produktivitas yang pada akhirnya tidak mampu lagi melakukan kegiatan mencari nafkah, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Dari aspek sosial, karena faktor usia yang menyebabkan kondisi yang semakin lama semakin melemah dan cenderung

tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga persoalan lansia membutuhkan perhatian yang lebih dari masyarakat dan pemerintah.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi sosial penduduk lanjut usia antara lain, adalah telantarnya lansia, disabilitas lansia, lansia yang menjadi korban kejahatan dan kelayakan tempat tinggal bagi lansia.

8.1 Ketelantaran

Sesuai dengan UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, program pemerintah dalam penanganan terhadap lansia lebih menekankan pemberian santunan kepada mereka yang telantar. Namun, saat ini kebijakan tersebut mempunyai sasaran yang lebih luas dengan memberikan dorongan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Hal ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga keluarga dan masyarakat agar dapat mendukung terwujudnya lansia yang berguna, berkualitas dan mandiri. Pemberdayaan dimaksudkan dalam upaya peningkatan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

8.1.1 Distribusi Lansia Telantar

Ketelantaran lansia dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu lansia telantar, hampir telantar dan tidak telantar. Lansia telantar yaitu lansia yang tidak/belum mampu memenuhi kebutuhan minimalnya untuk dapat hidup secara layak, lansia hampir telantar yaitu lansia yang berpotensi untuk menjadi lansia telantar. Untuk menentukan ketelantaran lansia digunakan pendekatan menggunakan beberapa variabel penentu kriteria ketelantaran lansia sebagai berikut:

1. Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati < 4 kali, hewani \leq 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu
4. Memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur

6. Bila sakit tidak diobati
7. Bekerja > 35 jam seminggu.

Lansia dikategorikan lansia telantar, jika memenuhi lebih dari 2 kriteria dari tujuh kriteria tersebut. Jika memenuhi 2 kriteria dikategorikan sebagai lansia hampir telantar, dan jika hanya memenuhi 1 kriteria atau kurang dikategorikan sebagai lansia tidak telantar.

Tabel 8.1 Perkiraan Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kategori Ketelantaran, 2012

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Telantar		Hampir telantar		Tidak Telantar		Total	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan (K)								
Laki-laki (L)	377,9	8,99	931,3	22,16	2 892,7	68,84	4 201,9	100,00
Perempuan (P)	450,0	9,12	1 108,4	22,48	3 373,0	68,40	4 931,4	100,00
L+P	827,9	9,06	2 039,7	22,33	6 265,7	68,60	9 133,3	100,00
Perdesaan (D)								
Laki-laki (L)	755,5	17,51	1 221,8	28,31	2 338,7	54,19	4 316,0	100,00
Perempuan (P)	856,7	16,88	1 478,9	29,14	2 740,1	53,98	5 075,8	100,00
L+P	1 612,3	17,17	2 700,7	28,76	5 078,8	54,08	9 391,7	100,00
K+D								
Laki-laki (L)	1 133,4	13,31	2 153,1	25,28	5 231,4	61,42	8 517,9	100,00
Perempuan (P)	1 306,7	13,06	2 587,4	25,86	6 113,1	61,09	10 007,2	100,00
L+P	2 440,2	13,17	4 740,4	25,59	11 344,4	61,24	18 525,0	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Pada Tabel 8.1 disajikan jumlah dan persentase lansia menurut kategori ketelantaran. Tabel tersebut menggambarkan bahwa dari keseluruhan lansia (18,53 juta jiwa) di Indonesia tahun 2012, sekitar 13,17 persen diantaranya termasuk kategori lansia telantar, 25,59 persen termasuk kategori lansia hampir telantar, dan sisanya 61,24 persen termasuk kategori lansia tidak telantar. Melihat masih banyaknya lansia yang tergolong telantar dan hampir telantar diperlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak, dalam hal ini tidak saja pemerintah melainkan juga dari anggota keluarga dan seluruh elemen masyarakat.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki telantar (13,31 persen) sedikit lebih tinggi dibanding lansia perempuan telantar (13,06 persen). Namun dilihat dari daerah tempat tinggal, pola yang sama terjadi di daerah perdesaan, yaitu lansia laki-laki telantar (17,51 persen) lebih tinggi dibanding lansia perempuan telantar (16,88 persen), sementara di daerah perkotaan lansia perempuan telantar (9,12 persen) lebih tinggi dibanding dengan lansia laki-laki telantar (8,99 persen). Kondisi yang sama juga terjadi pada lansia yang termasuk kategori tidak telantar, sedangkan untuk kategori hampir telantar, persentase lansia perempuan (25,86 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki hampir telantar (25,28 persen).

Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase lansia telantar di daerah perdesaan (17,17 persen) hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (9,06 persen). Pola yang serupa juga terjadi pada lansia hampir telantar. Persentase lansia hampir telantar di daerah perdesaan sebesar 28,76 persen dan di daerah perkotaan 22,33 persen. Potret ini mengindikasikan bahwa lansia di daerah perkotaan kondisinya lebih baik bila dibandingkan dengan lansia di daerah perdesaan.

Bila dilihat menurut provinsi (Lampiran Tabel 8.1.3), persentase lansia telantar pada masing-masing provinsi bervariasi antara 7,40 - 39,85 persen. Provinsi Papua mempunyai persentase lansia telantar paling tinggi yaitu sebesar 39,85 persen. Kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan persentase sebesar 36,55 persen dan 32,65 persen. Provinsi dengan persentase lansia telantar di bawah 10 persen terdapat di Provinsi Bali (7,40 persen), Bangka Belitung (8,14 persen), Kalimantan Timur (8,89 persen) dan Jawa Tengah (9,57 persen). Sementara itu persentase lansia hampir telantar antar provinsi memiliki variasi antara 19,99 - 34,06 persen. Persentase lansia hampir telantar tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat (34,06 persen), Sulawesi Barat (33,93 persen) dan Maluku Utara (32,80 persen). Sedangkan persentase lansia hampir telantar terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara (19,99 persen), Gorontalo (20,46 persen) dan Sulawesi Tengah (20,70 persen).

8.1.2 Status Ekonomi Rumah Tangga dengan Ketelantaran Lansia

Status ekonomi rumah tangga lansia berpengaruh terhadap kriteria ketelantaran lansia. Tabel 8.2. memperlihatkan pola hubungan antara status ekonomi rumah tangga dengan ketelantaran lansia.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kategori Ketelantaran, 2012

Status Ekonomi Rumah Tangga	Tidak Telantar	Hampir Telantar	Telantar
(1)	(2)	(3)	(4)
40 persen Rendah	35,54	51,34	61,91
40 persen Menengah	40,01	37,05	31,73
20 persen Tinggi	24,45	11,62	6,36
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, jumlah lansia yang telantar maupun hampir telantar semakin menurun. Proporsi lansia telantar yang berada pada rumah tangga dengan kelompok 40 persen pengeluaran rendah mencapai 61,91 persen dan kelompok 40 persen pengeluaran menengah sebesar 31,73 persen, sedangkan proporsi lansia telantar yang berada pada rumah tangga pengeluaran tinggi (kelompok 20 persen tinggi) hanya sebesar 6,36 persen. Proporsi lansia hampir telantar yang berada pada rumah tangga pengeluaran rendah (kelompok 40 persen rendah) sebesar 51,34 persen, dan yang berada pada rumah tangga pengeluaran menengah (kelompok 40 persen menengah) sebesar 37,05 persen dan proporsi lansia hampir telantar yang berada pada rumah tangga pengeluaran tinggi (kelompok 20 persen) hanya 11,62 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga berpendapatan rendah lebih berpotensi lansia telantar. Hal ini sekaligus membuktikan secara empiris bahwa status ekonomi rumah tangga merupakan salah satu variabel yang valid untuk digunakan sebagai salah satu ciri dalam mengidentifikasi rumah tangga lansia telantar.

8.2 Lansia Disabilitas

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) di sebutkan bahwa penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Disadari sepenuhnya bahwa beban permasalahan penyandang disabilitas tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab sosial segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu masalah yang berhubungan dengan disabilitas merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif, terutama bagi lansia yang mengalami disabilitas.

8.2.1 Distribusi Lansia dengan Disabilitas

Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa perkiraan jumlah lansia dengan disabilitas ada sebanyak 2,75 juta jiwa atau 14,86 persen dari seluruh penduduk lansia (Tabel 8.3). Perbandingan menurut gender memperlihatkan bahwa jumlah lansia perempuan dengan disabilitas lebih banyak dibandingkan jumlah lansia laki-laki, dimana jumlah lansia perempuan dengan disabilitas sebesar 1,57 juta (15,70 persen) dan laki-laki sebesar 1,18 juta (13,88 persen). Namun bila dilihat berdasarkan tipe daerah, lansia dengan disabilitas di daerah perdesaan baik jumlah maupun persentase lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah dan persentase lansia dengan disabilitas di daerah perdesaan sebesar 1,49 juta (15,88 persen) dan lansia dengan disabilitas di daerah perkotaan sebesar 1,26 juta (13,82 persen).

Pada Lampiran Tabel 8.2 dapat dilihat bahwa persentase jumlah lansia dengan disabilitas pada masing-masing provinsi bervariasi dengan berkisar antara 9,45 - 26,40 persen. Persentase lansia dengan disabilitas tertinggi terdapat pada Provinsi Gorontalo (26,40 persen), Bengkulu (25,52 persen) dan Sulawesi Tenggara (25,33 persen). Sedangkan untuk provinsi dengan

persentase lansia dengan disabilitas terendah adalah Provinsi Papua (9,45 persen), Maluku (9,57 persen) dan DKI Jakarta (10,11 persen).

Tabel 8.3 Perkiraan Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Lansia Dengan Disabilitas menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2012

Jenis Kelamin	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki (L)			
Jumlah Penyandang Disabilitas (000)	534,2	647,9	1.182,0
Jumlah Penduduk Lansia (000)	4.201,9	4.316,0	8.517,9
% Penyandang Disabilitas Terhadap Jumlah Penduduk	12,71	15,01	13,88
Perempuan (P)			
Jumlah Penyandang Disabilitas (000)	728,2	843,3	1.571,5
Jumlah Penduduk Lansia (000)	4.931,4	5.075,8	10.007,2
% Penyandang Disabilitas Terhadap Jumlah Penduduk	14,77	16,61	15,70
L + P			
Jumlah Penyandang Disabilitas (000)	1.262,4	1.491,1	2.753,5
Jumlah Penduduk Lansia (000)	9.133,3	9.391,7	18.525,0
% Penyandang Disabilitas Terhadap Jumlah Penduduk	13,82	15,88	14,86

Sumber : BPS RI - Susenas Modul 2012

8.2.2. Jenis dan Penyebab Kedisabilitas

Berdasarkan definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005, jenis dan penyebab disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Kecacatan akibat kecelakaan, meliputi korban peperangan, kerusakan, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya; 2) Cacat Sejak Lahir atau ketika dalam kandungan, termasuk golongan ini adalah mereka yang menderita cacat akibat penyakit keturunan; 3) Cacat yang disebabkan oleh penyakit, diantaranya adalah penyakit polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, Diabetes dll.

Hasil Susenas 2012 yang ditunjukkan Tabel 8.4 memperlihatkan Proporsi Lansia dengan Disabilitas menurut Jenis Disabilitas dan Tipe Daerah. Secara umum jenis disabilitas yang memiliki proporsi cukup besar yang dialami oleh lansia adalah disabilitas melihat (9,37 persen), berjalan atau naik tangga (6,18 persen), dan mendengar (6,07 persen). Sedangkan jenis disabilitas yang

memiliki proporsi relatif rendah adalah disabilitas berkomunikasi (2,05 persen), mengingat atau berkonsentrasi (2,23 persen) dan mengurus diri sendiri (3,74 persen). Pola yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan maupun perdesaan untuk proporsi jenis disabilitas yang paling besar, sedangkan proporsi jenis disabilitas yang rendah terdapat perbedaan untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perdesaan urutan proporsi dari yang terendah adalah disabilitas mengingat atau berkonsentrasi (2,30 persen), selanjutnya berkomunikasi (2,32 persen) dan mengurus diri sendiri (3,76 persen). Di daerah perkotaan adalah disabilitas berkomunikasi (1,77 persen), mengingat atau berkonsentrasi (2,17 persen) dan mengurus diri sendiri (3,71 persen).

Tabel 8.4 Proporsi Lansia dengan Disabilitas menurut Jenis Disabilitas dan Tipe Daerah, 2012

Gangguan fungsi/keterbatasan/ disabilitas	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)
Melihat	8,57	10,14	9,37
Mendengar	5,48	6,65	6,07
Berkomunikasi	1,77	2,32	2,05
Mengingat atau berkonsentrasi	2,17	2,30	2,23
Berjalan atau naik tangga	5,66	6,69	6,18
Mengurus diri sendiri	3,71	3,76	3,74

Sumber : BPS RI - Susenas Modul 2012

Bila dilihat menurut provinsi (Lampiran Tabel 8.3.3), lansia dengan jenis disabilitas melihat memiliki proporsi yang paling besar dibandingkan dengan jenis disabilitas yang lain untuk seluruh provinsi. Jenis disabilitas melihat pada masing-masing provinsi bervariasi antara 5,93 - 19,16 persen. Provinsi Gorontalo mempunyai persentase lansia dengan jenis disabilitas paling tinggi yaitu sebesar 19,16 persen. Kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bengkulu dengan persentase sebesar 19,07 persen dan 17,07 persen. Provinsi yang persentase lansia dengan jenis disabilitas melihat paling rendah terdapat di Provinsi Maluku (5,93 persen), Bali (6,15 persen), dan DKI Jakarta (6,49 persen).

Tabel 8.5 Persentase Lansia dengan Disabilitas menurut Jenis Gangguan Fungsi/ Keterbatasan/ Disabilitas dan Penyebab Utama Disabilitas, 2012

Gangguan fungsi/ keterbatasan/ disabilitas	Penyebab Utama						Jumlah
	Bawaan sejak lahir	Kecela - kaan/ Bencana Alam	Penyakit Kusta	Penyakit Lainnya	Kurang Gizi	Tekanan Hidup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Melihat	3,49	12,10	0,11	82,03	2,20	0,06	100,00
Mendengar	3,87	14,66	0,00	80,18	1,14	0,16	100,00
Berkomunikasi	3,98	25,73	0,00	69,60	0,55	0,14	100,00
Mengingat atau berkonsentrasi	0,99	48,10	0,00	40,74	0,00	10,17	100,00
Berjalan atau naik tangga	3,39	20,15	0,14	75,82	0,45	0,05	100,00
Mengurus diri sendiri	1,68	20,39	0,20	74,68	0,67	2,39	100,00
Jumlah	3,16	19,00	0,09	75,46	1,15	1,14	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas Modul 2012

Gambaran mengenai persentase lansia dengan disabilitas menurut jenis disabilitas dan penyebab utamanya tersaji pada Tabel 8.5. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase penyebab utama disabilitas yang paling banyak dialami lansia adalah penyakit lainnya sebesar 75,46 persen, yaitu penyakit yang umumnya diderita oleh lansia antara lain diabetes, TBC, asma, jantung, darah tinggi, sakit pinggang, dan pikun. Kemudian penyebab yang lainnya adalah karena kecelakaan /bencana alam (19,00 persen) dan bawaan sejak lahir (3,16 persen). Tingginya persentase lansia dengan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit lainnya adalah karena secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia akan mengalami penurunan kesehatan atau daya tahan tubuh semakin menurun sehingga mudah terserang penyakit.

Tabel 8.5 juga menggambarkan bahwa jenis disabilitas yang dialami oleh lansia hampir seluruh penyebab terbesarnya adalah penyakit lainnya kecuali jenis disabilitas mengingat atau berkonsentrasi. Data diatas menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen jenis disabilitas disebabkan oleh penyakit lainnya yaitu disabilitas melihat (82,03 persen), mendengar (80,18 persen), berjalan atau naik tangga (75,82 persen), mengurus diri sendiri (74,68 persen) dan

berkomunikasi (69,60 persen), sedangkan disabilitas mengingat atau berkonsentrasi penyebab terbesarnya adalah karena kecelakaan atau bencana alam sebesar 48,10 persen.

8.3 Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Sehingga setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua berhak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindak kekerasan maupun kejahatan masih sering terjadi.

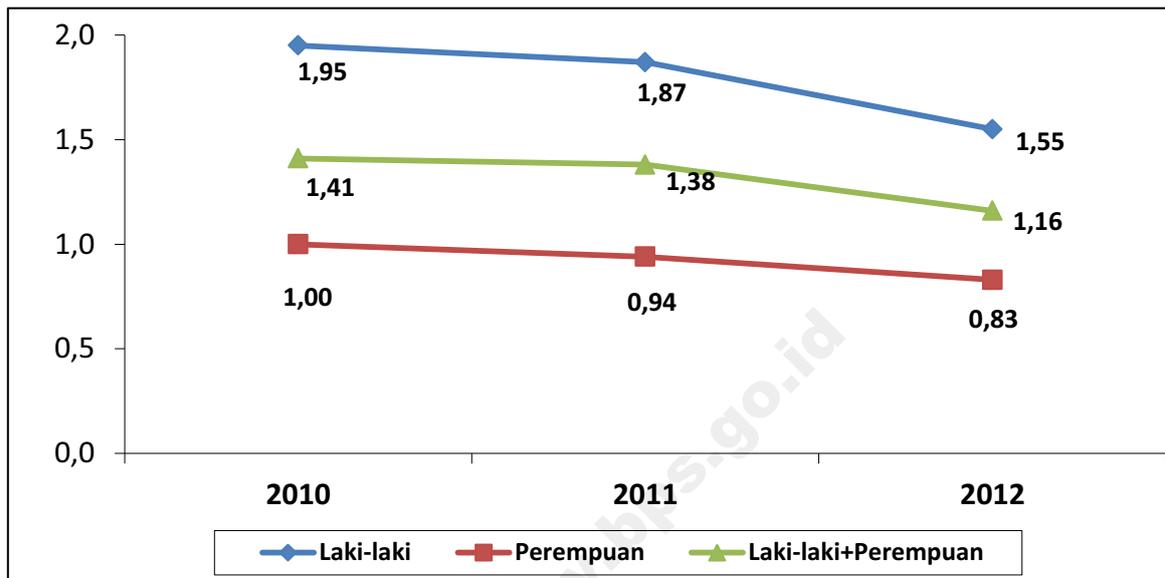
Uraian berikut ini memberikan gambaran lansia yang mengalami tindak kejahatan yang dibatasi pada jenis tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan penipuan serta gambaran lansia yang melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

8.3.1 Lansia yang Mengalami Tindak Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Gambar 8.1 menunjukkan proporsi lansia yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir, dan terlihat bahwa proporsi lansia yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data Susenas menunjukan pada tahun 2010, persentase lansia yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,41 persen, tahun 2011 turun menjadi 1,38 persen, kemudian terus menurun pada tahun 2012 menjadi 1,16 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi lansia laki-laki yang menjadi korban tindak kejahatan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan. Berdasarkan data tahun 2012, persentase lansia laki-laki yang

menjadi korban tindak kejahatan sebesar 1,55 persen hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding lansia perempuan sebesar 0,83 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun proporsi lansia perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan lebih rendah daripada laki-laki, namun lansia perempuan yang mengalami tindak kejahatan cenderung mengalami ketakutan dan trauma yang lebih besar dibandingkan laki-laki.



Sumber: BPS - Susenas 2010-2012

Gambar 8.1 Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2010-2012

Bila dilihat berdasarkan tipe daerah maka proporsi lansia yang berada di daerah perkotaan yang menjadi korban tindak kejahatan lebih besar dibandingkan di perdesaan, yaitu sebesar 1,27 persen dan 1,06 persen. Hal yang sama terjadi pada lansia laki-laki maupun perempuan menurut tipe daerah, dimana proporsi lansia baik laki-laki maupun perempuan di perkotaan yang menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Tabel 8.6 memperlihatkan lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan di daerah perkotaan (1,58 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (1,52 persen), sedangkan lansia perempuan yang menjadi korban kejahatan di daerah perkotaan sebesar 1,00 persen dan di perdesaan sebesar 0,67 persen.

Pada Lampiran Tabel 8.4 memperlihatkan proporsi lansia yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir menurut provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki persentase tertinggi

untuk lansia yang menjadi korban tindak kejahatan yaitu sebesar 2,72 persen, kemudian Provinsi Banten sebesar 2,16 persen, dan Sulawesi Tengah sebesar 2,02 persen, sedangkan provinsi dengan proporsi lansia yang menjadi korban tindak kejahatan dibawah 1 persen ada sebanyak 17 provinsi.

Tabel 8.6 Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Tipe Daerah	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	1,58	1,00	1,27
Perdesaan	1,52	0,67	1,06
Perkotaan+Perdesaan	1,55	0,83	1,16

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Dilihat menurut jenis tindak kejahatan (Tabel 8.7), tindak kejahatan yang paling banyak dialami oleh lansia adalah pencurian (67,04 persen), kemudian penipuan (13,64 persen) dan perampokan (12,91 persen). Namun bila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka kondisi yang sama juga terjadi baik pada lansia laki-laki, sedangkan lansia perempuan yang terbesar adalah pencurian (59,59 persen), kemudian perampokan (19,43 persen) dan penipuan (13,56 persen).

Tabel 8.7 Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, 2012

Jenis Kejahatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencurian	71,66	59,69	67,04
Perampokan	8,82	19,43	12,91
Pembunuhan	0,17	0,31	0,22
Penipuan	13,68	13,56	13,64
Lainnya	5,66	7,01	6,18
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Bila dibandingkan antara lansia laki-laki dan perempuan maka kondisi yang cukup memprihatinkan ternyata dialami oleh lansia perempuan, dimana lansia perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan perampokan adalah sebesar 19,43 persen atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang dialami lansia laki-laki (8,82 persen). Perampokan merupakan tindakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini dapat menyebabkan luka maupun efek trauma terhadap lansia perempuan. Selain jenis kejahatan perampokan, persentase jenis kejahatan pembunuhan, dan kejahatan lainnya juga lebih tinggi terjadi terhadap lansia perempuan dibandingkan lansia laki-laki, kecuali jenis kejahatan penipuan.

8.4 Kelayakan Tempat Tinggal

Definisi rumah dijelaskan dalam UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pasal (1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ditinjau dari sisi kelayakan, rumah dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu rumah layak huni, rumah hampir tidak layak huni dan rumah tidak layak huni. Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan estetika, sehingga dapat memberikan suasana nyaman bagi penghuninya. Berbeda dengan rumah layak huni, rumah hampir tidak layak huni dan rumah tidak layak huni adalah rumah yang kurang/tidak memenuhi syarat kesehatan dan estetika.

Tabel 8.8 Persentase Lansia menurut Kelayakan Rumah Tinggal, 2010-2012

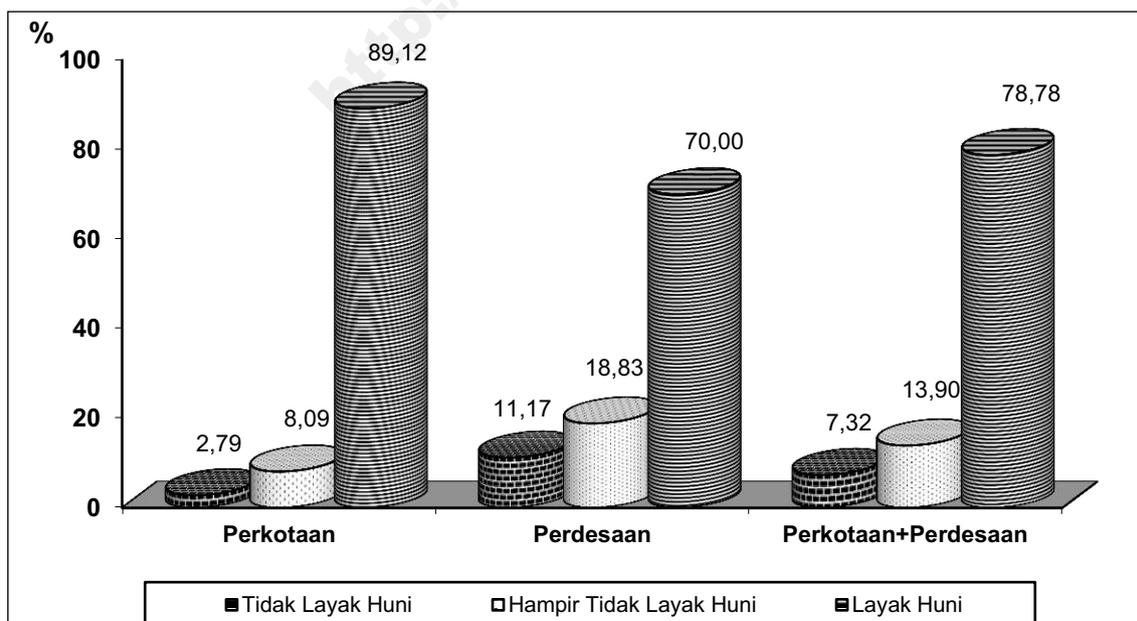
Kategori Kelayakan Rumah Tinggal	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Layak Huni	9,12	7,78	7,32
Hampir Tidak Layak Huni	15,48	14,03	13,90
Layak Huni	75,39	78,20	78,78
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS- Susenas 2010-2012

Pada umumnya orang yang tinggal dirumah tidak layak huni memiliki taraf hidup yang tergolong masih rendah. Bila dilihat dari tabel diatas,

persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni pada tahun 2012 sebesar 7,32 persen atau turun dibandingkan tahun 2010 (9,12 persen) dan tahun 2011 (7,78 persen). Kondisi yang sama juga terjadi pada lansia yang tinggal di rumah hampir tidak layak huni, pada tahun 2010 terdapat sebesar 15,48 persen, turun menjadi sebesar 14,03 persen pada tahun 2011 dan sebesar 13,90 persen pada tahun 2012. Namun kondisi lansia yang tinggal di rumah layak huni mengalami peningkatan, mulai dari 75,39 persen pada tahun 2010, kemudian tahun tahun 2011 meningkat menjadi 78,20 persen, kemudian meningkat lagi tahun 2012 menjadi 78,78 persen. Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa kondisi kesejahteraan lansia bila dilihat dari kelayakan rumah tinggalnya semakin membaik.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni di perdesaan (11,17 persen) hampir empat kali lipat daripada di perkotaan (2,79 persen). Sedangkan lansia yang tinggal di rumah layak huni pada daerah perkotaan (89,12 persen) lebih tinggi daripada perdesaan (70,00 persen). Kondisi diatas memperlihatkan bahwa kesejahteraan lansia yang tinggal di daerah perkotaan memiliki kehidupan yang lebih baik berdasarkan kelayakan tempat tinggalnya dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan (Gambar 8.2).



Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Gambar 8.2 Persentase Lansia menurut Tipe Daerah dan Kelayakan Rumah Tinggal, 2012

Proporsi lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni menurut provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 8.6.3. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki persentase tertinggi dari lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni sebesar 38,48 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Papua sebesar 25,35 persen, dan Gorontalo sebesar 16,59 persen. Sementara itu lebih dari separuh atau sebanyak 23 provinsi memiliki persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni dibawah 10 persen.

Tabel 8.9 Persentase Lansia menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2012

Status Kepemilikan Tempat Tinggal	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	90,45	94,70	92,75
Kontrak	1,67	0,13	0,84
Sewa	1,49	0,07	0,72
Lainnya	6,38	5,10	5,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal merupakan salah satu faktor untuk melihat kesejahteraan sosial suatu rumah tangga. Seseorang yang tinggal di rumah dengan status milik sendiri akan merasa lebih nyaman menempati rumahnya dibandingkan dengan menyewa, mengontrak atau lainnya. Pada Tabel 8.9 dapat dilihat bahwa sebagian besar (92,75 persen) lansia tinggal dirumah dengan status milik sendiri, sedangkan yang tinggal rumah kontrak sebesar 0,84 persen, dirumah sewa sebesar 0,72 persen, dan sisanya sebesar 5,69 persen tinggal di rumah lainnya seperti rumah bebas sewa, rumah dinas dan sebagainya. Pola yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase lansia yang tinggal di rumah dengan status milik sendiri di daerah perdesaan (94,70 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (90,45 persen). Sebaliknya persentase lansia yang tinggal di rumah dengan status sewa, kontrak, dan lainnya di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

PERLINDUNGAN SOSIAL

<http://www.bukuipoint.com>



Perlindungan Sosial

Dalam kurun waktu 68 tahun sejak Indonesia merdeka telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat telah menyelenggarakan beberapa bentuk perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang tergolong rentan seperti penduduk miskin, lanjut usia, anak, penyandang cacat ganda (fisik dan mental) serta penduduk yang tinggal di kawasan terpencil. Namun hingga saat ini penduduk rentan pada umumnya belum tersentuh oleh skema perlindungan sosial tersebut sehingga mereka tetap berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap ketidakstabilan perekonomian yang terjadi baik di lingkungan sekitar maupun di Indonesia secara umum.

Penduduk lanjut usia termasuk ke dalam kelompok rentan. Bila dilihat dari kondisi demografi, menunjukkan bahwa penduduk lansia di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah maupun

persentase. Hal ini menyebabkan terjadi pergeseran struktur penduduk Indonesia yang mengarah kepada struktur penduduk tua (*aging population*) yaitu makin banyaknya lanjut usia (lansia). Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan/ jaminan sosial bagi mereka dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi maupun sosial yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

UUD 1945 Pasal 28 H-ayat 3 (amandemen kedua) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34 ayat 2 (amandemen keempat), bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Di samping itu, Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 juga menugaskan kepada Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Menurut Edi Suharto, PhD dalam “Memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN”, Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko-resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan. Kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya untuk konteks negara-negara di kawasan ASEAN, mencakup lima jenis, yaitu: Pertama, kebijakan pasar kerja (*labour market policies*) yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan beroperasinya hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien; Kedua, bantuan sosial (*social assistance*), yakni program jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan; Ketiga, asuransi sosial (*social insurance*), yaitu skema

jaminan sosial yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayarkannya; Keempat, jaring pengaman sosial berbasis masyarakat (*community-based social safety nets*) atau yang dikenal dengan istilah 'skema mikro dan berbasis wilayah' (*micro and area-based schemes*), perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas.; dan Kelima, perlindungan anak (*child protection*).

Pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan sosial rakyat terutama bagi penduduk lanjut usia telah menyelenggarakan beberapa bentuk perlindungan sosial. Gambaran umum mengenai pencapaian penyelenggaraan perlindungan sosial yang telah dilakukan pemerintah akan disajikan dalam bab ini. Jenis perlindungan sosial yang dicakup adalah bantuan sosial (*social assistance*), asuransi sosial (*social insurance*) dan kebijakan pasar kerja (*labour market policies*).

9.1 Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam menghadapi masa krisis ekonomi. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi dan penyediaan pemakaman.

Salah satu bentuk bantuan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah

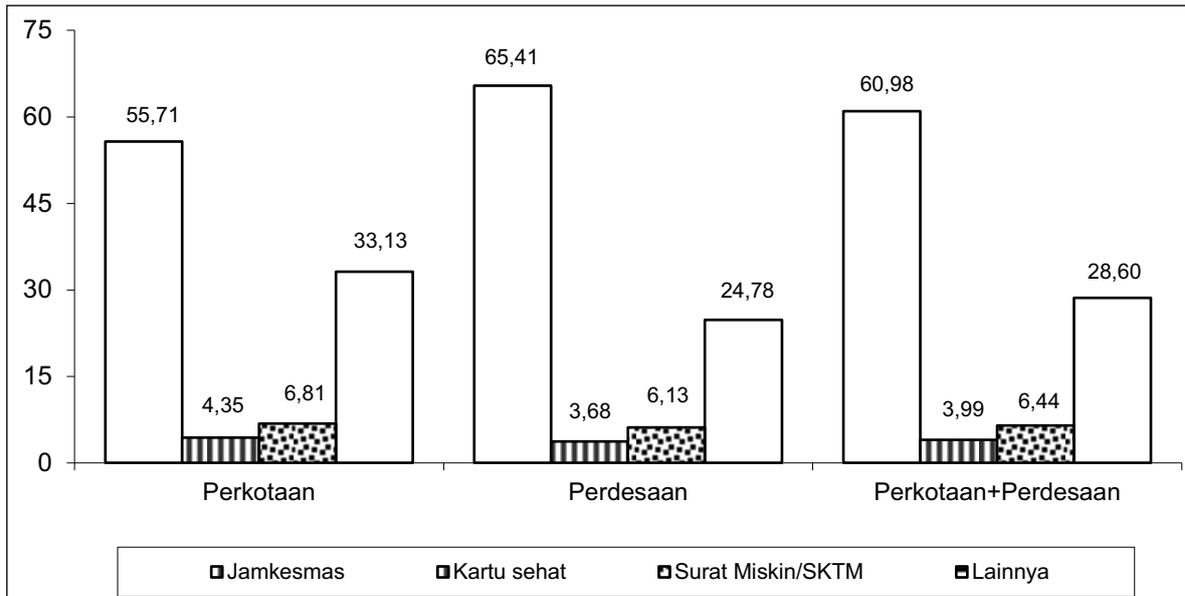
adalah pelayanan kesehatan gratis. Tabel 9.1 memperlihatkan jumlah rumah tangga lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis berdasarkan hasil susenas 2012. Tabel tersebut menggambarkan rumah tangga lansia di Indonesia yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebanyak 3,04 juta rumah tangga atau 20,60 persen dari seluruh rumah tangga lansia. Bila dilihat menurut tipe daerah, di daerah perkotaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebesar 1,39 juta rumah tangga (20,44 persen) lebih kecil dibandingkan dengan daerah perdesaan yaitu sebesar 1,65 juta rumah tangga atau 20,74 persen.

Tabel 9.1 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga (RT) Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Selama 6 Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2012

Tipe Daerah	Jumlah RT Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis (000)	Jumlah Rumah Tangga Lansia (000)	Persentase RT Lansia yang art-nya ada yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis (Buat Trend)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	1 386 942	6 785 912	20,44
Perdesaan (D)	1 649 955	7 956 479	20,74
K+D	3 036 897	14 742 391	20,60

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kartu/surat yang dapat digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah (rumah sakit atau puskesmas) tanpa di pungut biaya. Gambar 9.1 menyajikan persentase jenis kartu/surat yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis menurut tipe daerah. Dari gambar tersebut terlihat Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) merupakan jenis kartu/surat yang paling banyak digunakan yaitu sebesar 60,98 persen, disusul dengan kartu/surat lainnya seperti Jamkesda (28,60 persen), Surat miskin/SKTM (6,44 persen) dan karti sehat (3,99 persen). Pola yang sama juga terlihat baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Gambar 9.1 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Selama 6 Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kartu/Surat yang Digunakan 2012

Program lainnya dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial yang telah dilaksanakan adalah pemberian subsidi beras bagi penduduk miskin. Raskin merupakan program bantuan pangan yang sudah dilaksanakan sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998. Program ini berlanjut hingga saat ini dengan tujuan utama mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program yang sebelum 2002 bernama Operasi Pasar Khusus (OPK) ini awalnya merupakan program darurat bagian dari jaring pengaman sosial (social safety net), namun kemudian fungsinya diperluas menjadi bagian dari program perlindungan sosial.

Tabel 9.2 menyajikan data mengenai karakteristik bantuan beras miskin yang diterima oleh rumah tangga lansia menurut tipe daerah. Berdasarkan tabel tersebut terlihat persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapatkan bantuan beras miskin adalah sebesar 62,24 persen dari seluruh rumah tangga lansia, di daerah perkotaan sebesar 49,98 persen dan perdesaan sebesar 72,70 persen.

Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, telah ditetapkan

subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di titik distribusi. Hasil susenas menunjukkan rata-rata banyaknya beras yang diterima oleh satu rumah tangga kurang dari jumlah alokasi sasaran yang ditetapkan pemerintah. Dimana beras yang didapat hanya sebesar 8,41 kg per rumah tangga lansia, di daerah perkotaan sebesar 7,34 kg dan di perdesaan sebesar 9,04 kg. Hal yang menyebabkan berkurangnya beras yang diterima adalah beras umumnya dibagi secara merata kepada hampir seluruh rumah tangga atau paling tidak kepada rumah tangga yang lebih banyak dari sasaran.

Tabel 9.2 Karakteristik Bantuan Beras Miskin (Raskin) yang Diterima oleh Rumah Tangga (RT) Lansia menurut Tipe Daerah, 2012

Tipe Daerah	Persentase RT Lansia yang Pernah Membeli/ Mendapat Raskin Selama 3 Bulan Terakhir (000)	Rata-rata Banyaknya Raskin (Kg) yang terakhir dibeli	Rata-rata Harga per Kg Raskin yang Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	49,98	7,34	2.082
Perdesaan (D)	72,70	9,04	2.029
K+D	62,24	8,41	2.048

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Demikian juga dengan rata-rata harga per kg beras miskin yang dibayar adalah sebesar Rp. 2.048,- (di perkotaan sebesar Rp. 2.082,- dan di perdesaan sebesar Rp. 2.029,-) tidak sesuai dengan harga tebus yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan adanya perbedaan harga tersebut, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah tingkat harga Raskin yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku di tingkat titik distribusi (TD), masalahnya tidak semua TD bisa sekaligus berfungsi sebagai titik bagi (TB), yakni titik terakhir yang berfungsi sebagai tempat RTS membeli Raskin. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan biaya tambahan untuk mendistribusikan beras dari TD ke TB.

9.2 Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Program jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28H (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian pula dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan konstitusi WHO yang menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap individu. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk mengatur agar hak hidup sehat bagi penduduknya terpenuhi. Penduduk lansia merupakan bagian masyarakat yang perlu mendapat perhatian yang lebih besar agar kebutuhan kesehatannya terpenuhi.

Tabel 9.3 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap menurut Tipe Daerah, 2012

Tipe Daerah	Jumlah RT Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan (000)	Jumlah Rumah Tangga Lansia (000)	Persentase RT Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	3.299.253	6.785.912	48,62
Perdesaan (D)	3.262.231	7.956.479	41,00
K+D	6.561.483	14.742.391	44,51

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 9.3 disajikan jumlah dan persentase rumah tangga lansia yang mempunyai jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan untuk keperluan berobat jalan/rawat inap menurut tipe daerah. Tabel tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga lansia di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 14,74 juta rumah

tangga. Sekitar 6,56 juta rumah tangga lansia atau 44,51 persen mempunyai jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Bila dilihat menurut tipe daerah, persentase rumah tangga lansia yang mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan di daerah perkotaan (48,62 persen) lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan (41,00 persen). Melihat masih banyaknya rumah tangga lansia yang belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan diperlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah.

Tabel 9.4 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan, 2012

Tipe Daerah	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes)	17,35	5,65	11,04
JPK Jamsostek	8,54	1,46	4,72
Asuransi Kesehatan Swasta	2,68	0,30	1,40
Tunjangan/penggantian biaya oleh perusahaan	2,56	0,50	1,45
JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin/ Kartu Miskin/Jamkesmas	21,21	30,69	26,33
Dana Sehat	0,50	0,24	0,36
JPKM/JPK Lain	2,85	3,86	3,40

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Berbagai jenis jaminan pembiayaan kesehatan untuk keperluan berobat jalan/rawat inap sudah banyak diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Hasil Susenas 2012 yang ditunjukkan Tabel 9.4 memperlihatkan jenis jaminan pembiayaan kesehatan yang digunakan rumah tangga lansia. Dari tabel tersebut terlihat JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin/ Kartu Miskin/Jamkesmas merupakan jenis jaminan pembiayaan kesehatan yang banyak digunakan yaitu sebesar 26,33 persen, kemudian JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) sebesar 11,04 persen dan JPK Jamsostek sebesar 4,72 persen. Pola yang hampir sama juga terlihat baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, di perkotaan JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin/ Kartu Miskin/Jamkesmas (21,21 persen), JPK

PNS/Veteran/ Pensiun (Askes) (17,35 persen) dan JPK Jamsostek (8,54 persen). Sedangkan di perdesaan JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Jamkesmas (30,69 persen), JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) (5,65 persen) dan JPKM/JPK Lain (3,86 persen).

9.3 Kebijakan Pasar Kerja (*Labour Market Policies*)

Umumnya lansia di Indonesia masih dapat melakukan berbagai aktivitas dan masih banyak berperan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tidaklah mengherankan bila pada kenyataannya lansia di Indonesia masih banyak yang harus bekerja, dan yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Banyaknya lansia yang masih bekerja disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang relatif masih besar, serta secara fisik dan mental lansia tersebut masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ekonomi yang relatif besar pada lansia kemungkinan disebabkan tidak/belum adanya jaminan sosial ekonomi yang memadai bagi lansia.

Idealnya lansia yang bekerja mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental serta bagi lansia yang tidak bekerja diharapkan kesejahteraan mereka juga masih tetap mendapat perhatian. Jika kondisi seperti ini dapat terwujud dengan baik, maka berbagai pandangan bahwa lansia bergantung kepada bagian penduduk yang lain dalam pemenuhan kebutuhan dapat dikurangi.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh penduduk lansia adalah dengan mengadakan program PNPB Mandiri dan Program lainnya (seperti : Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan lain-lain). Hasil susenas 2012 memberikan gambaran mengenai rumah tangga lansia yang menerima bantuan dari kedua program pemerintah dalam setahun terakhir yang diperlihatkan pada Tabel 9.5. Dari tabel tersebut terlihat rumah tangga lansia di Indonesia yang menerima bantuan dari kedua program tersebut ada sebanyak 319 ribu rumah tangga atau 2,17 persen dari seluruh rumah tangga lansia. Bila dilihat menurut tipe daerah, di daerah perkotaan yang menerima bantuan tersebut adalah sebesar 113 ribu rumah tangga (1,67 persen) lebih kecil dibandingkan dengan daerah perdesaan (206

ribu rumah tangga atau 2,59 persen.

Tabel 9.5 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Program PNPM Mandiri dan Program Lainnya Dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah, 2012

Tipe Daerah	Jumlah RT Lansia yang Menerima Program PNPM Mandiri dan Program Lainnya (000)	Jumlah Rumah Tangga (000)	Persentase RT Lansia yang Menerima Program PNPM Mandiri dan Program Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	113.399	6.785.912	1,67
Perdesaan (D)	206.382	7.956.479	2,59
K+D	319.781	14.742.391	2,17

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 9.6 menyajikan persentase rumah tangga lansia yang menerima bantuan dari kedua program pemerintah tersebut dalam setahun terakhir. Hasilnya adalah rumah tangga lansia yang menerima bantuan dari kedua program tersebut relatif sangat kecil, yaitu Program PNPM Mandiri (1,75 persen) dan program pemerintah lainnya (0,46 persen). Bila dilihat menurut tipe daerah, pemberian bantuan melalui Program PNPM Mandiri di daerah perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 2,12 persen dan 1,30 persen. Pola yang sama juga terlihat untuk program pemerintah lainnya, yaitu di perdesaan sebesar 0,53 persen dan di perkotaan sebesar 0,38 persen.

Tabel 9.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan dari Program PNPM Mandiri dan Program Lainnya Dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah, 2012

Tipe Daerah	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Program pemerintah lainnya
(1)	(2)	(3)
Perkotaan (K)	1,30	0,38
Perdesaan (D)	2,12	0,53
K+D	1,75	0,46

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

PERBERDAYAAN SOSIAL

<http://www.god.com>



Program Pemberdayaan Lansia

Hasil kunjungan yang dilakukan pada empat provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, dan Bali, selain memperoleh data kualitatif yang menggambarkan kehidupan lansia juga diperoleh informasi mengenai berbagai program pemberdayaan lansia yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait lansia, baik yang merupakan program pusat maupun program khusus daerah. Selain data kualitatif terkait gambaran kehidupan lansia. Pengumpulan informasi mendalam mengenai program/kegiatan lansia dilakukan dengan cara mendatangi dinas/instansi/lembaga terkait yang berhubungan dengan lansia. Dinas/instansi/lembaga yang dikunjungi adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Panti Werdha.

Petugas yang berkunjung ke daerah melakukan wawancara terhadap pejabat yang berwenang menangani atau mengetahui tentang program pemberdayaan lansia untuk menanyakan program-program yang sudah dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan lansia.

Pemberdayaan terhadap penduduk lansia dapat dilaksanakan melalui berbagai macam kebijakan serta kegiatan yang diharapkan dapat menyentuh kepentingan dan mempunyai nilai lebih bagi lansia. Dana yang digunakan dalam menjalankan program-program pemberdayaan lansia bersumber dari dana APBN dan APBD. Dari instansi yang dikunjungi, secara umum Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan mempunyai program-program khusus terkait dengan pemberdayaan lansia, seperti Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sekarang berganti menjadi Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Pendampingan dan Perawatan Lansia di Rumah (*Home Care*) dan Karang Lansia.

Gambaran umum beberapa program yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan lansia di daerah rujukan studi antara lain :

1. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) → Kemensos

Proses membimbing, mendampingi, dan mengarahkan lanjut usia yang telah mendapatkan bantuan di daerahnya masing-masing. Tujuannya agar terdampinginya lansia dalam mengatasi berbagai masalah dan kebutuhannya, meningkatnya kemampuan lansia untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan berkurangnya masalah yang dihadapi oleh lansia yang didampingi.

Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp 200.000,- per bulan yang dananya berasal dari APBN. Penyaluran dana melalui PT. Pos. Petugas pembayar dari PT Pos bersama pendamping mengantar bantuan ke tempat tinggal lansia. Dari hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan ternyata semua provinsi telah melaksanakan program ini,. Di Provinsi Lampung yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdapat 550 orang penerima ASLUT.

Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta tetap memberikan program bantuan ASLUT kepada lansia dengan menggunakan dana APBD 2013, dengan besaran yang diterima adalah Rp. 117.000/lansia/bulan.

2. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) → kemensos

Tahapan pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepada lanjut usia potensial dan produktif untuk dapat meningkatkan pendapatan/penghasilan yang layak. Tujuannya bersifat stimulan sebagai

modal usaha yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sasarannya adalah lansia berusia 60 tahun keatas, kurang mampu/keluarga miskin, serta masih potensial.

Program pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada lansia adalah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). UEP menggunakan APBN yang ditransfer langsung ke rekening lansia. Besaran UEP adalah Rp. 1.500.000/lansia dan hanya diberikan satu kali. Dana ini digunakan untuk bantuan modal lansia yang masih aktif bekerja seperti membuat, membuat tempe, membuat tikar, dsb. Di Provinsi Lampung, pemberian dilakukan di dua kabupaten/kota terhadap 100 orang lansia yaitu di Kabupaten Lampung Tengah (Laki-laki: 43 orang, Perempuan: 17 orang) dan Kabupaten Way Kanan (Laki-laki: 28 orang, Perempuan 12 orang).

3. Program Pendampingan dan Perawatan Lansia di Rumah (*Home Care*)

Home care lanjut usia merupakan pelayanan pendampingan dan atau perawatan lanjut usia di rumah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh keluarga, kerabat atau warga masyarakat setempat. Program ini memiliki beberapa fungsi antara lain pencegahan, promosi, rehabilitasi, dan perlindungan serta pemeliharaan. *Home care* lanjut usia membangun kemitraan lintas disiplin antara lain pekerja sosial, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, rohaniawan, guru, pemandu kebugaran jasmani. Kemitraan lintas sektor antara lain pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha. Sasaran pelayanan meliputi lansia rentan, lansia telantar, lansia tinggal sendiri, lansia miskin, lansia dengan keterbatasan mobilitas, lansia penyandang cacat ringan atau berat, lansia pasca perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan laporan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2012, program ini dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Kab. Lampung Selatan (40 orang), Kab. Lampung Timur (40 orang), dan Kab. Pringsewu (30 orang), jadi jumlah keseluruhan sasaran *Home Care* adalah 110 orang (Laki-laki: 45 orang, Perempuan 65 orang) dengan melibatkan tenaga petugas provinsi (2 orang), tenaga fasilitator (2 orang), dan tenaga pendamping (22 orang). Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Maret s.d Agustus 2012.

4. Karang Lansia

Karang lansia merupakan salah satu wadah kegiatan lansia. Kegiatan yang terdapat dalam karang lansia antara lain posyandu lansia, pembinaan keagamaan/pengajian, dan rekreasi. Di Provinsi Kalimantan Selatan karang lansia telah mendapatkan penghargaan dari MURI atas pembuatan tikar purun terpanjang sebesar 1.300 meter.

Program spesifik wilayah yang pendanaannya bersumber dari APBD ataupun swadaya masyarakat mengenai lansia yang diperoleh dari daerah yang dikunjungi antara lain:

1. Rumah Sehat Lansia

Program ini baru berjalan pada akhir 2012. Rumah sehat lansia sebelumnya merupakan Pustu (Puskesmas pembantu), namun karena jaraknya berdekatan dengan Puskesmas maka dialihfungsikan menjadi Rumah Sehat Lansia. Rumah sehat lansia memberikan konsultasi spesialis untuk lansia. Setiap puskesmas mengirimkan lansia secara bergilir ke rumah sehat lansia untuk konsultasi setiap harinya. Selain itu, rumah sehat lansia juga bekerjasama dengan RS. Sarjito, sehingga diadakan konsultasi Geriatri setiap hari rabu dan sabtu.

2. Puskesmas Santun Lansia

Beberapa puskesmas di Kota Yogya merupakan Puskesmas Santun Lansia. Puskesmas ini memiliki loket yang terpisah antara lansia dan non lansia, selain itu ada pelayanan psikologi lansia yang diadakan 3 kali dalam seminggu.

3. Pembinaan Lansia Berbasis Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, seperti: Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKPKS), Kanwil Agama Provinsi Bali, dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sumber dana APBD Tk.I. Pada tahun 2012 dilaksanakan di Desa Timpang Kecamatan Kediri Tabanan dan Desa Warnasari Kecamatan Malaya Kabupeten Jembrana. Dari masing-masing desa dipilih sebanyak 50 lansia binaan.

Rangkaian kegiatan meliputi:

- Penyuluhan dari Kanwil Agama Provinsi Bali, Dinas Sosial Provinsi Bali, dan BKKS mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam memperhatikan para lansia.
- Olahraga senam lansia secara rutin
- Pemeriksaan/pelayanan kesehatan
- Pemeriksaan mata dan pemberian kaca mata gratis serta operasi katarak oleh Rumah Sakit Indra

Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lansia binaan agar menjadi lansia yang sehat dan berguna serta mampu menolong diri sendiri dan mengurangi beban pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat melaksanakan perannya dalam keluarga sebagai pensehat, pembimbing dan panutan bagi keluarga serta generasi penerusnya.

4. Posyandu Lansia

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaa kesehatan yang dilakukan setiap sebulan sekali, pemberian makanan tambahan serta pelaksanaan senam lansia dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali tergantung masing-masing posyandu lansia. Selain kegiatan kesehatan, posyandu lansia juga menyelengi kegiatan dengan keterampilan dan pelatihan.

5. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Service*)

Pelayanan lansia luar panti yang ditangani secara profesional, terencana, terarah, dan terpadu sehingga dapat lebih efektif. Tujuannya antara lain untuk membantu memberikan pelayanan kepada lansia, memenuhi kebutuhan lansia, meningkatkan kemampuan lansia untuk mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan, membentuk hubungan dan kerjasama harmonis antara lansia, keluarga, masyarakat, dan lembaga Pelayanan Harian Lanjut Usia (PHLU), serta untuk mengurangi rasa kecemasan yang timbul dalam diri lansia. Sasarannya adalah para lansia yang ada di lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha dan di Ikatan Peduli Lansia Kota Bandar Lampung, dengan memberikan keterampilan bagi para lansia untuk mengembangkan keterampilannya.

6. Safari Kesehatan Lansia

Kegiatannya berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan lansia yang dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Kesehatan keliling dari satu kecamatan ke kecamatan lain dengan jadwal tertentu.

7. Perayaan Hari Lansia

Perayaan hari lansia ini dilakukan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Denpasar dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan Mei. Pada tahun 2013 dirayakan pada tanggal 18 Mei. Perayaan hari Lansia diisi dengan perlombaan-perlombaan khusus lansia, seperti: goyang lansia, tari lansia, lomba lagu lansia, dll yang dikoordinasikan oleh Dinas kebudayaan. Puncak penyelenggaraan Hari Lansia tingkat Kota Denpasar diselenggarakan oleh Komda Lansia Kota Denpasar.

8. Forum komunikasi lansia

Forum komunikasi lansia diadakan 2 kali dalam setahun. Forum ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lansia.

9. Pemotongan Biaya Pengobatan

Program ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 60% dari tarif retribusi pengobatan umum, dan pengurangan sebesar 50% dari tarif retribusi tindakan.

10. Bimbingan Lansia Telantar Di Luar Panti

Program ini dilaksanakan di Provinsi Bali. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa pemberian bantuan modal usaha kepada lansia telantar dengan sumber dana dari APBD. Pada tahun 2012 diberikan bantuan Modal Usaha berupa alat-alat untuk penyewaan tenda dan kursi kepada kelompok lansia di Kecamatan Denpasar Timur. Pada tahun 2013, pemberian modal ternak babi kepada 30 lansia telantar di Kecamatan Denpasar Utara, masing-masing 1 ekor babi.

Kegiatan lain yang diselenggarakan daerah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan lansia tetapi masih dalam perencanaan, di perkirakan akan beroperasi pada tahun 2014. Di Taman Lansia ini nantinya akan diadakan penyuluhan pada pra lansia dan lansia, tempat olahraga, bidang yang akan diisi dengan batu-batu untuk refleksi bagi lansia, tempat pengobatan tradisional lansia, perpustakaan lansia, pelayanan lansia, dan forum interaksi antar lansia.

<http://www.bps.go.id>

TABEL LAMPIRAN

<http://www.123.go.id>

Tabel 3.1.1
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Tahun),
2012

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					Laki - Laki
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,22	2,73	3,41	1,40	0,41	5,23
Sumatera Utara	10,15	3,04	3,26	1,42	0,46	5,14
Sumatera Barat	10,53	3,92	4,11	2,13	0,68	6,92
R i a u	8,51	2,69	2,93	1,00	0,30	4,24
Kepulauan Riau	8,26	2,08	2,26	0,92	0,21	3,40
J a m b i	9,87	3,16	3,52	1,50	0,48	5,49
Sumatera Selatan	10,23	2,88	3,61	1,57	0,59	5,77
Bangka Belitung	9,74	3,48	3,54	1,44	0,43	5,41
Bengkulu	10,16	3,15	3,38	1,54	0,62	5,53
Lampung	10,55	3,47	4,10	2,05	0,85	7,00
DKI Jakarta	10,72	3,36	3,48	1,17	0,27	4,92
Jawa Barat	10,72	3,38	4,17	1,83	0,56	6,57
Banten	9,87	2,79	2,89	1,07	0,29	4,25
Jawa Tengah	12,99	4,54	5,52	2,93	1,00	9,44
DI Yogyakarta	12,73	4,71	6,21	3,99	1,43	11,63
Jawa Timur	13,06	4,65	5,67	2,72	0,81	9,20
B a l i	11,55	3,86	5,52	2,52	1,02	9,07
Nusa Tenggara Barat	9,56	3,22	4,47	1,91	0,66	7,03
Nusa Tenggara Timur	9,07	3,20	4,29	2,15	0,74	7,19
Kalimantan Barat	9,81	2,99	3,89	1,42	0,41	5,72
Kalimantan Tengah	10,06	2,56	3,00	1,10	0,48	4,58
Kalimantan Selatan	10,38	3,02	3,45	1,37	0,27	5,08
Kalimantan Timur	10,11	3,00	2,88	0,93	0,23	4,04
Sulawesi Utara	12,35	4,70	4,84	2,14	0,62	7,60
Gorontalo	9,78	2,96	3,77	1,41	0,23	5,41
Sulawesi Tengah	9,66	2,98	3,71	1,46	0,45	5,62
Sulawesi Selatan	9,95	3,07	4,59	2,05	0,71	7,35
Sulawesi Barat	7,61	2,54	3,64	1,56	0,71	5,91
Sulawesi Tenggara	8,10	2,71	3,48	1,46	0,47	5,41
Maluku	8,45	3,10	3,60	1,81	0,53	5,94
Maluku Utara	8,69	2,67	3,21	1,22	0,33	4,76
Papua	8,36	1,89	1,61	0,47	0,06	2,13
Papua Barat	8,95	2,49	2,41	0,68	0,17	3,26
INDONESIA	10,98	3,58	4,30	1,97	0,63	6,91

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.1.2
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Tahun), 2012

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					Perempuan
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,33	2,65	3,92	1,93	0,70	6,55
Sumatera Utara	10,45	3,21	3,87	1,95	0,86	6,68
Sumatera Barat	11,29	3,78	4,79	3,03	1,41	9,23
R i a u	8,64	2,22	2,91	1,16	0,39	4,47
Kepulauan Riau	7,55	2,05	2,29	0,95	0,27	3,50
J a m b i	9,65	3,15	3,39	1,70	0,67	5,75
Sumatera Selatan	9,96	3,05	3,95	1,94	0,83	6,73
Bangka Belitung	9,55	3,50	3,69	1,92	0,69	6,31
Bengkulu	9,87	2,83	3,17	1,96	0,84	5,97
Lampung	10,72	2,97	4,19	2,26	1,01	7,45
DKI Jakarta	10,95	3,07	3,59	1,31	0,54	5,44
Jawa Barat	10,43	3,31	4,49	2,20	0,87	7,55
Banten	9,46	2,40	3,12	1,37	0,49	4,98
Jawa Tengah	12,94	4,18	6,18	3,60	1,47	11,24
DI Yogyakarta	14,02	4,39	7,12	4,50	2,69	14,32
Jawa Timur	13,05	4,37	6,35	3,73	1,42	11,50
B a l i	11,67	4,20	6,04	3,37	1,12	10,52
Nusa Tenggara Barat	9,50	3,29	4,49	2,09	0,84	7,42
Nusa Tenggara Timur	9,26	3,36	4,58	2,28	0,88	7,75
Kalimantan Barat	9,64	3,01	3,85	1,66	0,53	6,04
Kalimantan Tengah	8,91	2,34	3,04	1,28	0,57	4,88
Kalimantan Selatan	9,83	3,06	4,04	1,93	0,63	6,60
Kalimantan Timur	9,43	2,40	2,71	1,07	0,30	4,08
Sulawesi Utara	11,85	4,73	5,31	2,81	1,26	9,38
Gorontalo	10,25	3,08	4,27	1,86	0,40	6,54
Sulawesi Tengah	9,11	2,95	3,75	1,51	0,68	5,94
Sulawesi Selatan	10,00	3,58	5,42	2,79	1,08	9,29
Sulawesi Barat	8,21	2,59	3,99	1,93	0,87	6,79
Sulawesi Tenggara	8,04	2,72	3,85	1,77	0,69	6,31
Maluku	9,16	2,98	3,73	2,17	0,59	6,49
Maluku Utara	8,35	2,64	3,02	1,27	0,58	4,86
Papua	6,82	1,50	1,28	0,37	0,08	1,73
Papua Barat	8,61	1,92	2,14	0,57	0,22	2,93
INDONESIA	10,93	3,45	4,74	2,50	1,00	8,23

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.1.3
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Tahun), 2012

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					Laki-laki+Perempuan	
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,28	2,69	3,66	1,67	0,56	5,89	
Sumatera Utara	10,30	3,12	3,57	1,69	0,66	5,91	
Sumatera Barat	10,91	3,85	4,45	2,58	1,05	8,09	
R i a u	8,57	2,46	2,92	1,08	0,35	4,35	
Kepulauan Riau	7,91	2,07	2,28	0,93	0,24	3,45	
J a m b i	9,76	3,16	3,45	1,60	0,57	5,62	
Sumatera Selatan	10,10	2,96	3,78	1,75	0,71	6,24	
Bangka Belitung	9,65	3,49	3,61	1,67	0,55	5,84	
Bengkulu	10,02	2,99	3,28	1,74	0,72	5,74	
Lampung	10,63	3,23	4,14	2,15	0,93	7,22	
DKI Jakarta	10,83	3,22	3,53	1,24	0,40	5,18	
Jawa Barat	10,58	3,34	4,33	2,01	0,71	7,05	
Banten	9,67	2,59	3,00	1,22	0,39	4,61	
Jawa Tengah	12,97	4,36	5,85	3,27	1,24	10,35	
DI Yogyakarta	13,38	4,55	6,67	4,25	2,07	12,99	
Jawa Timur	13,06	4,51	6,01	3,23	1,12	10,37	
B a l i	11,61	4,03	5,78	2,94	1,07	9,79	
Nusa Tenggara Barat	9,53	3,25	4,48	2,00	0,75	7,23	
Nusa Tenggara Timur	9,16	3,28	4,44	2,22	0,81	7,47	
Kalimantan Barat	9,72	3,00	3,87	1,54	0,47	5,87	
Kalimantan Tengah	9,51	2,46	3,02	1,18	0,52	4,73	
Kalimantan Selatan	10,11	3,04	3,74	1,64	0,45	5,83	
Kalimantan Timur	9,79	2,71	2,80	1,00	0,26	4,06	
Sulawesi Utara	12,10	4,72	5,07	2,46	0,93	8,47	
Gorontalo	10,01	3,02	4,02	1,63	0,32	5,97	
Sulawesi Tengah	9,39	2,97	3,73	1,48	0,56	5,78	
Sulawesi Selatan	9,97	3,33	5,02	2,43	0,90	8,34	
Sulawesi Barat	7,91	2,56	3,82	1,74	0,79	6,35	
Sulawesi Tenggara	8,07	2,71	3,66	1,62	0,58	5,86	
Maluku	8,80	3,04	3,67	1,99	0,56	6,22	
Maluku Utara	8,52	2,66	3,11	1,24	0,45	4,81	
Papua	7,64	1,71	1,45	0,42	0,07	1,94	
Papua Barat	8,79	2,22	2,28	0,63	0,19	3,10	
INDONESIA	10,95	3,52	4,52	2,23	0,81	7,57	

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Provinsi, Tipe Daerah dan
Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,58	9,28	8,43	8,84	11,12	9,98	8,47	10,59	9,53
Sumatera Utara	7,99	10,14	9,07	9,06	12,03	10,54	8,51	11,05	9,78
Sumatera Barat	10,13	13,38	11,77	12,58	17,04	14,81	11,59	15,55	13,58
R i a u	7,26	7,65	7,45	6,57	6,97	6,76	6,84	7,24	7,04
Kepulauan Riau	4,44	4,46	4,45	8,60	9,36	8,96	5,15	5,24	5,19
J a m b i	9,36	9,48	9,42	8,31	8,94	8,62	8,63	9,11	8,86
Sumatera Selatan	8,59	10,34	9,46	9,51	10,97	10,22	9,18	10,74	9,94
Bangka Belitung	8,41	10,33	9,33	8,18	9,57	8,84	8,30	9,95	9,08
Bengkulu	7,21	7,22	7,22	9,48	10,61	10,02	8,77	9,50	9,13
Lampung	9,63	10,60	10,11	11,64	12,37	11,99	11,11	11,88	11,48
DKI Jakarta	6,98	7,75	7,36	.	.	.	6,98	7,75	7,36
Jawa Barat	9,23	10,74	9,97	12,58	14,58	13,56	10,33	12,00	11,15
Banten	5,77	6,64	6,20	8,30	10,00	9,12	6,54	7,64	7,08
Jawa Tengah	13,96	16,73	15,36	16,02	19,04	17,53	15,07	17,96	16,52
DI Yogyakarta	15,11	18,90	17,00	23,82	29,25	26,59	17,86	22,26	20,07
Jawa Timur	12,88	16,11	14,50	15,46	19,42	17,47	14,20	17,83	16,04
B a l i	11,97	13,99	12,96	17,73	20,59	19,15	14,16	16,53	15,33
Nusa Tenggara Barat	11,25	11,39	11,32	12,38	12,21	12,29	11,90	11,86	11,88
Nusa Tenggara Timur	9,96	10,66	10,31	14,37	14,84	14,61	13,38	13,92	13,66
Kalimantan Barat	9,58	9,95	9,77	9,15	9,70	9,42	9,28	9,78	9,52
Kalimantan Tengah	6,69	7,12	6,90	7,37	8,12	7,72	7,14	7,76	7,44
Kalimantan Selatan	7,44	9,39	8,41	8,24	10,92	9,56	7,90	10,26	9,07
Kalimantan Timur	5,82	6,02	5,91	6,82	7,09	6,94	6,20	6,41	6,30
Sulawesi Utara	10,81	13,67	12,22	12,82	16,22	14,45	11,91	15,02	13,41
Gorontalo	8,30	10,60	9,47	9,03	10,63	9,82	8,78	10,62	9,70
Sulawesi Tengah	7,59	8,42	8,00	9,90	10,36	10,12	9,32	9,85	9,57
Sulawesi Selatan	10,11	12,73	11,45	13,74	16,81	15,34	12,33	15,26	13,85
Sulawesi Barat	10,55	12,35	11,47	10,34	11,50	10,92	10,39	11,70	11,05
Sulawesi Tenggara	7,30	8,36	7,84	10,22	11,65	10,94	9,37	10,68	10,03
Maluku	9,22	10,38	9,80	11,30	11,93	11,61	10,47	11,30	10,88
Maluku Utara	6,65	7,56	7,09	8,61	8,42	8,52	8,03	8,17	8,10
Papua	4,61	4,32	4,48	3,05	2,25	2,67	3,48	2,78	3,15
Papua Barat	4,66	4,46	4,57	5,65	4,92	5,31	5,25	4,74	5,01
INDONESIA	9,78	11,67	10,71	12,21	14,59	13,39	10,96	13,08	12,01

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.3
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah
dan Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,80	5,92	5,36	5,40	6,79	6,10	5,23	6,55	5,89
Sumatera Utara	5,05	6,40	5,73	5,23	6,96	6,09	5,14	6,68	5,91
Sumatera Barat	6,30	8,33	7,32	7,32	9,81	8,57	6,92	9,23	8,09
R i a u	4,53	4,78	4,65	4,04	4,26	4,15	4,24	4,47	4,35
Kepulauan Riau	2,95	3,01	2,98	5,50	5,93	5,70	3,40	3,50	3,45
J a m b i	6,00	6,03	6,01	5,27	5,63	5,45	5,49	5,75	5,62
Sumatera Selatan	5,49	6,63	6,06	5,92	6,79	6,34	5,77	6,73	6,24
Bangka Belitung	5,55	6,58	6,05	5,27	6,04	5,64	5,41	6,31	5,84
Bengkulu	4,63	4,68	4,66	5,93	6,57	6,24	5,53	5,97	5,74
Lampung	6,20	6,92	6,56	7,28	7,64	7,45	7,00	7,45	7,22
DKI Jakarta	4,92	5,44	5,18				4,92	5,44	5,18
Jawa Barat	5,96	6,86	6,40	7,76	8,90	8,32	6,57	7,55	7,05
Banten	3,84	4,47	4,15	5,10	6,07	5,57	4,25	4,98	4,61
Jawa Tengah	8,89	10,69	9,80	9,91	11,71	10,81	9,44	11,24	10,35
DI Yogyakarta	10,07	12,46	11,27	14,77	17,91	16,38	11,63	14,32	12,99
Jawa Timur	8,48	10,52	9,51	9,87	12,39	11,15	9,20	11,50	10,37
B a l i	7,84	9,10	8,46	10,96	12,67	11,81	9,07	10,52	9,79
Nusa Tenggara Barat	6,77	7,25	7,02	7,22	7,54	7,38	7,03	7,42	7,23
Nusa Tenggara Timur	6,02	6,60	6,31	7,48	8,03	7,76	7,19	7,75	7,47
Kalimantan Barat	5,99	6,29	6,14	5,60	5,93	5,76	5,72	6,04	5,87
Kalimantan Tengah	4,37	4,64	4,50	4,69	5,01	4,84	4,58	4,88	4,73
Kalimantan Selatan	4,85	6,16	5,49	5,25	6,92	6,08	5,08	6,60	5,83
Kalimantan Timur	3,81	3,90	3,85	4,41	4,37	4,39	4,04	4,08	4,06
Sulawesi Utara	7,08	8,81	7,94	8,01	9,85	8,90	7,60	9,38	8,47
Gorontalo	5,21	6,70	5,97	5,51	6,45	5,97	5,41	6,54	5,97
Sulawesi Tengah	4,85	5,37	5,11	5,87	6,14	6,00	5,62	5,94	5,78
Sulawesi Selatan	6,27	8,00	7,15	7,98	10,03	9,04	7,35	9,29	8,34
Sulawesi Barat	6,08	7,23	6,66	5,86	6,66	6,26	5,91	6,79	6,35
Sulawesi Tenggara	4,47	5,24	4,86	5,77	6,72	6,24	5,41	6,31	5,86
Maluku	5,59	6,41	6,00	6,15	6,55	6,35	5,94	6,49	6,22
Maluku Utara	4,24	4,76	4,49	4,96	4,90	4,93	4,76	4,86	4,81
Papua	2,96	2,72	2,85	1,84	1,39	1,63	2,13	1,73	1,94
Papua Barat	3,01	2,83	2,93	3,41	2,99	3,22	3,26	2,93	3,10
INDONESIA	6,35	7,56	6,95	7,47	8,91	8,18	6,91	8,23	7,57

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.4.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2012

Laki-laki

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,58	87,90	0,39	11,12	100,00
Sumatera Utara	0,56	81,85	1,17	16,42	100,00
Sumatera Barat	0,36	85,21	1,99	12,44	100,00
R i a u	0,49	85,84	1,52	12,16	100,00
Kepulauan Riau	1,57	74,81	2,70	20,93	100,00
J a m b i	0,37	82,55	1,14	15,93	100,00
Sumatera Selatan	0,34	85,79	0,70	13,17	100,00
Bangka Belitung	1,15	80,02	1,87	16,96	100,00
Bengkulu	0,49	82,23	1,18	16,09	100,00
Lampung	0,09	83,34	0,78	15,79	100,00
DKI Jakarta	0,36	81,79	0,73	17,11	100,00
Jawa Barat	0,27	86,46	1,00	12,27	100,00
Banten	0,11	85,19	0,44	14,26	100,00
Jawa Tengah	0,46	82,97	1,02	15,55	100,00
DI Yogyakarta	0,63	83,34	0,73	15,30	100,00
Jawa Timur	0,54	82,52	1,18	15,76	100,00
B a l i	2,44	79,45	0,83	17,28	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,12	81,18	2,04	15,66	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,41	76,96	0,90	19,74	100,00
Kalimantan Barat	1,31	82,71	1,22	14,76	100,00
Kalimantan Tengah	0,79	79,80	1,24	18,17	100,00
Kalimantan Selatan	1,11	82,40	2,34	14,15	100,00
Kalimantan Timur	0,99	78,71	2,40	17,91	100,00
Sulawesi Utara	2,30	79,52	0,93	17,24	100,00
Gorontalo	1,09	85,01	1,89	12,01	100,00
Sulawesi Tengah	1,29	82,44	2,80	13,47	100,00
Sulawesi Selatan	1,11	80,03	1,73	17,13	100,00
Sulawesi Barat	0,94	79,27	2,84	16,95	100,00
Sulawesi Tenggara	1,01	82,57	2,86	13,56	100,00
Maluku	1,85	76,92	1,40	19,84	100,00
Maluku Utara	1,59	75,53	1,25	21,63	100,00
Papua	0,30	82,16	0,82	16,72	100,00
Papua Barat	2,13	76,43	1,43	20,01	100,00
INDONESIA	0,62	83,15	1,15	15,08	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.4.2
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2012

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perempuan
					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,38	27,02	2,60	69,99	100,00
Sumatera Utara	1,17	34,15	1,10	63,58	100,00
Sumatera Barat	0,49	33,73	5,91	59,87	100,00
R i a u	0,26	36,33	3,78	59,63	100,00
Kepulauan Riau	0,96	39,48	4,33	55,22	100,00
J a m b i	0,85	35,60	2,87	60,68	100,00
Sumatera Selatan	0,29	40,96	2,10	56,66	100,00
Bangka Belitung	1,37	38,55	3,59	56,49	100,00
Bengkulu	0,36	38,76	3,14	57,74	100,00
Lampung	0,26	40,04	1,88	57,82	100,00
DKI Jakarta	1,74	37,59	3,72	56,95	100,00
Jawa Barat	0,47	37,31	3,23	58,99	100,00
Banten	0,26	34,50	3,37	61,87	100,00
Jawa Tengah	0,80	37,64	2,92	58,64	100,00
DI Yogyakarta	1,05	42,34	3,03	53,57	100,00
Jawa Timur	0,83	32,55	3,32	63,30	100,00
B a l i	5,25	48,46	2,07	44,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,18	42,40	6,71	49,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,64	42,01	2,23	51,11	100,00
Kalimantan Barat	2,23	39,78	1,15	56,84	100,00
Kalimantan Tengah	0,59	38,97	2,47	57,97	100,00
Kalimantan Selatan	1,72	26,03	4,68	67,58	100,00
Kalimantan Timur	1,02	39,26	3,07	56,64	100,00
Sulawesi Utara	3,59	46,62	2,29	47,50	100,00
Gorontalo	4,20	40,56	1,88	53,36	100,00
Sulawesi Tengah	1,43	42,34	3,98	52,25	100,00
Sulawesi Selatan	4,20	35,67	3,46	56,66	100,00
Sulawesi Barat	4,95	36,75	6,26	52,04	100,00
Sulawesi Tenggara	1,13	37,05	3,72	58,10	100,00
Maluku	3,87	44,45	2,04	49,64	100,00
Maluku Utara	1,34	39,36	2,23	57,07	100,00
Papua		50,47	1,86	47,66	100,00
Papua Barat	0,96	40,50	1,72	56,82	100,00
INDONESIA	1,15	36,65	3,11	59,08	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.4.3

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2012

Laki-laki+Perempuan					
Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,47	54,08	1,62	43,83	100,00
Sumatera Utara	0,90	54,86	1,13	43,10	100,00
Sumatera Barat	0,44	55,59	4,25	39,73	100,00
R i a u	0,38	61,17	2,65	35,81	100,00
Kepulauan Riau	1,27	57,35	3,51	37,87	100,00
J a m b i	0,61	59,05	2,01	38,33	100,00
Sumatera Selatan	0,31	62,05	1,44	36,20	100,00
Bangka Belitung	1,26	58,47	2,76	37,50	100,00
Bengkulu	0,43	60,15	2,18	37,25	100,00
Lampung	0,18	61,66	1,33	36,83	100,00
DKI Jakarta	1,08	58,87	2,28	37,77	100,00
Jawa Barat	0,38	60,61	2,17	36,84	100,00
Banten	0,19	58,41	1,99	39,41	100,00
Jawa Tengah	0,64	58,20	2,06	39,10	100,00
DI Yogyakarta	0,86	60,49	2,01	36,64	100,00
Jawa Timur	0,70	54,45	2,38	42,47	100,00
B a l i	3,94	62,93	1,49	31,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,16	60,70	4,51	33,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,57	58,71	1,59	36,12	100,00
Kalimantan Barat	1,77	61,13	1,19	35,91	100,00
Kalimantan Tengah	0,69	59,62	1,85	37,84	100,00
Kalimantan Selatan	1,45	50,90	3,65	44,01	100,00
Kalimantan Timur	1,01	59,94	2,72	36,33	100,00
Sulawesi Utara	3,00	61,70	1,67	33,63	100,00
Gorontalo	2,79	60,77	1,89	34,56	100,00
Sulawesi Tengah	1,36	62,34	3,39	32,91	100,00
Sulawesi Selatan	2,87	54,76	2,72	39,65	100,00
Sulawesi Barat	3,08	56,62	4,66	35,64	100,00
Sulawesi Tenggara	1,07	58,19	3,32	37,42	100,00
Maluku	2,89	60,15	1,73	35,23	100,00
Maluku Utara	1,47	57,67	1,74	39,12	100,00
Papua	0,17	68,96	1,25	29,61	100,00
Papua Barat	1,61	60,46	1,56	36,37	100,00
INDONESIA	0,91	58,03	2,21	38,85	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.5.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga,
2012

					Laki-laki
Provinsi	Kepala Rumahtangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	96,27	0,27	3,17	0,29	100,00
Sumatera Utara	91,74	0,16	7,30	0,80	100,00
Sumatera Barat	89,89	0,18	7,91	2,02	100,00
R i a u	91,79	0,16	6,25	1,80	100,00
Kepulauan Riau	88,66		9,62	1,72	100,00
J a m b i	91,50		7,50	1,00	100,00
Sumatera Selatan	87,89	0,32	10,66	1,13	100,00
Bangka Belitung	92,09	0,15	6,39	1,37	100,00
Bengkulu	89,52	0,12	9,00	1,36	100,00
Lampung	90,50	0,21	8,55	0,75	100,00
DKI Jakarta	94,46	0,39	4,03	1,12	100,00
Jawa Barat	94,00	0,30	5,00	0,70	100,00
Banten	92,05	0,21	6,82	0,92	100,00
Jawa Tengah	87,80	0,35	10,80	1,05	100,00
DI Yogyakarta	90,83	0,21	8,09	0,86	100,00
Jawa Timur	88,93	0,39	9,02	1,66	100,00
B a l i	69,88	0,11	27,37	2,63	100,00
Nusa Tenggara Barat	90,68	0,43	8,24	0,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,42	0,27	13,08	3,23	100,00
Kalimantan Barat	90,38	0,09	8,79	0,74	100,00
Kalimantan Tengah	89,49	0,14	9,38	0,99	100,00
Kalimantan Selatan	92,84	0,35	6,31	0,50	100,00
Kalimantan Timur	90,33	0,06	8,01	1,60	100,00
Sulawesi Utara	85,91	0,12	11,23	2,74	100,00
Gorontalo	88,42	0,16	8,49	2,93	100,00
Sulawesi Tengah	88,57	0,37	9,16	1,90	100,00
Sulawesi Selatan	89,45	0,40	7,97	2,18	100,00
Sulawesi Barat	87,14		9,58	3,28	100,00
Sulawesi Tenggara	90,10	0,10	8,08	1,72	100,00
Maluku	84,70	0,09	13,41	1,80	100,00
Maluku Utara	82,97		14,75	2,28	100,00
Papua	90,10	0,65	6,91	2,33	100,00
Papua Barat	93,40		4,66	1,95	100,00
INDONESIA	89,80	0,29	8,63	1,28	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.5.2
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2012

Provinsi	Kepala Rumahtangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Perempuan
					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	57,80	25,16	15,97	1,06	100,00
Sumatera Utara	46,48	31,74	19,23	2,54	100,00
Sumatera Barat	36,72	30,93	29,43	2,92	100,00
R i a u	37,04	32,11	28,31	2,54	100,00
Kepulauan Riau	29,68	31,37	37,13	1,81	100,00
J a m b i	31,66	33,01	31,70	3,62	100,00
Sumatera Selatan	28,88	34,81	34,82	1,49	100,00
Bangka Belitung	38,33	35,62	24,71	1,34	100,00
Bengkulu	33,44	33,64	30,64	2,28	100,00
Lampung	29,43	35,19	32,56	2,82	100,00
DKI Jakarta	48,58	32,16	16,20	3,06	100,00
Jawa Barat	41,71	34,84	21,09	2,36	100,00
Banten	38,06	31,06	27,43	3,45	100,00
Jawa Tengah	34,18	33,18	28,88	3,75	100,00
DI Yogyakarta	34,44	38,42	23,99	3,16	100,00
Jawa Timur	36,32	28,79	30,26	4,63	100,00
B a l i	15,55	35,29	40,86	8,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,29	38,11	21,69	1,91	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,39	35,18	29,49	5,93	100,00
Kalimantan Barat	29,25	35,29	31,61	3,86	100,00
Kalimantan Tengah	35,24	36,58	26,86	1,31	100,00
Kalimantan Selatan	46,19	23,78	25,86	4,18	100,00
Kalimantan Timur	35,04	34,19	27,30	3,46	100,00
Sulawesi Utara	28,43	40,97	25,70	4,89	100,00
Gorontalo	27,94	33,81	31,36	6,90	100,00
Sulawesi Tengah	30,30	35,65	29,64	4,41	100,00
Sulawesi Selatan	34,93	32,30	26,95	5,82	100,00
Sulawesi Barat	34,74	31,55	26,83	6,88	100,00
Sulawesi Tenggara	38,09	32,86	25,43	3,63	100,00
Maluku	30,71	39,40	25,10	4,79	100,00
Maluku Utara	31,72	31,32	33,77	3,19	100,00
Papua	33,52	43,80	19,93	2,75	100,00
Papua Barat	35,70	37,67	23,53	3,10	100,00
INDONESIA	36,70	32,61	27,03	3,65	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 3.5.3

**Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga,
2012**

Laki-laki+Perempuan					
Provinsi	Kepala Rumahtangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,90	14,10	10,28	0,72	100,00
Sumatera Utara	66,13	18,03	14,05	1,79	100,00
Sumatera Barat	59,29	17,87	20,29	2,54	100,00
R i a u	64,51	16,08	17,24	2,17	100,00
Kepulauan Riau	59,52	15,50	23,21	1,77	100,00
J a m b i	61,55	16,53	19,61	2,31	100,00
Sumatera Selatan	56,64	18,58	23,45	1,33	100,00
Bangka Belitung	64,16	18,57	15,91	1,35	100,00
Bengkulu	61,04	17,15	19,99	1,83	100,00
Lampung	59,93	17,72	20,57	1,78	100,00
DKI Jakarta	70,68	16,86	10,34	2,12	100,00
Jawa Barat	66,50	18,47	13,46	1,58	100,00
Banten	63,53	16,51	17,71	2,26	100,00
Jawa Tengah	58,50	18,30	20,68	2,52	100,00
DI Yogyakarta	59,39	21,51	16,95	2,14	100,00
Jawa Timur	59,38	16,34	20,95	3,33	100,00
B a l i	40,91	18,86	34,56	5,66	100,00
Nusa Tenggara Barat	63,01	20,33	15,34	1,32	100,00
Nusa Tenggara Timur	55,22	18,49	21,65	4,64	100,00
Kalimantan Barat	59,66	17,78	20,26	2,31	100,00
Kalimantan Tengah	62,67	18,15	18,02	1,15	100,00
Kalimantan Selatan	66,77	13,44	17,23	2,55	100,00
Kalimantan Timur	64,03	16,30	17,19	2,49	100,00
Sulawesi Utara	54,78	22,25	19,07	3,91	100,00
Gorontalo	55,43	18,51	20,96	5,09	100,00
Sulawesi Tengah	59,36	18,06	19,43	3,16	100,00
Sulawesi Selatan	58,40	18,57	18,78	4,25	100,00
Sulawesi Barat	59,23	16,81	18,77	5,20	100,00
Sulawesi Tenggara	62,24	17,64	17,37	2,74	100,00
Maluku	56,81	20,40	19,45	3,34	100,00
Maluku Utara	57,67	15,46	24,14	2,73	100,00
Papua	66,53	18,63	12,34	2,51	100,00
Papua Barat	67,76	16,74	13,04	2,46	100,00
INDONESIA	61,11	17,76	18,57	2,56	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.1.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,
2012

Provinsi	Perkotaan						Total
	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	14,11	17,90	37,27	9,87	14,09	6,76	100,00
Sumatera Utara	6,99	24,38	28,36	16,61	18,30	5,36	100,00
Sumatera Barat	6,14	28,78	23,32	15,58	18,21	7,97	100,00
R i a u	8,94	22,56	24,95	14,90	18,19	10,46	100,00
Kepulauan Riau	14,20	22,59	26,78	12,86	20,06	3,50	100,00
J a m b i	15,22	25,63	27,44	9,32	15,97	6,41	100,00
Sumatera Selatan	9,66	29,99	31,58	11,77	10,51	6,49	100,00
Bangka Belitung	15,09	30,93	29,91	10,78	11,67	1,63	100,00
Bengkulu	12,19	30,72	34,39	6,33	10,50	5,87	100,00
Lampung	14,41	28,38	28,54	12,25	12,63	3,79	100,00
DKI Jakarta	7,06	17,46	23,27	15,35	21,99	14,87	100,00
Jawa Barat	17,01	31,14	29,77	7,47	10,13	4,49	100,00
Banten	26,78	26,93	19,20	7,09	12,49	7,51	100,00
Jawa Tengah	28,62	29,12	22,84	7,39	8,18	3,85	100,00
DI Yogyakarta	27,20	19,97	21,32	12,39	12,16	6,96	100,00
Jawa Timur	23,50	30,39	24,67	8,05	10,08	3,32	100,00
B a l i	34,58	22,41	24,98	5,68	8,50	3,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,92	22,12	12,67	4,51	6,53	4,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,70	25,96	26,00	11,75	17,98	6,61	100,00
Kalimantan Barat	29,09	28,76	18,11	9,29	10,15	4,60	100,00
Kalimantan Tengah	10,97	26,75	27,53	12,22	16,41	6,12	100,00
Kalimantan Selatan	12,38	28,47	25,86	10,59	15,52	7,19	100,00
Kalimantan Timur	11,63	27,11	30,30	11,79	15,73	3,43	100,00
Sulawesi Utara	0,75	27,58	20,71	15,43	25,41	10,12	100,00
Gorontalo	3,97	34,35	23,76	12,66	17,45	7,81	100,00
Sulawesi Tengah	6,11	22,46	29,50	14,74	16,97	10,22	100,00
Sulawesi Selatan	20,78	21,80	20,04	10,44	17,29	9,65	100,00
Sulawesi Barat	24,57	31,90	20,84	4,83	11,51	6,34	100,00
Sulawesi Tenggara	18,63	24,73	25,57	10,75	15,86	4,46	100,00
Maluku	5,33	22,02	26,78	14,58	21,43	9,86	100,00
Maluku Utara	9,38	22,73	33,85	8,49	19,67	5,88	100,00
Papua	3,18	14,50	32,27	16,22	24,29	9,54	100,00
Papua Barat	2,80	13,22	27,11	27,07	20,53	9,27	100,00
INDONESIA	20,07	27,67	25,37	9,39	12,04	5,46	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.1.2
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,
2012

Provinsi	Perdesaan						Total
	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	24,82	36,18	29,57	5,43	3,31	0,69	100,00
Sumatera Utara	13,59	37,65	33,28	9,26	4,98	1,24	100,00
Sumatera Barat	10,86	49,42	23,56	9,76	4,82	1,57	100,00
R i a u	21,13	41,65	29,98	4,54	2,40	0,30	100,00
Kepulauan Riau	26,00	45,53	23,44	2,44	2,32	0,26	100,00
J a m b i	27,74	36,72	26,54	4,54	3,94	0,52	100,00
Sumatera Selatan	19,33	45,07	29,48	3,83	2,09	0,19	100,00
Bangka Belitung	28,87	43,31	22,96	1,96	2,90		100,00
Bengkulu	27,38	42,59	21,84	3,94	3,65	0,61	100,00
Lampung	27,39	44,59	20,04	5,59	1,86	0,53	100,00
DKI Jakarta							-
Jawa Barat	24,27	39,13	31,47	2,73	1,71	0,69	100,00
Banten	31,67	41,94	19,85	2,01	3,64	0,89	100,00
Jawa Tengah	37,22	36,62	20,35	2,65	2,23	0,94	100,00
DI Yogyakarta	45,49	22,28	20,54	6,50	3,70	1,50	100,00
Jawa Timur	45,38	33,21	17,60	1,74	1,46	0,60	100,00
B a l i	46,36	25,97	21,44	3,65	1,86	0,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,97	27,06	15,13	1,88	2,19	0,77	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,04	40,23	19,09	2,65	2,18	0,82	100,00
Kalimantan Barat	44,13	34,51	16,16	3,30	1,62	0,28	100,00
Kalimantan Tengah	17,93	34,01	40,58	4,52	2,37	0,59	100,00
Kalimantan Selatan	22,93	48,90	21,95	2,55	3,13	0,54	100,00
Kalimantan Timur	26,69	35,60	31,94	2,61	2,93	0,23	100,00
Sulawesi Utara	2,58	45,04	28,22	11,15	11,15	1,85	100,00
Gorontalo	10,91	53,38	22,86	4,36	6,80	1,69	100,00
Sulawesi Tengah	17,98	36,80	32,86	6,42	4,69	1,26	100,00
Sulawesi Selatan	41,41	31,66	18,30	3,91	3,12	1,59	100,00
Sulawesi Barat	30,67	40,70	18,44	4,24	4,04	1,90	100,00
Sulawesi Tenggara	40,40	34,35	18,24	3,36	3,05	0,59	100,00
Maluku	8,25	32,05	45,02	7,07	5,94	1,68	100,00
Maluku Utara	18,14	41,60	27,93	4,74	6,80	0,79	100,00
Papua	49,68	20,32	21,24	3,02	4,44	1,30	100,00
Papua Barat	23,63	34,28	26,20	8,26	5,42	2,21	100,00
INDONESIA	33,42	36,83	22,83	3,56	2,54	0,82	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.1.3
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,
2012

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan						Total
	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	22,07	31,49	31,55	6,57	6,08	2,25	100,00
Sumatera Utara	10,44	31,32	30,94	12,76	11,33	3,21	100,00
Sumatera Barat	9,20	42,17	23,48	11,81	9,53	3,82	100,00
R i a u	15,99	33,59	27,86	8,91	9,06	4,58	100,00
Kepulauan Riau	17,54	29,10	25,83	9,91	15,03	2,58	100,00
J a m b i	23,66	33,10	26,84	6,10	7,86	2,44	100,00
Sumatera Selatan	15,96	39,82	30,22	6,59	5,03	2,39	100,00
Bangka Belitung	21,84	37,00	26,50	6,46	7,37	0,83	100,00
Bengkulu	23,54	39,59	25,00	4,54	5,38	1,94	100,00
Lampung	24,32	40,76	22,05	7,16	4,40	1,30	100,00
DKI Jakarta	7,06	17,46	23,27	15,35	21,99	14,87	100,00
Jawa Barat	19,91	34,34	30,45	5,57	6,76	2,97	100,00
Banten	28,68	32,77	19,45	5,12	9,05	4,94	100,00
Jawa Tengah	33,49	33,37	21,43	4,71	4,81	2,20	100,00
DI Yogyakarta	34,96	20,95	20,99	9,89	8,57	4,65	100,00
Jawa Timur	35,81	31,98	20,69	4,50	5,23	1,79	100,00
B a l i	40,21	24,11	23,29	4,71	5,33	2,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,73	25,06	14,13	2,95	3,95	2,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,14	37,85	20,24	4,17	4,82	1,78	100,00
Kalimantan Barat	39,36	32,69	16,78	5,20	4,33	1,65	100,00
Kalimantan Tengah	15,70	31,68	36,40	6,98	6,87	2,36	100,00
Kalimantan Selatan	18,74	40,79	23,50	5,74	8,05	3,18	100,00
Kalimantan Timur	17,86	30,62	30,98	8,00	10,44	2,11	100,00
Sulawesi Utara	1,81	37,67	25,05	12,96	17,17	5,34	100,00
Gorontalo	8,54	46,90	23,17	7,19	10,43	3,78	100,00
Sulawesi Tengah	15,41	33,70	32,14	8,22	7,34	3,19	100,00
Sulawesi Selatan	34,88	28,54	18,85	5,98	7,61	4,14	100,00
Sulawesi Barat	29,21	38,60	19,01	4,38	5,83	2,96	100,00
Sulawesi Tenggara	35,41	32,15	19,92	5,06	5,99	1,48	100,00
Maluku	7,18	28,39	38,36	9,81	11,59	4,67	100,00
Maluku Utara	15,89	36,74	29,45	5,70	10,11	2,10	100,00
Papua	32,07	18,12	25,42	8,02	11,96	4,42	100,00
Papua Barat	16,06	26,62	26,53	15,10	10,91	4,78	100,00
INDONESIA	27,29	32,62	24,00	6,23	6,90	2,95	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.1

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Perkotaan - Laki-Laki					
Provinsi	Dapat membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	60,80	1,09	31,82	6,29	100,00
Sumatera Utara	53,21	0,03	44,38	2,38	100,00
Sumatera Barat	55,28	0,06	40,53	4,13	100,00
R i a u	19,29	1,90	75,29	3,52	100,00
Kepulauan Riau	24,81	1,22	65,87	8,09	100,00
J a m b i	41,87	1,33	51,82	4,98	100,00
Sumatera Selatan	33,52	0,45	61,46	4,57	100,00
Bangka Belitung	50,08	1,00	44,73	4,20	100,00
Bengkulu	65,92	1,26	24,35	8,48	100,00
Lampung	56,63	2,23	34,51	6,63	100,00
DKI Jakarta	30,74	0,53	66,65	2,08	100,00
Jawa Barat	30,08	1,90	58,79	9,23	100,00
Banten	29,05	3,88	55,47	11,61	100,00
Jawa Tengah	44,11	1,31	36,83	17,75	100,00
DI Yogyakarta	34,34	0,36	50,24	15,07	100,00
Jawa Timur	43,09	1,84	42,27	12,81	100,00
B a l i	34,83	1,57	46,18	17,41	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,61	1,28	18,18	36,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	86,35		8,11	5,54	100,00
Kalimantan Barat	41,73	5,98	37,60	14,69	100,00
Kalimantan Tengah	54,27	0,60	36,92	8,21	100,00
Kalimantan Selatan	20,09	3,39	71,07	5,44	100,00
Kalimantan Timur	38,97	1,46	54,61	4,96	100,00
Sulawesi Utara	89,18	0,11	9,92	0,78	100,00
Gorontalo	53,98		41,70	4,33	100,00
Sulawesi Tengah	53,43	0,50	43,51	2,56	100,00
Sulawesi Selatan	38,67	1,98	39,77	19,57	100,00
Sulawesi Barat	50,06		21,80	28,14	100,00
Sulawesi Tenggara	63,23		24,64	12,13	100,00
Maluku	68,08	0,31	26,36	5,26	100,00
Maluku Utara	56,09		39,97	3,93	100,00
Papua	70,18	0,32	24,82	4,67	100,00
Papua Barat	79,74	0,04	19,24	0,98	100,00
INDONESIA	39,81	1,54	47,44	11,21	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.2

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Provinsi	Dapat membaca				Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya			
	(2)	(3)	(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	51,38	5,36	21,89	21,38	100,00	
Sumatera Utara	53,15	1,40	32,24	13,21	100,00	
Sumatera Barat	50,08	1,14	36,51	12,28	100,00	
R i a u	14,66	5,33	68,43	11,58	100,00	
Kepulauan Riau	31,64	7,25	40,74	20,37	100,00	
J a m b i	36,08	5,84	35,41	22,67	100,00	
Sumatera Selatan	31,26	5,36	48,65	14,73	100,00	
Bangka Belitung	45,30	5,14	27,29	22,28	100,00	
Bengkulu	59,12	1,83	22,49	16,56	100,00	
Lampung	42,86	2,30	28,19	26,65	100,00	
DKI Jakarta	29,40	5,44	55,10	10,05	100,00	
Jawa Barat	23,05	6,32	47,94	22,69	100,00	
Banten	20,99	11,97	33,11	33,93	100,00	
Jawa Tengah	30,60	2,80	20,41	46,19	100,00	
DI Yogyakarta	30,28	1,39	24,44	43,89	100,00	
Jawa Timur	33,39	4,37	23,39	38,85	100,00	
B a l i	28,24	1,66	18,81	51,30	100,00	
Nusa Tenggara Barat	23,56	0,80	5,76	69,88	100,00	
Nusa Tenggara Timur	72,58		4,67	22,75	100,00	
Kalimantan Barat	34,01	3,93	21,62	40,44	100,00	
Kalimantan Tengah	50,13	8,81	29,03	12,03	100,00	
Kalimantan Selatan	16,49	4,98	60,20	18,34	100,00	
Kalimantan Timur	39,29	4,01	36,96	19,74	100,00	
Sulawesi Utara	86,18	0,32	11,49	2,01	100,00	
Gorontalo	43,85	0,77	45,79	9,59	100,00	
Sulawesi Tengah	44,69	1,39	37,29	16,63	100,00	
Sulawesi Selatan	37,45	2,83	27,56	32,16	100,00	
Sulawesi Barat	43,46	0,66	12,06	43,82	100,00	
Sulawesi Tenggara	52,52	0,54	16,03	30,92	100,00	
Maluku	77,39	2,65	12,26	7,71	100,00	
Maluku Utara	56,24	2,19	24,11	17,46	100,00	
Papua	71,11	0,48	10,01	18,39	100,00	
Papua Barat	80,40		13,04	6,56	100,00	
INDONESIA	32,34	4,31	32,27	31,08	100,00	

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.3

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Provinsi	Perkotaan - Laki-laki+Perempuan				Jumlah
	Dapat membaca			Tidak Dapat	
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	55,63	3,43	26,37	14,57	100,00
Sumatera Utara	53,18	0,80	37,57	8,46	100,00
Sumatera Barat	52,30	0,68	38,22	8,80	100,00
R i a u	16,97	3,62	71,84	7,57	100,00
Kepulauan Riau	28,18	4,20	53,47	14,15	100,00
J a m b i	39,00	3,56	43,69	13,75	100,00
Sumatera Selatan	32,29	3,13	54,48	10,10	100,00
Bangka Belitung	47,55	3,18	35,51	13,75	100,00
Bengkulu	62,52	1,54	23,42	12,52	100,00
Lampung	49,46	2,27	31,21	17,06	100,00
DKI Jakarta	30,04	3,08	60,66	6,22	100,00
Jawa Barat	26,38	4,23	53,08	16,31	100,00
Banten	24,80	8,15	43,67	23,39	100,00
Jawa Tengah	36,68	2,13	27,80	33,39	100,00
DI Yogyakarta	32,08	0,93	35,91	31,08	100,00
Jawa Timur	37,68	3,25	31,74	27,33	100,00
B a l i	31,33	1,62	31,65	35,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,92	1,02	11,56	54,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	79,16		6,31	14,53	100,00
Kalimantan Barat	37,81	4,93	29,48	27,78	100,00
Kalimantan Tengah	52,19	4,72	32,96	10,13	100,00
Kalimantan Selatan	18,10	4,27	65,05	12,58	100,00
Kalimantan Timur	39,12	2,69	46,09	12,10	100,00
Sulawesi Utara	87,53	0,23	10,78	1,46	100,00
Gorontalo	48,20	0,44	44,03	7,33	100,00
Sulawesi Tengah	48,87	0,96	40,26	9,90	100,00
Sulawesi Selatan	37,98	2,47	32,82	26,73	100,00
Sulawesi Barat	46,44	0,36	16,45	36,75	100,00
Sulawesi Tenggara	57,44	0,29	19,98	22,29	100,00
Maluku	73,02	1,55	18,88	6,56	100,00
Maluku Utara	56,17	1,14	31,69	11,00	100,00
Papua	70,59	0,39	18,35	10,67	100,00
Papua Barat	80,04	0,02	16,41	3,53	100,00
INDONESIA	35,78	3,04	39,24	21,94	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.4

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Perdesaan - Laki-laki					
Provinsi	Dapat membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	55,39	3,44	26,51	14,66	100,00
Sumatera Utara	59,33	0,48	30,01	10,17	100,00
Sumatera Barat	59,82	0,41	29,48	10,30	100,00
R i a u	23,68	3,84	65,10	7,38	100,00
Kepulauan Riau	28,46	1,11	59,84	10,60	100,00
J a m b i	39,75	3,41	44,49	12,36	100,00
Sumatera Selatan	42,14	1,08	47,76	9,02	100,00
Bangka Belitung	43,74	0,71	41,49	14,07	100,00
Bengkulu	50,52	1,86	35,40	12,22	100,00
Lampung	55,09	1,24	26,77	16,90	100,00
DKI Jakarta					-
Jawa Barat	25,98	3,70	56,68	13,64	100,00
Banten	21,18	7,80	55,14	15,88	100,00
Jawa Tengah	39,37	1,56	32,12	26,95	100,00
DI Yogyakarta	40,51	0,23	28,48	30,78	100,00
Jawa Timur	38,30	2,48	26,61	32,60	100,00
B a l i	29,75	0,95	41,48	27,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,10	0,90	12,75	45,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	68,66		1,85	29,49	100,00
Kalimantan Barat	45,70	1,74	22,50	30,06	100,00
Kalimantan Tengah	50,74	2,25	36,31	10,71	100,00
Kalimantan Selatan	23,92	2,92	60,75	12,41	100,00
Kalimantan Timur	44,92	3,49	33,21	18,39	100,00
Sulawesi Utara	86,23	0,39	10,27	3,12	100,00
Gorontalo	60,80	0,30	19,87	19,04	100,00
Sulawesi Tengah	59,41	0,85	23,89	15,86	100,00
Sulawesi Selatan	37,38	3,14	24,17	35,32	100,00
Sulawesi Barat	69,69	0,50	4,41	25,41	100,00
Sulawesi Tenggara	56,19	0,95	12,48	30,38	100,00
Maluku	67,85	1,13	26,32	4,70	100,00
Maluku Utara	69,69	0,62	16,09	13,59	100,00
Papua	42,48	1,18	6,68	49,66	100,00
Papua Barat	62,84	2,61	19,76	14,79	100,00
INDONESIA	41,70	2,12	33,03	23,15	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.5

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Perdesaan - Perempuan					
Provinsi	Dapat membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	38,62	9,60	16,16	35,62	100,00
Sumatera Utara	54,09	1,91	20,55	23,45	100,00
Sumatera Barat	52,17	1,86	25,26	20,71	100,00
R i a u	14,78	15,10	44,58	25,54	100,00
Kepulauan Riau	20,72	9,49	41,82	27,97	100,00
J a m b i	29,38	8,49	24,34	37,80	100,00
Sumatera Selatan	29,18	4,35	34,60	31,87	100,00
Bangka Belitung	32,81	4,59	21,87	40,73	100,00
Bengkulu	34,64	5,28	17,98	42,10	100,00
Lampung	33,96	5,02	12,68	48,35	100,00
DKI Jakarta					-
Jawa Barat	18,61	7,54	40,03	33,82	100,00
Banten	14,48	13,30	32,74	39,47	100,00
Jawa Tengah	24,46	2,20	12,62	60,72	100,00
DI Yogyakarta	26,37	0,64	10,37	62,62	100,00
Jawa Timur	20,73	4,05	9,79	65,43	100,00
B a l i	18,76	1,92	13,94	65,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,35	0,68	3,27	72,70	100,00
Nusa Tenggara Timur	48,02	0,18	1,06	50,75	100,00
Kalimantan Barat	23,72	4,51	8,83	62,93	100,00
Kalimantan Tengah	46,65	6,17	20,38	26,80	100,00
Kalimantan Selatan	17,16	9,73	39,97	33,15	100,00
Kalimantan Timur	36,08	7,36	23,19	33,37	100,00
Sulawesi Utara	83,01	0,29	7,57	9,13	100,00
Gorontalo	44,48	0,93	31,42	23,17	100,00
Sulawesi Tengah	49,72	1,13	17,75	31,40	100,00
Sulawesi Selatan	26,13	5,14	13,85	54,88	100,00
Sulawesi Barat	43,40		2,66	53,94	100,00
Sulawesi Tenggara	34,03	0,66	5,20	60,10	100,00
Maluku	68,67	1,48	15,02	14,83	100,00
Maluku Utara	58,60	1,25	7,25	32,91	100,00
Papua	34,66		3,91	61,42	100,00
Papua Barat	47,75	1,65	6,47	44,12	100,00
INDONESIA	28,04	4,24	17,70	50,02	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.6

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Perdesaan - Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Dapat membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,03	6,88	20,73	26,36	100,00
Sumatera Utara	56,34	1,30	24,62	17,74	100,00
Sumatera Barat	55,41	1,24	27,05	16,30	100,00
R i a u	19,27	9,42	54,94	16,37	100,00
Kepulauan Riau	24,63	5,26	50,92	19,20	100,00
J a m b i	34,53	5,96	34,35	25,15	100,00
Sumatera Selatan	35,38	2,79	40,90	20,94	100,00
Bangka Belitung	38,16	2,69	31,48	27,67	100,00
Bengkulu	42,42	3,60	26,51	27,47	100,00
Lampung	44,64	3,11	19,80	32,45	100,00
DKI Jakarta					-
Jawa Barat	22,11	5,72	47,92	24,25	100,00
Banten	17,64	10,71	43,29	28,36	100,00
Jawa Tengah	31,26	1,91	21,51	45,32	100,00
DI Yogyakarta	32,59	0,46	18,33	48,62	100,00
Jawa Timur	28,38	3,37	17,11	51,14	100,00
B a l i	23,87	1,47	26,73	47,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,79	0,78	7,78	59,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,89	0,09	1,43	40,59	100,00
Kalimantan Barat	34,72	3,13	15,67	46,49	100,00
Kalimantan Tengah	48,73	4,17	28,49	18,61	100,00
Kalimantan Selatan	20,11	6,75	49,06	24,08	100,00
Kalimantan Timur	40,80	5,29	28,54	25,36	100,00
Sulawesi Utara	84,50	0,34	8,82	6,34	100,00
Gorontalo	52,11	0,64	26,02	21,24	100,00
Sulawesi Tengah	54,61	0,99	20,84	23,56	100,00
Sulawesi Selatan	30,97	4,28	18,29	46,46	100,00
Sulawesi Barat	55,82	0,23	3,49	40,46	100,00
Sulawesi Tenggara	44,35	0,79	8,59	46,26	100,00
Maluku	68,27	1,31	20,57	9,85	100,00
Maluku Utara	64,32	0,93	11,81	22,94	100,00
Papua	39,32	0,71	5,56	54,41	100,00
Papua Barat	56,24	2,19	13,95	27,62	100,00
INDONESIA	34,32	3,26	24,75	37,67	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.7

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan - Laki-Laki				Jumlah
	Dapat membaca			Tidak Dapat	
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	56,80	2,83	27,89	12,48	100,00
Sumatera Utara	56,38	0,26	36,93	6,42	100,00
Sumatera Barat	58,22	0,29	33,38	8,12	100,00
R i a u	21,84	3,03	69,36	5,76	100,00
Kepulauan Riau	25,84	1,19	64,17	8,80	100,00
J a m b i	40,45	2,72	46,90	9,93	100,00
Sumatera Selatan	39,23	0,87	52,38	7,52	100,00
Bangka Belitung	46,91	0,85	43,11	9,12	100,00
Bengkulu	54,47	1,70	32,57	11,26	100,00
Lampung	55,44	1,46	28,52	14,58	100,00
DKI Jakarta	30,74	0,53	66,65	2,08	100,00
Jawa Barat	28,44	2,62	57,95	11,00	100,00
Banten	25,99	5,40	55,34	13,27	100,00
Jawa Tengah	41,41	1,45	34,14	22,99	100,00
DI Yogyakarta	36,94	0,30	41,07	21,69	100,00
Jawa Timur	40,41	2,20	33,52	23,87	100,00
B a l i	32,42	1,28	43,95	22,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,11	1,05	14,93	41,91	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,62		2,89	25,49	100,00
Kalimantan Barat	44,46	3,07	27,23	25,24	100,00
Kalimantan Tengah	51,85	1,73	36,50	9,92	100,00
Kalimantan Selatan	22,38	3,11	64,90	9,61	100,00
Kalimantan Timur	41,47	2,31	45,59	10,62	100,00
Sulawesi Utara	87,46	0,27	10,12	2,15	100,00
Gorontalo	58,60	0,20	26,90	14,30	100,00
Sulawesi Tengah	58,17	0,78	27,95	13,10	100,00
Sulawesi Selatan	37,79	2,77	29,11	30,33	100,00
Sulawesi Barat	65,16	0,38	8,42	26,04	100,00
Sulawesi Tenggara	57,79	0,74	15,24	26,24	100,00
Maluku	67,93	0,84	26,34	4,90	100,00
Maluku Utara	66,39	0,47	21,90	11,24	100,00
Papua	52,59	0,87	13,30	33,23	100,00
Papua Barat	68,85	1,69	19,58	9,89	100,00
INDONESIA	40,83	1,85	39,65	17,66	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.8

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan - Perempuan				Jumlah
	Dapat membaca			Tidak Dapat	
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	41,86	8,53	17,61	32,01	100,00
Sumatera Utara	53,64	1,67	26,08	18,61	100,00
Sumatera Barat	51,44	1,60	29,20	17,76	100,00
R i a u	14,73	10,94	54,72	19,60	100,00
Kepulauan Riau	28,54	7,89	41,05	22,53	100,00
J a m b i	31,54	7,63	27,91	32,91	100,00
Sumatera Selatan	29,93	4,71	39,64	25,72	100,00
Bangka Belitung	39,29	4,87	24,68	31,16	100,00
Bengkulu	40,73	4,42	19,10	35,75	100,00
Lampung	36,15	4,35	16,49	43,01	100,00
DKI Jakarta	29,40	5,44	55,10	10,05	100,00
Jawa Barat	21,28	6,81	44,77	27,14	100,00
Banten	18,45	12,49	32,96	36,09	100,00
Jawa Tengah	27,14	2,46	16,02	54,38	100,00
DI Yogyakarta	28,61	1,07	18,44	51,88	100,00
Jawa Timur	26,23	4,19	15,69	53,89	100,00
B a l i	23,69	1,79	16,47	58,05	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,44	0,73	4,29	71,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	52,12	0,15	1,66	46,07	100,00
Kalimantan Barat	27,02	4,33	12,94	55,71	100,00
Kalimantan Tengah	47,78	7,03	23,19	22,00	100,00
Kalimantan Selatan	16,89	7,86	47,92	27,33	100,00
Kalimantan Timur	37,99	5,36	31,39	25,25	100,00
Sulawesi Utara	84,37	0,31	9,25	6,08	100,00
Gorontalo	44,25	0,87	36,54	18,33	100,00
Sulawesi Tengah	48,59	1,19	22,14	28,08	100,00
Sulawesi Selatan	29,71	4,41	18,19	47,69	100,00
Sulawesi Barat	43,42	0,16	4,98	51,45	100,00
Sulawesi Tenggara	38,31	0,63	7,71	53,35	100,00
Maluku	71,94	1,92	13,98	12,16	100,00
Maluku Utara	57,96	1,50	11,84	28,70	100,00
Papua	49,16	0,19	6,34	44,31	100,00
Papua Barat	59,95	1,03	8,93	30,09	100,00
INDONESIA	30,02	4,27	24,39	41,32	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 4.2.9

Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2012

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan - Laki-laki+Perempuan				Jumlah
	Dapat membaca			Tidak Dapat	
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	48,50	5,99	22,18	23,33	100,00
Sumatera Utara	54,83	1,06	30,79	13,31	100,00
Sumatera Barat	54,32	1,04	30,98	13,66	100,00
R i a u	18,30	6,97	62,07	12,66	100,00
Kepulauan Riau	27,17	4,50	52,74	15,58	100,00
J a m b i	35,99	5,18	37,40	21,43	100,00
Sumatera Selatan	34,30	2,90	45,63	17,16	100,00
Bangka Belitung	42,95	2,94	33,53	20,57	100,00
Bengkulu	47,49	3,08	25,73	23,70	100,00
Lampung	45,78	2,91	22,50	28,81	100,00
DKI Jakarta	30,04	3,08	60,66	6,22	100,00
Jawa Barat	24,67	4,83	51,02	19,49	100,00
Banten	22,01	9,14	43,52	25,32	100,00
Jawa Tengah	33,61	2,00	24,24	40,15	100,00
DI Yogyakarta	32,30	0,73	28,45	38,52	100,00
Jawa Timur	32,45	3,32	23,51	40,73	100,00
B a l i	27,77	1,55	29,30	41,38	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,25	0,88	9,31	57,56	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,44	0,08	2,25	36,23	100,00
Kalimantan Barat	35,70	3,70	20,05	40,56	100,00
Kalimantan Tengah	49,84	4,35	29,92	15,89	100,00
Kalimantan Selatan	19,31	5,76	55,41	19,51	100,00
Kalimantan Timur	39,82	3,77	38,84	17,58	100,00
Sulawesi Utara	85,78	0,29	9,65	4,28	100,00
Gorontalo	50,78	0,57	32,16	16,50	100,00
Sulawesi Tengah	53,37	0,98	25,04	20,61	100,00
Sulawesi Selatan	33,19	3,71	22,89	40,22	100,00
Sulawesi Barat	53,58	0,27	6,58	39,57	100,00
Sulawesi Tenggara	47,36	0,68	11,20	40,76	100,00
Maluku	70,00	1,40	19,95	8,65	100,00
Maluku Utara	62,22	0,98	16,93	19,86	100,00
Papua	51,16	0,59	10,40	37,85	100,00
Papua Barat	64,89	1,40	14,84	18,86	100,00
INDONESIA	34,99	3,16	31,41	30,44	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.1
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	52,89	68,83	61,63	62,31	70,50	66,88	59,85	70,08	65,53
Sumatera Utara	41,02	47,42	44,61	51,30	52,48	51,97	46,34	50,08	48,46
Sumatera Barat	47,50	52,07	50,12	62,31	62,83	62,61	57,08	59,06	58,22
Riau	44,13	49,92	47,04	51,39	49,87	50,64	48,35	49,90	49,12
Kepulauan Riau	41,00	40,05	40,53	43,37	49,31	46,31	41,67	42,68	42,17
Jambi	48,84	44,20	46,54	46,80	46,02	46,41	47,47	45,43	46,45
Sumatera Selatan	47,06	54,34	51,02	46,40	51,89	49,26	46,62	52,77	49,88
Bangka Belitung	55,62	52,89	54,18	56,44	64,57	60,59	56,03	58,52	57,32
Bengkulu	54,23	54,70	54,46	52,18	56,54	54,41	52,70	56,09	54,42
Lampung	46,90	55,42	51,34	50,06	53,63	51,82	49,34	54,07	51,71
DKI Jakarta	51,46	59,67	55,72				51,46	59,67	55,72
Jawa Barat	49,40	54,04	51,84	57,79	60,70	59,32	52,76	56,70	54,83
Banten	55,71	57,72	56,77	62,44	66,61	64,65	58,32	61,18	59,83
Jawa Tengah	50,80	52,79	51,89	46,56	49,32	48,06	48,38	50,84	49,72
DI Yogyakarta	53,17	53,41	53,30	49,90	48,43	49,07	51,79	51,28	51,51
Jawa Timur	45,51	50,40	48,24	45,21	48,13	46,86	45,34	49,11	47,46
Bali	52,36	54,31	53,40	66,65	74,67	70,94	59,15	64,08	61,78
Nusa Tenggara Barat	61,02	59,76	60,35	63,70	64,74	64,25	62,62	62,70	62,66
Nusa Tenggara Timur	64,78	60,61	62,60	59,91	63,54	61,80	60,72	63,05	61,93
Kalimantan Barat	47,36	49,41	48,40	53,77	56,79	55,28	51,76	54,42	53,10
Kalimantan Tengah	58,34	48,82	53,57	54,51	56,89	55,67	55,72	54,27	55,00
Kalimantan Selatan	53,24	60,07	57,02	57,96	63,29	60,95	56,06	62,02	59,39
Kalimantan Timur	40,25	40,00	40,13	53,08	55,21	54,07	45,66	46,15	45,89
Sulawesi Utara	37,46	46,66	42,52	53,38	49,57	51,34	46,78	48,32	47,61
Gorontalo	72,10	70,58	71,23	62,37	64,08	63,28	65,50	66,39	65,99
Sulawesi Tengah	56,37	56,74	56,56	54,67	57,51	56,08	55,02	57,34	56,18
Sulawesi Selatan	45,35	48,61	47,21	47,50	51,01	49,50	46,82	50,25	48,78
Sulawesi Barat	56,13	66,41	61,78	61,28	62,32	61,83	60,10	63,33	61,82
Sulawesi Tenggara	58,39	58,56	58,48	57,12	60,98	59,18	57,41	60,42	59,02
Maluku	44,59	44,38	44,48	45,11	47,28	46,21	44,92	46,20	45,58
Maluku Utara	40,32	39,74	40,02	44,61	53,89	49,10	43,57	50,04	46,76
Papua	40,86	36,82	39,09	46,98	43,28	45,49	44,74	40,71	43,06
Papua Barat	52,81	31,27	42,97	42,44	43,17	42,76	46,12	38,72	42,83
INDONESIA	49,02	52,90	51,11	51,34	54,05	52,81	50,28	53,52	52,03

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.2
Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	29,96	41,12	36,08	39,55	44,58	42,36	37,05	43,70	40,75
Sumatera Utara	21,56	23,19	22,47	30,10	32,35	31,39	25,99	28,02	27,14
Sumatera Barat	20,53	24,09	22,57	34,51	29,62	31,69	29,57	27,68	28,48
R i a u	29,71	27,90	28,80	28,47	26,41	27,45	28,99	27,04	28,02
Kepulauan Riau	20,03	18,39	19,22	28,84	27,85	28,35	22,52	21,07	21,81
J a m b i	28,70	24,07	26,40	31,52	26,11	28,80	30,59	25,45	28,02
Sumatera Selatan	15,13	18,97	17,22	25,36	24,04	24,68	21,91	22,22	22,08
Bangka Belitung	26,36	18,93	22,44	29,68	21,43	25,47	28,02	20,14	23,92
Bengkulu	27,71	25,38	26,54	30,85	33,45	32,18	30,05	31,44	30,75
Lampung	22,57	28,52	25,67	24,40	29,08	26,71	23,99	28,94	26,47
DKI Jakarta	22,78	24,49	23,67				22,78	24,49	23,67
Jawa Barat	23,81	25,55	24,72	29,76	30,87	30,34	26,20	27,68	26,97
Banten	30,14	26,12	28,02	39,58	36,28	37,83	33,80	30,08	31,83
Jawa Tengah	25,12	24,24	24,64	23,91	23,29	23,57	24,43	23,70	24,04
DI Yogyakarta	19,03	24,49	22,07	18,29	20,91	19,76	18,72	22,97	21,09
Jawa Timur	23,38	24,57	24,04	25,16	25,45	25,33	24,37	25,07	24,76
B a l i	29,30	27,18	28,18	43,56	47,26	45,54	36,07	36,81	36,47
Nusa Tenggara Barat	32,22	32,17	32,20	39,30	40,22	39,78	36,45	36,92	36,70
Nusa Tenggara Timur	37,27	26,48	31,64	37,33	38,06	37,71	37,32	36,12	36,70
Kalimantan Barat	26,84	28,27	27,57	32,04	30,08	31,06	30,41	29,50	29,95
Kalimantan Tengah	32,29	26,74	29,51	35,62	33,14	34,40	34,57	31,06	32,84
Kalimantan Selatan	24,86	30,49	27,98	27,44	29,54	28,62	26,41	29,91	28,37
Kalimantan Timur	24,52	24,94	24,72	29,55	35,93	32,52	26,64	29,39	27,95
Sulawesi Utara	20,38	21,14	20,80	38,55	33,55	35,87	31,01	28,23	29,51
Gorontalo	34,91	34,72	34,81	37,24	34,03	35,53	36,49	34,28	35,28
Sulawesi Tengah	28,94	25,73	27,26	37,26	32,04	34,67	35,54	30,62	33,07
Sulawesi Selatan	23,60	25,23	24,53	26,24	25,49	25,81	25,40	25,41	25,41
Sulawesi Barat	36,79	38,91	37,96	38,67	42,73	40,81	38,24	41,79	40,13
Sulawesi Tenggara	37,33	32,06	34,48	38,95	39,76	39,38	38,58	37,98	38,26
Maluku	26,67	25,46	26,02	23,12	29,01	26,11	24,37	27,68	26,08
Maluku Utara	24,00	23,09	23,52	36,06	40,12	38,03	33,13	35,49	34,29
Papua	14,72	10,68	12,96	30,17	31,52	30,72	24,53	23,23	23,99
Papua Barat	36,55	23,34	30,51	26,04	24,60	25,41	29,78	24,13	27,27
INDONESIA	24,36	25,12	24,77	28,58	28,66	28,62	26,64	27,03	26,85

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.3.1
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit (hari), 2012

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Perkotaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	47,30	34,26	4,97	2,08	11,39	100,00
Sumatera Utara	39,97	34,96	2,81	6,52	15,74	100,00
Sumatera Barat	38,97	35,32	5,63	4,95	15,14	100,00
R i a u	55,04	31,97	3,18	2,09	7,72	100,00
Kepulauan Riau	37,06	43,83	5,12	1,00	12,98	100,00
J a m b i	42,29	37,34	4,70	2,03	13,63	100,00
Sumatera Selatan	46,46	37,54	4,64	5,51	5,84	100,00
Bangka Belitung	44,40	27,36	3,19	4,24	20,81	100,00
Bengkulu	43,28	27,83	6,34	2,07	20,48	100,00
Lampung	49,43	27,48	4,74	2,38	15,97	100,00
DKI Jakarta	60,09	27,74	4,88	1,64	5,65	100,00
Jawa Barat	43,07	33,96	7,47	3,89	11,61	100,00
Banten	54,91	30,28	1,71	3,32	9,78	100,00
Jawa Tengah	45,26	30,43	5,40	3,46	15,45	100,00
DI Yogyakarta	37,83	26,29	7,16	4,25	24,47	100,00
Jawa Timur	39,53	32,91	7,31	4,04	16,22	100,00
B a l i	48,53	27,17	6,10	3,58	14,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,08	38,91	8,11	3,88	10,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	24,19	40,33	14,63	4,15	16,70	100,00
Kalimantan Barat	55,84	27,10	3,15	2,12	11,79	100,00
Kalimantan Tengah	52,62	28,17	4,99	1,69	12,52	100,00
Kalimantan Selatan	56,18	22,26	3,67	1,67	16,22	100,00
Kalimantan Timur	46,61	35,81	6,98	1,68	8,92	100,00
Sulawesi Utara	44,77	32,21	3,58	2,17	17,26	100,00
Gorontalo	56,02	25,90	7,97	1,71	8,39	100,00
Sulawesi Tengah	41,60	33,86	4,40	1,61	18,54	100,00
Sulawesi Selatan	46,76	32,11	3,74	1,79	15,60	100,00
Sulawesi Barat	44,47	31,76	8,81	1,34	13,62	100,00
Sulawesi Tenggara	47,93	34,97	5,36	1,11	10,62	100,00
Maluku	49,40	30,01	8,48	0,70	11,42	100,00
Maluku Utara	56,85	15,51	15,04	0,06	12,54	100,00
Papua	39,53	34,35	1,46	5,14	19,52	100,00
Papua Barat	38,40	54,60	4,71		2,29	100,00
INDONESIA	44,73	32,07	6,04	3,53	13,64	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.3.2
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit (hari), 2012

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Perdesaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,21	37,59	5,10	3,40	7,70	100,00
Sumatera Utara	39,10	28,96	7,66	4,81	19,47	100,00
Sumatera Barat	37,06	29,08	5,67	9,82	18,37	100,00
R i a u	44,27	36,66	3,92	4,18	10,97	100,00
Kepulauan Riau	38,07	37,05	0,61	2,95	21,32	100,00
J a m b i	40,21	40,02	5,15	1,30	13,33	100,00
Sumatera Selatan	46,87	34,90	5,44	2,76	10,03	100,00
Bangka Belitung	36,56	31,27	4,76	2,13	25,29	100,00
Bengkulu	40,88	37,19	6,24	2,20	13,49	100,00
Lampung	39,66	32,76	7,93	3,10	16,56	100,00
DKI Jakarta						-
Jawa Barat	39,33	34,32	7,78	4,31	14,27	100,00
Banten	46,02	31,83	5,75	1,86	14,55	100,00
Jawa Tengah	44,83	32,24	5,09	2,96	14,88	100,00
DI Yogyakarta	43,97	28,04	6,67	1,44	19,87	100,00
Jawa Timur	38,24	32,88	7,33	4,73	16,82	100,00
B a l i	47,20	25,72	5,49	2,29	19,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	36,87	34,38	7,96	1,57	19,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,39	36,20	10,84	2,77	12,80	100,00
Kalimantan Barat	48,64	33,30	7,05	1,81	9,21	100,00
Kalimantan Tengah	53,92	30,49	5,28	2,17	8,14	100,00
Kalimantan Selatan	43,36	31,35	4,64	2,47	18,19	100,00
Kalimantan Timur	37,10	40,03	5,29	4,51	13,08	100,00
Sulawesi Utara	46,01	35,50	6,80	2,10	9,60	100,00
Gorontalo	36,23	37,81	11,73	3,59	10,65	100,00
Sulawesi Tengah	41,22	34,48	8,60	3,71	11,99	100,00
Sulawesi Selatan	38,23	30,63	6,65	3,46	21,03	100,00
Sulawesi Barat	37,38	32,06	6,70	8,87	15,00	100,00
Sulawesi Tenggara	40,15	32,37	10,44	4,29	12,75	100,00
Maluku	33,36	36,34	9,81	2,57	17,92	100,00
Maluku Utara	25,96	43,94	9,89	7,57	12,63	100,00
Papua	30,08	48,24	10,25	3,26	8,16	100,00
Papua Barat	27,43	39,42	14,32	0,02	18,80	100,00
INDONESIA	40,99	33,07	6,88	3,74	15,32	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.3.3
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit (hari), 2012

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan					
	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	46,46	36,84	5,07	3,10	8,54	100,00
Sumatera Utara	39,44	31,33	5,75	5,48	17,99	100,00
Sumatera Barat	37,59	30,82	5,66	8,46	17,47	100,00
R i a u	48,94	34,63	3,60	3,27	9,56	100,00
Kepulauan Riau	37,43	41,33	3,46	1,72	16,05	100,00
J a m b i	40,85	39,20	5,01	1,52	13,42	100,00
Sumatera Selatan	46,76	35,62	5,22	3,51	8,89	100,00
Bangka Belitung	40,31	29,40	4,01	3,14	23,15	100,00
Bengkulu	41,40	35,15	6,26	2,17	15,01	100,00
Lampung	41,90	31,55	7,20	2,94	16,42	100,00
DKI Jakarta	60,09	27,74	4,88	1,64	5,65	100,00
Jawa Barat	41,38	34,12	7,61	4,08	12,81	100,00
Banten	50,80	30,99	3,58	2,65	11,99	100,00
Jawa Tengah	45,02	31,43	5,23	3,18	15,13	100,00
DI Yogyakarta	40,27	26,99	6,96	3,13	22,64	100,00
Jawa Timur	38,79	32,89	7,32	4,43	16,56	100,00
B a l i	47,73	26,31	5,74	2,81	17,41	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,66	36,00	8,02	2,39	15,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,49	36,79	11,38	2,97	13,36	100,00
Kalimantan Barat	50,74	31,49	5,91	1,90	9,96	100,00
Kalimantan Tengah	53,55	29,82	5,20	2,03	9,40	100,00
Kalimantan Selatan	48,38	27,79	4,26	2,16	17,42	100,00
Kalimantan Timur	42,04	37,84	6,17	3,04	10,92	100,00
Sulawesi Utara	45,64	34,52	5,84	2,12	11,88	100,00
Gorontalo	42,88	33,80	10,47	2,96	9,89	100,00
Sulawesi Tengah	41,29	34,37	7,86	3,34	13,16	100,00
Sulawesi Selatan	40,84	31,08	5,76	2,95	19,37	100,00
Sulawesi Barat	38,98	31,99	7,17	7,17	14,69	100,00
Sulawesi Tenggara	41,76	32,91	9,39	3,63	12,31	100,00
Maluku	39,20	34,03	9,32	1,89	15,56	100,00
Maluku Utara	31,42	38,92	10,80	6,24	12,62	100,00
Papua	32,02	45,40	8,45	3,65	10,49	100,00
Papua Barat	31,89	45,59	10,41	0,01	12,09	100,00
INDONESIA	42,58	32,65	6,52	3,65	14,61	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.4
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	66,17	69,30	68,09	64,55	67,21	66,11	64,92	67,73	66,59
Sumatera Utara	69,27	73,12	71,57	68,05	63,37	65,36	68,57	67,73	68,08
Sumatera Barat	57,84	59,48	58,82	55,61	52,09	53,57	56,26	54,37	55,16
R i a u	78,32	66,29	71,91	71,92	65,05	68,57	74,37	65,58	69,92
Kepulauan Riau	77,86	66,54	72,33	59,70	73,14	66,79	72,51	68,70	70,61
J a m b i	65,65	60,94	63,43	74,26	73,70	73,98	71,34	69,69	70,53
Sumatera Selatan	68,44	72,25	70,65	72,56	68,06	70,09	71,16	69,61	70,29
Bangka Belitung	72,22	67,83	69,95	73,14	73,58	73,38	72,68	70,89	71,73
Bengkulu	63,77	70,40	67,10	76,15	62,11	68,70	72,89	64,12	68,30
Lampung	73,21	68,62	70,63	72,60	70,04	71,29	72,73	69,68	71,14
DKI Jakarta	73,51	77,19	75,55				73,51	77,19	75,55
Jawa Barat	72,82	70,94	71,79	78,32	74,05	76,02	75,23	72,27	73,62
Banten	71,43	74,16	72,90	83,62	75,50	79,20	76,50	74,73	75,55
Jawa Tengah	65,83	62,94	64,21	59,31	58,71	58,98	62,25	60,63	61,34
DI Yogyakarta	56,05	45,19	50,01	47,27	46,39	46,78	52,49	45,68	48,71
Jawa Timur	63,53	63,93	63,76	65,06	62,79	63,75	64,38	63,30	63,75
B a l i	46,76	55,14	51,29	43,16	53,00	48,71	44,84	53,94	49,87
Nusa Tenggara Barat	61,20	65,19	63,31	62,46	60,39	61,37	61,97	62,27	62,13
Nusa Tenggara Timur	55,61	68,71	62,23	52,43	53,33	52,91	52,99	55,80	54,48
Kalimantan Barat	66,49	70,40	68,52	71,13	72,38	71,77	69,80	71,80	70,83
Kalimantan Tengah	68,95	66,74	67,94	76,52	77,92	77,22	74,02	74,65	74,33
Kalimantan Selatan	78,38	80,12	79,39	81,76	77,47	79,26	80,47	78,48	79,31
Kalimantan Timur	70,91	67,78	69,40	68,24	72,27	70,16	69,60	69,95	69,77
Sulawesi Utara	61,28	59,01	59,91	64,67	64,55	64,60	63,54	62,25	62,83
Gorontalo	69,98	69,25	69,56	79,45	78,56	78,97	76,09	75,03	75,51
Sulawesi Tengah	72,15	62,53	67,11	73,13	68,67	70,86	72,92	67,31	70,05
Sulawesi Selatan	70,50	70,56	70,53	62,37	63,66	63,13	64,86	65,77	65,40
Sulawesi Barat	77,94	63,82	69,61	61,91	67,03	64,63	65,37	66,20	65,82
Sulawesi Tenggara	79,31	71,97	75,33	73,33	70,60	71,83	74,71	70,91	72,62
Maluku	83,21	72,46	77,52	83,62	84,60	84,13	83,48	80,23	81,78
Maluku Utara	60,39	67,91	64,29	82,82	79,39	81,00	77,77	76,91	77,32
Papua	65,33	64,42	64,95	69,50	71,03	70,09	68,11	68,65	68,33
Papua Barat	67,30	75,91	70,16	69,56	57,84	64,39	68,64	63,29	66,49
INDONESIA	67,64	66,96	67,26	66,66	64,51	65,47	67,10	65,62	66,28

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.5.1
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut
Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2012

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Perkotaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	9,98	55,84	1,81	32,38	100,00
Sumatera Utara	4,91	61,42	1,66	32,02	100,00
Sumatera Barat	23,78	50,05	0,77	25,40	100,00
R i a u	7,15	64,84		28,01	100,00
J a m b i	7,50	28,98	3,91	59,61	100,00
Sumatera Selatan	9,44	62,62		27,94	100,00
Bengkulu	14,82	54,70	1,19	29,29	100,00
Lampung	1,84	68,06		30,10	100,00
Bangka Belitung	10,55	54,56		34,89	100,00
Kepulauan Riau	9,83	70,26	4,24	15,66	100,00
DKI Jakarta	6,21	57,00	3,39	33,39	100,00
Jawa Barat	6,48	63,35	1,52	28,65	100,00
Jawa Tengah	2,09	70,88	0,34	26,69	100,00
DI Yogyakarta	10,47	65,23	0,93	23,38	100,00
Jawa Timur	19,34	58,87	2,47	19,32	100,00
Banten	12,15	52,95	1,08	33,82	100,00
B a l i	18,97	37,93	1,28	41,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	16,52	57,87	4,66	20,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,05	75,06	2,92	14,97	100,00
Kalimantan Barat	9,36	49,37	2,01	39,26	100,00
Kalimantan Tengah	6,00	62,62		31,37	100,00
Kalimantan Selatan	9,13	68,37	0,80	21,70	100,00
Kalimantan Timur	5,74	66,13	0,46	27,67	100,00
Sulawesi Utara	14,33	68,10		17,57	100,00
Sulawesi Tengah	7,63	70,65		21,72	100,00
Sulawesi Selatan	10,30	57,42	1,75	30,53	100,00
Sulawesi Tenggara	9,46	60,29		30,24	100,00
Gorontalo	7,93	74,26		17,81	100,00
Sulawesi Barat	5,78	75,80		18,42	100,00
Maluku	2,96	75,18		21,86	100,00
Maluku Utara		62,52		37,48	100,00
Papua Barat	2,28	84,12		13,60	100,00
Papua	20,40	57,07	1,25	21,29	100,00
INDONESIA	9,29	60,57	1,39	28,74	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.5.2
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut
Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2012

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Perdesaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	15,24	38,78	0,34	45,64	100,00
Sumatera Utara	10,37	57,56	1,52	30,54	100,00
Sumatera Barat	23,94	51,45	0,22	24,38	100,00
R i a u	9,98	57,36	0,53	32,13	100,00
J a m b i	10,41	58,28		31,30	100,00
Sumatera Selatan	9,53	62,52	0,35	27,60	100,00
Bengkulu	7,42	53,40	1,01	38,18	100,00
Lampung	7,24	57,90	2,71	32,14	100,00
Bangka Belitung	11,53	49,79	0,24	38,44	100,00
Kepulauan Riau	14,14	52,71	1,03	32,13	100,00
DKI Jakarta					-
Jawa Barat	5,19	62,86	0,17	31,79	100,00
Jawa Tengah	5,51	55,28	1,83	37,39	100,00
DI Yogyakarta	8,54	67,85	1,61	21,99	100,00
Jawa Timur	22,44	48,09	4,25	25,22	100,00
Banten	13,11	49,80	0,83	36,26	100,00
B a l i	39,63	25,56	0,80	34,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,09	60,54		24,37	100,00
Nusa Tenggara Timur	18,77	50,03	1,21	29,99	100,00
Kalimantan Barat	6,05	58,39	0,86	34,70	100,00
Kalimantan Tengah	4,28	62,44	0,31	32,96	100,00
Kalimantan Selatan	5,38	65,78	0,41	28,42	100,00
Kalimantan Timur	7,65	52,31	1,35	38,69	100,00
Sulawesi Utara	8,47	71,42	0,89	19,22	100,00
Sulawesi Tengah	3,79	62,93		33,28	100,00
Sulawesi Selatan	13,40	62,56	0,47	23,58	100,00
Sulawesi Tenggara	14,97	48,23	0,76	36,05	100,00
Gorontalo	12,58	63,72		23,70	100,00
Sulawesi Barat	10,01	62,70	0,50	26,80	100,00
Maluku	6,37	50,09	1,23	42,32	100,00
Maluku Utara	9,83	38,89		51,28	100,00
Papua Barat	18,38	33,85	0,49	47,29	100,00
Papua	13,02	55,27	1,71	30,01	100,00
INDONESIA	11,36	56,10	0,85	31,70	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.5.3
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut
Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2012

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan				
	Jenis Obat yang Digunakan				
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	14,08	42,53	0,67	42,72	100,00
Sumatera Utara	8,12	59,15	1,58	31,15	100,00
Sumatera Barat	23,90	51,06	0,37	24,67	100,00
R i a u	8,74	60,64	0,30	30,33	100,00
Kepulauan Riau	8,55	39,52	2,50	49,42	100,00
J a m b i	9,50	62,55	0,25	27,70	100,00
Sumatera Selatan	9,50	53,76	1,06	35,68	100,00
Bangka Belitung	4,80	62,49	1,49	31,22	100,00
Bengkulu	11,34	50,73	0,19	37,74	100,00
Lampung	13,15	56,74	1,77	28,34	100,00
DKI Jakarta	6,21	57,00	3,39	33,39	100,00
Jawa Barat	5,87	63,12	0,88	30,12	100,00
Banten	3,82	62,99	1,09	32,10	100,00
Jawa Tengah	9,43	66,64	1,30	22,63	100,00
DI Yogyakarta	20,63	54,39	3,21	21,77	100,00
Jawa Timur	12,70	51,14	0,94	35,21	100,00
B a l i	31,05	30,70	1,00	37,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,61	59,58	1,68	23,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,87	54,09	1,49	27,55	100,00
Kalimantan Barat	6,94	55,98	1,17	35,92	100,00
Kalimantan Tengah	4,75	62,49	0,23	32,53	100,00
Kalimantan Selatan	6,82	66,78	0,56	25,84	100,00
Kalimantan Timur	6,64	59,62	0,88	32,86	100,00
Sulawesi Utara	10,11	70,49	0,64	18,76	100,00
Gorontalo	4,88	65,13		29,98	100,00
Sulawesi Tengah	12,85	61,65	0,70	24,81	100,00
Sulawesi Selatan	13,24	52,01	0,52	34,23	100,00
Sulawesi Barat	11,50	66,18		22,33	100,00
Sulawesi Tenggara	9,08	65,58	0,39	24,96	100,00
Maluku	5,21	58,61	0,81	35,37	100,00
Maluku Utara	8,56	41,94		49,50	100,00
Papua	15,47	42,92	0,40	41,20	100,00
Papua Barat	16,04	56,00	1,52	26,44	100,00
INDONESIA	10,48	57,99	1,08	30,45	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.6
Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	60,34	56,75	58,14	51,39	55,11	53,58	53,45	55,52	54,68
Sumatera Utara	50,96	45,00	47,41	47,93	49,43	48,79	49,22	47,45	48,19
Sumatera Barat	48,78	51,43	50,36	60,00	57,37	58,48	56,71	55,53	56,02
R i a u	58,23	50,03	53,86	34,93	39,67	37,24	43,83	44,08	43,96
Kepulauan Riau	45,95	51,87	48,84	70,97	58,41	64,35	53,32	54,02	53,67
J a m b i	47,63	47,64	47,63	40,02	41,15	40,58	42,60	43,19	42,89
Sumatera Selatan	54,28	41,87	47,09	41,94	43,65	42,88	46,14	43,00	44,38
Bangka Belitung	52,65	48,65	50,59	47,62	47,05	47,31	50,12	47,80	48,89
Bengkulu	57,32	48,55	52,91	45,35	51,52	48,62	48,50	50,80	49,71
Lampung	58,41	59,74	59,16	45,85	48,43	47,17	48,55	51,28	49,98
DKI Jakarta	48,77	43,94	46,09				48,77	43,94	46,09
Jawa Barat	48,48	52,76	50,83	47,47	42,18	44,62	48,04	48,23	48,14
Banten	55,95	49,11	52,28	50,50	45,62	47,84	53,68	47,63	50,41
Jawa Tengah	45,95	47,10	46,59	48,51	48,07	48,26	47,35	47,63	47,51
DI Yogyakarta	47,20	61,41	55,10	53,70	50,50	51,93	49,84	57,02	53,82
Jawa Timur	48,99	49,34	49,19	46,77	45,82	46,22	47,75	47,39	47,54
B a l i	69,06	63,77	66,20	68,53	64,45	66,23	68,78	64,15	66,22
Nusa Tenggara Barat	49,55	51,15	50,39	54,09	46,97	50,33	52,31	48,60	50,35
Nusa Tenggara Timur	54,84	39,23	46,95	52,24	52,82	52,55	52,70	50,64	51,60
Kalimantan Barat	42,03	48,19	45,23	43,69	37,79	40,66	43,21	40,82	41,98
Kalimantan Tengah	39,45	46,19	42,53	36,23	34,08	35,15	37,29	37,62	37,45
Kalimantan Selatan	43,32	39,81	41,28	36,07	36,33	36,22	38,84	37,66	38,15
Kalimantan Timur	45,82	43,23	44,57	51,54	57,27	54,26	48,62	50,02	49,29
Sulawesi Utara	56,74	46,95	50,84	52,87	51,58	52,20	54,16	49,66	51,69
Gorontalo	51,88	51,55	51,70	52,03	45,97	48,76	51,98	48,08	49,84
Sulawesi Tengah	43,41	45,89	44,71	43,98	41,00	42,46	43,86	42,08	42,95
Sulawesi Selatan	41,75	43,71	42,90	42,73	40,42	41,37	42,43	41,42	41,84
Sulawesi Barat	27,72	39,81	34,86	45,46	45,41	45,43	41,64	43,96	42,91
Sulawesi Tenggara	39,36	29,04	33,77	32,82	33,16	33,01	34,33	32,24	33,18
Maluku	34,06	39,12	36,74	27,39	37,29	32,54	29,73	37,95	34,04
Maluku Utara	45,82	46,09	45,96	31,76	31,39	31,57	34,93	34,57	34,74
Papua	38,98	45,17	41,53	36,23	50,09	41,56	37,15	48,32	41,55
Papua Barat	40,11	51,97	44,05	51,12	38,14	45,39	46,64	42,31	44,90
INDONESIA	49,20	49,50	49,36	47,67	46,50	47,02	48,35	47,86	48,08

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.7.1

Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2012

Provinsi	Perkotaan						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskesmas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	21,66	4,47	34,91	39,26	21,00	2,32	1,97
Sumatera Utara	17,69	16,47	30,37	19,43	25,67	2,13	8,00
Sumatera Barat	13,28	4,74	29,62	32,12	32,47	2,54	1,62
R i a u	26,48	22,79	36,54	24,86	8,66	2,19	5,81
Kepulauan Riau	15,54	9,43	22,91	42,11	10,02	8,47	18,60
J a m b i	22,85	11,87	28,70	24,24	22,14	1,65	7,64
Sumatera Selatan	15,82	5,11	33,74	33,78	13,10	1,59	3,02
Bangka Belitung	14,07	15,66	25,49	47,81	18,50	5,13	5,68
Bengkulu	17,94	9,84	39,46	28,60	26,46	6,10	1,24
Lampung	9,13	8,27	45,82	23,43	23,99	1,64	3,73
DKI Jakarta	20,57	20,26	41,30	25,65	1,18	0,48	3,04
Jawa Barat	11,35	4,77	42,31	34,32	16,70	2,41	1,65
Banten	7,69	8,01	49,58	23,86	20,10	1,36	0,72
Jawa Tengah	10,72	6,44	38,38	26,88	21,82	2,78	3,17
DI Yogyakarta	9,47	16,32	30,77	28,16	16,36	2,03	5,33
Jawa Timur	9,37	8,29	34,20	26,46	34,13	3,02	5,50
B a l i	8,45	0,87	51,35	19,80	27,73	2,15	2,96
Nusa Tenggara Barat	5,51	3,59	36,97	31,49	32,58	3,24	1,89
Nusa Tenggara Timur	16,69	8,54	38,31	42,04	5,60		2,49
Kalimantan Barat	19,03	7,03	35,66	26,39	34,83	5,82	11,77
Kalimantan Tengah	11,85	3,61	35,59	31,82	33,70		4,67
Kalimantan Selatan	18,69	7,48	21,53	25,89	28,52	0,54	1,18
Kalimantan Timur	28,05	11,07	24,37	43,63	5,75		2,26
Sulawesi Utara	23,28	6,47	56,70	20,29	9,92	3,27	9,62
Gorontalo	4,96		63,03	29,28	10,07	1,65	0,00
Sulawesi Tengah	18,01		22,87	51,95	12,97	0,53	0,00
Sulawesi Selatan	18,42	5,89	26,10	39,64	14,05	0,86	1,64
Sulawesi Barat	6,00		25,34	46,75	19,66	2,75	0,00
Sulawesi Tenggara	11,24	4,97	43,99	29,41	15,92	1,49	0,00
Maluku	8,85	5,84	42,65	34,67	13,24	2,24	1,41
Maluku Utara	39,60		21,80	26,35	18,49		0,00
Papua	34,14	4,07	49,13	24,08	4,07	2,40	4,80
Papua Barat	26,41	4,31	31,17	33,04			9,30
INDONESIA	12,42	8,00	38,21	28,99	21,57	2,36	3,55

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.7.2

Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2012

Provinsi	Perdesaan						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskesmas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,94	2,53	18,41	51,71	25,48	3,69	1,83
Sumatera Utara	8,59	4,98	18,44	28,66	44,11	5,28	5,68
Sumatera Barat	11,34	2,36	17,83	32,40	42,96	5,76	1,70
R i a u	14,87	11,69	26,73	34,74	31,25	8,50	13,77
Kepulauan Riau	8,84	0,30	5,34	80,16	8,72	2,39	2,53
J a m b i	8,33	1,24	25,85	39,79	31,97	1,48	2,19
Sumatera Selatan	4,70	1,73	19,81	27,97	50,65	1,13	2,78
Bangka Belitung	14,85	11,77	22,72	38,25	50,54	19,10	23,67
Bengkulu	5,96	4,01	21,66	33,90	42,03	5,76	5,71
Lampung	3,67	4,07	22,14	24,18	52,56	2,41	0,55
DKI Jakarta							0,00
Jawa Barat	6,38	3,90	32,61	27,98	38,93	3,35	2,65
Banten	4,15	1,22	22,46	25,58	48,31	0,72	3,24
Jawa Tengah	3,78	3,58	30,06	21,52	45,66	2,21	2,12
DI Yogyakarta	6,65	10,87	45,15	28,24	16,56	0,61	2,39
Jawa Timur	4,51	2,26	21,54	17,95	57,82	3,91	2,98
B a l i	4,41	1,43	38,58	18,68	44,12	3,90	0,44
Nusa Tenggara Barat	2,66	0,77	19,34	31,06	49,06	4,73	0,68
Nusa Tenggara Timur	5,77	3,80	7,59	71,39	12,12	1,55	4,74
Kalimantan Barat	5,66	2,91	9,86	35,37	50,00	1,98	5,42
Kalimantan Tengah	13,48	1,16	7,59	58,42	23,28	1,76	2,99
Kalimantan Selatan	6,81	1,21	7,65	37,89	59,13	1,45	2,69
Kalimantan Timur	13,87	1,96	14,69	66,76	6,65	3,88	1,33
Sulawesi Utara	9,94	2,18	36,29	38,53	21,74	1,47	3,06
Gorontalo	6,71	1,11	24,70	36,76	42,06	3,86	0,76
Sulawesi Tengah	6,44	0,50	9,42	48,91	35,55	1,90	1,35
Sulawesi Selatan	13,15	1,20	15,65	55,00	24,36	1,31	2,50
Sulawesi Barat	8,01	1,12	9,24	58,12	26,69	3,86	1,51
Sulawesi Tenggara	7,44	2,44	12,00	64,07	20,06	1,74	4,86
Maluku	17,29	1,84	15,75	55,79	18,89	2,96	3,07
Maluku Utara	6,31	2,75	8,63	73,03	7,55		5,43
Papua	8,43	7,98	5,66	82,72	4,70		0,00
Papua Barat	13,94	0,65	3,79	83,55	3,10		5,79
INDONESIA	6,28	3,05	23,52	30,91	42,27	3,14	2,83

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 5.7.3

Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2012

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskesmas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	15,09	3,01	22,48	48,63	24,37	3,36	1,87
Sumatera Utara	12,22	9,56	23,19	24,98	36,76	4,02	6,61
Sumatera Barat	11,83	2,96	20,81	32,33	40,31	4,95	1,68
Riau	21,03	17,58	31,93	29,50	19,26	5,15	9,55
Kepulauan Riau	13,07	6,06	16,43	56,14	9,54	6,22	12,67
Jambi	13,06	4,70	26,78	34,73	28,77	1,53	3,96
Sumatera Selatan	7,93	2,71	23,87	29,66	39,72	1,26	2,85
Bangka Belitung	14,45	13,75	24,13	43,10	34,26	12,00	14,53
Bengkulu	8,65	5,32	25,66	32,71	38,54	5,83	4,71
Lampung	5,10	5,17	28,33	23,98	45,09	2,21	1,38
DKI Jakarta	20,57	20,26	41,30	25,65	1,18	0,48	3,04
Jawa Barat	9,22	4,40	38,16	31,61	26,22	2,81	2,08
Banten	6,09	4,94	37,31	24,64	32,87	1,07	1,86
Jawa Tengah	6,82	4,83	33,70	23,87	35,21	2,46	2,58
DI Yogyakarta	8,30	14,06	36,73	28,19	16,44	1,44	4,11
Jawa Timur	6,64	4,90	27,08	21,68	47,46	3,53	4,08
Bali	6,03	1,20	43,70	19,13	37,55	3,20	1,45
Nusa Tenggara Barat	3,70	1,80	25,80	31,21	43,02	4,18	1,13
Nusa Tenggara Timur	7,23	4,43	11,71	67,46	11,24	1,34	4,44
Kalimantan Barat	9,71	4,16	17,68	32,65	45,40	3,14	7,35
Kalimantan Tengah	12,97	1,93	16,40	50,05	26,56	1,21	3,51
Kalimantan Selatan	12,01	3,95	13,73	32,64	45,73	1,05	2,03
Kalimantan Timur	20,15	5,99	18,97	56,53	6,25	2,17	1,74
Sulawesi Utara	14,34	3,59	43,02	32,52	17,84	2,06	5,22
Gorontalo	6,09	0,71	38,45	34,08	30,58	3,07	0,49
Sulawesi Tengah	8,58	0,41	11,91	49,47	31,37	1,65	1,10
Sulawesi Selatan	14,81	2,68	18,95	50,16	21,11	1,17	2,23
Sulawesi Barat	7,60	0,89	12,47	55,84	25,28	3,63	1,21
Sulawesi Tenggara	8,18	2,93	18,23	57,32	19,25	1,69	3,92
Maluku	13,87	3,46	26,64	47,24	16,60	2,67	2,40
Maluku Utara	15,35	2,00	12,20	60,36	10,52		3,95
Papua	14,75	7,02	16,36	68,29	4,54	0,59	1,18
Papua Barat	18,69	2,05	14,23	64,28	1,92		7,13
INDONESIA	8,96	5,22	29,94	30,07	33,23	2,80	3,14

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 6.1
TPAK Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,86	45,12	41,52
Sumatera Utara	35,54	54,85	45,47
Sumatera Barat	30,35	46,25	40,19
Riau	41,34	52,62	48,17
Kep. Riau	35,48	46,15	37,28
Jambi	34,53	50,47	45,80
Sumatera Selatan	28,67	56,76	46,97
Kep. Bangka Belitung	32,07	48,61	40,54
Bengkulu	37,16	52,54	47,86
Lampung	30,79	53,38	47,63
DKI Jakarta	35,19		35,19
Jawa Barat	36,21	49,75	41,02
Banten	30,80	47,49	36,46
Jawa Tengah	42,26	55,81	49,66
DI Yogyakarta	45,55	68,29	53,19
Jawa Timur	40,09	55,61	48,28
Bali	48,08	64,62	54,70
Nusa Tenggara Barat	43,34	54,38	49,72
Nusa Tenggara Timur	35,48	59,68	55,14
Kalimantan Barat	31,87	58,11	50,57
Kalimantan Tengah	33,26	60,65	51,67
Kalimantan Selatan	33,53	52,13	44,40
Kalimantan Timur	39,62	55,89	45,84
Sulawesi Utara	33,89	42,34	38,61
Gorontalo	29,16	48,38	41,89
Sulawesi Tengah	35,98	51,75	47,95
Sulawesi Selatan	26,05	44,87	38,20
Sulawesi Barat	49,04	53,79	52,73
Sulawesi Tenggara	37,89	57,38	52,15
Maluku	33,00	49,25	43,42
Maluku Utara	32,67	52,09	46,68
Papua	39,82	59,65	54,40
Papua Barat	30,66	63,95	53,97
INDONESIA	37,79	53,81	45,99

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Tabel 6.2.1
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha,
2012

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa**)	Perkotaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	26,78	10,43	62,78	100,00
Sumatera Utara	30,47	12,84	56,69	100,00
Sumatera Barat	49,87	7,80	42,33	100,00
Riau	21,83	14,26	63,91	100,00
Kep. Riau	30,10	13,59	56,31	100,00
Jambi	40,58	16,14	43,28	100,00
Sumatera Selatan	24,87	12,99	62,15	100,00
Kep. Bangka Belitung	28,67	21,16	50,17	100,00
Bengkulu	25,99	15,45	58,56	100,00
Lampung	30,94	10,18	58,88	100,00
DKI Jakarta	2,04	9,20	88,76	100,00
Jawa Barat	36,93	13,14	49,94	100,00
Banten	18,24	18,51	63,25	100,00
Jawa Tengah	38,71	19,49	41,80	100,00
DI Yogyakarta	45,87	14,14	39,99	100,00
Jawa Timur	39,69	11,53	48,78	100,00
Bali	42,62	21,19	36,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,84	12,52	33,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,81	12,61	50,59	100,00
Kalimantan Barat	31,70	12,84	55,46	100,00
Kalimantan Tengah	34,21	14,30	51,49	100,00
Kalimantan Selatan	22,48	14,03	63,49	100,00
Kalimantan Timur	26,67	23,55	49,78	100,00
Sulawesi Utara	34,15	14,01	51,84	100,00
Gorontalo	31,75	18,47	49,78	100,00
Sulawesi Tengah	30,15	16,12	53,73	100,00
Sulawesi Selatan	30,34	9,52	60,14	100,00
Sulawesi Barat	39,50	10,54	49,96	100,00
Sulawesi Tenggara	31,11	8,72	60,17	100,00
Maluku	34,65	19,77	45,58	100,00
Maluku Utara	45,06	9,49	45,45	100,00
Papua	17,51	14,63	67,85	100,00
Papua Barat	7,61	18,19	74,20	100,00
INDONESIA	35,07	14,26	50,67	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Catatan :

- *) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi
 **) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.2.2
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha,
2012

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa**)	Perdesaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	81,82	5,38	12,80	100,00
Sumatera Utara	85,00	3,97	11,03	100,00
Sumatera Barat	73,14	6,67	20,18	100,00
Riau	82,99	3,78	13,23	100,00
Kep. Riau	70,55	14,18	15,26	100,00
Jambi	87,11	2,43	10,46	100,00
Sumatera Selatan	83,54	4,31	12,15	100,00
Kep. Bangka Belitung	68,34	18,60	13,06	100,00
Bengkulu	85,85	3,67	10,47	100,00
Lampung	79,21	8,15	12,64	100,00
DKI Jakarta				-
Jawa Barat	72,79	11,93	15,27	100,00
Banten	62,40	7,04	30,56	100,00
Jawa Tengah	76,09	10,85	13,06	100,00
DI Yogyakarta	84,23	7,79	7,98	100,00
Jawa Timur	81,68	5,38	12,94	100,00
Bali	75,24	12,51	12,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	77,47	9,40	13,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	88,04	8,38	3,58	100,00
Kalimantan Barat	87,52	4,67	7,81	100,00
Kalimantan Tengah	88,32	4,24	7,44	100,00
Kalimantan Selatan	77,71	7,35	14,93	100,00
Kalimantan Timur	80,76	2,33	16,90	100,00
Sulawesi Utara	71,87	9,58	18,55	100,00
Gorontalo	64,62	16,99	18,40	100,00
Sulawesi Tengah	77,32	9,68	12,99	100,00
Sulawesi Selatan	82,65	5,46	11,88	100,00
Sulawesi Barat	86,19	4,08	9,72	100,00
Sulawesi Tenggara	79,33	6,28	14,40	100,00
Maluku	85,20	6,61	8,18	100,00
Maluku Utara	88,81	4,65	6,54	100,00
Papua	85,44	2,74	11,82	100,00
Papua Barat	84,36	3,42	12,22	100,00
INDONESIA	79,31	7,75	12,94	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Catatan :

- *) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi
 **) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.2.3
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha,
2012

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa**)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	70,40	6,42	23,17	100,00
Sumatera Utara	64,32	7,33	28,34	100,00
Sumatera Barat	66,47	7,00	26,54	100,00
Riau	62,33	7,32	30,35	100,00
Kep. Riau	38,56	13,71	47,73	100,00
Jambi	76,82	5,46	17,72	100,00
Sumatera Selatan	71,17	6,14	22,69	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,26	19,58	27,16	100,00
Bengkulu	71,70	6,46	21,84	100,00
Lampung	71,32	8,49	20,20	100,00
DKI Jakarta	2,04	9,20	88,76	100,00
Jawa Barat	52,51	12,61	34,88	100,00
Banten	38,13	13,34	48,53	100,00
Jawa Tengah	61,68	14,18	24,13	100,00
DI Yogyakarta	62,45	11,39	26,16	100,00
Jawa Timur	65,25	7,79	26,97	100,00
Bali	58,05	17,09	24,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	68,82	10,54	20,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	81,85	8,89	9,26	100,00
Kalimantan Barat	77,48	6,14	16,38	100,00
Kalimantan Tengah	76,90	6,36	16,74	100,00
Kalimantan Selatan	60,44	9,44	30,12	100,00
Kalimantan Timur	51,95	13,63	34,41	100,00
Sulawesi Utara	57,25	11,30	31,45	100,00
Gorontalo	56,89	17,34	25,78	100,00
Sulawesi Tengah	68,89	10,83	20,28	100,00
Sulawesi Selatan	69,99	6,45	23,56	100,00
Sulawesi Barat	76,50	5,42	18,07	100,00
Sulawesi Tenggara	69,92	6,75	23,33	100,00
Maluku	71,44	10,19	18,37	100,00
Maluku Utara	80,27	5,59	14,13	100,00
Papua	72,25	5,05	22,70	100,00
Papua Barat	71,60	5,87	22,52	100,00
INDONESIA	61,64	10,35	28,01	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Catatan :

- *) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi
 **) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.3.1
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan,
2012

Perkotaan

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	39,81	31,58	19,49	2,06	7,07	100,00
Sumatera Utara	33,20	29,59	19,67	9,24	8,31	100,00
Sumatera Barat	32,59	38,94	13,20	5,38	9,89	100,00
Riau	36,68	28,87	19,94	3,47	11,04	100,00
Kep. Riau	34,65	33,12	21,92	0,49	9,81	100,00
Jambi	34,50	32,78	15,98	9,62	7,12	100,00
Sumatera Selatan	32,34	29,35	23,76	4,53	10,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	34,23	20,12	26,86	6,19	12,60	100,00
Bengkulu	40,50	31,35	13,36	5,88	8,90	100,00
Lampung	32,19	38,37	17,59	2,81	9,05	100,00
DKI Jakarta	27,85	20,67	44,42	2,22	4,84	100,00
Jawa Barat	30,01	34,72	15,86	11,01	8,40	100,00
Banten	27,72	25,33	31,30	11,06	4,59	100,00
Jawa Tengah	28,98	36,94	12,17	10,25	11,66	100,00
DI Yogyakarta	23,52	42,72	11,95	8,05	13,77	100,00
Jawa Timur	27,21	35,44	13,57	10,86	12,92	100,00
Bali	23,67	38,25	16,88	5,06	16,15	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,98	45,05	7,07	13,77	11,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,68	34,81	17,70	2,79	12,01	100,00
Kalimantan Barat	32,19	32,56	19,24	4,62	11,39	100,00
Kalimantan Tengah	45,68	28,58	14,39	4,88	6,47	100,00
Kalimantan Selatan	33,54	34,25	15,55	4,17	12,48	100,00
Kalimantan Timur	35,84	32,11	22,23	2,38	7,44	100,00
Sulawesi Utara	43,84	24,01	18,34	5,59	8,22	100,00
Gorontalo	50,51	23,28	14,84	6,22	5,15	100,00
Sulawesi Tengah	40,64	27,99	21,03	4,85	5,49	100,00
Sulawesi Selatan	26,67	42,29	21,42	3,63	5,99	100,00
Sulawesi Barat	46,35	43,33	4,84		5,48	100,00
Sulawesi Tenggara	37,57	34,63	20,36	0,68	6,75	100,00
Maluku	43,58	23,32	26,57		6,53	100,00
Maluku Utara	26,76	40,62	22,04	0,27	10,31	100,00
Papua	36,06	29,57	25,96		8,41	100,00
Papua Barat	49,95	39,60	7,10	3,35		100,00
INDONESIA	29,35	34,45	17,06	8,85	10,29	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Tabel 6.3.2
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan,
2012

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tidak Dibayar	Perdesaan
						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	26,59	51,33	7,69	5,26	9,13	100,00
Sumatera Utara	24,05	51,88	4,23	4,77	15,07	100,00
Sumatera Barat	30,18	43,71	6,17	7,87	12,07	100,00
Riau	36,69	45,26	7,36	3,64	7,04	100,00
Kep. Riau	50,28	19,27	10,48	11,00	8,97	100,00
Jambi	28,95	45,13	7,25	6,39	12,28	100,00
Sumatera Selatan	22,54	50,25	6,82	5,33	15,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	35,40	30,29	11,45	8,26	14,61	100,00
Bengkulu	25,09	48,20	4,09	3,03	19,59	100,00
Lampung	22,25	52,91	4,26	5,96	14,62	100,00
DKI Jakarta						-
Jawa Barat	16,54	45,88	4,69	21,00	11,89	100,00
Banten	26,48	43,86	3,62	12,40	13,64	100,00
Jawa Tengah	18,25	48,72	3,29	11,24	18,49	100,00
DI Yogyakarta	11,19	54,94	2,43	4,50	26,94	100,00
Jawa Timur	17,43	46,93	2,77	14,41	18,47	100,00
Bali	22,30	40,40	3,64	8,33	25,33	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,52	53,72	2,08	10,77	8,90	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,29	55,54	0,57	0,94	22,67	100,00
Kalimantan Barat	22,34	51,15	6,17	0,64	19,69	100,00
Kalimantan Tengah	20,20	52,02	6,81	1,61	19,36	100,00
Kalimantan Selatan	25,32	47,71	3,87	5,67	17,43	100,00
Kalimantan Timur	32,95	37,37	12,93	3,32	13,43	100,00
Sulawesi Utara	37,71	28,16	8,31	10,22	15,61	100,00
Gorontalo	33,54	41,64	7,35	10,15	7,32	100,00
Sulawesi Tengah	26,52	52,36	4,39	3,95	12,78	100,00
Sulawesi Selatan	19,60	59,03	2,63	3,41	15,32	100,00
Sulawesi Barat	17,38	68,80	0,32	2,34	11,16	100,00
Sulawesi Tenggara	23,82	58,55	1,91	0,13	15,58	100,00
Maluku	31,10	50,93	2,70		15,27	100,00
Maluku Utara	21,18	53,56	2,67	6,00	16,60	100,00
Papua	19,98	51,53	5,55	3,75	19,19	100,00
Papua Barat	24,73	48,80	6,18	0,75	19,55	100,00
INDONESIA	20,55	48,82	3,90	10,17	16,55	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Tabel 6.3.3
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan,
2012

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan					Jumlah
	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29,33	47,23	10,14	4,60	8,70	100,00
Sumatera Utara	27,52	43,43	10,09	6,46	12,50	100,00
Sumatera Barat	30,87	42,34	8,18	7,16	11,44	100,00
Riau	36,69	39,72	11,61	3,58	8,39	100,00
Kep. Riau	37,92	30,23	19,53	2,69	9,64	100,00
Jambi	30,18	42,40	9,18	7,11	11,14	100,00
Sumatera Selatan	24,61	45,85	10,39	5,16	13,98	100,00
Kep. Bangka Belitung	34,95	26,42	17,30	7,47	13,85	100,00
Bengkulu	28,74	44,21	6,28	3,70	17,06	100,00
Lampung	23,87	50,53	6,44	5,45	13,71	100,00
DKI Jakarta	27,85	20,67	44,42	2,22	4,84	100,00
Jawa Barat	24,15	39,57	11,01	15,35	9,92	100,00
Banten	27,16	33,68	18,83	11,66	8,66	100,00
Jawa Tengah	22,38	44,18	6,71	10,86	15,86	100,00
DI Yogyakarta	18,19	48,00	7,83	6,52	19,46	100,00
Jawa Timur	21,25	42,43	7,00	13,02	16,30	100,00
Bali	23,02	39,27	10,61	6,61	20,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,96	50,55	3,91	11,87	9,72	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,78	53,03	2,64	1,16	21,38	100,00
Kalimantan Barat	24,12	47,81	8,52	1,36	18,20	100,00
Kalimantan Tengah	25,57	47,07	8,41	2,30	16,64	100,00
Kalimantan Selatan	27,89	43,50	7,53	5,20	15,88	100,00
Kalimantan Timur	34,49	34,57	17,88	2,82	10,24	100,00
Sulawesi Utara	40,09	26,55	12,20	8,42	12,74	100,00
Gorontalo	37,53	37,32	9,11	9,23	6,81	100,00
Sulawesi Tengah	29,04	48,01	7,36	4,11	11,48	100,00
Sulawesi Selatan	21,31	54,98	7,18	3,47	13,06	100,00
Sulawesi Barat	23,40	63,52	1,25	1,85	9,98	100,00
Sulawesi Tenggara	26,51	53,89	5,51	0,24	13,86	100,00
Maluku	34,50	43,41	9,20		12,89	100,00
Maluku Utara	22,27	51,03	6,45	4,88	15,37	100,00
Papua	23,10	47,27	9,51	3,03	17,10	100,00
Papua Barat	28,92	47,27	6,33	1,18	16,30	100,00
INDONESIA	24,07	43,08	9,16	9,64	14,05	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Tabel 6.4.1
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin
dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2012

Perkotaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	13,86	32,20	53,93	26,84	44,38	28,78	17,38	35,49	47,13
Sumatera Utara	5,33	22,46	72,21	13,89	33,70	52,41	8,34	26,41	65,24
Sumatera Barat	16,24	38,34	45,42	42,31	30,49	27,19	24,88	35,74	39,38
Riau	10,61	22,49	66,91	21,58	38,56	39,85	13,46	26,66	59,88
Kep. Riau	14,65	18,45	66,90	34,38	23,46	42,16	20,20	19,85	59,95
Jambi	8,27	24,25	67,48	13,22	41,34	45,44	9,67	29,08	61,25
Sumatera Selatan	8,98	26,12	64,90	8,21	36,80	54,99	8,68	30,35	60,97
Kep. Bangka Belitung	9,92	26,73	63,35	16,89	45,67	37,44	11,82	31,89	56,29
Bengkulu	14,78	30,24	54,98	18,56	28,55	52,89	15,79	29,79	54,42
Lampung	16,93	24,78	58,29	26,92	38,05	35,03	19,83	28,62	51,55
DKI Jakarta	6,59	16,08	77,33	18,27	11,69	70,04	11,64	14,18	74,18
Jawa Barat	14,15	27,73	58,12	20,39	36,49	43,12	15,89	30,18	53,93
Banten	11,85	19,13	69,02	27,17	32,84	39,98	15,20	22,12	62,68
Jawa Tengah	13,04	33,51	53,44	21,28	28,29	50,43	16,18	31,52	52,29
DI Yogyakarta	18,28	42,54	39,18	24,99	31,94	43,07	21,16	38,00	40,84
Jawa Timur	10,10	34,88	55,02	19,38	29,57	51,04	13,45	32,97	53,58
Bali	13,38	37,15	49,46	14,67	32,45	52,88	13,96	35,05	50,99
Nusa Tenggara Barat	15,78	43,93	40,29	26,39	36,85	36,76	19,76	41,27	38,97
Nusa Tenggara Timur	17,06	24,74	58,21	17,56	39,38	43,06	17,24	30,10	52,66
Kalimantan Barat	6,62	25,73	67,65	12,54	38,78	48,68	8,73	30,38	60,89
Kalimantan Tengah	13,79	32,89	53,32	15,78	36,47	47,75	14,51	34,18	51,32
Kalimantan Selatan	18,92	32,69	48,39	26,66	35,88	37,47	21,71	33,84	44,45
Kalimantan Timur	4,96	20,91	74,14	19,99	34,22	45,79	9,90	25,28	64,83
Sulawesi Utara	17,27	33,05	49,69	15,93	34,07	50,00	16,73	33,46	49,81
Gorontalo	44,66	13,63	41,71	32,71	19,82	47,47	40,21	15,93	43,85
Sulawesi Tengah	25,65	33,60	40,75	22,63	33,75	43,62	24,62	33,65	41,73
Sulawesi Selatan	18,42	29,30	52,29	18,46	35,16	46,38	18,43	31,02	50,55
Sulawesi Barat	43,83	22,79	33,38	14,01	19,27	66,72	35,10	21,76	43,14
Sulawesi Tenggara	29,92	31,91	38,17	25,70	33,41	40,88	28,53	32,41	39,06
Maluku	21,16	31,77	47,08	17,65	21,58	60,77	20,13	28,79	51,08
Maluku Utara	12,20	30,23	57,57	11,04	41,14	47,82	11,85	33,52	54,63
Papua	3,87	27,84	68,29	4	43,24	53,26	3,75	32,62	63,62
Papua Barat	15,64	20,34	64,02	26,58	29,35	44,07	20,71	24,52	54,77
INDONESIA	12,61	30,32	57,07	20,27	30,77	48,96	15,26	30,48	54,26

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Tabel 6.4.2
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin
dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2012

Perdesaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	20,54	51,22	28,24	33,55	55,31	11,14	24,89	52,59	22,53
Sumatera Utara	17,03	44,75	38,22	20,51	53,54	25,95	18,55	48,58	32,87
Sumatera Barat	16,06	53,23	30,70	27,51	50,14	22,35	19,96	52,18	27,86
Riau	15,86	50,22	33,92	25,24	51,81	22,96	18,17	50,61	31,22
Kep. Riau	22,32	33,49	44,19	20,03	64,78	15,19	21,59	43,35	35,06
Jambi	16,56	54,79	28,65	17,57	59,28	23,15	16,84	56,05	27,11
Sumatera Selatan	15,77	50,75	33,48	16,71	54,36	28,93	16,10	52,00	31,90
Kep. Bangka Belitung	9,31	53,81	36,88	16,03	51,51	32,46	11,32	53,12	35,56
Bengkulu	20,00	39,50	40,50	23,93	49,73	26,34	21,33	42,97	35,70
Lampung	23,55	40,85	35,61	35,79	36,83	27,38	27,22	39,64	33,14
DKI Jakarta									
Jawa Barat	15,90	45,61	38,49	26,53	48,86	24,60	19,24	46,63	34,13
Banten	13,04	39,70	47,26	31,98	39,52	28,51	19,01	39,65	41,35
Jawa Tengah	12,89	50,19	36,92	24,56	48,17	27,27	17,61	49,38	33,02
DI Yogyakarta	10,97	57,04	31,98	20,92	58,76	20,32	16,02	57,91	26,06
Jawa Timur	12,84	53,35	33,81	25,96	48,75	25,29	18,14	51,49	30,37
Bali	8,27	57,12	34,61	19,58	52,86	27,56	13,25	55,25	31,51
Nusa Tenggara Barat	27,69	41,20	31,11	23,43	42,88	33,69	26,21	41,78	32,01
Nusa Tenggara Timur	16,61	51,00	32,39	25,32	57,84	16,84	20,21	53,82	25,97
Kalimantan Barat	11,26	64,20	24,54	18,03	58,73	23,24	13,84	62,12	24,05
Kalimantan Tengah	10,62	41,26	48,12	19,89	47,92	32,19	13,83	43,57	42,59
Kalimantan Selatan	14,82	60,34	24,84	15,12	57,37	27,51	14,94	59,12	25,94
Kalimantan Timur	10,10	26,77	63,13	11,32	37,21	51,47	10,47	29,90	59,63
Sulawesi Utara	8,40	40,73	50,86	13,91	42,78	43,31	9,98	41,32	48,70
Gorontalo	22,97	38,78	38,25	26,57	34,97	38,46	24,20	37,48	38,32
Sulawesi Tengah	24,50	42,02	33,48	43,04	41,11	15,85	30,15	41,74	28,11
Sulawesi Selatan	25,09	47,07	27,84	36,51	41,83	21,67	29,07	45,24	25,69
Sulawesi Barat	41,24	41,29	17,47	57,92	23,05	19,03	47,08	34,90	18,02
Sulawesi Tenggara	23,42	52,22	24,36	34,16	43,36	22,48	27,45	48,89	23,65
Maluku	12,41	49,43	38,17	21,27	53,40	25,32	15,07	50,62	34,31
Maluku Utara	11,69	45,59	42,72	32,25	45,32	22,43	19,46	45,49	35,05
Papua	8,77	52,22	39,01	7,04	56,40	36,56	8,31	53,32	38,37
Papua Barat	10,82	39,58	49,60	17,16	49,37	33,47	12,79	42,63	44,58
INDONESIA	15,57	49,34	35,09	25,42	49,10	25,48	19,25	49,25	31,50

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Tabel 6.4.3
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin
dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2012

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	19,05	46,98	33,97	32,38	53,40	14,22	23,33	49,04	27,63
Sumatera Utara	12,21	35,55	52,24	18,33	46,99	34,69	14,68	40,17	45,15
Sumatera Barat	16,11	48,92	34,97	31,68	44,61	23,71	21,37	47,46	31,16
Riau	14,11	40,96	44,93	23,96	47,18	28,86	16,58	42,52	40,90
Kep. Riau	16,19	21,47	62,33	31,10	32,90	36,00	20,49	24,77	54,74
Jambi	14,73	48,05	37,22	16,60	55,30	28,10	15,26	50,09	34,66
Sumatera Selatan	14,42	45,87	39,71	14,73	50,26	35,02	14,53	47,44	38,03
Kep. Bangka Belitung	9,54	43,28	47,17	16,34	49,42	34,24	11,51	45,06	43,44
Bengkulu	18,67	37,13	44,20	22,88	45,58	31,54	20,02	39,85	40,12
Lampung	22,45	38,19	39,36	34,38	37,02	28,60	26,01	37,84	36,15
DKI Jakarta	6,59	16,08	77,33	18,27	11,69	70,04	11,64	14,18	74,18
Jawa Barat	14,89	35,28	49,83	23,23	42,22	34,55	17,35	37,33	45,33
Banten	12,35	27,73	59,92	29,78	36,46	33,76	16,91	30,02	53,07
Jawa Tengah	12,95	43,61	43,44	23,34	40,79	35,86	17,06	42,50	40,45
DI Yogyakarta	15,39	48,28	36,33	23,06	44,66	32,27	18,94	46,61	34,46
Jawa Timur	11,72	45,81	42,47	23,56	41,76	34,67	16,30	44,25	39,45
Bali	10,95	46,66	42,39	16,97	42,02	41,00	13,62	44,60	41,77
Nusa Tenggara Barat	23,45	42,17	34,38	24,57	40,56	34,87	23,85	41,60	34,55
Nusa Tenggara Timur	16,67	47,60	35,73	24,48	55,83	19,69	19,85	50,96	29,19
Kalimantan Barat	10,40	57,06	32,55	17,10	55,33	27,57	12,92	56,41	30,67
Kalimantan Tengah	11,27	39,52	49,20	19,00	45,44	35,57	13,98	41,59	44,43
Kalimantan Selatan	16,17	51,21	32,62	18,42	51,22	30,36	17,06	51,22	31,73
Kalimantan Timur	7,42	23,71	68,88	16,14	35,55	48,32	10,16	27,44	62,40
Sulawesi Utara	11,48	38,07	50,46	14,86	38,69	46,45	12,60	38,27	49,13
Gorontalo	27,88	33,08	39,03	28,11	31,16	40,72	27,96	32,41	39,62
Sulawesi Tengah	24,70	40,58	34,73	39,03	39,66	21,30	29,16	40,29	30,55
Sulawesi Selatan	23,37	42,51	34,12	32,68	40,41	26,91	26,49	41,80	31,70
Sulawesi Barat	41,81	37,19	21,00	50,04	22,37	27,59	44,60	32,17	23,23
Sulawesi Tenggara	24,76	48,03	27,21	32,68	41,61	25,71	27,66	45,67	26,66
Maluku	14,81	44,58	40,61	20,31	44,92	34,77	16,45	44,68	38,87
Maluku Utara	11,80	42,30	45,90	28,81	44,64	26,55	17,98	43,15	38,87
Papua	7,87	47,74	44,39	6,26	53,48	40,27	7,43	49,30	43,27
Papua Barat	11,47	36,99	51,54	19,32	44,79	35,90	14,11	39,62	46,27
INDONESIA	14,36	41,55	44,09	23,45	42,11	34,43	17,66	41,75	40,59

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Tabel 7.1.1
Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenis Bacaan, 2012

Provinsi	Perkotaan								
	Laki-laki (L)			Perempuan (P)			L+P		
	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	41,68	7,04	28,82	6,71	2,65	15,41	22,32	4,61	21,39
Sumatera Utara	38,86	8,68	20,37	9,64	2,16	18,60	22,27	4,98	19,36
Sumatera Barat	26,74	10,02	19,64	8,49	5,94	29,81	16,15	7,66	25,54
R i a u	43,51	10,16	18,14	5,41	3,13	23,01	24,20	6,60	20,61
Kepulauan Riau	30,56	17,42	8,87	12,52	2,21	9,87	21,75	9,99	9,36
J a m b i	25,68	11,09	9,93	6,53	1,61	14,24	15,90	6,25	12,13
Sumatera Selatan	36,39	3,09	12,51	13,83	3,70	12,36	24,30	3,42	12,43
Bangka Belitung	42,02	2,46	13,56	17,56	3,46	5,61	29,18	2,98	9,38
Bengkulu	27,91	2,44	37,93	19,72		28,62	23,62	1,17	33,06
Lampung	30,66	7,15	16,94	15,60	0,95	12,80	22,99	3,99	14,83
DKI Jakarta	43,54	9,00	22,34	24,32	6,04	18,61	33,55	7,46	20,41
Jawa Barat	18,17	3,35	18,31	7,36	2,28	10,86	12,49	2,78	14,40
Banten	23,10	2,28	19,89	5,48	1,51	9,43	13,78	1,87	14,36
Jawa Tengah	14,44	2,79	16,33	4,91	1,53	10,90	9,22	2,10	13,36
DI Yogyakarta	26,28		5,00	14,72		5,00	19,88		5,00
Jawa Timur	17,45	3,29	13,07	7,98	1,47	7,32	12,16	2,27	9,86
B a l i	16,59	3,52	10,71	5,99	0,25	0,84	10,97	1,79	5,47
Nusa Tenggara Barat	11,71	4,28	21,29	0,68	2,01	5,33	5,87	3,08	12,85
Nusa Tenggara Timur	28,85	14,96	25,09	16,69	1,50	11,38	22,59	8,03	18,03
Kalimantan Barat	13,63	1,22	16,07	1,11	1,60	7,95	7,29	1,41	11,96
Kalimantan Tengah	32,75	3,04	8,54	12,62	1,92	6,45	22,66	2,48	7,49
Kalimantan Selatan	21,39	3,36	18,88	13,56		22,22	17,01	1,48	20,74
Kalimantan Timur	25,94	9,32	21,25	7,84	3,37	12,97	17,26	6,47	17,28
Sulawesi Utara	39,03	3,79	38,43	18,51	2,00	36,26	27,83	2,81	37,24
Gorontalo	12,08		13,97	5,67	10,43	31,15	8,58	5,70	23,35
Sulawesi Tengah	30,19	8,54	25,11	10,15	3,26	23,64	19,97	5,85	24,36
Sulawesi Selatan	24,40	11,27	25,28	11,16	6,35	13,32	16,89	8,48	18,50
Sulawesi Barat	0,21			3,08		2,91	1,77		1,58
Sulawesi Tenggara	12,70		23,60	9,12	3,36	11,12	10,77	1,82	16,86
Maluku	20,01	2,62	54,31	7,79	3,09	47,64	13,66	2,87	50,84
Maluku Utara	47,54	1,68	24,92	13,87	0,98	8,92	30,70	1,33	16,92
Papua	16,53		27,33	4,86		33,76	11,84		29,92
Papua Barat	34,25	26,70	60,20	15,49	11,68	19,46	26,03	20,12	42,35
INDONESIA	22,11	4,42	17,30	8,83	2,21	11,58	14,94	3,23	14,21

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.1.2
Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenis Bacaan, 2012

Provinsi	Perdesaan								
	Laki-laki (L)			Perempuan (P)			L+P		
	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	18,81	1,47	12,32	1,87	0,99	10,42	9,36	1,20	11,26
Sumatera Utara	20,90	2,54	27,92	2,85	2,37	19,22	10,70	2,44	23,00
Sumatera Barat	5,52	3,82	18,65	1,54	2,79	20,76	3,23	3,23	19,86
R i a u	4,19	7,58	20,77	1,06	1,09	8,18	2,62	4,33	14,46
Kepulauan Riau	5,61	8,21	34,42			18,35	2,94	4,30	26,77
J a m b i	3,27	3,46	18,02	0,28	2,37	11,06	1,76	2,91	14,51
Sumatera Selatan	5,34	1,88	18,36	0,46	1,28	11,53	2,78	1,56	14,77
Bangka Belitung	0,96	1,45	6,15	2,06		2,30	1,53	0,70	4,16
Bengkulu	7,52	2,56	13,74	0,85		3,76	4,11	1,25	8,64
Lampung	1,90	3,16	17,25	0,18	1,11	7,77	1,05	2,14	12,54
DKI Jakarta									
Jawa Barat	3,21	1,66	16,17	1,27	0,25	11,58	2,19	0,92	13,75
Banten	3,93	2,21	34,01	0,50	2,01	19,13	2,18	2,11	26,40
Jawa Tengah	4,55	1,33	11,04	0,16	0,25	5,21	2,15	0,74	7,86
DI Yogyakarta	15,76		4,96	3,26	1,59	4,72	8,59	0,91	4,83
Jawa Timur	3,06	0,41	5,76	0,79	0,41	2,49	1,78	0,41	3,92
B a l i	4,22	2,54	1,42	0,01	0,01		1,96	1,18	0,66
Nusa Tenggara Barat	4,68	3,92	11,59			3,99	2,22	1,86	7,59
Nusa Tenggara Timur	4,45	4,49	12,50	1,08	0,47	6,00	2,68	2,39	9,10
Kalimantan Barat	3,87	1,51	7,64	1,33	0,74	2,33	2,60	1,13	4,99
Kalimantan Tengah	1,49	3,42	22,19	0,46	0,53	10,30	0,98	2,00	16,36
Kalimantan Selatan	2,61	1,21	24,89			13,61	1,15	0,53	18,58
Kalimantan Timur	9,33	8,59	21,74	2,06	3,87	22,71	5,88	6,35	22,20
Sulawesi Utara	15,40	4,51	32,33	8,07	2,66	35,04	11,47	3,52	33,78
Gorontalo	12,82	12,61	12,72	2,38	2,63	12,66	7,18	7,22	12,69
Sulawesi Tengah	3,35	4,60	28,69		1,51	18,87	1,68	3,06	23,79
Sulawesi Selatan	6,12	4,36	10,65	1,05	0,62	7,27	3,22	2,23	8,72
Sulawesi Barat	7,10	1,42	12,91	3,53	4,91	9,19	5,21	3,27	10,94
Sulawesi Tenggara	4,79	3,77	8,52		0,80	3,06	2,22	2,18	5,59
Maluku	7,96	4,87	44,45		4,07	40,70	3,85	4,46	42,51
Maluku Utara	5,29	14,45	19,67	2,07		4,08	3,69	7,25	11,90
Papua	8,76	7,83	18,88	2,73		7,29	6,25	4,56	14,04
Papua Barat	3,58	5,76	22,57		1,88	13,73	1,99	4,04	18,64
INDONESIA	5,34	2,23	13,65	0,95	0,78	8,12	2,97	1,45	10,66

Tabel 7.1.3
Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenis Bacaan,
2012

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan								
	Laki-laki (L)			Perempuan (P)			L+P		
	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya	Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	Buku	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	25,29	3,05	17,00	3,23	1,45	11,81	13,00	2,16	14,11
Sumatera Utara	29,71	5,55	24,21	6,19	2,27	18,91	16,39	3,69	21,21
Sumatera Barat	13,43	6,13	19,02	4,17	3,98	24,18	8,09	4,89	22,00
R i a u	19,47	8,58	19,75	2,78	1,90	14,02	11,07	5,22	16,87
Kepulauan Riau	25,36	15,50	14,20	10,01	1,77	11,57	17,90	8,82	12,92
J a m b i	10,10	5,79	15,55	2,22	2,14	12,05	6,11	3,94	13,78
Sumatera Selatan	16,30	2,31	16,29	5,31	2,16	11,83	10,48	2,23	13,93
Bangka Belitung	21,00	1,94	9,76	9,78	1,72	3,95	15,16	1,83	6,74
Bengkulu	13,72	2,52	21,10	6,79		11,59	10,16	1,23	16,21
Lampung	9,19	4,17	17,17	4,23	1,07	9,09	6,71	2,62	13,13
DKI Jakarta	43,54	9,00	22,34	24,32	6,04	18,61	33,55	7,46	20,41
Jawa Barat	13,04	2,77	17,58	5,27	1,58	11,11	8,95	2,14	14,18
Banten	16,47	2,25	24,78	3,83	1,68	12,63	9,86	1,95	18,43
Jawa Tengah	9,06	2,00	13,45	2,34	0,84	7,82	5,38	1,36	10,37
DI Yogyakarta	22,77		4,99	10,70	0,56	4,90	16,00	0,31	4,94
Jawa Timur	9,93	1,79	9,25	4,20	0,92	4,78	6,72	1,30	6,75
B a l i	11,68	3,13	7,03	3,59	0,15	0,50	7,37	1,54	3,55
Nusa Tenggara Barat	7,61	4,07	15,63	0,28	0,84	4,55	3,74	2,37	9,78
Nusa Tenggara Timur	9,23	6,54	14,97	4,06	0,67	7,03	6,53	3,48	10,83
Kalimantan Barat	6,77	1,42	10,15	1,26	1,00	4,04	4,01	1,21	7,09
Kalimantan Tengah	11,79	3,29	17,69	4,59	1,00	8,99	8,24	2,16	13,39
Kalimantan Selatan	10,51	2,12	22,36	5,70		17,23	7,82	0,93	19,49
Kalimantan Timur	19,56	9,04	21,44	5,65	3,56	16,67	12,92	6,42	19,16
Sulawesi Utara	25,97	4,19	35,06	12,84	2,36	35,60	18,88	3,20	35,35
Gorontalo	12,57	8,41	13,14	3,50	5,27	18,92	7,65	6,71	16,27
Sulawesi Tengah	9,78	5,54	27,83	2,52	1,94	20,06	6,14	3,74	23,93
Sulawesi Selatan	12,85	6,91	16,04	4,73	2,71	9,48	8,23	4,52	12,30
Sulawesi Barat	5,54	1,10	10,00	3,43	3,75	7,71	4,41	2,52	8,78
Sulawesi Tenggara	6,94	2,74	12,62	2,51	1,51	5,28	4,56	2,08	8,68
Maluku	12,41	4,04	48,09	2,91	3,71	43,29	7,49	3,87	45,60
Maluku Utara	16,74	10,99	21,09	5,28	0,27	5,40	11,02	5,64	13,26
Papua	10,84	5,74	21,13	3,27		14,02	7,71	3,37	18,19
Papua Barat	13,23	12,35	34,41	4,79	4,91	15,50	9,50	9,06	26,05
INDONESIA	13,61	3,31	15,45	4,84	1,49	9,82	8,87	2,32	12,41

Tabel 7.2
Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	84,63	71,86	77,56	69,32	47,47	57,12	73,66	54,29	62,87
Sumatera Utara	89,15	93,01	91,34	78,12	69,45	73,22	83,53	81,06	82,13
Sumatera Barat	91,39	87,25	88,99	77,36	67,42	71,65	82,59	74,92	78,17
R i a u	94,31	85,15	89,67	82,93	80,51	81,72	87,35	82,34	84,83
Kepulauan Riau	97,72	94,35	96,07	94,38	80,74	87,89	97,03	91,62	94,40
J a m b i	89,44	83,33	86,32	78,92	76,04	77,46	82,12	78,30	80,19
Sumatera Selatan	95,76	87,41	91,28	83,58	73,17	78,11	87,88	78,33	82,83
Bangka Belitung	98,20	88,09	92,89	75,24	85,89	80,73	86,45	86,99	86,73
Bengkulu	100,00	89,22	94,36	72,85	67,65	70,20	81,11	74,45	77,68
Lampung	93,66	92,67	93,16	85,76	78,37	82,09	87,76	82,13	84,95
DKI Jakarta	89,53	93,74	91,72				89,53	93,74	91,72
Jawa Barat	88,97	84,16	86,44	78,28	67,35	72,53	85,30	78,39	81,66
Banten	94,47	84,24	89,06	78,05	69,81	73,84	88,79	79,47	83,92
Jawa Tengah	83,71	82,42	83,00	82,68	78,18	80,22	83,15	80,12	81,49
DI Yogyakarta	92,39	77,46	84,12	75,97	80,14	78,36	86,92	78,40	82,15
Jawa Timur	90,04	81,78	85,42	83,72	74,59	78,58	86,74	78,00	81,84
B a l i	83,99	80,36	82,06	88,95	70,49	79,06	85,96	76,39	80,86
Nusa Tenggara Barat	65,73	53,13	59,06	61,90	53,04	57,23	63,49	53,08	57,99
Nusa Tenggara Timur	82,57	62,02	71,99	31,77	23,06	27,21	41,74	30,50	35,88
Kalimantan Barat	94,94	88,78	91,83	77,71	75,57	76,64	82,83	79,59	81,21
Kalimantan Tengah	81,47	85,61	83,54	59,40	59,41	59,40	66,67	68,31	67,48
Kalimantan Selatan	92,87	87,23	89,72	74,46	64,85	69,09	82,21	74,26	77,77
Kalimantan Timur	97,26	96,26	96,78	85,36	73,28	79,63	92,69	87,54	90,23
Sulawesi Utara	97,32	94,39	95,72	77,87	63,90	70,38	86,57	77,84	81,85
Gorontalo	84,34	91,93	88,48	66,90	59,77	63,05	72,71	70,65	71,59
Sulawesi Tengah	88,08	93,41	90,80	76,43	69,60	73,02	79,22	75,50	77,36
Sulawesi Selatan	85,48	84,55	84,95	72,99	65,77	68,87	77,59	72,62	74,76
Sulawesi Barat	80,17	82,04	81,19	71,49	57,51	64,08	73,45	63,30	68,03
Sulawesi Tenggara	95,83	86,55	90,82	67,91	67,76	67,83	75,51	72,93	74,12
Maluku	85,20	90,87	88,15	62,63	54,47	58,42	70,96	68,04	69,45
Maluku Utara	84,19	79,32	81,75	69,98	61,44	65,72	73,83	66,31	70,08
Papua	77,65	73,37	75,93	44,71	46,75	45,56	53,49	53,52	53,50
Papua Barat	89,70	91,10	90,32	62,46	49,50	56,70	71,03	62,36	67,20
INDONESIA	88,63	83,92	86,09	77,91	70,21	73,75	83,20	76,97	79,83

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.3
Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio menurut Provinsi,
Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	13,77	8,64	10,93	9,57	2,25	5,48	10,76	4,04	7,02
Sumatera Utara	17,80	16,17	16,88	12,05	9,54	10,63	14,87	12,81	13,70
Sumatera Barat	19,72	12,80	15,71	16,24	13,36	14,58	17,54	13,15	15,01
R i a u	15,27	13,54	14,39	19,38	10,40	14,88	17,78	11,64	14,69
Kepulauan Riau	30,60	21,44	26,12	2,34	34,09	17,44	24,70	23,97	24,34
J a m b i	9,69	0,22	4,85	10,07	2,96	6,48	9,95	2,11	5,98
Sumatera Selatan	21,13	10,51	15,44	8,75	6,32	7,47	13,12	7,84	10,32
Bangka Belitung	12,03	14,31	13,23	15,00	9,76	12,30	13,55	12,03	12,76
Bengkulu	24,46	1,22	12,30	12,98	3,03	7,90	16,48	2,46	9,27
Lampung	8,49	9,79	9,15	16,63	9,85	13,26	14,57	9,84	12,20
DKI Jakarta	23,52	12,96	18,03				23,52	12,96	18,03
Jawa Barat	16,30	11,87	13,97	18,51	12,71	15,46	17,06	12,16	14,48
Banten	29,83	9,19	18,91	13,66	2,89	8,15	24,23	7,11	15,28
Jawa Tengah	33,25	18,53	25,19	25,38	14,60	19,49	28,97	16,40	22,10
DI Yogyakarta	46,08	32,54	38,58	43,67	36,93	39,80	45,28	34,08	39,00
Jawa Timur	30,30	14,21	21,31	22,75	11,90	16,65	26,36	12,99	18,86
B a l i	26,33	16,35	21,03	21,15	17,22	19,04	24,27	16,70	20,24
Nusa Tenggara Barat	14,61	4,92	9,48	4,21	0,51	2,26	8,54	2,35	5,28
Nusa Tenggara Timur	25,07	20,51	22,72	7,97	4,74	6,28	11,32	7,75	9,46
Kalimantan Barat	32,60	18,90	25,67	10,51	5,19	7,86	17,08	9,36	13,21
Kalimantan Tengah	6,83	13,45	10,15	9,25	4,87	7,11	8,45	7,79	8,12
Kalimantan Selatan	22,99	10,82	16,19	20,90	12,54	16,22	21,78	11,81	16,21
Kalimantan Timur	23,27	11,08	17,43	10,83	1,73	6,51	18,49	7,53	13,26
Sulawesi Utara	26,15	18,81	22,14	12,47	9,41	10,83	18,59	13,71	15,95
Gorontalo	52,66	42,09	46,89	34,51	25,65	29,72	40,55	31,21	35,49
Sulawesi Tengah	12,85	2,32	7,48	7,41	3,55	5,49	8,72	3,24	5,97
Sulawesi Selatan	21,74	7,06	13,41	13,22	5,63	8,88	16,36	6,15	10,54
Sulawesi Barat	19,26		8,76	15,20	10,47	12,69	16,11	8,00	11,78
Sulawesi Tenggara	21,10	6,37	13,15	13,58	2,24	7,50	15,62	3,38	9,05
Maluku	19,62	8,18	13,67	7,74	3,94	5,78	12,13	5,52	8,71
Maluku Utara	0,03	8,85	4,45	9,23		4,63	6,74	2,41	4,58
Papua	37,52	23,92	32,05	13,09	2,28	8,58	19,61	7,78	14,72
Papua Barat	43,78	34,30	39,62	14,00	3,94	9,53	23,37	13,33	18,93
INDONESIA	24,84	14,31	19,16	18,41	10,90	14,35	21,58	12,58	16,72

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.4.1
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat
Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jenis Kegiatan, 2012

Provinsi	Jenis Kegiatan Sosial							Perkotaan
	Keaga- maan	Keteram- pilan	Olahraga	Kesenian	Arisan	Kematian	Sosial Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	77,20	0,34	2,52			11,38	76,29	49,53
Sumatera Utara	71,78	0,48	2,04	0,97		17,30	64,48	21,25
Sumatera Barat	57,33	1,29	1,70	0,07		8,93	65,82	36,17
R i a u	75,94		4,69			23,65	68,05	38,03
Kepulauan Riau	68,29	0,79	17,64	0,27		16,48	68,90	41,82
J a m b i	74,51		5,29			18,84	66,24	35,72
Sumatera Selatan	61,65		1,20	1,97		12,81	68,17	15,23
Bangka Belitung	66,34		3,01			8,08	44,36	13,24
Bengkulu	80,92		7,58			15,74	65,59	48,42
Lampung	63,59		2,94	1,03		11,40	57,62	23,74
DKI Jakarta	74,80	3,22	12,66	2,93		31,86	55,89	30,09
Jawa Barat	68,24	0,12	4,98	0,72		11,43	48,74	28,12
Banten	84,10	0,52	5,24	0,41		10,70	43,79	22,44
Jawa Tengah	63,05	0,15	4,90	1,10		37,22	61,80	40,35
DI Yogyakarta	72,96	0,17	10,72	1,55		50,53	65,96	45,41
Jawa Timur	65,15	0,73	4,94	1,08		29,65	56,89	30,03
B a l i	75,39	0,22	4,64	2,52		6,31	55,70	39,08
Nusa Tenggara Barat	73,33		1,38	1,06		7,45	81,27	34,31
Nusa Tenggara Timur	67,12	1,11	5,78	3,09		29,22	56,23	14,99
Kalimantan Barat	39,30		1,36	2,06		6,84	49,38	15,49
Kalimantan Tengah	65,44		4,22			31,81	41,54	11,41
Kalimantan Selatan	61,10	0,60	2,43	0,60		28,24	54,95	21,68
Kalimantan Timur	53,62		2,55	0,98		18,04	53,84	28,34
Sulawesi Utara	87,42	1,16	3,49	1,47		36,09	77,85	39,02
Gorontalo	64,37		1,54	1,54		12,11	51,20	9,16
Sulawesi Tengah	61,33		6,54			21,44	59,19	18,98
Sulawesi Selatan	40,35	0,12	4,73	0,43		13,88	50,44	22,30
Sulawesi Barat	21,98					0,09	44,86	4,43
Sulawesi Tenggara	47,40		0,38			7,79	60,10	30,67
Maluku	65,55	0,88	1,84	1,17		1,59	53,53	25,71
Maluku Utara	58,88		1,14			3,54	56,86	30,03
Papua	77,94	1,22	3,89	1,22		21,08	47,67	24,86
Papua Barat	77,30	2,55	3,68	2,55		28,66	75,06	40,83
INDONESIA	66,84	0,50	5,15	1,08		22,88	56,85	30,86

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.4.2
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jenis Kegiatan, 2012

Provinsi	Jenis Kegiatan Sosial							Perdesaan
	Keaga- maan	Keteram- pilan	Olahraga	Kesenian	Arisan	Kematian	Sosial Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	73,61	0,46	0,42	0,58	7,35	77,27	45,78	
Sumatera Utara	77,48		0,50	0,26	15,46	68,12	31,76	
Sumatera Barat	61,42	0,43	1,63	0,30	6,48	70,52	36,30	
R i a u	80,28		0,81	1,34	16,47	75,93	43,52	
J a m b i	77,91	0,01			10,65	60,78	34,79	
Sumatera Selatan	77,09	0,44	0,82	2,46	19,89	70,58	35,50	
Bengkulu	54,99	0,28	0,59	0,35	10,35	71,83	24,61	
Lampung	44,75					52,71	17,07	
Bangka Belitung	61,02	0,38	1,27	4,67	13,49	69,10	44,39	
Kepulauan Riau	68,89	0,34	0,34	0,32	13,70	56,49	28,53	
DKI Jakarta								
Jawa Barat	70,66	0,44	0,74	0,48	4,21	55,76	34,52	
Jawa Tengah	86,12	0,03		1,00	2,42	60,04	37,39	
DI Yogyakarta	63,97	0,42	1,24	1,49	32,39	63,08	40,87	
Jawa Timur	53,65		2,44	1,91	60,83	38,97	34,18	
Banten	55,59	0,35	1,45	0,96	23,36	53,60	24,13	
B a l i	73,15	0,98	1,57	3,20	3,71	55,09	46,97	
Nusa Tenggara Barat	60,51		0,61	1,08	3,66	76,54	34,05	
Nusa Tenggara Timur	64,68	1,07	0,38	1,43	12,90	67,67	36,68	
Kalimantan Barat	58,64	0,14			9,02	56,50	32,90	
Kalimantan Tengah	71,06		0,21	0,32	9,53	59,68	35,73	
Kalimantan Selatan	70,13		0,58		29,55	66,32	30,16	
Kalimantan Timur	68,60	0,91	0,10	2,78	13,41	54,13	34,95	
Sulawesi Utara	84,56	0,92	1,21	1,86	26,37	74,94	39,39	
Sulawesi Tengah	50,41	0,41	1,03		6,26	66,84	19,64	
Sulawesi Selatan	60,20	0,28	1,20	0,21	4,93	65,92	29,84	
Sulawesi Tenggara	43,84	0,28	0,60	0,23	4,12	58,69	23,53	
Gorontalo	51,99	1,03	0,31	1,00	4,62	60,26	23,72	
Sulawesi Barat	37,82		1,04	0,21	7,12	58,23	29,44	
Maluku	77,43	0,45	1,90	2,43	1,89	63,91	24,89	
Maluku Utara	60,85	0,50	1,84	1,71	1,63	59,11	26,19	
Papua	70,16			0,21	5,04	46,86	32,78	
Papua Barat	71,92	1,01	4,22		5,37	46,30	30,66	
INDONESIA	63,26	0,36	0,99	0,96	17,58	60,61	32,62	

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.4.3
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat
Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jenis Kegiatan, 2012

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Kegiatan Sosial						
	Keagamaan	Keterampilan	Olahraga	Kesenian	Arisan	Kematian	Sosial Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	74,62	0,42	1,01	0,42	8,49	77,00	46,83
Sumatera Utara	74,68	0,23	1,26	0,61	16,36	66,33	26,59
Sumatera Barat	59,89	0,75	1,65	0,21	7,40	68,75	36,25
Riau	78,58		2,33	0,81	19,28	72,85	41,37
Jambi	70,25	0,63	14,03	0,22	15,28	67,24	40,38
Sumatera Selatan	76,30	0,30	2,20	1,70	19,56	69,24	35,57
Bengkulu	57,38	0,18	0,81	0,93	11,23	70,52	21,25
Lampung	55,40		1,48		3,98	48,59	15,18
Bangka Belitung	67,18	0,26	3,22	3,22	14,19	68,01	45,64
Kepulauan Riau	67,52	0,25	1,01	0,50	13,11	56,78	27,29
DKI Jakarta	74,80	3,22	12,66	2,93	31,86	55,89	30,09
Jawa Barat	69,07	0,23	3,52	0,64	8,95	51,15	30,32
Jawa Tengah	84,78	0,36	3,47	0,61	7,90	49,28	27,49
DI Yogyakarta	63,55	0,30	2,91	1,31	34,60	62,49	40,64
Jawa Timur	66,33	0,11	7,88	1,68	54,06	56,70	41,56
Banten	60,14	0,53	3,11	1,01	26,35	55,17	26,93
Bali	74,49	0,52	3,41	2,80	5,27	55,46	42,23
Nusa Tenggara Barat	65,86		0,93	1,07	5,24	78,51	34,16
Nusa Tenggara Timur	65,15	1,08	1,43	1,75	16,05	65,46	32,48
Kalimantan Barat	52,83	0,10	0,41	0,62	8,37	54,36	27,67
Kalimantan Tengah	69,18		1,55	0,21	16,99	53,61	27,59
Kalimantan Selatan	66,33	0,25	1,36	0,25	29,00	61,54	26,59
Kalimantan Timur	59,34	0,35	1,61	1,67	16,27	53,95	30,86
Sulawesi Utara	85,86	1,03	2,24	1,68	30,77	76,26	39,22
Sulawesi Tengah	55,10	0,27	1,20	0,52	8,22	61,58	16,12
Sulawesi Selatan	60,48	0,22	2,50	0,16	8,95	64,28	27,20
Sulawesi Tenggara	42,56	0,22	2,11	0,30	7,69	55,67	23,08
Gorontalo	45,05	0,79	0,24	0,77	3,58	56,70	19,27
Sulawesi Barat	40,45		0,86	0,15	7,30	58,74	29,78
Maluku	73,02	0,61	1,87	1,97	1,78	60,06	25,19
Maluku Utara	60,32	0,37	1,65	1,25	2,15	58,50	27,24
Papua	72,20	0,32	1,02	0,48	9,23	47,07	30,71
Papua Barat	73,60	1,49	4,05	0,80	12,64	55,28	33,84
INDONESIA	65,03	0,43	3,04	1,02	20,19	58,75	31,75

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.5.1
Proporsi Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama
Seminggu Terakhir menurut Provinsi, dan Frekuensi Olahraga dalam Seminggu,
2012

Provinsi	Frekuensi Olahraga dalam Seminggu			
	1 hari	2 hari	3 hari	> 3 hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	23,64	22,58	13,93	39,84
Sumatera Utara	16,13	14,98	14,24	54,65
Sumatera Barat	22,97	7,48	18,55	51,00
R i a u	31,50		15,06	53,43
Kepulauan Riau	48,79	25,99	16,36	8,86
J a m b i	25,37	27,31	15,69	31,63
Sumatera Selatan	38,11	9,98	2,51	49,41
Bangka Belitung	21,12	10,40	18,37	50,10
Bengkulu	51,88	44,04		4,09
Lampung	18,87	17,16	16,96	47,01
DKI Jakarta	35,13	8,90	13,46	42,51
Jawa Barat	45,23	15,62	8,70	30,45
Banten	21,44	22,08	18,01	38,47
Jawa Tengah	23,25	20,23	17,13	39,39
DI Yogyakarta	12,92	26,09	15,24	45,74
Jawa Timur	12,67	21,75	19,88	45,70
B a l i	13,44	10,34	13,18	63,04
Nusa Tenggara Barat	14,61			85,39
Nusa Tenggara Timur		16,13	30,44	53,43
Kalimantan Barat	15,44	8,26	27,78	48,52
Kalimantan Tengah	24,34	18,23	33,63	23,80
Kalimantan Selatan	34,71	14,60	6,13	44,56
Kalimantan Timur	15,49	14,81	24,42	45,27
Sulawesi Utara	21,55	24,91	28,43	25,11
Gorontalo	60,74			39,26
Sulawesi Tengah	33,75		50,48	15,77
Sulawesi Selatan	20,25	28,99	18,37	32,40
Sulawesi Barat				
Sulawesi Tenggara	4,73	12,37	32,10	50,81
Maluku		18,85	25,11	56,04
Maluku Utara		52,99	39,03	7,98
Papua	19,80	0,55	79,65	
Papua Barat				100,00
INDONESIA	25,50	17,91	15,72	40,88

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.5.2
Proporsi Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama
Seminggu Terakhir menurut Provinsi, dan Frekuensi Olahraga dalam Seminggu,
2012

Provinsi	Frekuensi Olahraga dalam Seminggu			
	1 hari	2 hari	3 hari	> 3 hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	44,07	10,73	11,68	33,52
Sumatera Utara	12,87	16,26	7,06	63,81
Sumatera Barat	19,09	24,59	4,71	51,61
R i a u	34,08		18,75	47,17
Kepulauan Riau			50,00	50,00
J a m b i	51,10			48,90
Sumatera Selatan	42,51	25,09	10,40	22,00
Bangka Belitung		27,80		72,20
Bengkulu		11,58	26,67	61,76
Lampung	26,16		6,74	67,10
DKI Jakarta				
Jawa Barat	4,43	12,64	35,38	47,56
Banten		24,14		75,86
Jawa Tengah	21,37	13,35	12,01	53,27
DI Yogyakarta	53,01			46,99
Jawa Timur	9,53	17,82	16,51	56,14
B a l i	61,96			38,04
Nusa Tenggara Barat			68,23	31,77
Nusa Tenggara Timur	33,54	23,69		42,77
Kalimantan Barat	100,00			
Kalimantan Tengah	33,04		41,05	25,91
Kalimantan Selatan	26,05	18,89	31,98	23,07
Kalimantan Timur	12,31	48,03		39,66
Sulawesi Utara	58,68	14,22	5,14	21,95
Gorontalo		57,64		42,36
Sulawesi Tengah	22,42	32,50	18,66	26,42
Sulawesi Selatan	12,21		13,96	73,83
Sulawesi Barat		100,00		
Sulawesi Tenggara	40,64	18,85	19,24	21,27
Maluku	15,02			84,98
Maluku Utara	34,93			65,07
Papua				100,00
Papua Barat		51,86		48,14
INDONESIA	17,76	15,18	13,91	53,15

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 7.5.3
Proporsi Penduduk Lansia yang Melakukan Kegiatan Olahraga Selama
Seminggu Terakhir menurut Provinsi, dan Frekuensi Olahraga dalam Seminggu,
2012

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan			
	Frekuensi Olahraga dalam Seminggu			
	1 hari	2 hari	3 hari	> 3 hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	33,03	17,13	12,90	36,94
Sumatera Utara	15,63	15,18	13,14	56,06
Sumatera Barat	21,02	16,09	11,58	51,31
R i a u	32,27		16,17	51,56
Kepulauan Riau	48,78	25,98	16,37	8,87
J a m b i	27,08	25,49	14,65	32,78
Sumatera Selatan	39,04	13,17	4,18	43,61
Bangka Belitung	17,44	13,44	15,17	53,96
Bengkulu	34,85	33,38	8,75	23,01
Lampung	20,56	13,18	14,59	51,67
DKI Jakarta	35,13	8,90	13,46	42,51
Jawa Barat	42,48	15,42	10,50	31,60
Banten	16,94	22,51	14,23	46,32
Jawa Tengah	22,72	18,29	15,68	43,31
DI Yogyakarta	17,05	23,41	13,67	45,87
Jawa Timur	11,96	20,86	19,12	48,06
B a l i	18,72	9,21	11,74	60,32
Nusa Tenggara Barat	11,99		12,22	75,79
Nusa Tenggara Timur	5,64	17,40	25,32	51,64
Kalimantan Barat	17,80	8,03	27,00	47,16
Kalimantan Tengah	25,31	16,19	34,46	24,04
Kalimantan Selatan	33,48	15,21	9,79	41,52
Kalimantan Timur	15,16	18,32	21,84	44,68
Sulawesi Utara	30,29	22,39	22,95	24,36
Gorontalo	48,09	12,00		39,91
Sulawesi Tengah	30,38	9,67	41,01	18,94
Sulawesi Selatan	19,40	25,91	17,90	36,79
Sulawesi Barat		100,00		
Sulawesi Tenggara	18,63	14,88	27,12	39,37
Maluku	5,63	11,78	15,70	66,88
Maluku Utara	9,40	38,73	28,53	23,34
Papua	17,75	0,50	71,41	10,34
Papua Barat		32,78		67,22
INDONESIA	24,11	17,42	15,40	43,08

Sumber: BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 8.1.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Ketelantaran, 2012

Provinsi	Telantar	Hampir Telantar	Tidak Telantar	Perkotaan
				Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10,43	17,96	71,60	100,00
Sumatera Utara	7,02	18,59	74,39	100,00
Sumatera Barat	8,51	18,22	73,27	100,00
R i a u	11,45	11,20	77,35	100,00
Kepulauan Riau	9,82	19,79	70,39	100,00
J a m b i	11,59	27,06	61,34	100,00
Sumatera Selatan	11,21	16,13	72,66	100,00
Bangka Belitung	3,05	20,27	76,68	100,00
Bengkulu	12,73	18,29	68,98	100,00
Lampung	10,82	23,37	65,81	100,00
DKI Jakarta	10,19	22,50	67,31	100,00
Jawa Barat	11,43	23,52	65,06	100,00
Banten	8,14	25,06	66,80	100,00
Jawa Tengah	7,07	21,61	71,31	100,00
DI Yogyakarta	9,65	20,85	69,50	100,00
Jawa Timur	7,20	24,99	67,81	100,00
B a l i	6,25	20,30	73,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	18,01	34,42	47,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	9,35	16,18	74,47	100,00
Kalimantan Barat	11,29	20,46	68,25	100,00
Kalimantan Tengah	14,12	13,00	72,88	100,00
Kalimantan Selatan	9,40	16,47	74,13	100,00
Kalimantan Timur	6,92	14,90	78,19	100,00
Sulawesi Utara	8,19	20,41	71,39	100,00
Gorontalo	7,75	15,49	76,77	100,00
Sulawesi Tengah	3,94	10,90	85,17	100,00
Sulawesi Selatan	10,21	19,73	70,06	100,00
Sulawesi Barat	10,53	40,78	48,69	100,00
Sulawesi Tenggara	12,26	19,74	67,99	100,00
Maluku	9,03	13,73	77,25	100,00
Maluku Utara	9,33	24,85	65,82	100,00
Papua	14,71	24,13	61,16	100,00
Papua Barat	17,74	18,90	63,36	100,00
INDONESIA	9,06	22,33	68,60	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 8.1.2
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Ketelantaran, 2012

Provinsi	Telantar	Hampir Telantar	Tidak Telantar	Perdesaan
				Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,24	24,72	55,04	100,00
Sumatera Utara	21,64	21,34	57,03	100,00
Sumatera Barat	12,91	29,02	58,07	100,00
R i a u	16,21	28,82	54,96	100,00
Kepulauan Riau	23,26	33,70	43,04	100,00
J a m b i	18,75	24,07	57,18	100,00
Sumatera Selatan	16,83	34,33	48,84	100,00
Bangka Belitung	13,10	31,61	55,29	100,00
Bengkulu	27,02	29,50	43,47	100,00
Lampung	15,20	28,88	55,92	100,00
DKI Jakarta				-
Jawa Barat	17,65	26,90	55,45	100,00
Banten	17,14	23,57	59,29	100,00
Jawa Tengah	11,67	28,85	59,48	100,00
DI Yogyakarta	12,24	24,55	63,21	100,00
Jawa Timur	16,06	31,95	51,99	100,00
B a l i	9,13	27,81	63,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,13	24,61	32,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,07	29,53	27,40	100,00
Kalimantan Barat	19,15	30,80	50,06	100,00
Kalimantan Tengah	17,20	32,20	50,60	100,00
Kalimantan Selatan	13,87	25,52	60,61	100,00
Kalimantan Timur	12,08	31,25	56,67	100,00
Sulawesi Utara	17,48	23,13	59,39	100,00
Gorontalo	22,49	22,98	54,53	100,00
Sulawesi Tengah	15,69	23,86	60,45	100,00
Sulawesi Selatan	12,61	27,82	59,57	100,00
Sulawesi Barat	29,60	31,87	38,52	100,00
Sulawesi Tenggara	15,64	35,49	48,87	100,00
Maluku	13,14	25,87	60,99	100,00
Maluku Utara	27,46	35,76	36,78	100,00
Papua	48,76	31,57	19,67	100,00
Papua Barat	26,27	40,95	32,78	100,00
INDONESIA	17,17	28,76	54,08	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 8.1.3
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Ketelantaran, 2012

Perkotaan+Perdesaan				
Provinsi	Telantar	Hampir Telantar	Tidak Telantar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	17,48	22,82	59,70	100,00
Sumatera Utara	14,45	19,99	65,57	100,00
Sumatera Barat	11,26	24,96	63,78	100,00
R i a u	14,35	21,93	63,73	100,00
Kepulauan Riau	12,57	22,63	64,80	100,00
J a m b i	16,55	24,99	58,46	100,00
Sumatera Selatan	14,82	27,81	57,37	100,00
Bangka Belitung	8,14	26,02	65,84	100,00
Bengkulu	22,59	26,03	51,37	100,00
Lampung	14,07	27,46	58,47	100,00
DKI Jakarta	10,19	22,50	67,31	100,00
Jawa Barat	13,56	24,68	61,76	100,00
Banten	11,18	24,56	64,26	100,00
Jawa Tengah	9,57	25,54	64,89	100,00
DI Yogyakarta	10,54	22,12	67,34	100,00
Jawa Timur	11,85	28,64	59,52	100,00
B a l i	7,40	23,30	69,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,65	28,70	38,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,55	26,95	36,50	100,00
Kalimantan Barat	16,78	27,69	55,53	100,00
Kalimantan Tengah	16,17	25,78	58,05	100,00
Kalimantan Selatan	11,99	21,72	66,30	100,00
Kalimantan Timur	8,89	21,14	69,97	100,00
Sulawesi Utara	13,28	21,90	64,82	100,00
Gorontalo	17,53	20,46	62,00	100,00
Sulawesi Tengah	12,83	20,70	66,47	100,00
Sulawesi Selatan	11,73	24,86	63,41	100,00
Sulawesi Barat	25,20	33,93	40,87	100,00
Sulawesi Tenggara	14,71	31,18	54,11	100,00
Maluku	11,61	21,37	67,02	100,00
Maluku Utara	22,53	32,80	44,67	100,00
Papua	39,85	29,62	30,52	100,00
Papua Barat	23,61	34,06	42,33	100,00
INDONESIA	13,17	25,59	61,24	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 8.2

Estimasi Jumlah dan Persentase Penyandang Disabilitas menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012

Provinsi	Penyandang Disabilitas						Jumlah Penduduk		
	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D		K	D	K + D
	N	%	N	%	N	%	N	N	N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	9.364	12,00	34.714	17,42	44.077	15,89	78.030	199.292	277.322
Sumatera Utara	36.392	9,47	63.914	16,10	100.305	12,84	384.290	397.005	781.295
Sumatera Barat	27.018	18,21	36.427	14,80	63.445	16,08	148.362	246.171	394.534
R i a u	16.617	17,44	21.522	14,52	38.139	15,66	95.306	148.179	243.485
Kepulauan Riau	6.400	11,78	4.685	33,52	11.085	16,22	54.348	13.978	68.326
Jambi	6.333	11,44	21.464	17,23	27.797	15,45	55.362	124.542	179.904
Sumatera Selatan	38.510	22,30	32.792	10,60	71.302	14,79	172.691	309.395	482.086
Kep Bangka Belitung	6.795	18,07	11.740	30,37	18.534	24,31	37.595	38.649	76.244
Bengkulu	7.467	23,20	19.047	26,56	26.515	25,52	32.191	71.722	103.913
Lampung	22.139	15,28	67.889	16,30	90.028	16,03	144.927	416.584	561.511
DKI Jakarta	52.067	10,11			52.067	10,11	514.843		514.843
Jawa Barat	298.585	14,43	172.812	15,97	471.397	14,96	2.069.912	1.082.138	3.152.050
Banten	46.056	13,26	35.755	20,17	81.810	15,59	347.400	177.261	524.661
Jawa Tengah	216.753	14,12	305.846	16,78	522.600	15,56	1.535.475	1.822.571	3.358.046
Dista Yogyakarta	51.676	17,04	32.297	20,38	83.973	18,19	303.258	158.434	461.692
Jawa Timur	251.622	13,41	267.193	12,92	518.815	13,15	1.875.872	2.068.190	3.944.062
B a l i	20.261	8,47	28.582	17,96	48.844	12,27	239.072	159.103	398.175
Nusa Tenggara Barat	18.993	13,69	50.359	26,00	69.352	20,86	138.726	193.705	332.431
Nusa Tenggara Timur	9.606	13,61	46.605	15,84	56.212	15,41	70.590	294.282	364.872
Kalimantan Barat	13.808	17,55	23.622	12,91	37.431	14,30	78.698	182.994	261.692
Kalimantan Tengah	7.955	22,03	13.651	19,02	21.605	20,03	36.102	71.773	107.875
Kalimantan Selatan	8.791	9,50	25.237	19,79	34.029	15,46	92.547	127.533	220.080
Kalimantan Timur	16.395	17,05	12.318	20,72	28.714	18,45	96.171	59.458	155.629
Sulawesi Utara	11.493	12,92	9.910	9,21	21.403	10,89	88.950	107.572	196.522
Gorontalo	4.145	19,10	12.908	30,09	17.053	26,40	21.703	42.896	64.599
Sulawesi Tengah	5.483	14,14	19.391	16,11	24.874	15,63	38.773	120.331	159.104
Sulawesi Selatan	30.739	12,26	67.604	15,58	98.343	14,37	250.733	433.859	684.592
Sulawesi Barat	1.317	7,31	9.958	16,61	11.275	14,46	18.016	59.955	77.971
Sulawesi Tenggara	11.524	30,97	22.907	23,21	34.431	25,33	37.212	98.709	135.921
Maluku	3.408	9,08	6.277	9,87	9.685	9,57	37.532	63.622	101.154
Maluku Utara	1.369	9,60	7.292	19,09	8.661	16,51	14.248	38.201	52.449
Papua	2.536	15,69	3.303	7,24	5.839	9,45	16.168	45.638	61.806
Papua Barat	755	9,24	3.104	17,24	3.860	14,74	8.176	18.004	26.180
Indonesia	1.262.372	13,82	1.491.126	15,88	2.753.498	14,86	9.133.281	9.391.748	18.525.028

Sumber : BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 8.3.1
Persentase Penyandang Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Disabilitas, 2012

Provinsi	Gangguan fungsi/keterbatasan/disabilitas					
	Melihat	Mendengar	Berkomuni- kasi	Mengingat atau Berkonsentrasi	Berjalan atau Naik Tangga	Mengurus Diri Sendiri
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,77	4,93	1,29	3,61	5,17	5,89
Sumatera Utara	7,59	4,12	2,53	2,88	6,60	3,43
Sumatera Barat	10,44	5,27	1,60	5,14	7,57	4,64
R i a u	16,91	5,10	0,69	0,67	2,41	
Kepulauan Riau	10,27	7,63	5,30	5,96	8,10	2,84
Jambi	5,76	5,43	2,93		4,42	2,28
Sumatera Selatan	17,39	5,74	1,23	1,91	4,42	2,65
Kep Bangka Belitung	11,75	6,83	2,07	4,80	8,64	4,57
Bengkulu	13,33	10,74		5,33	6,45	5,92
Lampung	12,38	5,52	0,86	0,27	3,03	2,03
DKI Jakarta	6,49	2,64	0,18	1,25	2,76	2,76
Jawa Barat	9,25	6,29	1,92	2,45	6,02	3,64
Banten	9,90	5,36	1,16	1,88	3,75	1,10
Jawa Tengah	6,92	6,85	2,99	2,03	7,17	4,33
Dista Yogyakarta	6,21	7,56	2,08	4,79	9,77	6,84
Jawa Timur	7,83	4,85	1,18	1,39	4,87	4,15
B a l i	3,69	3,16	0,80	1,30	3,44	1,74
Nusa Tenggara Barat	9,48	1,66	2,02	1,97	5,00	3,81
Nusa Tenggara Timur	11,56	6,46	1,64	2,49	6,13	5,83
Kalimantan Barat	11,04	6,42	2,16	4,03	5,15	3,14
Kalimantan Tengah	16,77	6,35	1,85	2,36	10,14	5,61
Kalimantan Selatan	7,19	2,33	0,81	1,92	5,09	2,14
Kalimantan Timur	14,73	5,79	2,57	2,78	4,43	5,00
Sulawesi Utara	8,22	5,90	2,88	3,60	8,51	2,85
Gorontalo	15,27	6,52	1,56	6,92	5,81	1,89
Sulawesi Tengah	11,41	3,93	1,88		7,56	6,68
Sulawesi Selatan	9,25	4,33	1,23	2,32	5,51	3,29
Sulawesi Barat	6,98	2,70	0,33		0,09	
Sulawesi Tenggara	23,38	12,86	5,17	5,03	3,70	1,53
Maluku	3,92	0,89		1,00	6,69	5,23
Maluku Utara	8,47	1,13			1,74	
Papua	12,57	8,20		7,39	5,09	3,17
Papua Barat	9,24					
Indonesia	8,57	5,48	1,77	2,17	5,66	3,71

Sumber : BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 8.3.2
Persentase Penyandang Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Disabilitas, 2012

Provinsi	Gangguan fungsi/keterbatasan/disabilitas					
	Melihat	Mendengar	Berkomuni- kasi	Mengingat atau Berkonsentrasi	Berjalan atau Naik Tangga	Mengurus Diri Sendiri
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perdesaan					
Aceh	10,26	6,50	2,62	3,52	9,23	4,75
Sumatera Utara	11,16	8,06	3,81	4,22	9,02	5,80
Sumatera Barat	8,47	5,46	2,06	1,41	5,65	2,93
R i a u	10,35	9,21	1,14	0,79	2,72	0,93
Kepulauan Riau	30,92	9,26	6,69	8,15	15,23	9,84
Jambi	11,19	5,03	3,44	2,87	6,87	4,01
Sumatera Selatan	6,82	5,10	1,47	0,97	4,09	2,96
Kep Bangka Belitung	19,91	19,52	1,02	1,32	12,72	2,68
Bengkulu	18,74	14,02	2,81	6,48	6,74	2,63
Lampung	11,08	10,50	3,70	4,60	6,58	5,70
DKI Jakarta						
Jawa Barat	11,85	6,74	2,68	2,01	7,61	3,51
Banten	12,06	7,89	2,47	1,52	11,86	4,40
Jawa Tengah	8,75	7,02	2,24	2,39	7,06	3,71
Dista Yogyakarta	11,80	7,14	1,86		8,01	5,90
Jawa Timur	7,59	4,27	1,68	1,40	5,26	3,20
B a l i	9,83	5,63	1,68	4,50	6,15	3,19
Nusa Tenggara Barat	21,74	11,40	3,84	4,81	11,73	6,54
Nusa Tenggara Timur	10,58	6,60	1,70	2,21	5,32	2,71
Kalimantan Barat	7,06	8,15	2,30	3,35	6,42	3,62
Kalimantan Tengah	14,66	7,62	3,56	2,25	5,74	4,85
Kalimantan Selatan	16,61	10,06	5,25	3,16	8,35	4,35
Kalimantan Timur	14,64	9,51	2,37	1,61	8,87	5,29
Sulawesi Utara	5,74	3,14	1,17	1,57	4,37	2,48
Gorontalo	21,13	9,82	2,15	2,78	7,55	2,11
Sulawesi Tengah	11,75	5,87	1,37	1,65	7,09	4,61
Sulawesi Selatan	11,49	5,64	2,59	2,75	5,90	3,25
Sulawesi Barat	11,95	11,55	4,71	0,36	4,19	4,86
Sulawesi Tenggara	17,44	9,94	1,19	1,74	9,24	4,30
Maluku	7,11	3,78	1,58	1,95	3,53	1,97
Maluku Utara	12,73	7,86	1,63	3,62	9,61	9,94
Papua	6,64	2,26	0,76	1,81	2,13	0,92
Papua Barat	11,13	8,33	1,47	4,02	6,23	5,31
Indonesia	10,14	6,65	2,32	2,30	6,69	3,76

Sumber : BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 8.3.3
Persentase Penyandang Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Disabilitas, 2012

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Gangguan fungsi/keterbatasan/disabilitas					
	Melihat	Mendengar	Berkomuni- kasi	Mengingat atau Berkonsentrasi	Berjalan atau Naik Tangga	Mengurus Diri Sendiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,56	6,06	2,25	3,55	8,08	5,07
Sumatera Utara	9,40	6,12	3,18	3,56	7,83	4,63
Sumatera Barat	9,21	5,39	1,89	2,81	6,37	3,57
R i a u	12,92	7,60	0,96	0,74	2,60	0,57
Kepulauan Riau	14,49	7,96	5,58	6,41	9,56	4,27
Jambi	9,52	5,15	3,28	1,99	6,12	3,48
Sumatera Selatan	10,61	5,33	1,38	1,31	4,21	2,85
Kep Bangka Belitung	15,89	13,26	1,54	3,03	10,71	3,61
Bengkulu	17,07	13,00	1,94	6,13	6,65	3,65
Lampung	11,41	9,22	2,96	3,48	5,67	4,76
DKI Jakarta	6,49	2,64	0,18	1,25	2,76	2,76
Jawa Barat	10,15	6,45	2,18	2,30	6,57	3,59
Banten	10,63	6,21	1,60	1,76	6,49	2,21
Jawa Tengah	7,92	6,94	2,58	2,22	7,11	4,00
Dista Yogyakarta	8,13	7,42	2,00	3,15	9,16	6,52
Jawa Timur	7,70	4,54	1,44	1,39	5,08	3,65
B a l i	6,15	4,15	1,15	2,58	4,52	2,32
Nusa Tenggara Barat	16,62	7,34	3,08	3,62	8,92	5,40
Nusa Tenggara Timur	10,77	6,57	1,69	2,27	5,47	3,32
Kalimantan Barat	8,25	7,63	2,26	3,56	6,04	3,47
Kalimantan Tengah	15,37	7,19	2,99	2,29	7,22	5,10
Kalimantan Selatan	12,65	6,81	3,38	2,64	6,98	3,42
Kalimantan Timur	14,70	7,21	2,49	2,33	6,12	5,11
Sulawesi Utara	6,86	4,39	1,94	2,49	6,24	2,65
Gorontalo	19,16	8,71	1,95	4,17	6,96	2,04
Sulawesi Tengah	11,67	5,39	1,49	1,25	7,20	5,11
Sulawesi Selatan	10,67	5,16	2,09	2,59	5,76	3,26
Sulawesi Barat	10,80	9,50	3,69	0,28	3,24	3,74
Sulawesi Tenggara	19,07	10,74	2,28	2,65	7,72	3,54
Maluku	5,93	2,71	1,00	1,60	4,71	3,18
Maluku Utara	11,57	6,03	1,19	2,64	7,48	7,24
Papua	8,19	3,81	0,56	3,27	2,90	1,51
Papua Barat	10,54	5,73	1,01	2,76	4,29	3,65
Indonesia	9,37	6,07	2,05	2,23	6,18	3,74

Sumber : BPS RI - Susenas Modul 2012

Tabel 8.4
Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun
Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,20	0,53	0,83	0,88	0,37	0,60	0,96	0,41	0,66
Sumatera Utara	1,62	0,67	1,09	1,07	0,46	0,72	1,34	0,56	0,90
Sumatera Barat	1,42	0,34	0,80	1,23	0,35	0,72	1,30	0,34	0,75
R i a u	0,47	1,17	0,82	1,09	1,53	1,31	0,83	1,38	1,10
Kepulauan Riau	0,09	0,31	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,22	0,14
J a m b i	0,58	0,00	0,29	1,46	0,25	0,85	1,17	0,17	0,67
Sumatera Selatan	1,47	0,76	1,08	1,61	0,35	0,95	1,56	0,50	1,00
Bangka Belitung	1,28	0,12	0,67	0,67	0,40	0,53	0,98	0,25	0,60
Bengkulu	3,28	0,42	1,85	3,03	0,77	1,88	3,10	0,68	1,87
Lampung	1,33	0,00	0,64	0,91	0,37	0,64	1,00	0,28	0,64
DKI Jakarta	1,49	1,24	1,36	0,00	0,00	0,00	1,49	1,24	1,36
Jawa Barat	2,14	1,35	1,72	2,57	1,23	1,86	2,31	1,30	1,78
Banten	3,00	1,70	2,32	2,77	1,20	1,94	2,91	1,51	2,17
Jawa Tengah	1,04	0,93	0,98	1,35	0,53	0,90	1,22	0,70	0,94
DI Yogyakarta	1,48	1,39	1,43	0,51	0,00	0,22	1,07	0,80	0,92
Jawa Timur	1,21	0,59	0,86	1,07	0,59	0,80	1,13	0,59	0,83
B a l i	0,75	1,13	0,95	0,81	0,83	0,82	0,78	0,98	0,89
Nusa Tenggara Barat	2,67	1,82	2,22	2,54	0,78	1,61	2,59	1,21	1,86
Nusa Tenggara Timur	4,77	0,82	2,71	3,77	1,76	2,72	3,93	1,61	2,72
Kalimantan Barat	1,22	2,82	2,03	0,73	0,75	0,74	0,88	1,41	1,15
Kalimantan Tengah	3,07	1,56	2,31	0,57	0,12	0,35	1,36	0,59	0,98
Kalimantan Selatan	1,88	1,22	1,52	0,85	0,40	0,59	1,26	0,72	0,96
Kalimantan Timur	0,15	0,49	0,32	0,00	0,00	0,00	0,09	0,29	0,19
Sulawesi Utara	2,20	1,57	1,86	0,70	0,14	0,40	1,32	0,75	1,01
Gorontalo	1,27	0,85	1,03	2,01	0,23	1,06	1,77	0,45	1,05
Sulawesi Tengah	1,61	1,82	1,72	3,67	0,52	2,11	3,24	0,81	2,02
Sulawesi Selatan	1,52	0,95	1,19	1,48	0,83	1,11	1,49	0,87	1,14
Sulawesi Barat	1,31	0,00	0,59	1,89	1,22	1,53	1,75	0,92	1,31
Sulawesi Tenggara	3,98	0,34	2,01	0,56	1,04	0,82	1,34	0,88	1,09
Maluku	3,61	0,89	2,17	2,57	0,00	1,27	2,94	0,33	1,59
Maluku Utara	0,00	4,46	2,33	0,57	0,24	0,41	0,43	1,39	0,90
Papua	1,50	2,40	1,89	0,79	0,00	0,47	1,05	0,95	1,01
Papua Barat	1,93	0,20	1,14	1,06	0,00	0,59	1,37	0,08	0,79
INDONESIA	1,58	1,00	1,27	1,52	0,67	1,06	1,55	0,83	1,16

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 8.5.1
Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir
Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2012

Provinsi	Laki-laki					
	Pencu-rian	Perampo-kan	Pembunu-han	Penipuan	Lainnya	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,55	5,33	0,00	21,96	14,15	100,00
Sumatera Utara	69,11	13,18	0,00	9,59	8,12	100,00
Sumatera Barat	73,33	12,87	0,00	13,80	0,00	100,00
Riau	67,46	8,07	0,00	24,48	0,00	100,00
Kep. Riau	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jambi	85,31	14,69	0,00	0,00	0,00	100,00
Sumatera Selatan	93,65	2,81	0,00	0,00	3,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bengkulu	73,27	11,32	0,00	0,00	15,41	100,00
Lampung	92,55	5,38	0,00	2,07	0,00	100,00
DKI Jakarta	38,30	19,80	0,00	41,90	0,00	100,00
Jawa Barat	67,22	12,36	0,00	15,34	5,07	100,00
Banten	93,98	6,02	0,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Tengah	68,41	3,06	0,00	18,52	10,02	100,00
DI Yogyakarta	61,27	0,00	0,00	29,81	8,92	100,00
Jawa Timur	63,53	12,25	0,49	15,18	8,55	100,00
Bali	73,90	0,00	0,00	26,10	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	77,83	4,88	2,23	13,20	1,86	100,00
Nusa Tenggara Timur	80,14	7,94	0,63	11,30	0,00	100,00
Kalimantan Barat	72,85	10,98	0,00	16,17	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	68,63	19,75	0,00	11,62	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	68,31	6,98	0,00	24,71	0,00	100,00
Kalimantan Timur	1,48	0,00	0,00	0,00	98,52	100,00
Sulawesi Utara	92,61	0,00	0,00	0,00	7,39	100,00
Gorontalo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	78,07	0,00	0,00	11,04	10,89	100,00
Sulawesi Selatan	90,91	4,43	0,00	2,55	2,12	100,00
Sulawesi Barat	41,93	33,20	0,00	0,00	24,87	100,00
Sulawesi Tenggara	89,89	10,11	0,00	0,00	0,00	100,00
Maluku	76,91	0,00	0,00	2,06	21,04	100,00
Maluku Utara	52,99	33,70	0,00	0,00	13,31	100,00
Papua	63,63	0,00	0,00	36,37	0,00	100,00
Papua Barat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Indonesia	71,66	8,82	0,17	13,68	5,66	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 8.5.2
Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir
Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2012

Provinsi	Pencu-rian	Perampo-kan	Pembunu-han	Penipuan	Lainnya	Perempuan
						Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	78,95	15,70	0,00	5,35	0,00	100,00
Sumatera Utara	70,06	13,38	0,00	7,69	8,87	100,00
Sumatera Barat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Riau	60,60	0,00	0,00	39,40	0,00	100,00
Kep. Riau	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jambi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sumatera Selatan	81,62	18,38	0,00	0,00	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bengkulu	84,58	15,42	0,00	0,00	0,00	100,00
Lampung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DKI Jakarta	22,05	27,73	0,00	42,95	7,27	100,00
Jawa Barat	56,91	18,71	0,00	11,19	13,19	100,00
Banten	92,36	7,64	0,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Tengah	61,42	21,38	1,95	8,07	7,18	100,00
DI Yogyakarta	46,81	0,00	0,00	43,67	9,52	100,00
Jawa Timur	39,42	32,48	0,00	20,34	7,76	100,00
Bali	62,64	20,55	0,00	16,81	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	54,16	9,36	0,00	36,48	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,95	2,57	0,00	0,00	4,48	100,00
Kalimantan Barat	61,65	19,82	0,00	18,54	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	86,06	13,94	0,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	51,76	48,24	0,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Timur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	41,04	19,22	0,00	29,12	10,62	100,00
Gorontalo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	66,57	24,87	0,00	4,12	4,44	100,00
Sulawesi Barat	44,40	55,60	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	83,62	16,38	0,00	0,00	0,00	100,00
Maluku	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Maluku Utara	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Papua	51,51	30,43	0,00	18,06	0,00	100,00
Papua Barat	28,04	71,96	0,00	0,00	0,00	100,00
Indonesia	59,69	19,43	0,31	13,56	7,01	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 8.5.3
Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan Dalam Setahun Terakhir
Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2012

Laki-laki+Perempuan						
Provinsi	Pencu-rian	Perampo-kan	Pembunu-han	Penipuan	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	65,67	8,95	0,00	16,16	9,21	100,00
Sumatera Utara	69,44	13,25	0,00	8,92	8,39	100,00
Sumatera Barat	80,40	9,46	0,00	10,14	0,00	100,00
Riau	63,19	3,05	0,00	33,76	0,00	100,00
Kep. Riau	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jambi	74,39	25,61	0,00	0,00	0,00	100,00
Sumatera Selatan	90,48	6,91	0,00	0,00	2,61	100,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bengkulu	75,36	12,08	0,00	0,00	12,56	100,00
Lampung	94,17	4,21	0,00	1,62	0,00	100,00
DKI Jakarta	30,62	23,55	0,00	42,40	3,44	100,00
Jawa Barat	63,26	14,80	0,00	13,75	8,19	100,00
Banten	93,38	6,62	0,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Tengah	65,54	10,58	0,80	14,23	8,85	100,00
DI Yogyakarta	54,27	0,00	0,00	36,52	9,21	100,00
Jawa Timur	53,89	20,35	0,29	17,24	8,23	100,00
Bali	67,25	12,13	0,00	20,62	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	69,72	6,42	1,47	21,18	1,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,09	6,28	0,43	7,82	1,38	100,00
Kalimantan Barat	65,93	16,44	0,00	17,63	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	73,81	18,02	0,00	8,16	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	61,36	24,31	0,00	14,33	0,00	100,00
Kalimantan Timur	74,99	0,00	0,00	0,00	25,01	100,00
Sulawesi Utara	71,83	7,74	0,00	11,73	8,69	100,00
Gorontalo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	82,48	0,00	0,00	8,82	8,70	100,00
Sulawesi Selatan	80,31	13,33	0,00	3,23	3,13	100,00
Sulawesi Barat	42,85	41,58	0,00	0,00	15,57	100,00
Sulawesi Tenggara	87,19	12,81	0,00	0,00	0,00	100,00
Maluku	79,40	0,00	0,00	1,84	18,77	100,00
Maluku Utara	88,69	8,11	0,00	0,00	3,20	100,00
Papua	58,86	11,99	0,00	29,16	0,00	100,00
Papua Barat	96,96	3,04	0,00	0,00	0,00	100,00
Indonesia	67,04	12,91	0,22	13,64	6,18	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 8.6.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan Rumah Tinggal, 2012

Provinsi	Perkotaan							
	Tidak Layak Huni		Hampir Tidak Layak Huni		Layak Huni		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1.505	2,11	5.053	7,09	64.743	90,80	71.300	100,00
Sumatera Utara	2.894	0,77	10.299	2,76	360.545	96,47	373.738	100,00
Sumatera Barat	1.249	0,88	5.630	3,97	134.909	95,15	141.788	100,00
Riau	138	0,13	1.325	1,21	107.679	98,66	109.142	100,00
Kep. Riau	463	1,00	710	1,54	45.061	97,46	46.234	100,00
Jambi	142	0,24	1.303	2,19	58.175	97,58	59.620	100,00
Sumatera Selatan	2.162	1,29	5.900	3,51	160.030	95,20	168.093	100,00
Kep. Bangka Belitung	44	0,11	1.013	2,61	37.748	97,28	38.804	100,00
Bengkulu	483	1,88	1.995	7,76	23.230	90,36	25.708	100,00
Lampung	2.146	1,61	4.929	3,70	126.070	94,69	133.146	100,00
DKI Jakarta	557	0,11	10.416	2,04	500.585	97,86	511.558	100,00
Jawa Barat	75.783	4,01	247.627	13,10	1.566.162	82,88	1.889.572	100,00
Banten	8.917	2,82	25.894	8,18	281.794	89,00	316.605	100,00
Jawa Tengah	62.316	4,26	141.559	9,69	1.257.351	86,05	1.461.226	100,00
DI Yogyakarta	5.622	2,13	19.408	7,35	239.056	90,52	264.086	100,00
Jawa Timur	50.864	2,95	131.546	7,63	1.541.045	89,42	1.723.455	100,00
Bali	1.410	0,68	5.989	2,88	200.692	96,44	208.090	100,00
Nusa Tenggara Barat	6.594	4,88	18.016	13,33	110.504	81,79	135.114	100,00
Nusa Tenggara Timur	4.134	6,78	5.835	9,56	51.047	83,66	61.017	100,00
Kalimantan Barat	689	0,83	1.841	2,21	80.847	96,97	83.376	100,00
Kalimantan Tengah	537	1,55	2.258	6,50	31.964	91,96	34.759	100,00
Kalimantan Selatan	289	0,33	2.905	3,33	84.119	96,34	87.312	100,00
Kalimantan Timur	25	0,03	1.737	1,90	89.679	98,07	91.440	100,00
Sulawesi Utara	272	0,33	4.085	4,91	78.892	94,77	83.249	100,00
Gorontalo	795	3,59	2.837	12,83	18.489	83,58	22.121	100,00
Sulawesi Tengah	639	1,87	2.087	6,10	31.490	92,03	34.216	100,00
Sulawesi Selatan	3.976	1,83	18.389	8,47	194.726	89,70	217.091	100,00
Sulawesi Barat	522	2,82	4.019	21,67	14.007	75,52	18.548	100,00
Sulawesi Tenggara	623	1,99	1.070	3,42	29.637	94,60	31.330	100,00
Maluku	1.320	3,58	2.017	5,48	33.483	90,94	36.819	100,00
Maluku Utara	598	4,38	651	4,76	12.407	90,85	13.656	100,00
Papua	31	0,13	1.275	5,47	21.995	94,39	23.302	100,00
Papua Barat	53	0,57	437	4,71	8.785	94,71	9.275	100,00
Indonesia	237.792	2,79	690.055	8,09	7.596.944	89,12	8.524.791	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 8.6.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan
Rumah Tinggal, 2012

Provinsi	Perdesaan							
	Tidak Layak Huni		Hampir Tidak Layak Huni		Layak Huni		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22.232	10,77	46.986	22,77	137.172	66,46	206.391	100,00
Sumatera Utara	32.307	7,88	58.482	14,26	319.429	77,87	410.218	100,00
Sumatera Barat	13.747	5,26	45.936	17,56	201.839	77,18	261.523	100,00
Riau	7.845	5,25	21.075	14,09	120.644	80,66	149.563	100,00
Kep. Riau	952	5,21	1.835	10,03	15.504	84,76	18.290	100,00
Jambi	7.717	6,26	16.212	13,16	99.299	80,58	123.228	100,00
Sumatera Selatan	20.885	6,65	55.638	17,71	237.589	75,64	314.112	100,00
Kep. Bangka Belitung	632	1,69	4.403	11,81	32.254	86,50	37.289	100,00
Bengkulu	5.522	7,25	15.324	20,12	55.299	72,62	76.146	100,00
Lampung	32.830	7,63	60.629	14,09	336.836	78,28	430.295	100,00
DKI Jakarta								-
Jawa Barat	176.679	14,01	335.249	26,58	749.331	59,41	1.261.258	100,00
Banten	44.550	22,11	41.532	20,61	115.452	57,29	201.534	100,00
Jawa Tengah	161.481	8,46	353.423	18,51	1.394.456	73,03	1.909.360	100,00
DI Yogyakarta	7.939	4,08	20.205	10,39	166.356	85,53	194.501	100,00
Jawa Timur	221.648	10,00	381.713	17,22	1.613.289	72,78	2.216.650	100,00
Bali	9.743	5,12	21.907	11,52	158.522	83,36	190.172	100,00
Nusa Tenggara Barat	46.117	23,34	49.496	25,05	101.961	51,61	197.574	100,00
Nusa Tenggara Timur	136.384	44,83	61.218	20,12	106.592	35,04	304.193	100,00
Kalimantan Barat	16.483	9,18	33.322	18,56	129.743	72,26	179.547	100,00
Kalimantan Tengah	6.081	8,24	17.402	23,58	50.310	68,18	73.793	100,00
Kalimantan Selatan	10.116	7,63	23.010	17,35	99.471	75,02	132.597	100,00
Kalimantan Timur	2.258	3,51	10.878	16,89	51.275	79,61	64.411	100,00
Sulawesi Utara	7.208	6,33	18.827	16,53	87.882	77,15	113.917	100,00
Gorontalo	9.974	23,30	9.819	22,94	23.013	53,76	42.806	100,00
Sulawesi Tengah	16.958	13,65	24.433	19,67	82.837	66,68	124.227	100,00
Sulawesi Selatan	36.214	7,73	93.670	19,99	338.639	72,28	468.524	100,00
Sulawesi Barat	10.945	18,53	13.619	23,06	34.492	58,41	59.056	100,00
Sulawesi Tenggara	14.240	13,53	21.149	20,10	69.850	66,37	105.239	100,00
Maluku	14.809	23,09	12.590	19,63	36.725	57,27	64.124	100,00
Maluku Utara	7.815	19,85	7.317	18,58	24.242	61,57	39.374	100,00
Papua	15.566	40,72	7.059	18,46	15.603	40,82	38.228	100,00
Papua Barat	2.106	12,97	3.165	19,48	10.971	67,55	16.242	100,00
Indonesia	1.119.984	11,17	1.887.521	18,83	7.016.879	70,00	10.024.383	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 8.6.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan Rumah Tinggal, 2012

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan							
	Tidak Layak Huni		Hampir Tidak Layak Huni		Layak Huni		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	23.737	8,55	52.039	18,74	201.915	72,71	277.691	100,00
Sumatera Utara	35.202	4,49	68.780	8,77	679.974	86,74	783.956	100,00
Sumatera Barat	14.996	3,72	51.566	12,79	336.749	83,50	403.311	100,00
Riau	7.983	3,09	22.399	8,66	228.322	88,26	258.705	100,00
Kep. Riau	1.416	2,19	2.545	3,94	60.564	93,86	64.524	100,00
Jambi	7.859	4,30	17.515	9,58	157.475	86,12	182.849	100,00
Sumatera Selatan	23.047	4,78	61.539	12,76	397.620	82,46	482.205	100,00
Kep. Bangka Belitung	676	0,89	5.415	7,12	70.002	92,00	76.093	100,00
Bengkulu	6.005	5,90	17.319	17,00	78.529	77,10	101.853	100,00
Lampung	34.977	6,21	65.558	11,64	462.907	82,16	563.441	100,00
DKI Jakarta	557	0,11	10.416	2,04	500.585	97,86	511.558	100,00
Jawa Barat	252.462	8,01	582.875	18,50	2.315.493	73,49	3.150.830	100,00
Banten	53.467	10,32	67.426	13,01	397.246	76,67	518.139	100,00
Jawa Tengah	223.797	6,64	494.983	14,69	2.651.807	78,67	3.370.586	100,00
DI Yogyakarta	13.561	2,96	39.613	8,64	405.413	88,40	458.586	100,00
Jawa Timur	272.512	6,92	513.259	13,03	3.154.334	80,06	3.940.105	100,00
Bali	11.153	2,80	27.896	7,00	359.213	90,20	398.262	100,00
Nusa Tenggara Barat	52.711	15,84	67.512	20,29	212.465	63,86	332.688	100,00
Nusa Tenggara Timur	140.518	38,48	67.053	18,36	157.639	43,16	365.210	100,00
Kalimantan Barat	17.171	6,53	35.163	13,37	210.589	80,10	262.924	100,00
Kalimantan Tengah	6.618	6,10	19.660	18,11	82.274	75,79	108.552	100,00
Kalimantan Selatan	10.404	4,73	25.915	11,78	183.589	83,48	219.909	100,00
Kalimantan Timur	2.283	1,46	12.614	8,09	140.954	90,44	155.851	100,00
Sulawesi Utara	7.480	3,79	22.912	11,62	166.774	84,59	197.166	100,00
Gorontalo	10.769	16,59	12.656	19,49	41.502	63,92	64.927	100,00
Sulawesi Tengah	17.596	11,11	26.520	16,74	114.327	72,16	158.443	100,00
Sulawesi Selatan	40.190	5,86	112.060	16,34	533.365	77,79	685.615	100,00
Sulawesi Barat	11.467	14,78	17.638	22,73	48.499	62,50	77.604	100,00
Sulawesi Tenggara	14.863	10,88	22.220	16,27	99.486	72,85	136.569	100,00
Maluku	16.129	15,98	14.607	14,47	70.207	69,55	100.943	100,00
Maluku Utara	8.414	15,87	7.967	15,02	36.649	69,11	53.030	100,00
Papua	15.598	25,35	8.333	13,54	37.598	61,11	61.529	100,00
Papua Barat	2.159	8,46	3.602	14,11	19.756	77,42	25.517	100,00
Indonesia	1.357.776	7,32	2.577.576	13,90	14.613.822	78,78	18.549.174	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 8.7.1
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan
Tempat Tinggal, 2012

Perkotaan					
Provinsi	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	88,84	2,23	2,07	6,86	100,00
Sumatera Utara	81,18	3,37	2,66	12,78	100,00
Sumatera Barat	85,11	3,88	1,08	9,93	100,00
Riau	87,72	2,53	6,43	3,32	100,00
Kep. Riau	86,08	0,42	6,54	6,96	100,00
Jambi	90,09	4,11	1,13	4,67	100,00
Sumatera Selatan	87,90	2,42	2,20	7,48	100,00
Kep. Bangka Belitung	91,66	0,82	0,25	7,27	100,00
Bengkulu	87,33	2,12	1,66	8,89	100,00
Lampung	89,36	2,70	1,08	6,85	100,00
DKI Jakarta	84,77	2,94	5,27	7,02	100,00
Jawa Barat	89,92	1,55	1,36	7,17	100,00
Banten	92,13	1,04	2,03	4,79	100,00
Jawa Tengah	92,66	1,09	0,36	5,88	100,00
DI Yogyakarta	95,35	0,60	0,30	3,75	100,00
Jawa Timur	93,47	1,58	0,65	4,29	100,00
Bali	92,99	0,99	1,53	4,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	92,28	0,07	0,48	7,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,33	1,08	1,27	5,32	100,00
Kalimantan Barat	88,95	3,11	1,09	6,85	100,00
Kalimantan Tengah	86,33	1,22	4,98	7,47	100,00
Kalimantan Selatan	85,33	1,18	4,35	9,14	100,00
Kalimantan Timur	88,92	1,38	5,97	3,72	100,00
Sulawesi Utara	82,37	1,52	0,96	15,15	100,00
Gorontalo	87,37			12,63	100,00
Sulawesi Tengah	89,50	0,97	0,99	8,54	100,00
Sulawesi Selatan	89,72	2,40	0,52	7,36	100,00
Sulawesi Barat	95,50	1,25		3,25	100,00
Sulawesi Tenggara	95,28	1,49	0,88	2,35	100,00
Maluku	90,86	0,97	2,23	5,94	100,00
Maluku Utara	89,08	0,33	0,58	10,00	100,00
Papua	85,00	0,44	5,02	9,55	100,00
Papua Barat	84,24	1,44	4,10	10,22	100,00
INDONESIA	90,45	1,67	1,49	6,38	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 8.7.2
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan
Tempat Tinggal, 2012

Perdesaan					
Provinsi	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	92,64	0,03	0,34	6,99	100,00
Sumatera Utara	88,13	0,84	0,39	10,64	100,00
Sumatera Barat	88,90	0,42	0,13	10,55	100,00
Riau	92,34	0,22	0,69	6,74	100,00
Kep. Riau	94,86		0,18	4,96	100,00
Jambi	91,32	0,65	0,04	7,99	100,00
Sumatera Selatan	92,17	0,35	0,05	7,43	100,00
Kep. Bangka Belitung	96,56	0,22		3,23	100,00
Bengkulu	92,68	0,35		6,97	100,00
Lampung	95,40	0,06	0,08	4,46	100,00
DKI Jakarta					100,00
Jawa Barat	94,63	0,12		5,26	100,00
Banten	93,72	0,41		5,87	100,00
Jawa Tengah	95,45	0,04	0,03	4,47	100,00
DI Yogyakarta	98,11			1,89	100,00
Jawa Timur	96,53	0,01		3,46	100,00
Bali	95,31	0,05		4,63	100,00
Nusa Tenggara Barat	94,14	0,03		5,83	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,08	0,03	0,03	4,86	100,00
Kalimantan Barat	94,70	0,53	0,16	4,61	100,00
Kalimantan Tengah	94,73	0,04	0,13	5,10	100,00
Kalimantan Selatan	92,33	0,09	0,25	7,34	100,00
Kalimantan Timur	92,81		1,75	5,45	100,00
Sulawesi Utara	91,41	0,12	0,15	8,32	100,00
Gorontalo	88,61	0,19		11,20	100,00
Sulawesi Tengah	94,97	0,24		4,78	100,00
Sulawesi Selatan	96,34	0,07		3,60	100,00
Sulawesi Barat	94,89			5,11	100,00
Sulawesi Tenggara	95,95		0,03	4,02	100,00
Maluku	95,20	0,20		4,60	100,00
Maluku Utara	95,12	0,08		4,80	100,00
Papua	97,30		0,13	2,57	100,00
Papua Barat	91,94		0,56	7,50	100,00
INDONESIA	94,70	0,13	0,07	5,10	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 8.7.3
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan
Tempat Tinggal, 2012

Perkotaan+Perdesaan					
Provinsi	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	91,66	0,60	0,78	6,96	100,00
Sumatera Utara	84,82	2,05	1,47	11,66	100,00
Sumatera Barat	87,57	1,64	0,47	10,33	100,00
Riau	90,39	1,20	3,11	5,30	100,00
Kep. Riau	88,57	0,30	4,74	6,39	100,00
Jambi	90,92	1,78	0,40	6,91	100,00
Sumatera Selatan	90,68	1,07	0,80	7,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	94,06	0,52	0,13	5,29	100,00
Bengkulu	91,33	0,80	0,42	7,45	100,00
Lampung	93,98	0,68	0,32	5,02	100,00
DKI Jakarta	84,77	2,94	5,27	7,02	100,00
Jawa Barat	91,80	0,98	0,81	6,41	100,00
Banten	92,75	0,80	1,24	5,21	100,00
Jawa Tengah	94,24	0,50	0,18	5,08	100,00
DI Yogyakarta	96,52	0,35	0,17	2,96	100,00
Jawa Timur	95,20	0,70	0,29	3,82	100,00
Bali	94,10	0,54	0,80	4,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	93,38	0,04	0,20	6,38	100,00
Nusa Tenggara Timur	94,62	0,21	0,24	4,93	100,00
Kalimantan Barat	92,88	1,34	0,46	5,32	100,00
Kalimantan Tengah	92,04	0,42	1,68	5,86	100,00
Kalimantan Selatan	89,55	0,52	1,88	8,05	100,00
Kalimantan Timur	90,53	0,81	4,23	4,44	100,00
Sulawesi Utara	87,60	0,71	0,49	11,20	100,00
Gorontalo	88,19	0,13		11,68	100,00
Sulawesi Tengah	93,79	0,40	0,21	5,59	100,00
Sulawesi Selatan	94,24	0,80	0,16	4,79	100,00
Sulawesi Barat	95,03	0,30		4,67	100,00
Sulawesi Tenggara	95,79	0,34	0,23	3,64	100,00
Maluku	93,61	0,49	0,81	5,09	100,00
Maluku Utara	93,56	0,15	0,15	6,14	100,00
Papua	92,64	0,17	1,98	5,21	100,00
Papua Barat	89,14	0,52	1,85	8,49	100,00
INDONESIA	92,75	0,84	0,72	5,69	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 9.1
Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis
Selama 6 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	50,39	55,03	53,87
Sumatera Utara	12,03	9,94	10,94
Sumatera Barat	22,66	23,83	23,42
R i a u	16,52	17,36	17,01
Kepulauan Riau	14,07	34,81	19,88
J a m b i	19,58	14,44	16,10
Sumatera Selatan	24,08	10,74	15,40
Bangka Belitung	28,55	29,92	29,22
Bengkulu	19,96	15,35	16,50
Lampung	24,40	11,12	14,28
DKI Jakarta	9,10	-	9,10
Jawa Barat	19,86	18,76	19,42
Banten	15,09	16,63	15,68
Jawa Tengah	25,53	19,87	22,33
DI Yogyakarta	19,58	25,98	22,28
Jawa Timur	18,89	14,90	16,64
B a l i	21,65	21,95	21,79
Nusa Tenggara Barat	31,18	25,91	28,03
Nusa Tenggara Timur	26,51	47,74	44,34
Kalimantan Barat	22,30	18,32	19,59
Kalimantan Tengah	15,52	26,85	23,27
Kalimantan Selatan	18,56	22,20	20,77
Kalimantan Timur	24,13	36,09	29,00
Sulawesi Utara	18,44	19,24	18,90
Gorontalo	29,41	29,66	29,58
Sulawesi Tengah	19,94	20,12	20,08
Sulawesi Selatan	29,02	35,16	33,19
Sulawesi Barat	35,59	38,30	37,64
Sulawesi Tenggara	28,81	33,24	32,24
Maluku	12,24	23,91	19,68
Maluku Utara	18,61	32,26	28,80
Papua	22,83	43,82	35,71
Papua Barat	23,17	43,15	35,43
INDONESIA	20,44	20,74	20,60

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 9.2.1
Persentase Rumah Tangga Lansia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis
Selama 6 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kartu/Surat yang Digunakan 2012

						Perkotaan
Provinsi	Jamkesmas	Kartu Sehat	Surat Miskin/SKTM	Lainnya	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	57,52	1,19	4,15	37,14	100,00	
Sumatera Utara	58,28	9,35	12,38	19,99	100,00	
Sumatera Barat	51,41	6,07	1,85	40,67	100,00	
Riau	47,89	6,19	9,33	36,58	100,00	
Kep. Riau	43,19		7,32	49,49	100,00	
Jambi	57,90	8,84	8,15	25,11	100,00	
Sumatera Selatan	68,72	5,82	5,34	20,12	100,00	
Kep. Bangka Belitung	25,19	1,19	4,95	68,66	100,00	
Bengkulu	57,67	15,96	5,56	20,82	100,00	
Lampung	39,06	10,09	3,61	47,24	100,00	
DKI Jakarta	8,36	8,83	38,60	44,21	100,00	
Jawa Barat	59,92	4,57	9,77	25,74	100,00	
Banten	65,12	5,51	4,20	25,16	100,00	
Jawa Tengah	57,27	2,13	3,31	37,29	100,00	
DI Yogyakarta	64,37	0,58	4,26	30,79	100,00	
Jawa Timur	60,07	4,82	5,44	29,67	100,00	
Bali	15,54	1,12	4,86	78,48	100,00	
Nusa Tenggara Barat	68,75	3,53	7,81	19,92	100,00	
Nusa Tenggara Timur	68,24	2,48	7,24	22,05	100,00	
Kalimantan Barat	67,76	2,00	3,05	27,19	100,00	
Kalimantan Tengah	36,98	5,98	7,34	49,71	100,00	
Kalimantan Selatan	41,41	9,24	4,26	45,09	100,00	
Kalimantan Timur	52,96	8,51	6,10	32,43	100,00	
Sulawesi Utara	53,33	2,95	1,97	41,75	100,00	
Gorontalo	57,11	4,35	4,05	34,49	100,00	
Sulawesi Tengah	54,63		1,88	43,49	100,00	
Sulawesi Selatan	47,35	5,52	3,84	43,29	100,00	
Sulawesi Barat	41,20	1,64	2,67	54,48	100,00	
Sulawesi Tenggara	69,49	1,09	3,03	26,39	100,00	
Maluku	54,76	6,39	14,28	24,56	100,00	
Maluku Utara	37,55	24,06	1,19	37,20	100,00	
Papua	41,00	8,60	6,75	43,65	100,00	
Papua Barat	67,60	1,90	6,39	24,11	100,00	
INDONESIA	55,71	4,35	6,81	33,13	100,00	

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 9.2.2
Persentase Rumah Tangga Lansia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis
Selama 6 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kartu/Surat yang Digunakan 2012

						Perdesaan
Provinsi	Jamkesmas	Kartu Sehat	Surat Miskin/SKTM	Lainnya	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	71,69	1,24	2,64	24,43	100,00	
Sumatera Utara	65,78	3,54	9,58	21,10	100,00	
Sumatera Barat	64,84	3,14	2,55	29,47	100,00	
Riau	57,82	2,05	6,74	33,39	100,00	
Kep. Riau	39,32	9,14	2,41	49,12	100,00	
Jambi	64,30	9,93	8,33	17,44	100,00	
Sumatera Selatan	50,87	0,76	18,01	30,37	100,00	
Kep. Bangka Belitung	10,46	0,80	1,17	87,57	100,00	
Bengkulu	80,79	4,41	5,71	9,09	100,00	
Lampung	64,83	4,39	3,66	27,12	100,00	
DKI Jakarta					100,00	
Jawa Barat	65,44	9,33	9,12	16,11	100,00	
Banten	82,06	3,21	2,20	12,53	100,00	
Jawa Tengah	70,47	3,09	3,01	23,43	100,00	
DI Yogyakarta	78,42	0,51	1,86	19,21	100,00	
Jawa Timur	68,26	3,33	8,13	20,28	100,00	
Bali	17,42	0,37	6,05	76,16	100,00	
Nusa Tenggara Barat	78,96	1,51	9,73	9,80	100,00	
Nusa Tenggara Timur	85,25	1,97	5,14	7,63	100,00	
Kalimantan Barat	76,91	2,25	8,24	12,60	100,00	
Kalimantan Tengah	49,78	2,28	20,97	26,96	100,00	
Kalimantan Selatan	39,41	5,98	4,13	50,48	100,00	
Kalimantan Timur	46,92	2,23	11,62	39,23	100,00	
Sulawesi Utara	68,47	2,65	8,56	20,32	100,00	
Gorontalo	82,09		2,52	15,39	100,00	
Sulawesi Tengah	62,65	6,28	6,59	24,47	100,00	
Sulawesi Selatan	40,96	2,30	5,39	51,36	100,00	
Sulawesi Barat	48,13	4,58	7,84	39,45	100,00	
Sulawesi Tenggara	80,92	0,56	3,30	15,21	100,00	
Maluku	69,55	5,78	5,78	18,89	100,00	
Maluku Utara	38,90	10,38	6,42	44,30	100,00	
Papua	61,35	14,92	11,52	12,22	100,00	
Papua Barat	64,60	5,94	4,64	24,82	100,00	
INDONESIA	65,41	3,68	6,13	24,78	100,00	

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 9.2.3
Persentase Rumah Tangga Lansia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis
Selama 6 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kartu/Surat yang Digunakan 2012

Perkotaan+Perdesaan					
Provinsi	Jamkesmas	Kartu Sehat	Surat Miskin/SKTM	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	68,37	1,23	3,00	27,41	100,00
Sumatera Utara	61,85	6,58	11,05	20,52	100,00
Sumatera Barat	60,29	4,13	2,32	33,26	100,00
Riau	53,83	3,71	7,78	34,68	100,00
Kep. Riau	41,29	4,49	4,91	49,31	100,00
Jambi	61,80	9,50	8,26	20,44	100,00
Sumatera Selatan	60,60	3,52	11,10	24,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	17,80	0,99	3,05	78,16	100,00
Bengkulu	73,78	7,91	5,66	12,64	100,00
Lampung	54,37	6,70	3,64	35,29	100,00
DKI Jakarta	8,36	8,83	38,60	44,21	100,00
Jawa Barat	62,03	6,40	9,52	22,05	100,00
Banten	72,04	4,57	3,38	20,00	100,00
Jawa Tengah	63,92	2,62	3,16	30,30	100,00
DI Yogyakarta	71,29	0,55	3,08	25,08	100,00
Jawa Timur	64,21	4,07	6,80	24,92	100,00
Bali	16,45	0,76	5,44	77,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	74,38	2,42	8,87	14,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,62	2,02	5,34	9,01	100,00
Kalimantan Barat	73,60	2,16	6,36	17,88	100,00
Kalimantan Tengah	47,08	3,06	18,09	31,77	100,00
Kalimantan Selatan	40,11	7,13	4,18	48,59	100,00
Kalimantan Timur	49,90	5,32	8,90	35,88	100,00
Sulawesi Utara	62,18	2,78	5,82	29,23	100,00
Gorontalo	73,56	1,48	3,04	21,91	100,00
Sulawesi Tengah	60,91	4,92	5,56	28,61	100,00
Sulawesi Selatan	42,75	3,20	4,96	49,09	100,00
Sulawesi Barat	46,55	3,91	6,66	42,89	100,00
Sulawesi Tenggara	78,62	0,67	3,25	17,47	100,00
Maluku	66,22	5,92	7,69	20,16	100,00
Maluku Utara	38,68	12,62	5,56	43,14	100,00
Papua	56,33	13,36	10,34	19,98	100,00
Papua Barat	65,36	4,92	5,08	24,64	100,00
INDONESIA	60,98	3,99	6,44	28,60	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2012

Tabel 9.3
Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Membeli/Mendapatkan Beras Miskin (Raskin)
Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	54,86	86,42	78,50
Sumatera Utara	30,63	56,50	44,18
Sumatera Barat	20,42	44,59	36,14
R i a u	26,04	53,84	42,33
Kepulauan Riau	26,52	65,08	37,33
J a m b i	38,83	45,63	43,44
Sumatera Selatan	44,46	48,12	46,84
Bangka Belitung	24,29	39,63	31,81
Bengkulu	29,39	49,32	44,33
Lampung	49,95	75,60	69,50
DKI Jakarta	14,19		14,19
Jawa Barat	61,20	78,81	68,18
Banten	48,38	81,36	61,08
Jawa Tengah	67,63	86,02	78,04
DI Yogyakarta	45,00	81,03	60,24
Jawa Timur	57,51	83,40	72,12
B a l i	22,83	46,52	34,19
Nusa Tenggara Barat	78,67	92,42	86,88
Nusa Tenggara Timur	27,40	65,71	59,58
Kalimantan Barat	26,42	57,43	47,59
Kalimantan Tengah	23,61	57,94	47,07
Kalimantan Selatan	19,89	39,62	31,86
Kalimantan Timur	20,76	36,67	27,25
Sulawesi Utara	23,46	54,67	41,37
Gorontalo	29,00	60,40	49,62
Sulawesi Tengah	28,45	63,68	55,96
Sulawesi Selatan	26,41	44,57	38,74
Sulawesi Barat	55,95	65,89	63,49
Sulawesi Tenggara	42,71	76,29	68,72
Maluku	31,97	56,55	47,66
Maluku Utara	20,85	44,66	38,62
Papua	23,65	57,04	44,14
Papua Barat	42,43	65,35	56,49
INDONESIA	49,98	72,70	62,24

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 9.4

**Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan
Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012**

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	81,64	78,45	79,25
Sumatera Utara	44,35	22,60	32,96
Sumatera Barat	52,06	32,93	39,62
R i a u	44,33	26,82	34,07
Kepulauan Riau	47,64	59,82	51,06
J a m b i	49,02	23,79	31,90
Sumatera Selatan	47,44	27,02	34,14
Bangka Belitung	61,55	59,29	60,44
Bengkulu	42,73	27,49	31,31
Lampung	46,53	28,67	32,91
DKI Jakarta	47,25		47,25
Jawa Barat	46,23	37,45	42,75
Banten	54,06	42,47	49,60
Jawa Tengah	48,92	44,28	46,29
DI Yogyakarta	54,30	65,18	58,90
Jawa Timur	39,58	31,75	35,16
B a l i	82,59	90,68	86,47
Nusa Tenggara Barat	57,27	53,36	54,94
Nusa Tenggara Timur	75,41	69,83	70,72
Kalimantan Barat	40,85	32,60	35,22
Kalimantan Tengah	47,16	38,81	41,46
Kalimantan Selatan	44,69	36,51	39,73
Kalimantan Timur	67,23	58,11	63,51
Sulawesi Utara	56,46	37,45	45,55
Gorontalo	67,41	57,52	60,92
Sulawesi Tengah	67,06	41,65	47,22
Sulawesi Selatan	66,48	56,67	59,82
Sulawesi Barat	56,62	48,64	50,57
Sulawesi Tenggara	59,31	56,81	57,38
Maluku	62,24	52,59	56,08
Maluku Utara	48,74	44,26	45,39
Papua	52,53	57,58	55,63
Papua Barat	64,66	48,84	54,96
INDONESIA	48,62	41,00	44,51

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

Tabel 9.5
Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Usaha Dalam Setahun Terakhir
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2012

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,57	3,30	3,12
Sumatera Utara	0,52	1,43	1,00
Sumatera Barat	2,67	4,73	4,01
R i a u	1,93	1,58	1,72
Kepulauan Riau	1,10	8,19	3,08
J a m b i	2,78	1,78	2,10
Sumatera Selatan	1,33	0,86	1,02
Bangka Belitung	0,23	0,17	0,20
Bengkulu	1,26	1,96	1,78
Lampung	1,67	1,06	1,21
DKI Jakarta	0,64		0,64
Jawa Barat	1,54	2,62	1,97
Banten	1,24	1,82	1,46
Jawa Tengah	2,51	2,54	2,52
DI Yogyakarta	1,00	3,56	2,09
Jawa Timur	1,77	2,57	2,22
B a l i	1,82	0,70	1,28
Nusa Tenggara Barat	1,41	2,70	2,18
Nusa Tenggara Timur	1,59	5,98	5,28
Kalimantan Barat	0,23	1,09	0,81
Kalimantan Tengah	1,37	0,75	0,94
Kalimantan Selatan	0,53	2,84	1,93
Kalimantan Timur	0,63	3,88	1,96
Sulawesi Utara	4,07	5,79	5,06
Gorontalo	3,80	9,08	7,27
Sulawesi Tengah	1,15	4,00	3,37
Sulawesi Selatan	1,97	2,39	2,25
Sulawesi Barat	4,07	3,32	3,50
Sulawesi Tenggara	3,15	4,90	4,50
Maluku	1,18	0,79	0,93
Maluku Utara	0,40	1,36	1,12
Papua	2,51	6,55	4,99
Papua Barat	1,75	2,14	1,98
INDONESIA	1,67	2,59	2,17

Sumber: BPS RI - Susenas 2012

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2007. *Laporan Survei Buta Aksara*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2008. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2009. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2010. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2011. *Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2012. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2011. *Pedoman Pencacahan Susenas Kor 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2012. *Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mariyati, Sukarni. 1994 . *Kesehatan Keluarga dan Lingkungan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang *Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- PKBI.2001. *Prosiding Seminar dan Loka Karya Pengembangan Pusat Pelayanan Lanjut Usia*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Rully R. 2003 . *Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Lansia di Rumah Sakit Umum dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Pusat Pengkajian Perlindungan

Kelompok Rentan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Siti Partini Suardiman. *DIY Provinsi Lansia*. Yogyakarta: Kepala Pusat Studi
Sumberdaya Lansia UNY.

TEMPO *Interaktif*. 2007 . *Pada 2025, Seperlima Penduduk Indonesia Lansia*.
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

